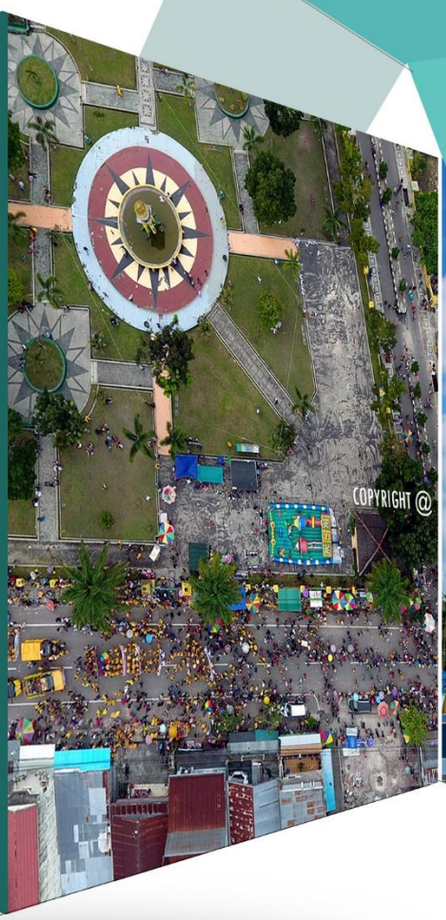
RPJMD

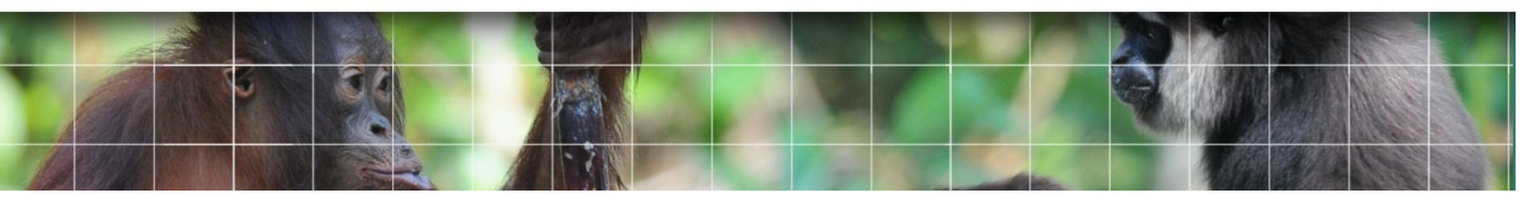




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2017-2022



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyesuaian Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
19. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran.

(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri atas:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. BAB IX : Penutup.

Pasal 5

(1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VI dan BAB VII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,08/2018.

Daftar Isi

Daftar Isi iii
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar xiii

BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen 8
1.4 Maksud dan Tujuan 9
1.4.1 Maksud 9
1.4.2 Tujuan 10
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 12
2.1 Aspek Geografi 12
2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis 12
2.1.2 Kondisi Topografi 13
2.1.3 Keadaan Geologi 14
2.1.4 Hidrologi 16
2.1.5. Klimatologi 17
2.1.6. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 19
2.2 Gambaran Umum Demografi 25
2.2.1 Kependudukan 25
2.2.2 Ketenagakerjaan 28
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 30
2.3.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 30
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 39
2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 44
2.4. Aspek Pelayanan Umum 44
2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 44
2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 61
2.4.3. Urusan Pemerintahan pilihan 75
2.5. Aspek Daya Saing 85
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 87
2.5.1.1 . Pertumbuhan Ekonomi 87
2.5.1.2. Pertanian, Perkebunan, Peternakan 88
2.5.1.3. Perikanan dan Kelautan 93

2.5.1.4. Kehutanan 95
2.5.1.5. Industri 96
2.5.1.6. Pariwisata 97
2.5.1.7. Nilai Tukar Petani 98
2.5.1.8. Angka Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat 98
2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 99
2.5.2.1. Perhubungan 99
2.5.2.2. Air Bersih Dan Listrik 101
2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi 104
2.5.3.1. Kriminalitas 104
2.5.3.2. Perkembangan Investasi 105
2.5.3.3. Desa Berstatus Swasembada 106
2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia 106
2.5.4.1. Ketenagakerjaan 106
2.5.4.2. Rasio Ketergantungan 108
2.5.4.3. Rasio Lulusan 108
2.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan 109

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 160
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 161
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 163
3.1.1.1. Pendapatan Daerah 163
3.1.1.2. Belanja Daerah 167
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah 169
3.1.2 Neraca Daerah 172
3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu 179
3.1.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 179
3.1.3.2. Analisis Pembiayaan 182
3.1.4 Proyeksi Kerangka Pendanaan 187
3.1.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan belanja 189
3.1.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan 198

BAB IV: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 200
4.1. Analisis Tahapan RPJP Berjalan 200
4.2. RPJMN Tahun 2015-2019 201
4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 202
4.3.1. Isu-isu strategis Provinsi 203
4.4. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya 206
4.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 209

4.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 212
4.6.1 Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis 212
4.6.2. Rekomendasi Perbaikan 214
4.7. Permasalahan Pembangunan 215
4.8. Isu Strategis 220

BAB V: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 227
5.1 VISI 227
5.2 MISI 229
Misi I "Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan" 231
Misi II "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Olahraga." 231
MISI III "Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup" 232
MISI IV "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat" 233
MISI V "Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis." 234
MISI VI "Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkat Kunjungan Wisata" 235
5.3 Platform Bupati Terpilih 236
5.4 Tujuan Dan Sasaran 255
5.4.1 Tujuan dan Sasaran Misi I 256
5.4.2 Tujuan dan Sasaran Misi II 256
5.4.3 Tujuan dan Sasaran Misi III 257
5.4.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV 258
5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi V 259
5.4.6 Tujuan dan Sasaran Misi VI 260
5.5 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran 261

BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 272
6.1 Strategi Pembangunan Daerah 272
6.2. Arah Kebijakan 287
6.3. Program Pembangunan Daerah 289

BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 385
7.1 Indikasi Program Prioritas disertai Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan. 385

BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 480
8.1 Indikator Kinerja Utama 480
8.2 Indikator Sasaran 482

BAB IX: PENUTUP 488
9.1. Pedoman Transisi 488
9.2. Kaidah Pelaksanaan 488
9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 490
9.4. Penutup 491

Daftar Tabel

Tabel 2. 1: Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 12
Tabel 2. 2: Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat 13
Tabel 2. 3: Kondisi Geologi 14
Tabel 2. 4: Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat 15
Tabel 2. 5: Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman 17
Tabel 2. 6: Suhu Udara Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016 17
Tabel 2. 7: Kecepatan Angin Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016 18
Tabel 2. 8: Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat 18
Tabel 2. 9: Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan, Tahun 2013 – 2016..... 25
Tabel 2. 10: Banyaknya Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 26
Tabel 2. 11: Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, ... 26
Tabel 2. 12: Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan 27
Tabel 2. 13: Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 28
Tabel 2. 14: Angkatan Kerja..... 29
Tabel 2. 15: Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015 29
Tabel 2. 16: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2012-2016 32
Tabel 2. 17: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2012-2016 33
Tabel 2. 18: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016..... 35
Tabel 2. 19: PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 38
Tabel 2. 20: Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Th. 2011-2016 . 39
Tabel 2. 21: Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 43
Tabel 2. 22: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 43

Tabel 2. 23: Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, ... 44
Tabel 2. 24: Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2016 44
Tabel 2. 25: Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016..... 48
Tabel 2. 26: Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2016 53
Tabel 2. 27: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya 54
Tabel 2. 28: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya 54
Tabel 2. 29: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya 55
Tabel 2. 30: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan 55
Tabel 2. 31: Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya 56
Tabel 2. 32: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang 56
Tabel 2. 33: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 – 2015 57
Tabel 2. 34: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 58
Tabel 2. 35: Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015 59
Tabel 2. 36: Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat 60
Tabel 2. 37: Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015 60
Tabel 2. 38: Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2012-2015 61
Tabel 2. 39: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 61
Tabel 2. 40: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 62
Tabel 2. 41: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras) 63
Tabel 2. 42: Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Th. 2012-2015 .. 63
Tabel 2. 43: Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016 64
Tabel 2. 44: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat 65
Tabel 2. 45: Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2015 ... 65
Tabel 2. 46: Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 66

Tabel 2. 47: Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 – 2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah 67
Tabel 2. 48: Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 67
Tabel 2. 49: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 – 2016 68
Tabel 2. 50: Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika..... 69
Tabel 2. 51: Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2016 70
Tabel 2. 52: Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2012-2016 71
Tabel 2. 53: Capaian Indikator Kepemudan dan Olahraga:..... 72
Tabel 2. 54: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012 – 2015... 72
Tabel 2. 55: Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012 – 2015..... 73
Tabel 2. 56: Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012 – 2015..... 74
Tabel 2. 57: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016..... 75
Tabel 2. 58: Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan 78
Tabel 2. 59: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2015 78
Tabel 2. 60: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012-2016..... 79
Tabel 2. 61: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015 80
Tabel 2. 62: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 81
Tabel 2. 63: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2012 – 2015..... 82
Tabel 2. 64: Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat..... 82
Tabel 2. 65: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat..... 83
Tabel 2. 66: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat..... 84
Tabel 2. 67: Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 – 2015 84
Tabel 2. 68: Kontibusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 88
Tabel 2. 69: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 88

Tabel 2. 70: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan RPJMD 2012-2016 90
Tabel 2. 71: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan RPJMD 2012-2016 91
Tabel 2. 72: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 93
Tabel 2. 73: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan di Kabupaten 95
Tabel 2. 74: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016 96
Tabel 2. 75: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015 97
Tabel 2. 76: Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012 - 2016 98
Tabel 2. 77: Angka Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2012-2016 98
Tabel 2. 78: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Statusnya Tahun 2012-2016 99
Tabel 2. 79: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012-2016 100
Tabel 2. 80: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012-2016 101
Tabel 2. 81: Rasio Ketersediaan Daya Listrik 103
Tabel 2. 82: Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 103
Tabel 2. 83: Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 104
Tabel 2. 84: Angka Kriminalitas Kabupaten Kotawaringin Barat 105
Tabel 2. 85: Jumlah dan Jenis Perda yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat 105
Tabel 2. 86: Perkembangan Investasi 2012-1016 Kabupaten Kotawaringin Barat 105
Tabel 2. 87: Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 106
Tabel 2. 88: Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2015 berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2016 106
Tabel 2. 89: Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat 108
Tabel 2. 90: Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 108
Tabel 2. 91: Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat 110

Tabel 3. 1: Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 162
Tabel 3. 2: Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 165
Tabel 3.3: Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 168
Tabel 3. 4: Rata-Rata perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016 170
Tabel 3.5: Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 173
Tabel 3. 6: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015 177
Tabel 3. 7: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 180
Tabel 3. 8: Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 181
Tabel 3. 9: Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 183
Tabel 3. 10: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat 185
Tabel 3. 11: Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 186
Tabel 3. 12: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Rupiah) 191
Tabel 3. 13: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (milyar rupiah) 194
Tabel 3. 14: Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2021 (milyar rupiah) 197
Tabel 3. 15: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 198
Tabel 3. 16: Anggaran berdasarkan prioritas pembangunan 199
Tabel 4. 1: Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya 207
Tabel 5. 1: Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah 268
Tabel 6. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi 282
Tabel 6. 2: Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD tahun 2017-2022 288
Tabel 6. 3: Pendefinisian agenda Politik kepala daerah 290
Tabel 6. 4: Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 306
Tabel 6. 5: Program Pembangunan Daerah dan kerangka Pendanaan tahun 2017 312
Tabel 6. 5: Justifikasi empat perspektif balanced Sore Card Strategi, terhadap program pembangunan daerah 346

Tabel 7. 1: Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 387
Tabel 7. 2: Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Tahun 2018-2022 388
Tabel 7. 3: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 389
Tabel 7. 4. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 391
Tabel 7. 5: Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 393
Tabel 7. 6. Capaian Kinerja Program Prioritas 2 dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 410
Tabel 7. 7: Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 453
Tabel 7. 8. Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022 464
Tabel 8. 1: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 481
Tabel 8. 2: Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 482

Daftar Gambar

Gambar 1. 1: Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 3
Gambar 1. 2: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 9
Gambar 2. 1: Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat 16
Gambar 2. 2: Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat 21
Gambar 2. 3: Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2017 27
Gambar 2. 4: IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016 30
Gambar 2. 5: PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Th. 2011-2015 ... 34
Gambar 2. 6: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016 36
Gambar 2. 7: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%) 37
Gambar 2. 8: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 37
Gambar 2. 9: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 39
Gambar 2. 10: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%) 40
Gambar 2. 11: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 41
Gambar 2. 12: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 41
Gambar 2. 13: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015 42
Gambar 2. 14: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015 42
Gambar 2. 15: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2012 – 2016 49
Gambar 2. 16: Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2012- 2016 49

Gambar 2. 17: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 – 2016 50
Gambar 2. 18: Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2012 – 2016 51

Gambar 2. 19: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 – 2016 51
Gambar 2. 20: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012-2016 52
Gambar 2. 21: Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2015 52
Gambar 2. 22: Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2016 53
Gambar 2. 23: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB (%) 77
Gambar 2. 24: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 81
Gambar 2. 25: Hasil Analisis Tipologi Klassen terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 86
Gambar 2. 26: Pertumbuhan Ekonomi 87
Gambar 2. 27: Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat 89
Gambar 2. 28: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 92
Gambar 2. 29: Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 94
Gambar 2. 30: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) 95
Gambar 2. 31: Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat 96
Gambar 2. 32: Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat 97
Gambar 2. 33: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kabupaten Kotawaringin Barat 97
Gambar 2. 34: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat 99
Gambar 2. 35: Persentase Penumpang Penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah 100
Gambar 2. 36: Persentase Penumpang Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah 101
Gambar 2. 37: Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat 102
Gambar 2. 38: Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat 102
Gambar 2. 39: Angkatan kerja dan Pengangguran 107
Gambar 2. 40: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat 107
Gambar 5. 1: Ilustrasi Misi Pembangunan Daerah 230

Gambar 5. 2: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 231
Gambar 5. 3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 232
Gambar 5. 4: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 233
Gambar 5. 5: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 234
Gambar 5. 6: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 235
Gambar 5. 7: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6 236
Gambar 5. 8: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1..... 256
Gambar 5. 9: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2..... 257
Gambar 5. 10: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3..... 258
Gambar 5. 11: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4..... 259
Gambar 5. 12: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5..... 260
Gambar 5. 13: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 6..... 261
Gambar 6. 1: Pemetaan Isu-Isu Sektoral Berdasarkan 4 Kuadran SWOT 274
Gambar 6. 2: Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022 275
Gambar 6. 3: Arah Kebijakan Pembangunan..... 287
Gambar 6. 4: Ilustrasi Transformasi agenda Politik kepala daerah 289

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

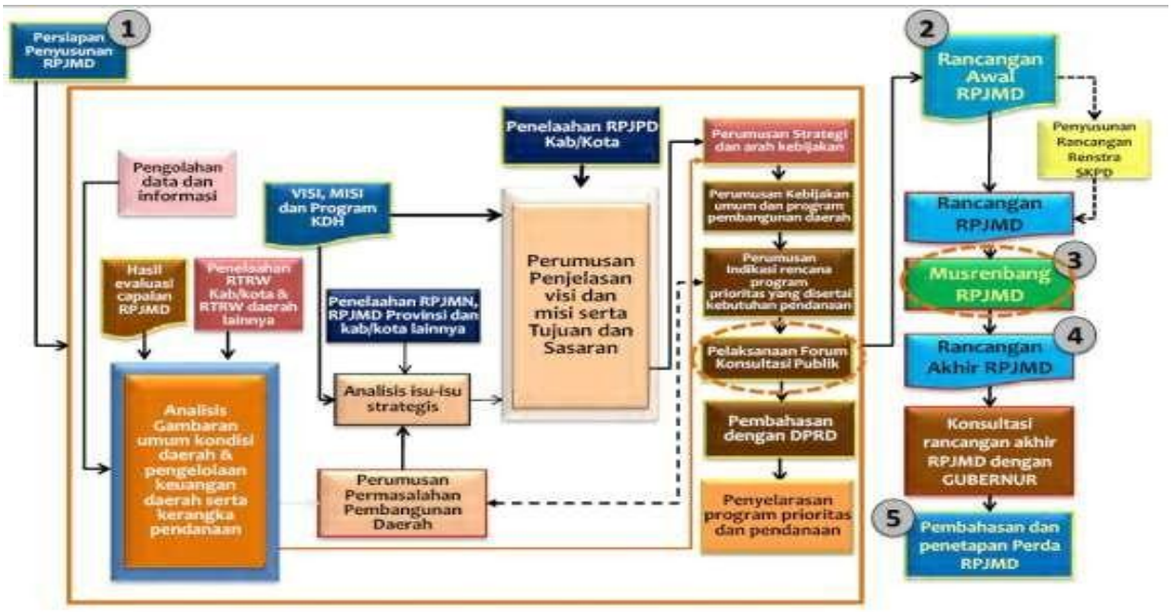
Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. **Kedua,** pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. **Ketiga,** pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. **Keempat,** pendekatan atas-bawah *(top-down*) dan bawah-atas *(bottom-up)*. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas PERANGKAT DAERAH, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunanya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar 1. 1: Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

a. Peraturan perundangan yang berlaku:
   1. Landasan Idiil Pancasila,
   2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

b. Landasan operasional sebagai berikut :
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
   5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
   6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
   7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
   8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanakan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyesuaian Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

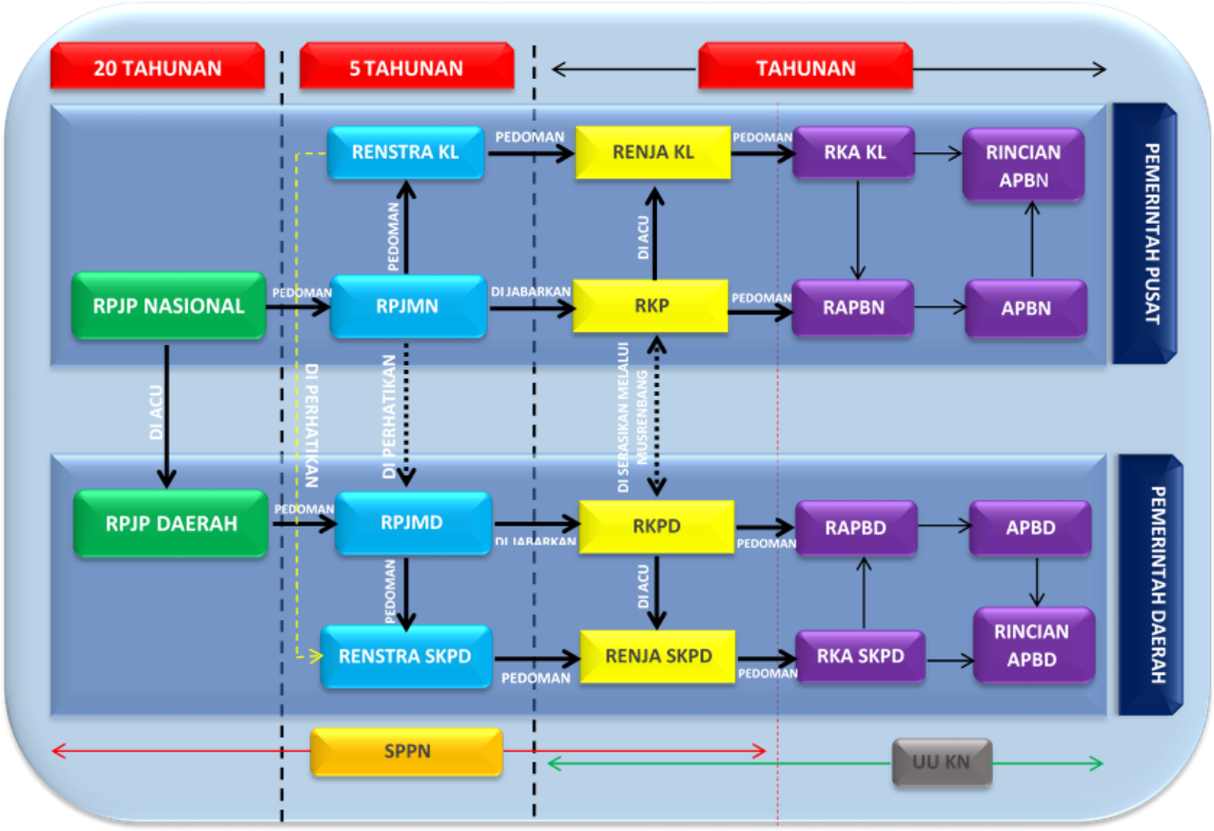
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 1312) ;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 1. 2: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 ditujukan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainibility development)* serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini juga meliputi rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode Tahun 2017-2022 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat harus mengacu pada RPJMD ini.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat ini antara lain:

a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Pembangunan Daerah tahun 2017-2022;
b. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis tahun 2017-2022, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD tahun 2017-2022;
d. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
e. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
f. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2 Neraca Daerah
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2 Analisis Pembiayaan
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Luas Wilayah dan Letak Geografis.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km^2 atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1: Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	**10.759**	**100,00**

Sumber:Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, dan 111˚20’-112˚6’ Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1˚26’ - 3˚33’ Lintang Selatan, 111˚13’-112˚6’ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan denganLaut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

2.1.2 Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
2. Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
3. Sebelah selatan adalah danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya petanian jika faktor lain mendukung.

Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan < 40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Tabel 2.2: Klasifikasi Lereng Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				
		0 – 2 %	2 – 15 %	15 – 40 %	> 40 %	Jumlah
1	Kotawaringin Lama	45.903,35	64.739,94	3.000,60	0	113.643,89
2	Arut Selatan	113.593,76	69.107,06	34.963,03	0	217.663,86
3	Kumai	278.812,90	22.572,55	0	0	301.385,44
4	Pangkalan Banteng	16.610,11	56.222,47	0	0	72.832,58
5	Pangkalan Lada	7.189,56	24.120,18	0	0	31.309,74
6	Arut Utara	0	292.410,98	121.342,23	72.460,00	249.450,98
Jumlah		462.109,98	292.410,98	159.305,86	72.460,00	986.286,49
%		46,85	29,65	16,15	7,35	100

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

2.1.3 Keadaan Geologi

Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3: Kondisi Geologi

No.	Jenis Tanah	Tersebar di Daerah
1	Podsolik Merah Kuning	Tengah sampai hulu sungai Kecamatan Arut Utara, sebagian kecil Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
2	Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)	Di tengah Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan dan sedikit Kecamatan Kotawaringin Lama
3	Kompleks Regosol (Podsol)	Bagian timur Kecamatan Kumai
4	Aluvial	Aliran sunga Lamandau, Arut dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah Kecamatan Kumai
5	Organosol	Kecamatan Kumai dan sedikit di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan
6	Okisol (Lateritik)	Bagian atas (hulu) Kecamatan Arut Utara

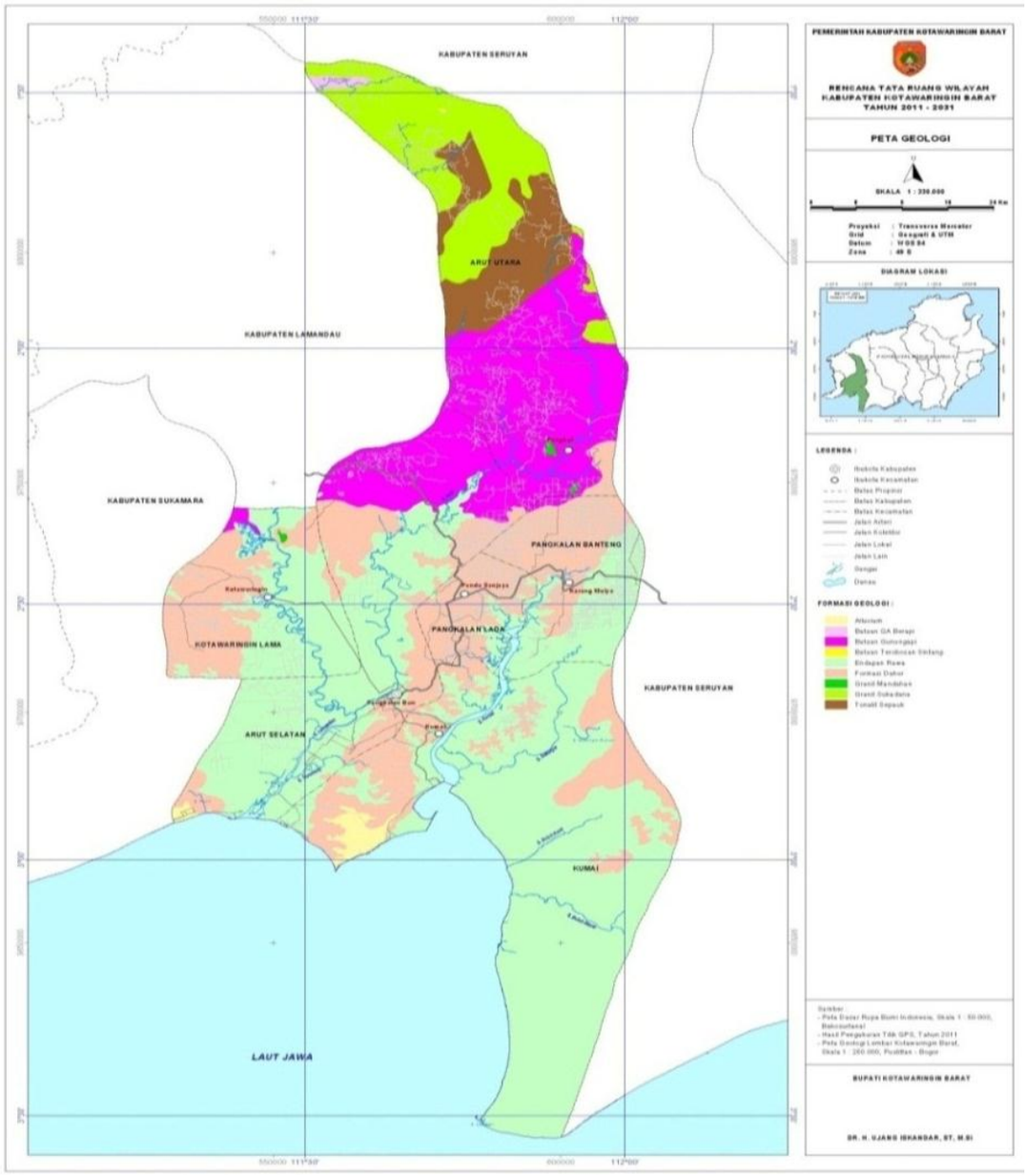
Rincian mengenaisusunan geologi Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4: Formasi Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Jenis Formasi	Kecamatan						Jumlah	%
		Ktw. Lama	Arut Selatan	Kumai*	Arut Utara	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada		
1.	Batuan Terobosan Sintang	0	0	0	89,22	0	0	89,22	0,01
2.	Granit Mandahan	265,77	0	0	1.159,50	0	0	1.425,27	0,16
3.	Granit Sukadana	0	0	0	84.598,66	0	0	84.598,66	9,71
4.	Batuan GA Berapi	10.173,09	0	0	2.115,31	0	0	12.288,40	1,41
5.	Tonalit Sepauk	0	0	0	47.049,37	0	0	47.049,37	5,40
6.	Formasi Dahor	50.565,04	50.084,89	57.449,03	5.959,05	34.956,68	24.208,56	223.223,25	25,61
7.	Endapan Rawa	52.640,00	118.916,03	120.353,27	0	37.083,02	7.101,18	336.093,50	38,56
8.	Batuan Gunung api	0	48.533,61	0	108.479,87	792,87	0	157.806,35	18,11
9.	Alluvium	0	129,33	6.912,01	0	0	0	7.041,34	0,81
10.	Formasi Laut	0	0	1.997,15	0	0	0	1.997,15	0,23
JUMLAH		113.643,89	217.663,86	186.711,46	249.450,98	72.832,57	31.309,74	871.612,50	100,00

Sumber: Diolah dari Peta Geologi Kalimantan Tengah, Tahun 2004

* Luas lebih kecil, karena sebagian data tidak ada di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.



Gambar 2. 1: Peta Geologi Wilayah Kab. Kotawaringin Barat

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, terlihat bahwa formasi geologi terbanyak adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha. Lebih lanjut mengenai persebaran susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.1.4 Hidrologi

Pada umumnya di Kalimantan sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, selain tempat mencari nafkah berperan sebagai sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya.

Tabel 2.5: Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

2.1.5. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Rincian kondisi klimatologi Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6: Suhu Udara Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016

Bulan		Suhu Udara (°C)					
		2014		2015		2016	
		Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.
01.	32,9	34,4	22,2	32,6	23,2	23,7	32,8
02.	33,5	36,4	22,0	32,5	22,2	23,9	32,5
03.	32,7	34,8	22,0	32,2	23,2	23,9	32,8
04.	32,7	34,4	22,4	32,1	23,4	24,1	32,7
05.	33,6	35,8	20,0	32,4	23,6	24,2	33,3
06.	32,6	35,4	18,8	33,6	21,6	23,7	32,9
07.	32,5	33,4	21,0	33,8	20,2	23,5	33,0
08.	32,6	33,8	21,3	34,8	19,8	23,1	33,1
09.	31,4	35,5	21,0	35,2	20,2	23,6	33,1
10.	33,3	36,2	20,8	34,8	20,5	23,5	32,8
11.	32,5	35,4	22,0	35,2	22,0	23,8	32,3
12.	32,6	35,0	22,2	35,9	22,0	23,5	32,1

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.7: Kecepatan Angin Rata-rata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2016

Bulan		Kecepatan Angin					
		2014		2015		2016	
		Maks.	Rata-rata	Maks.	Rata-rata	Maks	Rata-rata
01.	Januari	19	3,1	15	2,6	12	1,7
02.	Pebruari	11	2,5	15	2,8	13	1,7
03.	Maret	16	2,2	15	1,8	12	1,6
04.	April	12	1,6	12	1,6	12	1,6
05.	Mei	13	2,4	15	2,4	13	1,7
06.	Juni	18	2,4	13	2,8	16	1,9
07.	Juli	14	2,9	12	3,4	16	2,2
08.	Agustus	14	3,4	14	3,8	15	2,7
09.	September	22	3,6	14	4,0	18	2,4
10.	Oktober	16	3,3	14	2,7	15	2,1
11.	Nopember	12	2,4	20	1,7	12	1,6
12.	Desember	12	2,3	15	2,0	12	2,5

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.8: Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Barat

Bulan		Jumlah Hari Hujan			Curah Hujan (mm)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
01.	Januari	12	29	23	139,2	219,8	331,6
02.	Pebruari	16	15	25	208,4	325,8	306,4
03.	Maret	24	24	23	423,8	263,6	347,4
04.	April	27	18	22	193,6	353,3	226,0
05.	Mei	23	17	21	321,7	239,8	472,0
06.	Juni	19	17	15	229,1	97,5	169,6
07.	Juli	10	11	18	38,6	56,4	199,6
08.	Agustus	15	5	11	132,1	12,6	64,0
09.	September	8	2	20	48,9	19,5	154,4
10.	Oktober	10	4	23	62,7	66,7	414,1
11.	Nopember	21	19	20	308,4	131,0	251,1
12.	Desember	25	20	23	200,4	511,0	375,8
Jumlah		**200**	**181**	**244**	**2.066,8**	**2.297,0**	**3.312,0**

Sumber Data : Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

2.1.6. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya (hutan lindung) mempunyai skor lereng, jenis tanah, curah hujan > 175 ; kemiringan > 40 % dan ketinggian > 500 m dpl. Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, terdiri dari :

1) Hutan Lindung

   Hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas hutan lindung persebarannya terletak disebagian Kecamatan Arut Utara dengan luas kurang lebih 8.754 hektar dan Pulau Kelapa, Pulau Samudera Kecil, Pulau Batimbul, Pulau Bengaris, Pulau Seluluk, dan Pulau Terusan Pulau Samudera di Desa Tanjung Putri.

2) Kawasan Bergambut dan Resapan Air

   a) Kawasan Bergambut

      Kawasan bergambut berada diantara Sungai Arut dan Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas kurang lebih 132.927 hektar.

   b) Kawasan Resapan Air

      Kawasan resapan air di Kabupaten kotawaringin Barat seluas 28.991 hektar yang berada di Kecamatan Arut Selatan seluas 491 hektar, Kecamatan Kumai seluas 5.000 hektar, Kecamatan Pangkalan Lada seluas 6.000 hektar, Kecamatan Pangkalan Banteng seluas 4.500 hektar, Kecamatan Arut Utara seluas 8.000 hektar dan Kecamatan Kotawaringin Lama seluas 5.000 hektar.

b. Kawasan Perlindungan Setempat.

1) Kawasan Sempadan Pantai.

   Kawasan sempadan pantai ini membentang di bagian selatan wilayah pesisir Kabupaten Kotawaringin Barat, mulai dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Kumai sampai wilayah pesisir selatan Kecamatan Arut Selatan. Panjang pantai ini kurang lebih 156 Km, sehingga luas lahan perlindungan sempadan pantai adalah 1.560 hektar.

2) Kawasan Sempadan Sungai.

   Sungai-sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat yang perlu dilindungi adalah sungai-sungai besar seperti Sungai Kumai, Sungai Arut dan Sungai Lamandau. Perlindungannya sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan sungai dan 50 meter bagi anak sungai diluar permukiman serta apabila sungai dan anak

sungai tersebut melintasi lingkungan permukiman, maka areal perlindungannya adalah 10-50 meter di kiri-kanan sungai.

Sempadan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas kurang lebih 725 Km². Untuk DAS Arut luas sempadan sungai sekitar 250 Km², sedangkan DAS Lamandau yang mengalir dari Kabupaten Lamandau memiliki sempadan sungai yang harus dilindungi seluas 325 Km² dan DAS Kumai yang merupakan kumpulan anak - anak sungai memiliki luas 150 Km².

3) Kawasan Sempadan Danau/Rawa.

Danau-danau yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Danau Kenambui dan Sulung di Kecamatan Arut Selatan serta Danau Gatal dan Danau Masorayan di Kecamatan Kotawaringin Lama. Areal yang perlu dilindungi adalah selebar 50-100 meter dari bibir danau ke arah darat.

4) Kawasan air terjun.

Kawasan air terjun patih mambang di desa keraya Kecamatan Kumai.

5) Kawasan kearifan lokal lainnya.

Kawasan kearifan lokal lainnya meliputi Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan dan Desa Sekonyer Kecamatan Kumai.

c. Kawasan Rawan Bencana.

1) Kawasan Rawan Kebakaran.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 1.122 titik rawan atau seluas 205 km2 . Kawasan rawan kebakaran hutan berada di daerah pesisir dan muara sungai serta hutan disepanjang jalan yang menghubungkan Kota Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang.

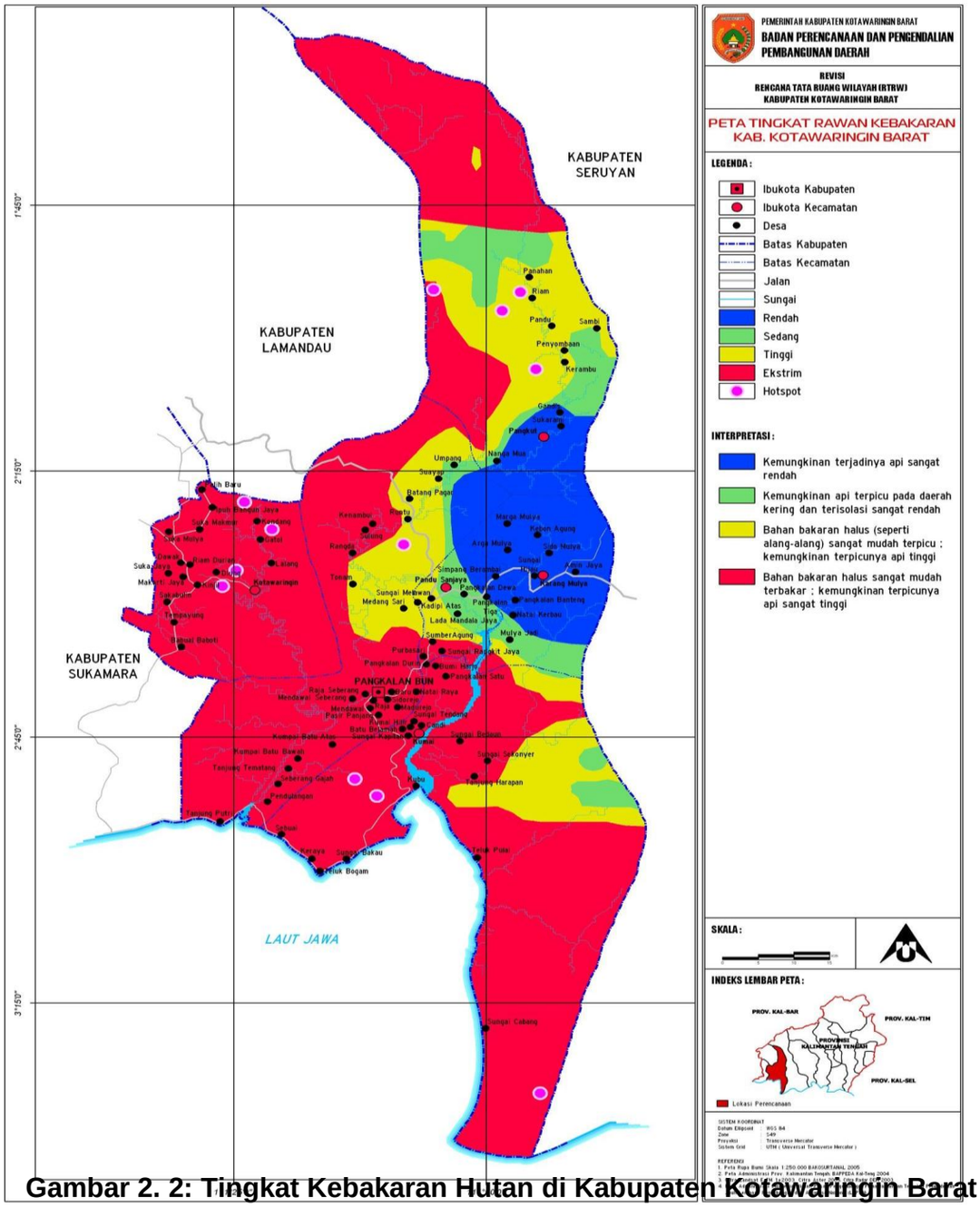
Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai terutama Tanjung Penghujan Sampai Tanjung Keluang, Teluk Pulai Sampai Teluk Ranggau, Keraya dan Sebuai Kecamatan Kumai.

3) Kawasan Rawan Banjir.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah di Kecamatan Arut Selatan yaitu Desa Kumpai Batu Bawah, Rangda, Sulung Kenambui, Umpang, Tanjung Trantang, di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu Desa Lalang, Rungun dan Kondang.

4) Jalur Evakuasi Bencana.

Jalur evakuasi bencana berada pda kawasan bandara baru di Kecamatan Kumai dan Desa Kumpai Batu Atas di Kecamatan Arut Selatan.



Gambar 2. 2: Tingkat Kebakaran Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.

1) Kawasan Suaka Alam.

   Kawasan yang merupakan kawasan suaka alam di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

   a) Taman Nasional Tanjung Puting secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Seruyan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 266.546 hektar.
   b) Taman Wisata Alam Tanjung Keluang berada di Kecamatan Kumai seluas kurang lebih 2.563 hektar.

2) Kawasan Pelestarian Alam.

   Kawasan pelestarian alam yaitu Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan suaka alam laut (kawasan padang lamun yang berada di sepanjang garis pantai Desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas kurang lebih 35.822 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan, berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang).

3) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

   Kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Istana Kuning/Keraton Lawang Agung Bukit Indera Kencana, Astana Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan, Astana Al-Nursari, Makam dan Masjid Kyai Gede dan Makam Raja Kuta Tanah di Kecamatan Kotawaringin Lama. Di Kecamatan Arut Utara yaitu Rumah Adat, Batu Patahan, Tiang Pantar, Balai Pinyang Laman, Batu Dahiang Burung, Sapundu, Rumah Betang Kuning, Batu Lancang, Tempayan Hermaung Yadana dan Monumen Iskandar Sambi.

e. Kawasan Lindung Geologi.

Sumber mata air terbesar berasal dari tiga sungai yang berada di Kabupaten kotawaringin barat yaitu, Sungai Kumai sepanjang 175 Km, Sungai Lamandau sepanjang 325 Km dan Sungai Arut sepanjang 250 Km. Untukkawasan mata air lainnya berada di kecamatan Arut Selatan meliputi tebing tinggi, Danau Sulung, Danau Seluluk, Danau Kenambui. Terdapat kawasan mata air yang berasal dari danau di Kecamatan Kotawaringin Lama (Danau Gatal, Masorayan, Terusan, Asam, Purun dan Batang Pagar) seluas 1,210 hektar.

f. Kawasan Lindung Lainnya.

1) Kawasan Perlindungan Plasma-Nutfah.

Kawasan lindung hutan plasma-nutfah merupakan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) seluas 266.546 hektar, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau seluas 35.822 hektar dan Tanjung Keluang seluas 2.563 hektar.

2) Kawasan Terumbu Karang dan Biota Laut yang di Lindungi.
   Kawasan yang merupakan daerah Konservasi Laut Daerah (KKLD) terutama terumbu karang, ikan dan padang lamun yang dilindungi berada di Gosong Senggora dan Sepagar dan daerah perlindungan laut terutama ikan berada di Gosong Sebogor dan Tanjung Keluang.

3) Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang di Lindungi.
   kawasan koridor bagi jenis satwa dan biota laut yang di lindungi yaitu ikan, terumbu karang dan padang lamun di Gosong Senggora, Sepagar, Gosong Sebogor, dan Tanjung Keluang di Kecamatan Kumai.

4) Kawasan Cagar Biosfer.
   Kawasan cagar biosfer yang terdiri dari zona inti/area inti, zona penyangga, dan zona transisi berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

5) Kawasan Pantai Berhutan Bakau.
   Kawasan pantai berhutan bakau yaitu di sungai mambang Desa Kubu hingga Desa Sungai Bakau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 6.973 hektar.

6) Kawasan Konservasi Perairan Sungai Atau Danau.
   Kawasan konservasi perairan sungai atau danau, meliputi:
   a) Kawasan konservasi perairan sungai Arut di sungai Desa Panahan seluas 1.500 hektar;
   b) Kawasan konservasi perairan Danau Seluluk seluas 200 hektar;
   c) Kawasan konservasi perairan Danau Gatal seluas 1.500 hektar;
   d) Kawasan konservasi perairan Danau Masorayan seluas 250 hektar;
   e) Kawasan konservasi Gosong Senggora dan perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat kurang lebih 13.032 hektar.

7) Kawasan Hutan Kota.
   Kawasan hutan kota yang telah ditetapkan dengan Perda seluas 785,75 hektar, meliputi:
   a) Kawasan Wisata Alam Kelurahan Sidorejo seluas 5 hektar;
   b) Kawasan Pangkalan TNI AU seluas 713 hektar;
   c) Hutan Kota Desa Purbasari seluas 55,75 hektar;
   d) Kawasan Klinik Rehabilitasi Orang Utan seluas 12 hektar;

e) Hutan lindung dalam arti khusus Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 411 hektar;

f) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai (penanaman turus jalan di Kecamatan Arut Selatan seluas 25 hektar); dan

g) Hutan Kota di Kecamatan Arut Selatan (penanaman turus jalan di Kota Pangkalan Bun seluas 10 hektar).

8) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya.

Kawasan Padang Lamun yang berada di sepanjang garis pantai desa Teluk Bogam, Desa Sungai Bakau, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 210 hektar. Kawasan sebaran terumbu karang berada di Sei Sungai Cabang Timur, Gosong Senggora dan Sepagar seluas 200 hektar. Daerah perlindungan laut khususnya ikan berada di Gosong Senggora dan Tanjung Keluang.

2.1.7. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.

a) Kriteria Kawasan Budidaya.

Terdapat banyak kriteria untuk penentuan kawasan budidaya khususnya untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Beberapa diantaranya adalah: Kepmentani No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/8/1981 dimana jumlah bobot nilai dari ketiga faktor fisik (lereng, jenis tanah dan curah hujan) haruslah berbobot < 124, dan juga kriteria *land system* yang berpedoman pada kesesuaian lahan dan berdasarkan kriteria fisik lahan.

b) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.

Kawasan hutan produksi diarahkan pemanfaatannya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan kayu serta keperluan industri, baik untuk tujuan lokal, nasional maupun ekspor. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari 3 kawasan, yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 286.485 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.582 hektar dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 160.185 hektar.

c) Kawasan Hutan Rakyat (HTR).

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas kurang lebih 668 hektar berada di Kecamatan Arut Utara yang meliputi Desa Nanga Mua, Desa Pangkut, Desa Sukarami, Desa Kerabu, dan Desa Gandis.

d) Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL).

Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain adalah kawasan dengan peruntukan kegiatan budidaya, kawasan pemukiman kota, desa, kawasan

industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hutan rakyat, serta penggunaan lain selain diatas.

2.2 Gambaran Umum Demografi.

2.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9: Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut KecamatanTahun 2013- 2016

No	Kecamatan	Tahun				Laju Pertumb. 2013-2016
		2013	2014	2015	2016	
1	Kotawaringin Lama	18.232	18.695	19.157	19.615	7,59
2	Arut Selatan	108.378	111.658	114.952	118.256	9,11
3	Kumai	51.056	52.534	54.015	55.495	8,69
4	Pangkalan Banteng	35.525	37.231	38.993	40.806	14,87
5	Pangkalan Lada	30.686	31.589	32.494	33.400	8,84
6	Arut Utara	17.323	17.922	18.530	19.142	10,50
Kotawaringin Barat		261.200	269.629	278.141	286.714	9,93

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Pada pertengahan tahun 2016 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 9,93 %, dari 278.141 jiwa pada tahun 2015 menjadi 286.714 jiwa pada pertengahan tahun 2016. Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10: Banyaknya Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kotawaringin Lama	5.110	10.394	9.221	19.615	113,00

2	Arut Selatan	29.642	61.651	56.605	118.256	109,00
3	Kumai	11.991	29.040	26.455	55.495	110,00
4	Pangkalan Banteng	10.506	22.018	18.788	40.806	117,00
5	Pangkalan Lada	8.662	17.785	15.615	33.400	114,00
6	Arut Utara	4.954	11.004	8.138	19.142	135,00
Jumlah 2016		**70.865**	**151.891**	**134.823**	**286.714**	**113,00**
2015		**68.600**	**147.292**	**130.849**	**278.141**	**113,00**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

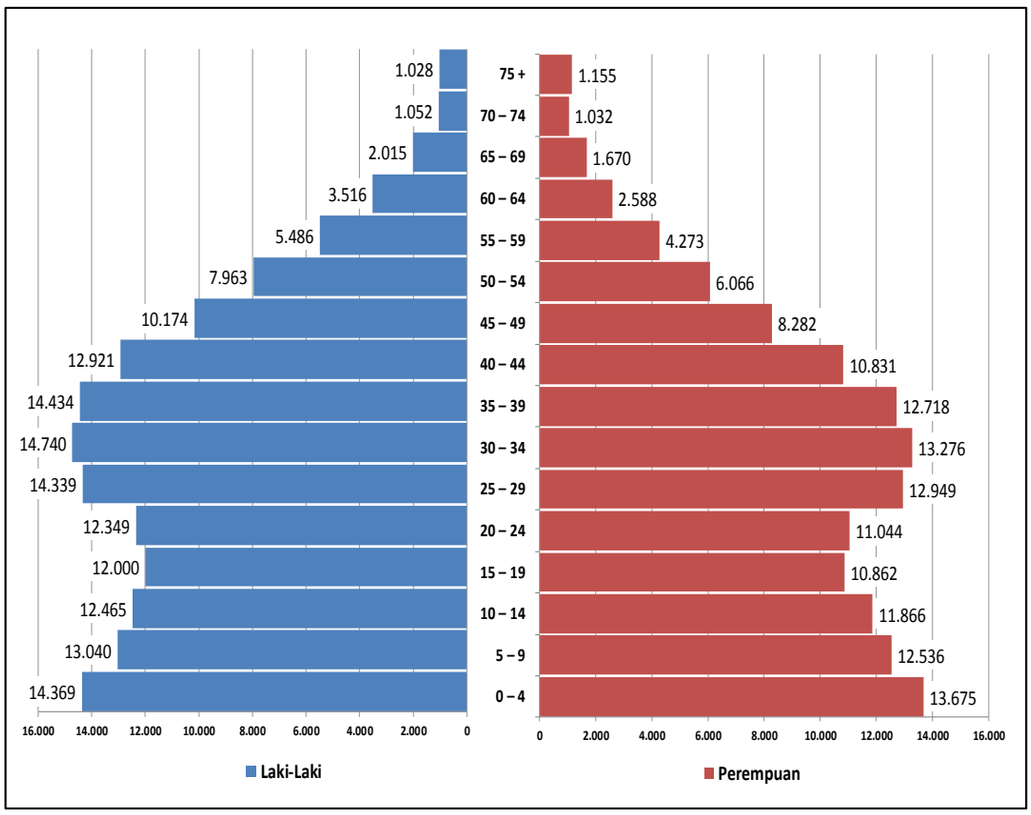
Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2016 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 113 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11: Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Seks Rasio	% terhadap Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
0 – 4	14.369	13.675	28.044	105,00	9,78
5 – 9	13.040	12.536	25.576	104,00	8,92
10 – 14	12.465	11.866	24.331	105,00	8,49
15 – 19	12.000	10.862	22.862	110,00	7,97
20 – 24	12.349	11.044	23.393	112,00	8,16
25 – 29	14.339	12.949	27.288	111,00	9,52
30 – 34	14.740	13.276	28.016	111,00	9,77
35 – 39	14.434	12.718	27.152	113,00	9,47
40 – 44	12.921	10.831	23.752	191,00	8,28
45 – 49	10.174	8.282	18.456	123,00	6,44
50 – 54	7.963	6.066	14.029	131,00	4,89
55 – 59	5.486	4.273	9.759	128,00	3,40
60 – 64	3.516	2.588	6.104	136,00	2,13
65 – 69	2.015	1.670	3.685	121,00	1,29
70 – 74	1.052	1.032	2.084	102,00	0,73
75 +	1.028	1.155	2.183	89,00	0,76
Jumlah	151.891	134.283	286.714	113,00	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2015.



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)

Gambar 2.3 : Piramida Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2016

Dari piramida penduduk tersebut terlihat komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk perempuan di usia yang sama.

Tabel 2.12: Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Rata-rata Penduduk	
			Per Desa	Per Rumah Tangga
1	Kotawaringin Lama	16,00	1.153,82	3,63
2	Arut Selatan	49,00	5.912,80	3,78
3	Kumai	19,00	3.083,06	4,33
4	Pangkalan Banteng	31,00	2.400,35	3,62
5	Pangkalan Lada	146,00	3.036,36	3,66
f6	Arut Utara	7,00	1.740,18	4,76
Rata-rata 2016		27,00	2.868,39	3,80
2015		26,00	2.778,72	3,81

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2016 sebesar 27,00 jiwa per km², Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 146,00 jiwa per km² dan disusul Kecamatan Arut Selatan 49,00 jiwa per km²,

Kecamatan Pangkalan Banteng 31,00 jiwa per km², Kecamatan Kumai 19,00 jiwa per km², Kecamatan Kotawaringin Lama 16,00 jiwa per km² dan terakhir Kecamatan Arut Utara 7,00 jiwa per km².

2.2.2 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2015 sebanyak 202.545 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13: Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2014 - 2016

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016**	
		Jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
I	***Angkatan Kerja***	**136.864 (70,05%)**		**145.749 (71,96%)**		**155.605 (74,20%)**	
1.	Bekerja	133.222	97,34	141.011	96,75	150.689	96,84
2.	Pengangguran	3.642	2,66	4.738	3,25	4.916	3,16
II	***Bukan Angkatan Kerja***	**58.509 (29,95%)**		**56.796 (28,04%)**		**54.112 (25,80%)**	
1.	Sekolah	17.465	29,85	14.855	26,15	18.981	35,08
2.	Mengurus Rumah Tangga	35.598	60,84	37.949	66,82	29.336	54,27
3.	Lainnya	5.446	9,31	3.992	7,03	5.765	10,65
Jumlah		**195.373**		**202.545**		**209.717**	

Sumber: BPS, Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Pada tahun 2016, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 209.717 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 74,20 % merupakan angkatan kerja, sedangkan 25,80 % bukan merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target RPJMD pada tahun 2016 yang mana mensyaratkan TPAK sebesar 80 %. Dari 155.605 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.916 orang atau 3,16 %. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut masih belum memenuhi target RPJMD 2016 yang sebesar 2 %.

Tabel 2.14: Angkatan Kerja

No.	Tahun	AK (Jiwa)	TPAK (%)	TKK (%)	TPT (%)
1.	2012	120.613	70,75	97,64	2,36
2.	2013	126.935	67,13	96,32	3,68
3.	2014	136.864	70,05	97,33	2,66
4.	2015	145.749	71,96	96,75	3,25
5.	2016*	155.605	74,20	96,84	3,16

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS)Tahun 2017

**LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 155.505 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,20 %, dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 96,84% serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,16 %. Progres Tingkat Pengangguran empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dari 2,36 % pada tahun 2012 menjadi 3,16 % pada tahun 2016.

Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2013 – 2015 berdasarkan perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15: Persentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2015

No.	Lapangan Pekerjaan	2013		2014		2015	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45.505	38,07	65.960	49,51	55.160	39,12
2	Pertambangan & Penggalian	13.662	11,43	3.724	2,80	2.595	1,84
3	Industri Pengolahan	9.848	8,24	6.049	4,54	8.891	6,31
4	Listrik, Gas & Air	513	0,43	240	0,18	0	0,00
5	Bangunan/ Konstruksi	8.628	7,22	8.801	6,61	9.824	6,97
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	21.040	17,60	25.925	19,46	34.228	24,27
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	6.469	5,41	6.983	5,24	8.225	5,83
8	Keuangan, Perbankan & Jasa Perusahaan	1.132	0,95	1.352	1,01	2.761	1,96
9	Jasa-jasa	12.736	10,65	14.188	10,65	19.327	13,71
Jumlah		119.533	100	133.222	100	141.011	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Sektor Pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2015 yaitu sebesar 39,12%, diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 24,27% dan sektor Jasa-jasa sebesar 13,71% yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia lapangan usaha sebesar 77,10%.

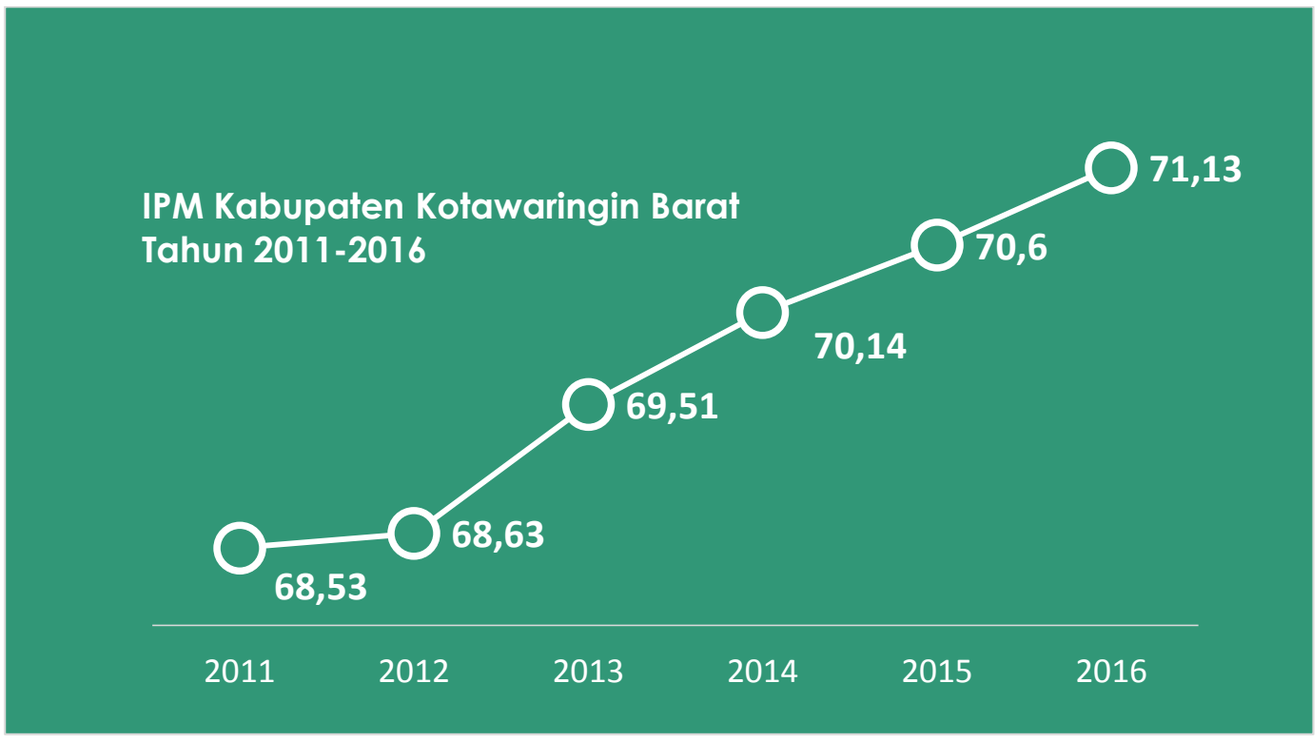
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut ini :



Gambar 2.4 : IPM Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara.

Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.16. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi leading setor dalam pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan kontribusi sekitar 26,06 %. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,36 %, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,67 %. Selanjutnya dalam Tabel 2.17. dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat.

Tabel 2.16: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2012-2016

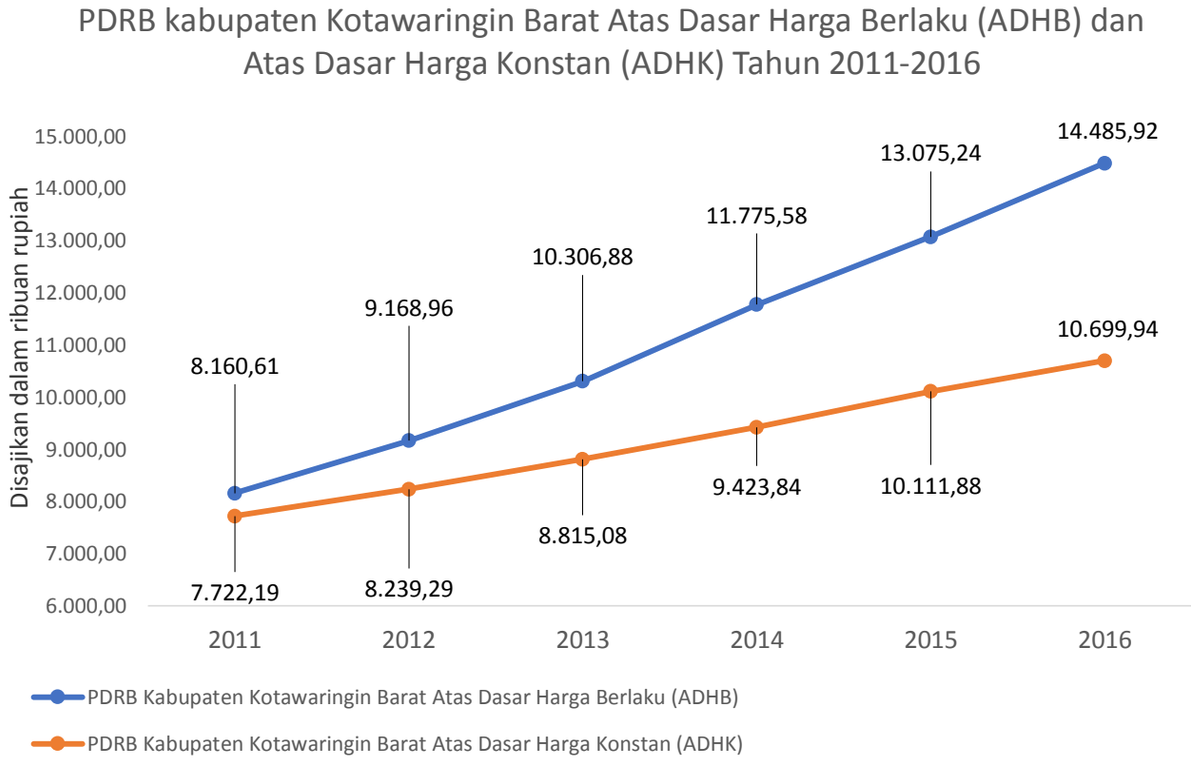
NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	(%)		(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.732.704,7	29,80	2.918.476,2	28,32	3.261.355,0	27,70	3.449.449,6	26,38	3.775.183,9	26,06
B	Pertambangan dan Penggalian	165.002,9	1,80	180.262,9	1,75	169.228,7	1,44	179.041,2	1,37	199.976,1	1,38
C	Indsutri Pengolahan	2.223.038,1	24,25	2.557.543,4	24,81	3.028.657,3	25,72	3.324.772,6	25,43	3.674.222,6	25,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.453,0	0,04	3.545,1	0,03	4.204,9	0,04	6.322,9	0,05	6.854,6	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.574,3	0,08	8.350,2	0,08	10.009,4	0,09	11.492,4	0,09	12.468,1	0,09
F	Konstruksi	748.255,7	8,16	853.762,5	8,28	971.321,7	8,25	1.103.333,4	8,44	1.228.807,5	8,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092.119,7	11,91	1.229.551,7	11,93	1.415.030,0	12,02	1.646.500,6	12,59	1.835.617,6	12,67
H	Transportasi dan Pergudangan	683.899,1	7,46	822.714,6	7,98	939.272,8	7,98	1.096.937,1	8,39	1.217.972,1	8,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115.987,7	1,27	132.236,8	1,28	145.588,9	1,24	171.901,2	1,31	200.246,8	1,38
J	Informasi dan Komunikasi	90.458,9	0,99	99.599,0	0,97	116.329,3	0,99	128.076,0	0,98	139.983,4	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	429.195,8	4,68	502.906,9	4,88	604.010,7	5,13	694.010,0	5,31	761.271,0	5,26
L	Real Estate	165.177,5	1,80	188.299,8	1,83	203.163,3	1,73	240.223,9	1,84	272.923,3	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	4.115,3	0,04	4.877,2	0,05	5.732,5	0,05	6.432,2	0,05	6.939,1	0,05
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.222,5	3,09	331.890,5	3,22	375.914,0	3,19	419.649,9	3,21	470.965,6	3,25
P	Jasa Pendidikan	237.629,6	2,59	265.091,5	2,57	288.035,6	2,45	326.455,8	2,50	375.290,8	2,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.504,0	1,12	111.058,5	1,08	130.909,9	1,11	148.270,3	1,13	166.715,1	1,15
RSTU	Jasa Lainnya	84.621,5	0,92	96.714,7	0,94	106.819,2	0,91	122.369,4	0,94	140.483,2	0,97
	JUMLAH	**9.168.960,2**		**10.306.881,5**		**11.775.583,2**	**100**	**13.075.238,5**	**100**	**14.485.921,0**	**100**

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tabel 2.17: PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2012-2016

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.355.547,2	28,59	2.430.133,1	27,57	2.593.036,2	27,52	2.745.466,5	27,15	2.907.562,40	27,17
B	Pertambangan dan Penggalian	140.985,4	1,71	151.113,2	1,71	131.436,5	1,39	133.371,6	1,32	143.353,10	1,34
C	Indsutri pengolahan	2.061.316,3	25,02	2.217.996,9	25,16	2.391.937,9	25,38	2.558.264,8	25,30	2.690.480,40	25,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.894,1	0,05	4.239,3	0,05	4.673,0	0,05	5.447,9	0,05	5.750,20	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.152,4	0,09	7.505,5	0,09	8.221,6	0,09	8.896,2	0,09	9.343,10	0,09
F	Konstruksi	697.800,0	8,47	763.670,2	8,66	815.094,6	8,65	885.898,2	8,76	934.460,20	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.007.960,6	12,23	1.080.903,7	12,26	1.132.837,9	12,02	1.232.135,6	12,19	1.319.377,50	12,33
H	Transportasi dan Pergudangan	646.977,0	7,85	737.655,2	8,37	775.545,3	8,23	829.053,3	8,20	884.708,50	8,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.906,5	1,21	107.934,4	1,22	118.108,0	1,25	128.555,8	1,27	139.756,10	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	88.771,0	1,08	94.447,0	1,07	102.192,5	1,08	110.037,5	1,09	118.590,00	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367.448,7	4,46	404.316,9	4,59	468.437,7	4,97	515.071,9	5,09	536.083,90	5,01
L	Real Estate	143.252,0	1,74	156.668,6	1,78	170.990,5	1,81	186.011,3	1,84	198.148,90	1,85
M,N	Jasa Perusahaan	3.672,6	0,04	4.036,3	0,05	4.357,3	0,05	4.666,2	0,05	4.859,70	0,05
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	242.866,1	2,95	259.908,4	2,95	287.129,9	3,05	315.723,4	3,12	331.239,20	3,1
P	Jasa Pendidikan	205.619,4	2,50	219.004,2	2,48	234.213,2	2,49	252.615,9	2,50	263.906,90	2,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.312,6	1,11	96.579,9	1,10	101.046,6	1,07	110.359,1	1,09	115.724,40	1,08
RSTU	Jasa Lainnya	74.812,1	0,91	78.971,2	0,90	84.579,1	0,90	90.308,9	0,89	96.593,30	0,9
	Jumlah	**8.239.294,0**		**8.815.084,0**		**9.423.837,8**		**10.111.884,1**		**10.699.937,90**	**100**

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017



Gambar 2.5 : PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011-2016

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori industri pengolahan serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan luasnya perkebunan kelapa sawit yang diusahakan baik masyarakat maupun perkebuanan swasta besar. Adanya perkebunan swasta besar diikuti dengan berdirinya industri pengolahan kelapa sawit meskipun belum optimal dengan hasil yang utama adalah minyak CPO dan minyak goreng, selain itu juga adanya industri pengolahan hasil hutan yang sudah lama eksis di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

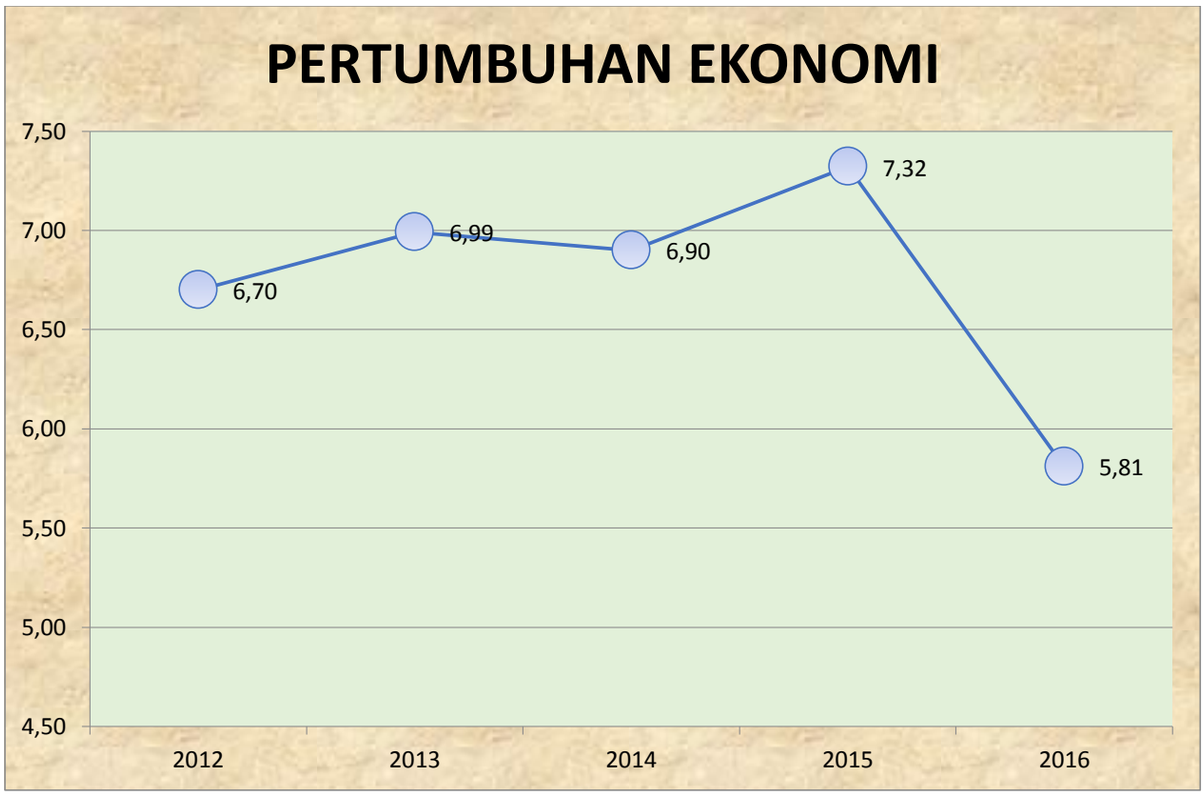
Kinerja perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2016

NO	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,09	5,03	3,17	6,89	5,86	5,73
B	Pertambangan dan Penggalian	7,55	5,72	7,18	(11,04)	0,70	5,9
C	Indsutri pengolahan	6,48	6,22	7,60	7,92	6,81	5,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	9,66	8,86	10,94	17,96	3,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,19	8,56	4,94	9,54	8,20	5,03
F	Konstruksi	6,30	7,97	9,44	6,73	8,69	5,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,57	8,44	7,24	4,90	8,67	7,08
H	Transportasi dan Pergudangan	17,55	8,39	14,02	5,16	7,87	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,28	8,16	8,04	8,96	9,18	8,84
J	Informasi dan Komunikasi	11,35	10,09	6,39	8,20	7,68	7,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,12	10,19	10,03	13,16	10,29	6,23
L	Real Estate	9,73	9,74	9,37	9,14	8,78	6,53
M,N	Jasa Perusahaan	9,82	9,48	9,90	7,95	7,09	4,15
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	7,24	7,02	9,70	9,76	5,84
P	Jasa Pendidikan	6,12	2,32	6,51	7,17	8,05	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,72	7,51	5,77	7,42	6,86	4,39
RSTU	Jasa Lainnya	5,25	6,93	5,56	5,83	8,05	6,96
Jumlah		7,56	6,70	6,99	6,90	7,32	5,81

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

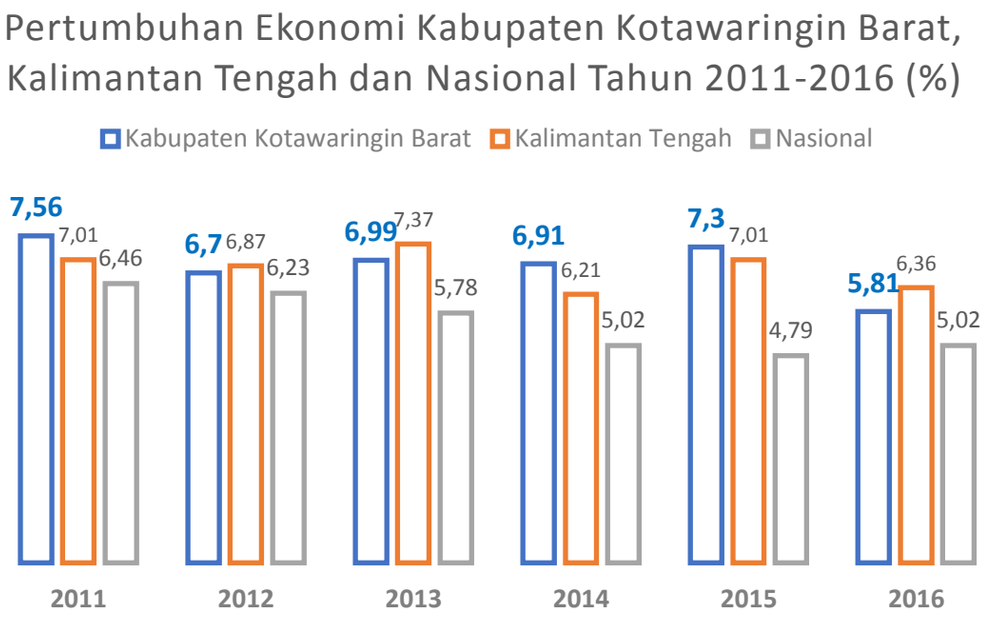
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan yang positif.



Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Gambar 2.6 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Berdasarkan uraian diatas sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Selama 4 (empat) tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7%, meskipun pada tahun 2016 mengalami perlambatan yang berada pada angka 5,8%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Kalimantan Tengah dan Nasional seperti nampak pada Gambar 2.7 berikut ini.

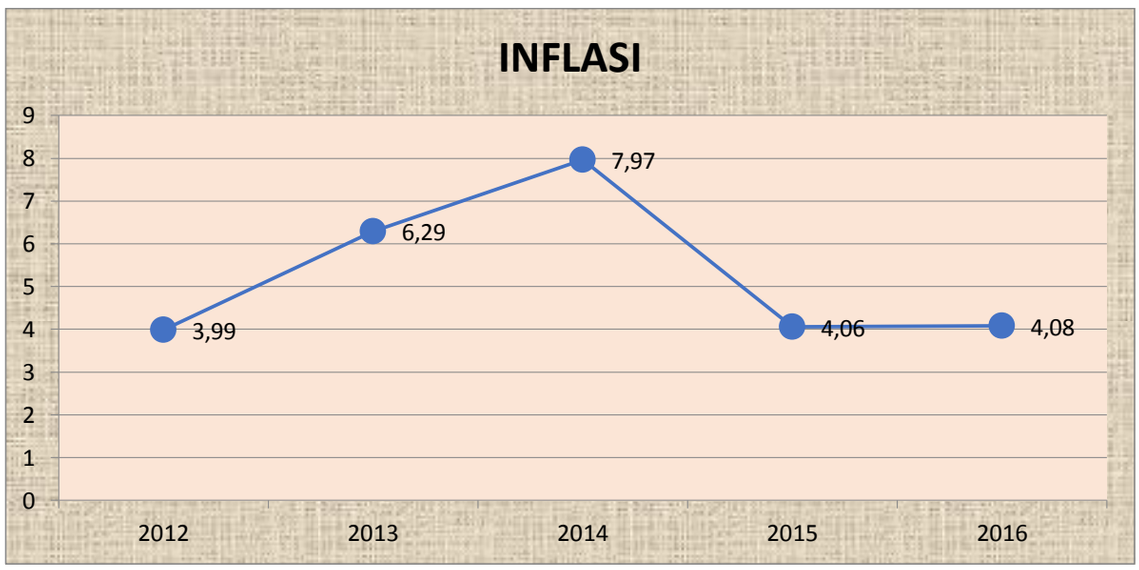


Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Gambar 2.7: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2011-2016 (%)

d. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Angka Inflasi pada Tahun 2012-2016 sebagaimana Gambar 2.8 berikut ini:



Gambar 2.8: Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Perkembangan inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,97 %. Angka tersebut masih tergolong dalam kategori inflasi ringan yang nilainya dibawah

angka 10 %. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat kebutuhan bahan pokok Kabupaten Kotawaringin Barat banyak yang didatangkan dari Pulau Jawa.

e. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.19: PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
PDRB (Juta Rp)	9.168.960,2	10.306.881,50	11.782.723,50	13.106.339,40	14.485.921,00
PDRB Per Kapita (Rp)	36.240.949,80	39.459.730,09	43.699.763,38	47.127.461,97	50.523.940,23
ATAS DASAR HARGA KONSTAN					
PDRB (Juta Rp)	8.239.294,00	8.815.084,00	9.423.199,70	10.112.713,60	10.699.937,80
PDRB Per Kapita (Rp)	32.566.379,45	33.748.407,35	34.948.761,82	36.358.226,94	37.319.202,41

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun2017

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat, PDRB per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

f. Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 sebesar Rp 279.080,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).

Angka Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjukkan pada Tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20: Indikator Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Indikator Kemiskinan	2012	2013	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp)	263.840	273.467	279.080	293.436	319.064
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	14.244	14.209	14.209	14.102	14.221
Angka Kemiskinan (%)	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96

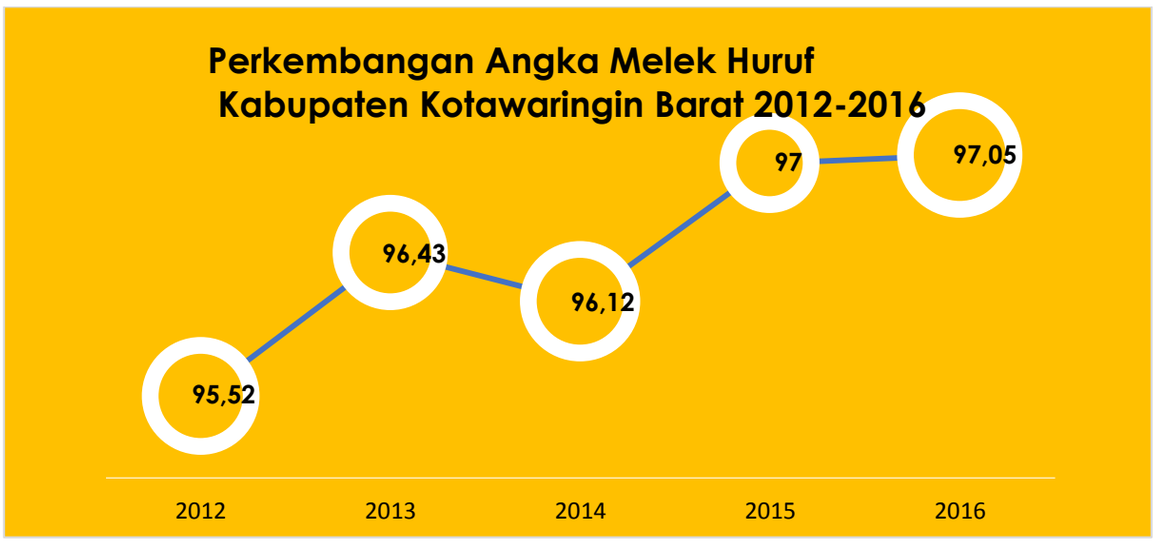
Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Memperhatikan data pada Tabel 2.20 tersebut di atas, bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup banyak yaitu 14.221 jiwa.

2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

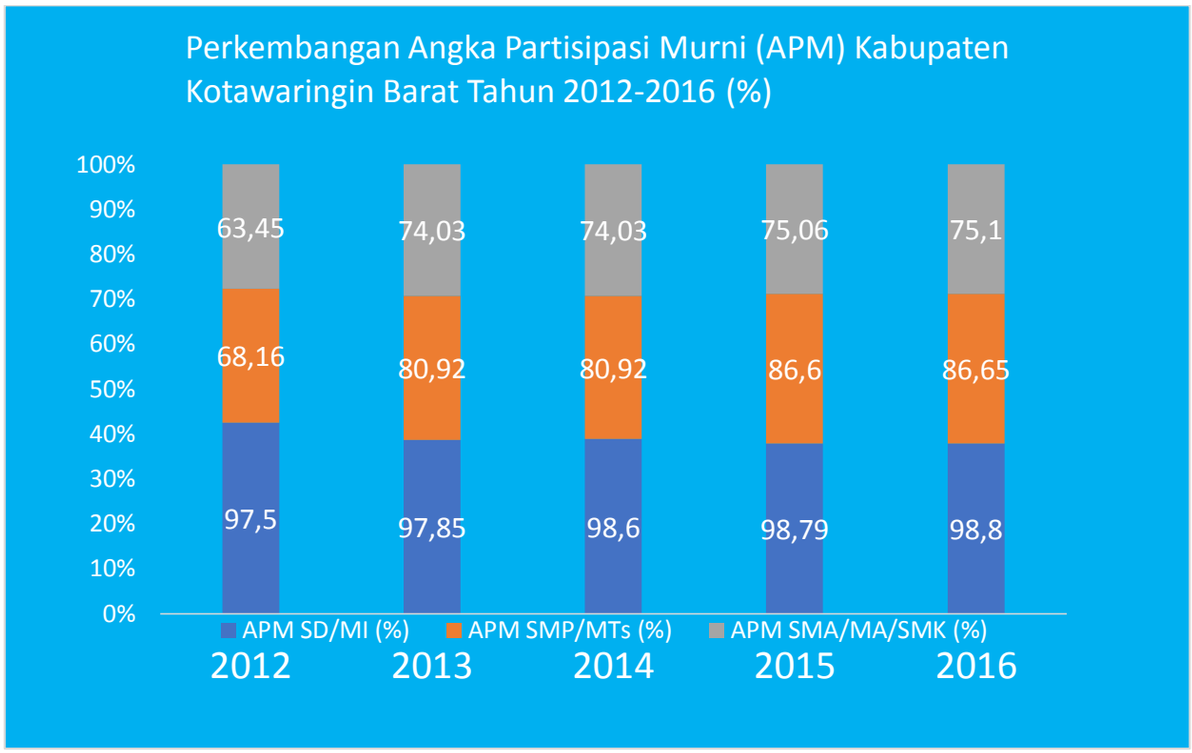
Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 2.9 berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

Gambar 2.9: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten KotawaringinBarat 2012-2016

Dari gambar tersebut, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat usia 15 tahun keatas belum seluruhnya mampu membaca dan menulis. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.10 sebagai berikut:

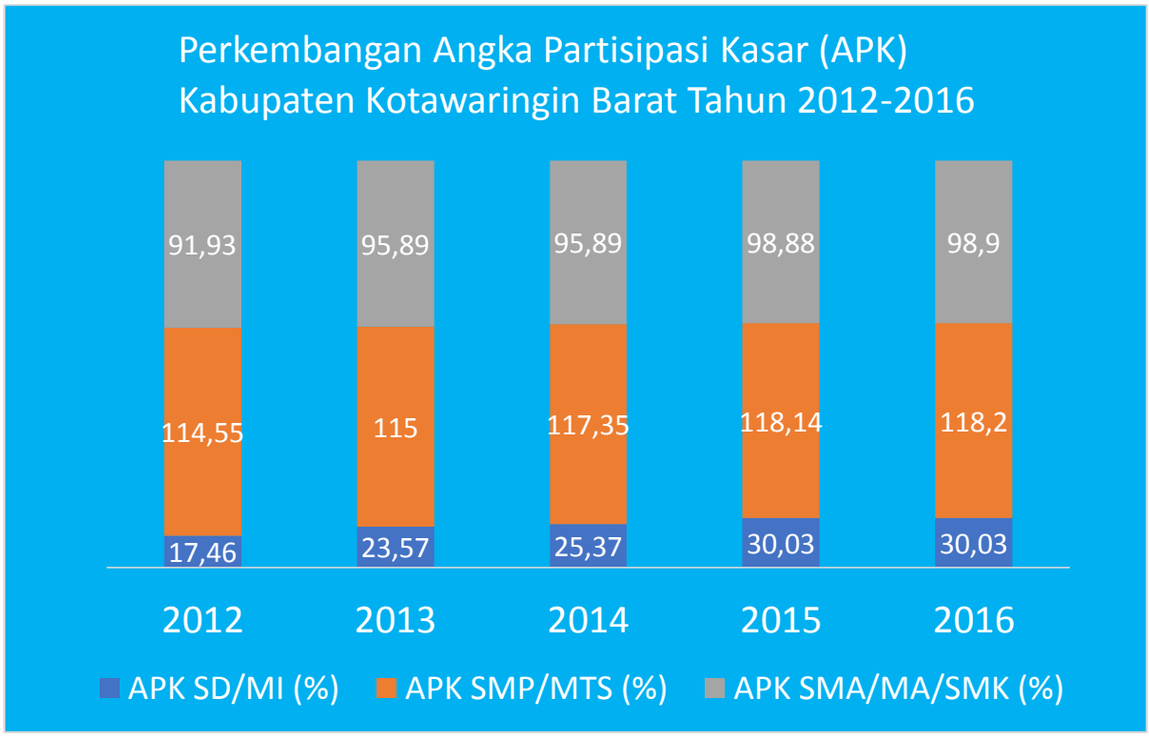


Sumber: Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Ktw.Barat Tahun 2017

Gambar 2.10: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (%)

Dari data pada Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Gambar 2.11 di bawah ini menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA yang setiap tahun juga cenderung mengalami kenaikan.

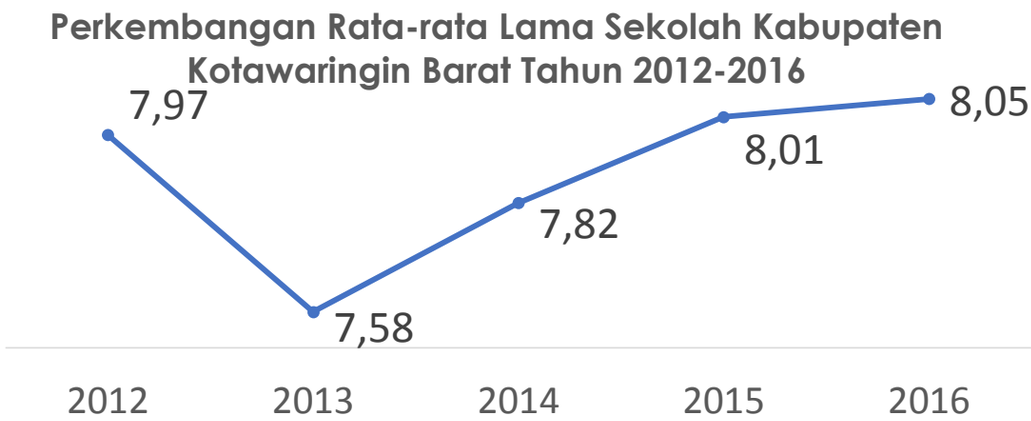
Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.11 sebagai berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Ktw.Barat Tahun 2017

Gambar 2. 11: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

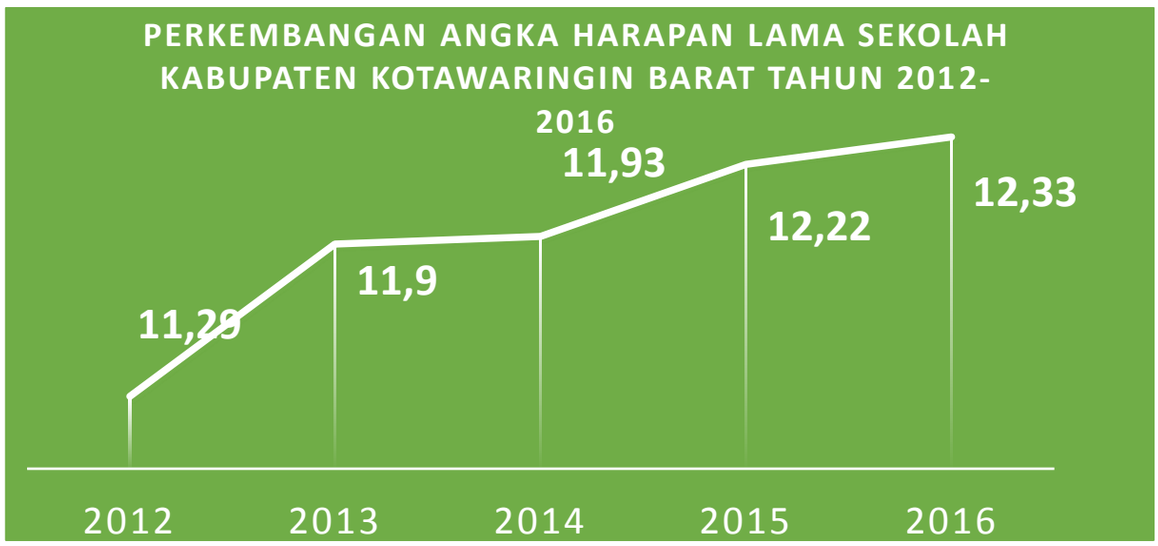
Dari data pada Gambar 2.11 di atas menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini terjadi karena masih terbatasnya SMA/SMK/MA yang sebagian besar di ibukota kecamatan belum terjangkau semua lulusan SMP/MTs yang berada jauh dari ibukota kecamatan. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.12.



Sumber: Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Ktw.Barat Tahun 2017

Gambar 2. 12: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.13 berikut.

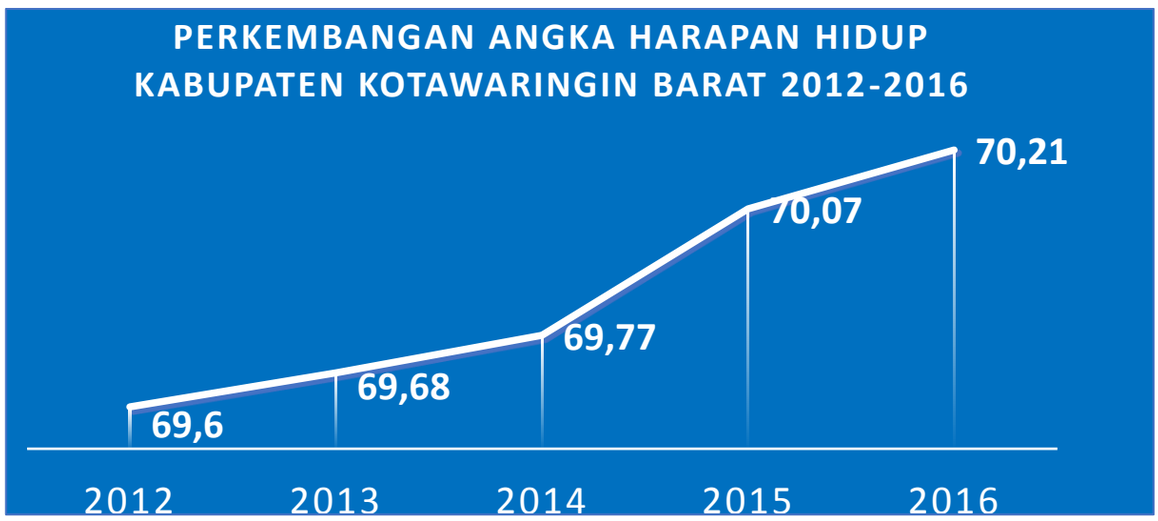


Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2017

Gambar 2. 13: Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Gambar 2.14.



Sumber: Statistik Daerah Kab. Ktw. Barat (BPS) Tahun 2017

Gambar 2.14: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

AHH penduduk Kabupaten Kotawaringin Baratyang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Gambar 2.13 di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi. Status gizi masyarakat pada balita di Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2012-2016.

Tabel 2. 21: Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi Balita Gizi Buruk	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%	§ <= 5%

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

c. Ketenagakerjaan

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,68 %. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22: Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Kotawaringin Barat 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545	209.717
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749	155.605
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011	150.689
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738	4.916
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,75	67,13	70,05	71,96	74,20
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,36	3,68	2,66	3,25	3,16
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,64	96,32	97,34	96,45	96,84
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56,796	54.112
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.956	18.981
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	36.698	29.366
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	6.346	5.765

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 2. 23.

Tabel 2.23: Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012-2016

No	Capaian Pembangunan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah grup kesenian	86	86	86	86	43
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	3
3	Jumlah Klub Olah raga	77	96	120	122	124
4	Jumlah gedung Olah raga	7	7	8	8	8

Sumber : Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

a. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui berbagai Indikator seperti yang tercantum dalam Tabel 2. 24

Tabel 2.24: Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka melek huruf (%)	95,52	96,43	96,12	97,00	97,05
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,97	7,58	7,82	8,01	8,05
3.	Angka Partisipasi Kasar					

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	17,46	23,57	25,37	30,03	30,03
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,55	115,00	117,35	118,14	118,20
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,93	95,89	95,89	98,88	98,90
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	76,88	78,92	87,59	87,59	87,60
4.	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	-	-	17,61	27,78	-
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,50	97,85	98,60	98,79	98,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,16	80,92	80,92	86,60	86,65
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	63,45	74,03	74,03	75,06	75,10
5.	Angka Putus Sekolah					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,40	0,20	0,20	0,20	0,14
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,80	1,19	1,19	0,40	0,70
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,80	1,60	1,60	1,10	0,70
6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					
	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,65	52,94	52,94	97,08	98,00
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,64	91,34	91,34	95,56	98,50
	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72,58	77,16	77,16	95,56	99,00
7.	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	94,80	98,92	98,92	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	57,21	99,58	99,58	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	66,86	99,09	99,09	99,09	99,00
8.	Angka Melanjutkan					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,62	89,67	89,67	99,75	99,75
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95,07	99,64	99,64	99,66	99,66
9.	Fasilitas Pendidikan					
	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	75,85	80,26	89,00	33,05	33,10
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	86,3	87,75	89,50	52,78	52,80
	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	80,00	82,00	88,00	88,00	88,10
10.	Rasio (perbandingan) jumlah guru/murid					
	a. SD/MI	1:17,77	1:18,07	1:32	1:21	1:21
	b. SLTP/MTs	1:13,73	1:13,32	1:28	1:19	1:14
	c. SMU/MA/SMK	01:12,8	1:14,50	1:28	1:14	1:14
11.	Angka Partisipasi Sekolah					
	a. SD/MI	97,66	97,87	99,82	99,53	94,81
	b. SLTP/MTs	90,18	97,73	100	95,42	99,25
	c. SMU/MA/SMK	66,35	68,28	73,05	73,83	95,37
12.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	a. SD/MI	179,99	179,99	185,00	162,09	162,15
	b. SLTP/MTs	300	310,12	310,12	123,00	332,19
	c. SMU/MA/SMK	640,92	660,15	660,15	326,00	743,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ktw. Barat Tahun, 2017

Menilik pada capaian indikator kinerja kunci urusan pendidikan secara umum terdapat peningkatan kinerja urusan pendidikan. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA dan PAUD Non-Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Sejenis PAUD) menunjukkan bahwa semakin banyak orang tua memandang bahwa pendidikan anak usia dini penting untuk proses tumbuh kembang anak sehingga mereka memutuskan untuk mengirimkan anak-anak ke lembaga PAUD.

Tolok ukur dalam keberhasilan pelayanan pendidikan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah adalah tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan meskipun belum dapat mecapai angka absolut. Hal ini didukung pula dengan peningkatan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/Mts. Namun angka tersebut belum mencapai 100% yang berarti masih terdapat anak-anak usia sekolah yang belum melanjutkan ke jenjang selanjunya. Masih terdapat siswa yang putus sekolah dengan berbagai penyebab, meskipun pada tahun 2014 angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sederajat relatif mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Beasiswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK SD/MI/Paket A melebihi 100% dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Sedangkan capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih harus ditingkatkan. Perlu adanya kerjasama lintas pihak dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.

Pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD/MI/Paket A dan ujian nasional jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih merupakan metode untuk mengukur hasil proses pembelajaran. Terjadi peningkatan angka kelulusan di semua jenjang. Namun demikian tetap harus ada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelulusan peserta didik dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Rasio pendidik dan siswa sudah mendekati tataran yang cukup ideal. Secara kuantitas, jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 semakin meningkat, namun perlu adanya upaya untuk peningkatan kualitas.

b. Kesehatan

Beberapa indikator capaian kinerja terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Cakupan dan Mutu Pelayanan Dilihat Melalui Indikator antara lain:

a) Angka Kematian Neto / Net Death Rate (NDR)

Rata-rata NDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 sebesar 12,03%, berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Angka Kematian Umum / Gross Death Rate (GDR)

Rata-rata GDR di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 sebesar 36,16%, berarti sudah sangat baik pelayanan rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c) Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit dapat dilihat dari BOR (*Bed Occupancy Rate*), LOS (*Length of Stay*) rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari) seorang pasien dan TOI (*Turn Over Interval*). BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu; LOS adalah rata-rata lama perawatan (dalam satuan hari) seorang pasien; dan TOI adalah lamanya pemakaian tempat tidur oleh pasien (dalam satuan hari). Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

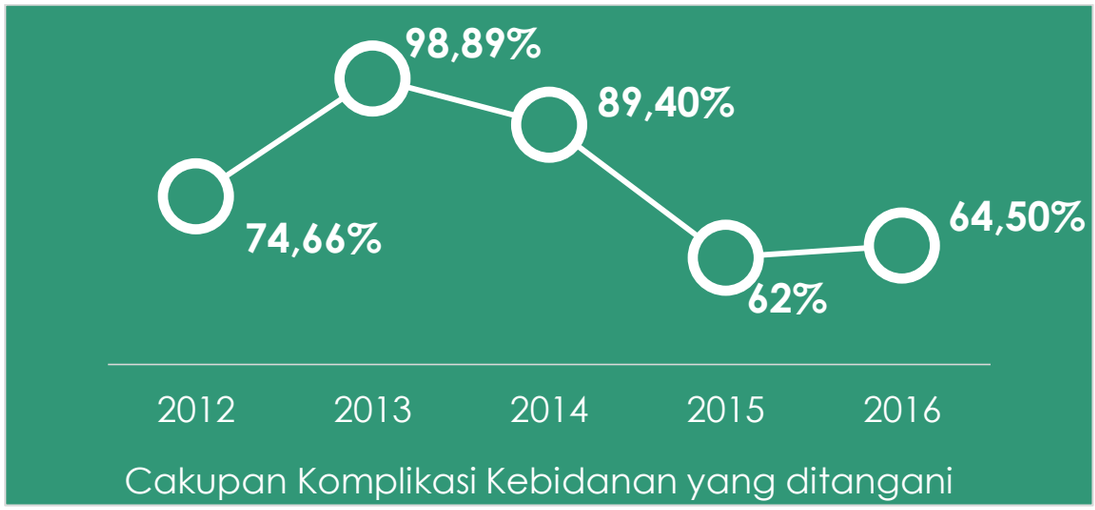
Tabel 2.25: Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun					Ideal
	2012	2013	2014	2015	2016	
BOR	76,36	71,22	72,41	77,00	53,98	60–85%
LOS (hari)	3,46	3,10	3,19	3,54	2,47	6–9 hari
TOI (hari)	1,07	1,25	1,22	1,06	2,10	1–3 hari
BTO (kali)	80,62	83,87	82,74	79,34	69,98	40-50 kali
GDR (%)	27,5	25,0	31,5	34,8	36,16	< 45%o
NDR (%)	9,9	10,5	16,5	14,4	12,03	< 25%o

Sumber: RSUD Sultan Imanuddin, 2017 (diolah)

2) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2012 - 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif dan kondisi pada tahun 2016 sebesar 64,50%, masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar 80%. Sebagai gambaran tentang perkembangan kondisi cakupan komplikasi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

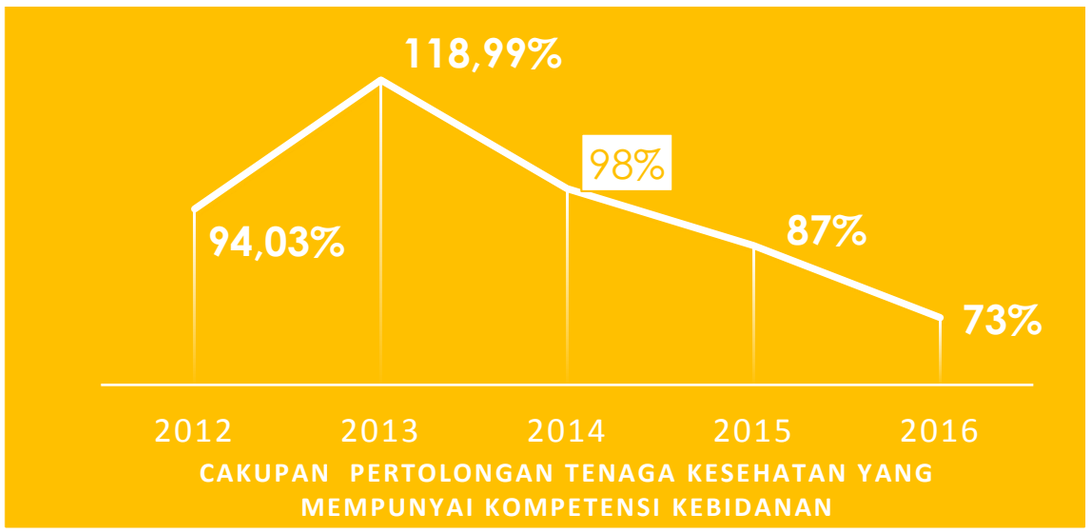


Gambar 2.15: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Tahun 2012 – 2016

3) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes tahun 2013 sebesar 118,99% terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 73%. Penurunan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan terjadi karena masih banyak sarana kesehatan swasta yang memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat yang belum melaporkan cakupan pelayanannya kepada dinas kesehatan setempat.

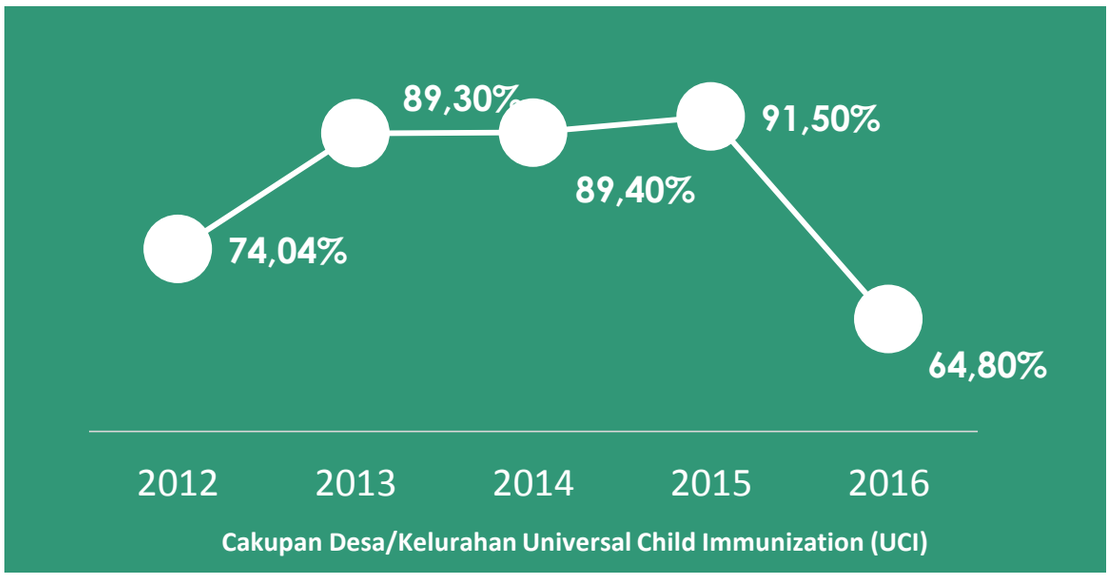
Perkembangan kondisi Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.16: Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan Tahun 2012- 2016

4) Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Target cakupan UCI menurut indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95%. Indikator keberhasilan GAIN UCI mengacu pada RPJMN Tahun 2012-2016 dengan target tahun 2016 mencapai UCI 100% dan 100% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Pencapaian UCI desa/kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.17: Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa cakupan desa/kelurahan UCI dari tahun 2012-2016 memiliki nilai yang fluktuatif namun masih berada di bawah 95%. Belum tercapainya target cakupan desa/kelurahan UCI dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan dalam menentukan besaran target sasaran, selain itu adanya mutasi tenaga imunisasi di Kabupaten maupun di Puskesmas.

5) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan.

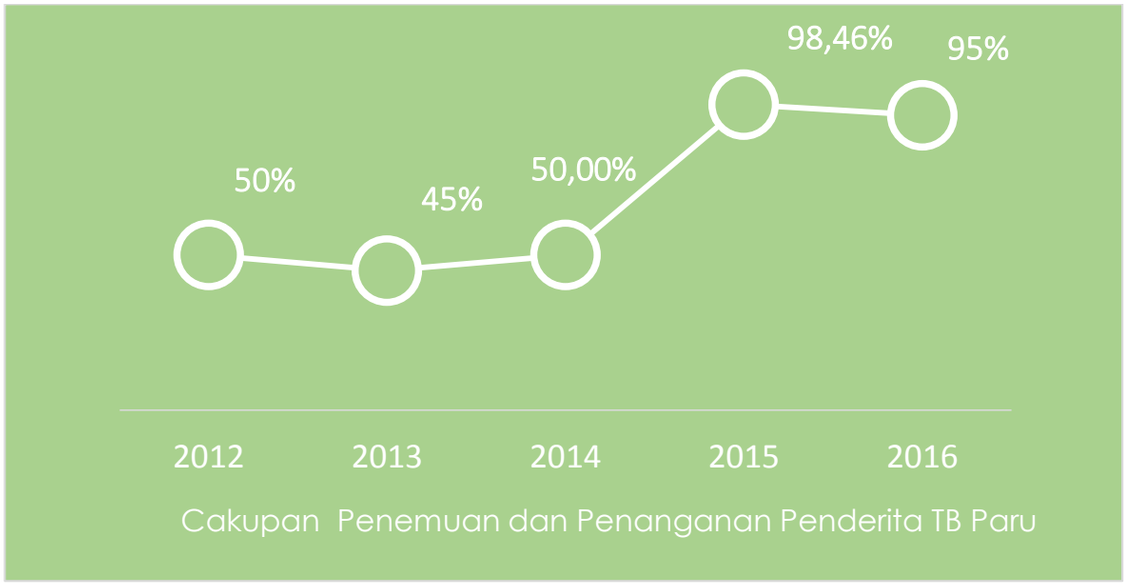
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dari tahun 2012-2016 yaitu 100%, dan diprediksikan konsisten hingga tahun 2016. Semua kasus gizi buruk yang terlacak, mendapat perawatan dengan pemberian bantuan MP-ASI selama perawatan/ penanganan. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.18: Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan Tahun 2012 – 2016

6) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Paru.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penderita Penyakit TB Paru Kabupaten Kotawaringin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



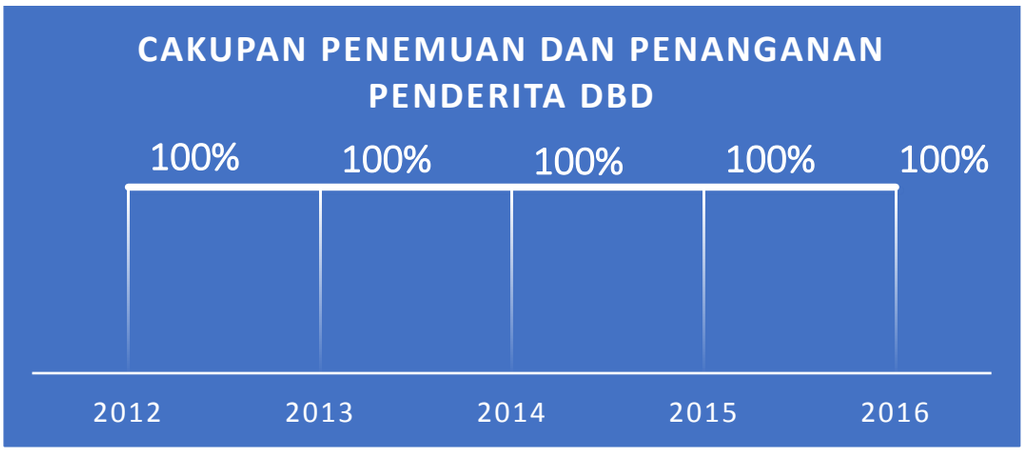
Gambar 2.19: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 – 2016

Dari gambar di atas diketahui bahwa cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2012 (50%), tahun 2013 (45%), tahun 2014 (50%), tahun 2015 (98,46%), dan tahun 2016 diprediksi sebesar 95%, diatas target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, diutamakan pada pelaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan. Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD diharapkan dapat mencapai lebih dari 90%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sejak tahun

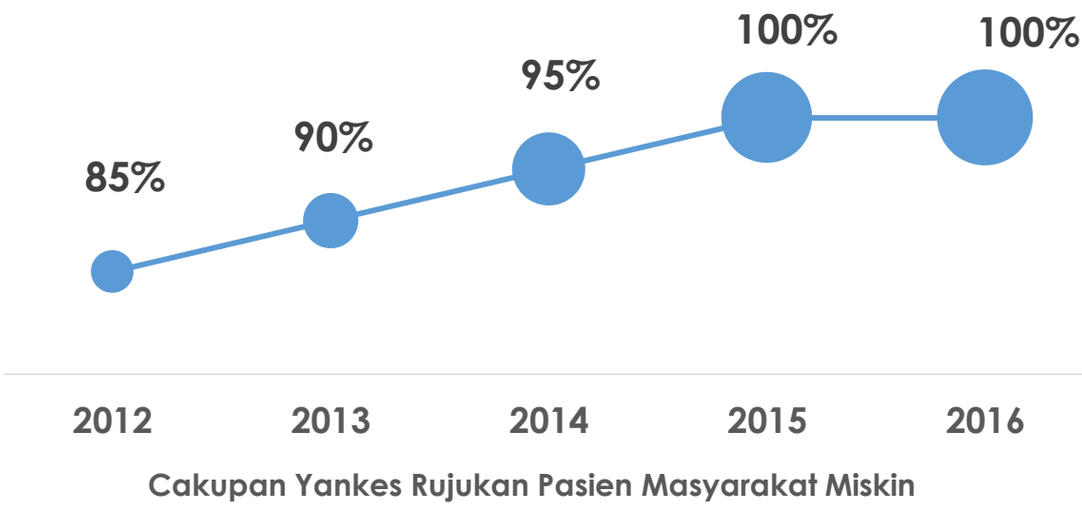
2012 hingga 2016 mencapai target 100%. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.20: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2012-2016

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin.

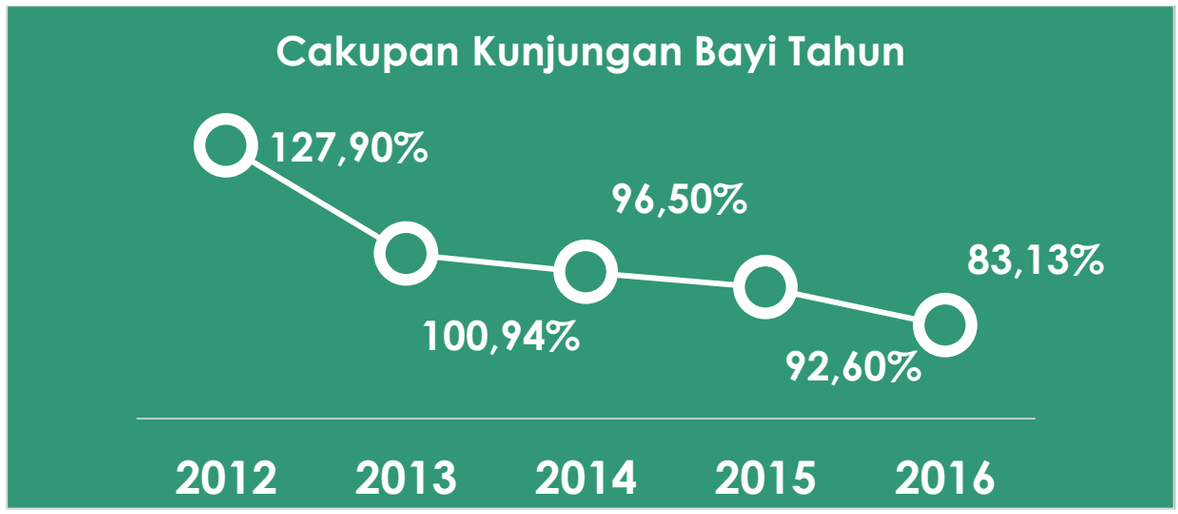
Cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (dan hampir miskin) dari tahun ketahun selalu menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 100% hingga tahun 2016. Ilustrasi Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.21: Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012-2016

9) Cakupan Kunjungan Bayi.

Gambar di bawah ini menampilkan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejak tahun 2012-2016 menunjukkan tren penurunan yaitu pada pada tahun 2012 sebesar 127,39% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar 83,13%.



Gambar 2.22: Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2016

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1) Pekerjaan Umum

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.26: Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2016

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	*0,24*	*0,27*	*0,26*	*0,45*	*0,363*
2	Rasio Jaringan Irigasi	*0,54*	*0,85*	*0,86*	*0,75*	*0,70*
3	Luas Wilayah Kebanjiran	*16,00%*	*15,00%*	*14,00%*	*13,80%*	*12%*
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	*96,99*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*77,96*
5	Persentase penanganan sampah	*65,54*	*68,93*	*70,45*	*51,63*	*80,80*
6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	*1,42*	*1,48*	*1,57*	*2,2*	*1,26*

Sumber: LKPJ Bupati Ktw.Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

Beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu rasio jaringan irigasi, luasan wilayah yang mengalami kebanjiran dan rasio rumah layak huni. Persentase penanganan sampah menunjukkan angka yang fluktuatif namun kondisi pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup significan. Sedangkan rasio tempat pembuangan sampah pada tahun 2016 justeru mengalami penurunan. Selain hal tersebut diatas capaian kinerja urusan pekerjaan umum juga dapat ditunjukkan melalui kondisi infrastruktur yang ada khususnya kondisi jalan dan jembatan.

Berdasarkan statusnya, jalan dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Baratberdasarkan Statusnya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	126,55	5,11	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,35
2	Jalan provinsi	155	6,26	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.185,51	47,87	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.224,37	49,55
4	Jalan desa	1.009,41	40,76	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,09	41,85
Jumlah		**2.476,67**	**100**	**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.470,82**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tabel 2.28: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Jenis Permukaannya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Aspal	663,84	26,81	656,99	26,64	1.018,41	41,24	1.022,37	41,40	1.090,11	44,12
2	Jalan Batu/kerikil	168,66	6,81	137,10	5,56	102,38	4,15	100,65	4,08	70,10	2,84
3	Jalan Tanah	1.276,91	51,56	1.436,85	58,26	1.098,68	44,49	1.082,92	43,85	1.046,79	42,37
4	Tidak dirinci: -Beton -Titian -Lainnya	367,26	14,83	111,54 27,89 95,86	4,52 1,13 3,89	125,00 29,11 96,16	5,06 1,18 3,89	137,81 29,85 96,16	5,58 1,21 3,89	137,81 29,85 96,16	5,58 1,21 3,89
Jumlah		**2.476,67**	**100**	**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.470,82**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2015 - 2016 adalah 2.470,82 Km, dimana jalan Provinsi berkurang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan status jalan pada ruas jalan Akses ke Pelabuhan Tanjung Kalap (Bumi Harjo) yang sebelumnya status jalan Provinsi menjadi Status Jalan Negara/nasional. Sementara untuk jalan yang merupakan kewenangan Kabupaten tidak mengalami perubahan panjang, dimana pada tahun 2015 - 2016 fokus pekerjaan bukan pada penambahan panjang jalan tetapi lebih kepada peningkatan infrastruktur dan kemantapan jalan.

Tabel 2.29: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang(Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan Baik	484,18	19,55	490,46	19,89	845,98	34,26	890,50	36,06	959,29	38,82
2	Jalan Sedang	1.069,31	43,18	816,60	33,11	784,19	31,75	761,46	30,83	735,56	29,77
3	Jalan Rusak Ringan	661,52	26,71	856,56	34,73	620,51	25,13	608,00	24,62	619	25,09
4	Jalan Rusak Berat	261,66	10,56	302,61	12,27	218,97	8,87	209,79	8,49	156,97	6,35
Jumlah		**2.476,67**	**100**	**2.466,23**	**100**	2.469,65	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.470,82**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.29 dapat disampaikan bahwa kinerja proporsi panjang jalan munurut kondisinya dari tahun 2012 -2016 sebagai berikut: Jalan kondisi baik meningkat sebesar 1,98%; jalan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 0,69%, jalan rusak ringan dan mengalami penurunan 0,94%, jalan rusak berat mengalami penurunan 0,60%.

Tabel 2.30: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kelas Jalan

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kelas III B	281,55	11,37	212,26	8,61	212,26	8,60	212,36	8,60	212,36	8,59
	Kelas III C	415,70	16,79	451,14	18,29	456,12	18,47	465,90	18,86	467,43	18,92
	Kelas Tidak dirinci	1.779,92	71,85	1.802,83	73,10	1.801,27	72,93	1.791,49	72,54	1.791,03	72,49
Jumlah		**2.477,17**	**100**	**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.470,82**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Sedangkan kondisi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada 56 Tabel berikut ini:

Tabel 2.31: Klasifikasi Jembatan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Kondisi fisiknya

No	Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	Jembatan Baik	22	5,41	24	5,97	141	74,6	148	78,31	149	69,3
2	Jembatan Sedang	371	91,15	378	94,03	30	15,87	26	13,76	23	10,7
3	Jembatan Rusak	14	3,44	-	-	16	8,47	14	7,41	35	16,28
4	Jembatan Rusak Berat	-	-	-	-	2	1,06	1	0,53	8	3,72
Jumlah		407	100	402	100	189	100	189	100	215	100

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

2) Penataan Ruang

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2.	Perda RTRW	-	-	-	-	-
3.	Dokumen RDTR	2	2	-	-	-
4.	Ketaatan pada RTRW	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat ketersediaan Perda RTRW masih belum ada. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini mekanisme penetapan perda RTRW masih dalam proses. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang hingga kini masih belum mengingat Perda tentang Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijadikan acuan masih dalam proses.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian kinerja pada Urusan Perumahan Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 – 2016

No	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	12,00	23,00	70,00	70,55	72,00
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	78,40	76,29	72,10	75,49	77,96
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	95,73	98,12	98,12	98,78	98,8
4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	3,35	3,34	3,10	2,74	2,35
5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah	96,65	96,66	96,90	97,26	97,5
6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok	43,20	47,92	50,19	55,19	58,2
7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,06	0,1	0,12	0,09

Sumber: Dinas PUPR dan BPS Kab. Ktw Barat Tahun 2017

Capaian Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2016 antara lain dapat dilihat pada persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih yang menunjukkan adanya peningkatan mencapai 72,0%,

Rumah tangga bersanitasi mencapai 77,96%, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mengelola sanitasi sangat baik.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Penaggulangan Bencana

Adapun Capaian Kinerja yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34: Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 – 2016

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)	-	1226	1226	1226	1226
2	Jumlah pos jaga/ronda (unit)	4	4	8	5	
3	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)	-	400	-	-	-
4	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan	-	-	-	-	-
5	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	-	-
6	Data laporan hasil monitoring	2 kec.	-	-	-	6 buku
7	Kondisi daerah yang kondusif (kec)	6	6	6	6	6
8	Tingkat Kehamonisan umat beragama (org)	90	90	-	-	-
9	Tingkat Kehamonisan antar etnis (org)	-	-	220	300	200
10	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada keg. IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)	-	1000	80	80	40
11	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)	5	4	4	3	3
12	Implementasi SKB 3 Menteri (org)	75	50	200	300	84
13	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)	50	50	400	300	-
14	Tingkat praktek prostitusi (org)	-	200	100	-	230
15	Data laporan hasil monitoring	-	6 Kec.	-	-	10 buku
16	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)	60	360	70	120	150

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
17	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormasdan LSM)	38 / 102	20 / 50	12/ 70	12 / 70	12 / 40
18	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)	-	10	-	10	-
19	Data laporan hasil monitoring (kec)	6	6	-	6	6
20	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana	140 org	15 org	100 org	100 org	-

Sumber: Badan Kesbangpol. Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

Adapun perkembangan dari hasil pengawasan terhadap Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35: Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran (kali)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	11	1	3	3	43
2.	Minuman Keras (Miras)	37	20	50	80	61
3.	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	15	57	20	39	81
4.	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	1	4	6	6	13
5.	Premanisme	-	2	-	-	-
6.	Judi Togel	-	-	-	1	-
7.	Mucikari	-	-	-	14	9
8.	KTP	-	-	-	9	4
9.	Ngelem Fox	-	-	-	1	6
Jumlah		**64**	**84**	**79**	**153**	**217**

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Adapun capaian kinerja penanggulangan bencana, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.36: Capaian Kinerja Penaggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Urusan Pemerintahan/ Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah mendapat Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan	-	-	5	12	23
2	Jumlah Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih	-	-	-	5	5
3	Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	-	-	70%	75%	75%

Sumber: Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2017

f. Sosial

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37: Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	15	15	17	17	21
2.	PMKS yang memperoleh bantuan social (%/kasus)	68,75	68,75	68,75	88,12	2.675
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%/kasus)	68,42	68,42	63,64	91,22	1.024

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan indikator Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terlihat capaian pada tahun 2012-2015 dan 2016 menunjukkan satuan yang berbeda, hal tersebut dikarenakan perbedaan cara penghitungannya yaitu untuk tahun 2012-2015 didasarkan pada jenis PMKS-nya, sedangkan untuk penghitungan capaian tahun 2016 didasarkan pada jumlah penerima bantuan dan jumlah kasus yang ditangani di tahun tersebut.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Program yang diupayakan pemerintah untuk mengoptimalkan tenaga kerja Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Adapun capaian kinerja pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38: JumlahPeserta KB Aktif Tahun 2012-2016

No	Peserta KB Aktif	2012	2013	2014	2015	2016
1	IUD	740	783	943	1.015	1.054
2	MOP	94	115	119	140	134
3	MOW	702	697	736	758	762
4	IMPLANT	2.442	2.436	3.162	3.175	2.463
5	SUNTIK	20.515	13.482	19.324	19.174	18.261
6	PIL	10.542	6.519	8.190	8.610	9.085
7	KONDOM	889	727	736	1.044	884
Jumlah		35.924	24.759	33.375	33.916	32.643

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Selanjutnya capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3,8	3	3
2.	Jml peserta KB aktif	35.924	24.759	33.375	33.916	32.643
3.	Jml Pasangan Usia Subur (PUS)	45.847	32.154	49.238	49.578	45.852
4.	Rasio akseptor KB (%)	80,69	87,9	80,12	69,92	71,19
5.	Cakupan peserta KB aktif/ PA (%)	78,36	77	67,78	68,41	32.643
6.	Keluarga Pra Sejahtera	2.966	1.474	2.701	2.325	32.643
	Keluarga Sejahtera I	10.624	4.197	9.545		

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami penurunan kualitas. Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih meningkatkan lagi capaian kinerjanya.

c. Pangan

Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.40: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.465/ 72,69	2.452/ 72,37	2.576/ 73,38	2.588/ 74,63	2.589/ 74,65
2	Penguatan Cadangan Pangan	-	-	57,8%	61,4%	60,39%
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12/Th
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60	60	60	60	60
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	80,7	84,56	91,1	92,7
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	55	57	59	66,6	70,77
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Standar Pelayanan Minimal di atas, dari tujuh indikator dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Sebagian besar indikator telah mencapai SPM bahkan melebihi SPM yang ditetapkan. Namun, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, belum bisa memenuhi target SPM dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana dan kurangnya SDM.

Tabel 2.41: Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersedian Pangan (Beras)

No.	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	253.000	261.000	269.629	278.141	286.714
2	Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.797	12.494
3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.866	34.910
4	Jumlah Kekurangan (Ton)	13.527	12.298	14.256	22.070	22.417

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dalam sistem ketersediaan pangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 masih mengalami defisit atau tergantung dari luar daerah yang mencapai rata-rata 25% - 30% per tahun.

d. Pertanahan

Perkembangan jumlah tanah bersertifikat dan luas tanah yang bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan tahun 2015, dari 875.871 Hektar tanah yang belum bersertifikat, tanah yang bersertifikat sebanyak 237.347 Hektar.

Tabel 2.42: Perkembangan Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Dan Luas Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator	satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas tanah bersertifikat	Hektar	808,88	808,88	808,88	808,88	808,88
2.	Luas tanah yang belum bersertifikat	Hektar	-	-	-	-	-
3.	Jumlah bidang tanah bersertifikat	bidang	103.470	103.470	103.470	103.470	103.470
4.	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	bidang	-	-	-	-	-
5.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	bidang	769	769	769	769	769
6.	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat	bidang	401	429	429	429	429
7.	Jumlah aset tanah Pemerintah	bidang	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254

No.	Indikator	satuan	Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
	Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga						
8.	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	Ijin	-	-	-	-	-
9.	Konflik pertanahan yang terjadi	kasus	5	4	3	4	4
10.	Konflik pertanahan yang terselesaikan	kasus	4	4	3	3	3

Sumber: Bagian Administrasi dan Perlengkapan Setda Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kinerja urusan lingkungan hidup sesuai indikator kinerja selama tahun 2012 - 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43: Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penanganan sampah	65	73,5	48,47	51,63	60,75
2.	Jumlah Duta Lingkungan (orang)	-	-	2	-	-
3.	Jumlah Kader lingkungan (orang)	50	39	39	40	-
4.	Jumlah Adhiwiyata (orang)	50	50	50	50	50
5.	Pencemaran status mutu air	2	2	2	2	2
6.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air:					
	Mangrove (bibit)	3.000	3.000	-	-	-
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)	600	1.000	678	200	-
	Biopori (Lubang Tanam)	1.000	2.000	32.000	-	-
7.	Penegakan Hukum Lingkungan	1	1	1	4	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Adapun capaian Indikator kinerja Urusan Kehutanan dari tahun 2012-2016 dituangkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.44: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29	-
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61	0,55
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25	25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400	300

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Rehabilitasi hutan Mangrove) di Desa Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Keraya baru tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 10 Ha, atau sebesar 3,29 dari yang ditargetkan. Sedangkan capaian kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkat, pada tahun 2015 PDRB sektor kehutanan sebesar 0,61%(*angka sangat sementara) dari total PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, atau meningkat sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0.57%.

Jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45: Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012-2016

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M^3)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kayu Meranti	43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-
Kayu Rimba Campuran	1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-
Kayu Indah	68,87	-	-	-	-
Jumlah	**45.840,29**	**30.461,64**	**46.443,01**	**44.349,36**	**-**

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

f. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2012-2016 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.46: Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	76,70	32,67	81,30	95	97,78
2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)	30,69	71,56	73,10	54,13	90,00
3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	52,66	58,64	78,22	76,25	76,6
4	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	18,73	28,09	52,08	58,36	61,26
5	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainya	229	163	217	271	167

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ktw. Barat Tahun 2017

Persentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK pada tahun 2015 mengalami penurunan hampir 19% apabila dibandingkan perolehan pada tahun 2014. Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E dan masih kurangnya kuantitas sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau pun penduduk pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri berupa KTP-E.

Pada tahun 2015 persentase jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) juga mengalami penurunan sebesar 1,97%. Hal ini disebabkan oleh masih adanya penduduk yang sudah menikah namun belum memisah KK-nya dan masih menumpang KK pada orang tuanya. Sedangkan persentase kepemilikan akte kelahiran dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 sebesar 18,73% menjadi 61,26%. Meningkatnya persentase kepemilikan akte kelahiran ini disebabkan oleh adanya kebijakan penerbitan akte kelahiran secara gratis atau bebas bea bagi bayi yang berusia kurang dari 60 hari, dan tumbuhnya

kesadaran dari orang tua akan pentingya dokumen kependudukan dalam hal ini akte kelahiran sebagai identitas diri pertama dan hak sipil anak paling utama yang dimiliki anak. Selain itu akta kelahiran juga merupakan bukti yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47: Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012–2015 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa yang Terperbaharui Profil Desanya	-	25	75 Desa	77 Desa	77 Desa
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	81 Desa	81 Desa	81 Desa	81 Desa	94 Desa
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188 Orang	-	-
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1	1

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada satu target IKK yang belum tercapai 100%, yaitu Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dari target 94 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai dengan akhir tahun 2016 baru ada 77 Desa yang telah memiliki Profil Desa yang representatif.

Tabel 2.48: Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD Kelembagaan Desa dan SM2L yang	90	90	90	120	120

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
	mengalami Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif					
2	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal	1.509	1.104	325	276	-
3	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring	94	94	94	94	94
4	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	94	94	94	94	94
5	Jumlah Fasilitasi Pembentukan BUMDes	-	6	25	57	
6	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W	30	30	30	60	60
7	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui	-	25	75	77	77
8	Jumlah pelaksanaan BBG-RM	1	1	1	1	1
9	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188	-	-
10	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan	6	6	6	6	6
11	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1	1
12	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	5	5	7	7	7

Sumber: DPMD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

h. Perhubungan

Adapun beberapa indikator kinerja dalam usaha pencapaian target kinerja pembangunan dibidang urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Tingkat Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	4
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4	4

No.	Indikator	Tingkat Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Jumlah Halte	11	11	11	12	12
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3	3
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	9	9
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	16	17	19	22
8.	Jumlah Trayek LLASDP	3	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

i. Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja dari tahun 2012-2016 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Komunikasi Dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50: Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan web site pemerintah daerah	unit	-	-	16	16	16
2.	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	Keping CD,	400 Majalah Digital, 400 CD kilas Kobar, 100 CD kegiatan	• 100 cd kegiatan • 350 CD kilas kobar • 350 cd majalah digital	• 82 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital
3.	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah,foto,spanduk, baliho	Eksemplar, buku,lembar	400 Buletin Marunting Batu Aji, 400 warta bergambar, 350 buku profil pangkalan bun, 300 buku sejarah kerajaan kotawaringin, 150 Buku himpunan pidato,12 album foto	• 50 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 Kalender Meja • 350 buletin • 350 warta bergambar • 350 foto bupati/wakil • 10 photo mantann bupati • 100 lembar spanduk	• 15 album foto kegiatan • 100 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 buletin • 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat • 400 Buku Profil Kota P.bun • 400 Kalender Meja • 400 Kalender dinding	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin • 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin • 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan

No.	Indikator	Satuan	Tingkat Capaian				
			2012	2013	2014	2015	2016
				• 240 m2 baleho • 13 media langganan koran	• 276 m2 baleho kegiatan • 125 lembar spanduk kegiatan • 830 Photo Bupati/Wakil	• 98 lembar spanduk kegiatan	• 98 lembar spanduk kegiatan • 5 buah baleho Kecamatan
4.	Terselenggarany a pameran/ ekspo	kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali
5.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	media	18 Media	6 Media	6 Media	7 media	5 media
6.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online	Media	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTV dan TVRI)	6 media	4 media
7	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	media	-	5 media	5 media	7 media	7 media
8	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	kali	-	-	46 kali	48 kali	47 kali

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.51: Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase Koperasi aktif (%)	78,08	78,81	80,49	81,10	81,61
2.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
3.	Jumlah UMKM (Unit)	10.564	10.828	11.245	11.349	11.349

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin. Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah, perkembangan jumlah persentase koperasi yang aktif dan UMKM terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi aktif meningkat dari tahun 2012 sebesar 78,08% menjadi 81,61% pada tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 3,53%. Jumlah UMKM juga mengalami

peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 10.564 unit menjadi 11.349 unit pada tahun 2016 dengan persentase kenaikan sebesar 7,43%.

k. Penanaman Modal

Capaian kinerja utama urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat dari sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.52: Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	42	29	35	45
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-	-	-	-
3.	PMDN (Rp)	5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	3.710.499.700.000
4.	PMA ($)	619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	1.996.616,4
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	879,79	667,86	-
6.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	3.500,1	2.544,03	474,91	108,81	459,1

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Investor semakin berminat untuk membuka Investasi baru dan sudah mulai melihat prospek dan peluang pasar yang lebih baik. Hal ini didukung pula dengan kemudahan dalam proses pengurusan ijin usaha yang telah menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

l. Kepemudaan dan Olah Raga

Secara umum kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik, namun perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.53: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional						
	a. POPNAS	medali	12	6	9	4	7
	b. POSPENAS	medali	16	6	5	3	3
2.	Jumlah organisasi pemuda	buah	61	83	97	105	235
3.	Jumlah organisasi (klub) olah raga	buah	77	96	120	122	124
4.	Gedung olah raga/balai remaja	unit	7	7	8	8	8
5.	Lapangan olahraga	buah	144	150	150	150	150

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

m. Statistik

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54: Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja				
				2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Ketersediaan buku PDRB Kotawaringin Barat	Buku	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

n. Kebudayaan

Berdasarkan hasil inventarisasi Benda Cagar Budaya yang telah dilakukan terdapat 33 obyek yang merupakan benda cagar budaya terdiri dari kelompok kawasan, bangunan rumah tradisional, bangunan peribadatan, bangunan makam pendiri Kotawaringin Barat, kelompok gapura, tugu monumen, perabot jalan, dan kelompok ruang terbuka atau taman. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap tahunnya baru 3 situs kawasan cagar budaya yang mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah.

Pelestarian kekayaan dan keragaman budaya daerah telah dilakukan melalui pembinaan grup kesenian di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 86 grup kesenian. Selain itu untuk lebih memperkenalkan kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki, setiap tahunnya diselenggarakan festival seni dan budaya dimana selama tahun 2012 sampai dengan 2015 telah dilaksanakan 23 kali penyelenggaraan.

o. Perpustakaan

Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55: Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perpustakaan	228	232	292	328	343
2.	Jumlah anggota perpustakaan	3.820	4.711	5.621	7.012	8.732
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan	13.735	23.469	28.450	75.309	93.737
4.	Jumlah peminjam	8.491	6.965	11.017	45.287	73.393
5.	Jumlah koleksi bahan pustaka	13.970	15.473	16.645	18.173	21.799
6.	Ratio Jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	228 : 245.143	232 : 261.200	292 : 252.492	328 : 278.141	343 : 286.714
7.	Ratio jumlah pustakawan terhadap jumlah penduduk	2 : 245.143	2 : 261.200	3 : 252.492	1 : 278.141	1 : 286.714

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami peningkatan dari 13.970 judul buku menjadi 21.799 judul buku atau meningkat 56,04% pada tahun 2016.

p. Kearsipan

Terkait dengan Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56: Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	2	2	-	-	5
3.	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	3	3	-	4	4
4.	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36	4:36	4:36	4:36	4:36
5.	Arsip audio visual	265	265	265	-	265
6.	Arsip Foto/Album	269	0	279	309	30
7.	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	-	-	21	21
8.	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	-	-	19.462	19.515	19.515
9.	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	-	-	1.001	1.008	7

LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Capaian indikator pembangunan daerah urusan kearsipan adalah tersediannya pengelolaan arsip secara baku yang telah diselenggarakan tahun 2012 hingga saat ini dan meningkatnya jumlah Arsip In Aktif yang dikelola tahun 2014 meningkat 50 arsip di tahun 2015 dan 2016 menjadi 19.515 Arsip In Aktif.

2.4.3. Urusan Pemerintahan pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

a. Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Capaian kinerja urusan Pertanian berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.57: Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	***Luas tanam tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ha)	7.403	7.200	6.866	5.412	4.209
	Padi ladang (Ha)	3.895	3.104	2.862	1.454	746
	Jagung (Ha)	814	503	638	1.526	2.438
2.	***Luas Panen Tanaman Pangan***					
	Padi sawah (Ha)	6.915	6.823	6.914	4.000	4.731
	Padi ladang (Ha)	3.368	2.814	2.674	1.664	1.296
	Jagung (Ha)	811	488	616	608	1.171
3.	***Produktivitas tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ton/Ha)	2,99	3,39	3,42	3,73	3,63
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,01	2,18	2,18	2,28	2,05
	Jagung (Ton/Ha)	3,69	3.69	3,75	3,65	3,73
4.	***Produksi tanaman pangan***					
	Padi sawah (Ton)	20.655	23.130	23.646	14.928	17.174
	Padi ladang (Ton)	6.769	6.148	5.837	3.797	2.657
	Jagung (Ton)	2.991	1.799	2.308	2.219	4.368

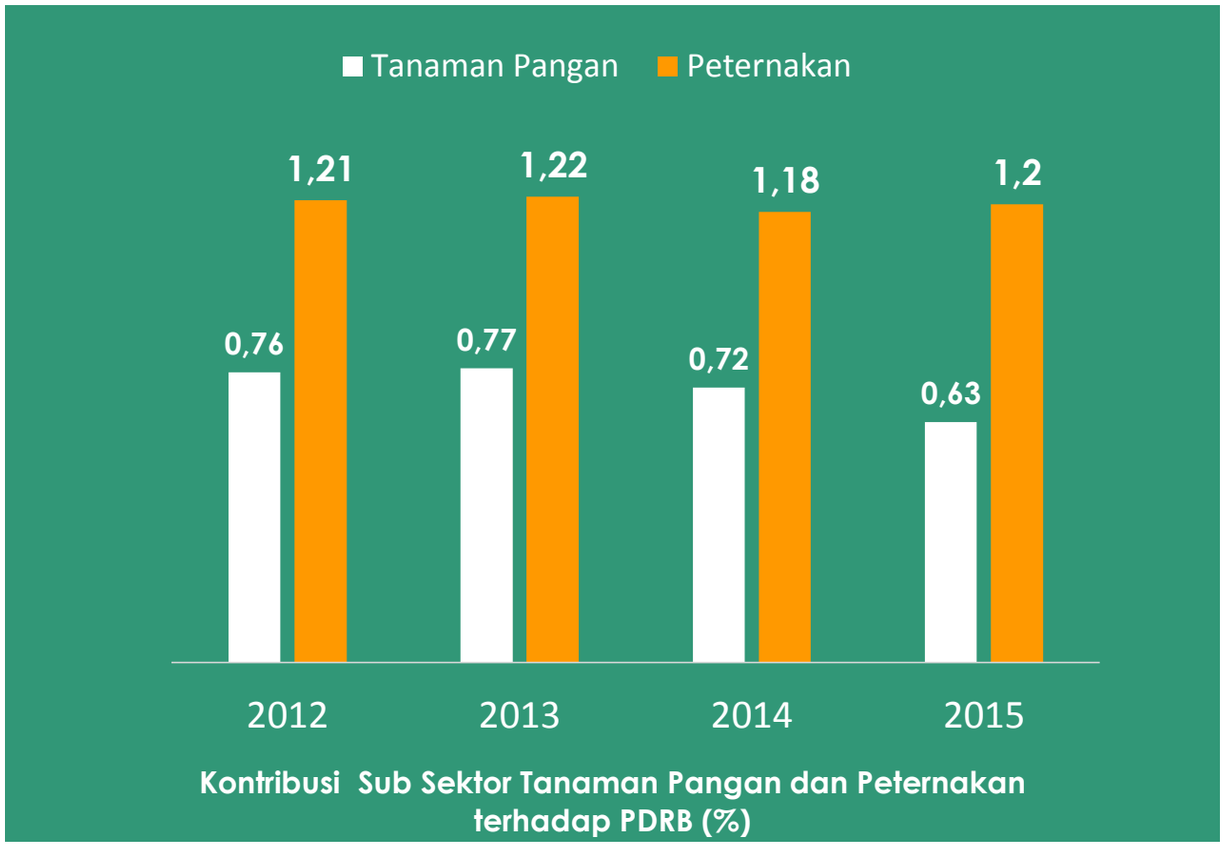
Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Pada tabel di atas capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan utama, dimana dari tahun ke tahun selama 2012-2016 produktivitasnya semakin menurun. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk capaian kinerja sub sektor peternakan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	***Populasi Ternak***					
	Sapi (ekor)	11.797	11.148	13.155	14.397	17.203
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.097	2.118	2.398	2.764	2.538
	Babi (ekor)	5.025	5.327	5.498	5.718	5.881
	Ayam buras (ekor)	315.121	342.230	343.941	345.661	346.843
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	46.500	50.794
	Ayam ras pedaging (ekor)	157.466	163.699	166.973	158.253	210.115
	Itik (ekor)	38.055	39.708	40.317	41.527	42.574
2.	***Produksi Daging Ternak***					
	Sapi (Ton)	565,64	551,99	552,96	572,24	625,86
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	-
	Kambing / Domba(Ton)	49,01	49,43	49,62	58,14	33,02
	Babi (Ton)	87,81	94,00	93,25	94,47	86,53
	Ayam buras (Ton)	289,47	317,36	388,09	340,50	400,6
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	20,39
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	807,73	885,56	886,34	817,78	1.031,75
	Itik (Ton)	14,38	15,77	17,78	14,12	17,09
3.	***Produksi Telur***					
	Ayam buras (Ton)	189,45	207,98	208,76	207,98	212,71
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	209,25	366,39
	Itik (Ton)	124,97	133	133,42	133,19	179,97
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	0,76	0,77	072	0,63	0,61
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,21	1,22	1,18	1,20	1,28
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	29,80	28,32	27,80	26,35	26,06

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2.23: Kontribusi SubSektor Tanaman Pangan dan Peternakan terhadap PDRB Kab. Kotawaringin Barat (%)

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas terlihat populasi sapi potong dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan sebesar 45,82%. Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging.

Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 21,03%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41% namun pada tahun 2016 mengalami penurunan.Lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama. Populasi ternak unggas dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 27,35%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor melampaui target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Capaian kinerja sub sektor perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	24,69	23,36	22,96	21,56	21,25
2.	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	83,75	82,48	82,58	81,82	81,54
3.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	263.608.993,65	263.608.993,65	31.074.462,39	189.439,16	189.439,16
4.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	50.545	48.018	48.018	55.160	55.160
5.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	-	15	15
6.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Rupiah)	14.152.000.000	14.670.000.000	14.670.000.000	12.447.807.384	12.447.807.384
7.	Kemitraan/Plasma	23.957,91	28,785,91	32.634.59	28.785,91	28.785,91
8.	**Pengembangan/ perluasan areal perkebunan**	**233.447,42**	**204.868,62**	**192.846,56**	**212.426**	**212.426**
a.	Karet	17.407	17.451,50	17.907	14.560,30	14.560,30
b.	Kelapa sawit	213.547,21	184.695,33	173.048,34	196.541,30	196.541,30
c.	Kelapa	1.181,51	1.176,51	1.069,52	738,75	738,75
d.	Lada	970,20	875,20	578,20	318,6	318,6
e.	Lainnya	341,5	313,50	243,50	267,51	267,51
9.	**Produksi komoditi perkebunan**	**3.908.557**	**3.029.378**	**3.593.559**	**2.981.823,68**	**2.981.823,68**
a.	Karet (lump)	6.481,13	8.012,06	7.619,19	7.253,83	7.253,83

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
b.	Kelapa (kopra)	356,23	358,57	343,83	265,45	265,45
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	2.974.134,28	2.974.134,28
d.	Lada (putih/hitam)	426,98	316,81	268,95	156,49	156,49
e.	Lainnya	22,30	21,50	20,24	13,63	13,63

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Produksi perkebunan per komoditi dari 2012 – 2016 mengalami penurunan pada semua komoditi karena pengaruh musim kemarau panjang. Namun pada komoditas karet pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 23,62%, Produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tahun 2014 sebesar 18,69%. Penurunan produksi komoditas perkebunan khususnya komoditas kelapa dalam sudah kurang berproduksi karena umur tanaman sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

b. Kelautan dan Perikanan

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012 – tahun 2016 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.60: Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016*)
1.	Produksi perikanan (TON)	12.486,70	13.506,67	16.345,53	16.661,43	19.922,39
2.	Perikanan tangkap (TON)	10.127,90	10.684,10	12.165,80	12.050,40	14.792,70
3.	Perikanan Budi daya (TON)	2.358,80	2.822,57	4.179,73	4.611,03	5.129,69
4.	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)	36,31	37,23	37,5	38	41,35
5.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)	275	424	374	458	453

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016*)
6.	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)	234,33	230,44	231,38	169,24	181,74
7.	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	414,22	463,77	1.357,13	431,3	493,97
8.	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	8.839,39	9.201,96	10.338,75	10.152,69	10.402
9.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	37,23	37,5	38,5	39	42,2

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi produksi perikanan tiap tahunnya sebesar 12,66% dimana peluang pengembangan eksplorasi dan eksploitasi produksi masih sangat besar. Rata-rata realisasi Komsumsi Ikan tiap tahunnya terdapat kecenderungan peningkatan dimana peningkatan tersebut telah melampaui target tingkat komsumsi ikan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,5 kg/kapita.

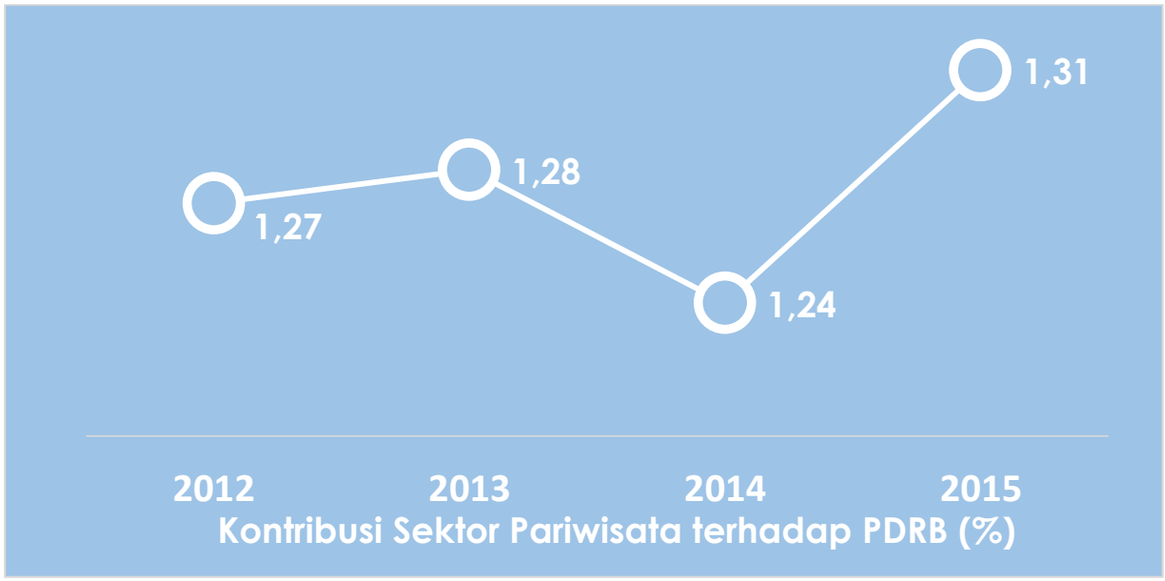
c. Pariwisata

Pencapaian kinerja dari tahun 2012-2016 dalam usaha mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	12.286	13.355	16.035	12.564	15.106
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	1,27	1,28	1,24	1,31	-

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2.24: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

Jumlah kunjungan wisatawan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan. Penurunan jumlah wisatawan dikarenakan krisis Ekonomi Eropa dan adanya bencana kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera, walaupun jumlah wisatawan menurun tetapi pendapatan retribusi meningkat terutama TNTP, karena perubahan tarif masuk. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2012 sebesar 1,27% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 1,31% atau meningkat 0,04% yang berasal dari sub sektor penyediaan akomodasi dan sub sektor penyediaan makan minum.

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.62: Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,80	1,75	1,45	1,36	1,38

Sumber: Kobar dalam angka BPS,2017
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja di atas Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan sebesar 0,42%. Penurunan tersebut sebagai akibat dari adanya penutupan lokasi atau penertiban penambangan secara berkala di seluruh 6 kecamatan.

Tabel 2.63: Capaian Kinerja UrusanEnergi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan Tahun 2012 – 2016

Uraian	Volume Ekspor(MT)					Nilai Ekspor(dalam Ribuan Rp)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Zircon Sand	18.623	11.642	10.346	13.998	12.446	4.270.600	2.328.400	2.069.200	2.779.600	2.489.200
Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilmenite	5.505	4.923	-	-	-	174.060	123.075	-	-	-
Jumlah	**24.343**	**16.565**	**10.346**	**13.998**	**12.446**	**4.444.660**	**2.451.475**	**2.069.200**	**2.779.600**	**2.489.200**

Sumber Data: Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2017

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja diatas, volume dan nilai perdagangan ekspor di Kabupaten Kotawaringin Barat terus berjalan dari tahun 2012-2016 walaupun mengalami fluktuasi.

Tabel 2.64: Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Kontribusi sektor Ketenagalistrikan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut pada tahun 2015 sebesar 0,05% dikarenakan adanya perubahan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah, meningkatnya pemasangan jaringan listrik untuk rumah masyarakat dan adanya perubahan tegangan voltase atau KWH dari 450 ke 900,

1300 atau 2200 yang berdampak kepada meningkatnya penerimaan dari sektor listrik ini untuk daerah.

e. Perindustrian

Capaian Indikator kinerja Urusan Perindustrian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	24,25	24,81	25,53	25,53	25,36
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,5	6,52	5,22	6,2	4,82
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	71	28	55	43	17
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	3	7	16	19	0

Sumber: LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016

Sebagian besar target indikator kinerja dapat dicapai bahkan jauh melebihi target, pada indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari 24,25% pada tahun 2012 meningkat menjadi 25,3 % di Tahun 2016. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri meningkat juga nilainya dari 1,5 % di tahun 2012 menjadi 4,82 % di tahun 2016. Sementara indikator pertumbuhan Industri mengalami penurunan dari 71 unit pada 2012 menjadi 17 unit di tahun 2016, namun angka ini masih melampaui target sedangkan indikator cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2012-2013 yang tidak mencapai target namun pada 2014-2015 angka indikator tersebut telah melampaui target. Untuk indikator pertumbuhan industri, terjadi dinamika yang fluktuatif.

f. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,91	11,93	12,02	12,59	12,67
2	Ekspor Bersih Perdagangan ($)	547.585.488	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	53.865.000	-	-	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 11,91% meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar 12,59% atau meningkat 0,68%. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya volume perdagangan besar dan eceran serta perdagangan ekspor. Sedangkan nilai ekspor bersih dari tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

g. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.67: Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi	2 unit mesin penggiling padi, 1 unit tambatan klotok berikut selter dan siring batu sepanjang 5 meter	Pembangunan workshop, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan kantor koperasi Pembinaan Pembangunan KTM di desa Tanjung Terantang dan	Pembangunan tambatan klotok dan shelter, Sarana TPQ, Badan jalan	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuat	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang (0,5 ha), Penimbunan badan jalan (700 m) dan Pembuata

No.	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
		serta buku-buku hasil identifikasi kawasan transmigrasi	penyelesaian sengketa lahan transmigrasi		an siring batu	n siring batu (220 m3)

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

2.5 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Beberapa perspektif tentang daya saing yang mencakup wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Daya saing tempat (lokalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal (setempat) untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga/penduduknya.
2. Daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan menarik investasi asing (eksternal) dan menentukan peran produktifnya.
3. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

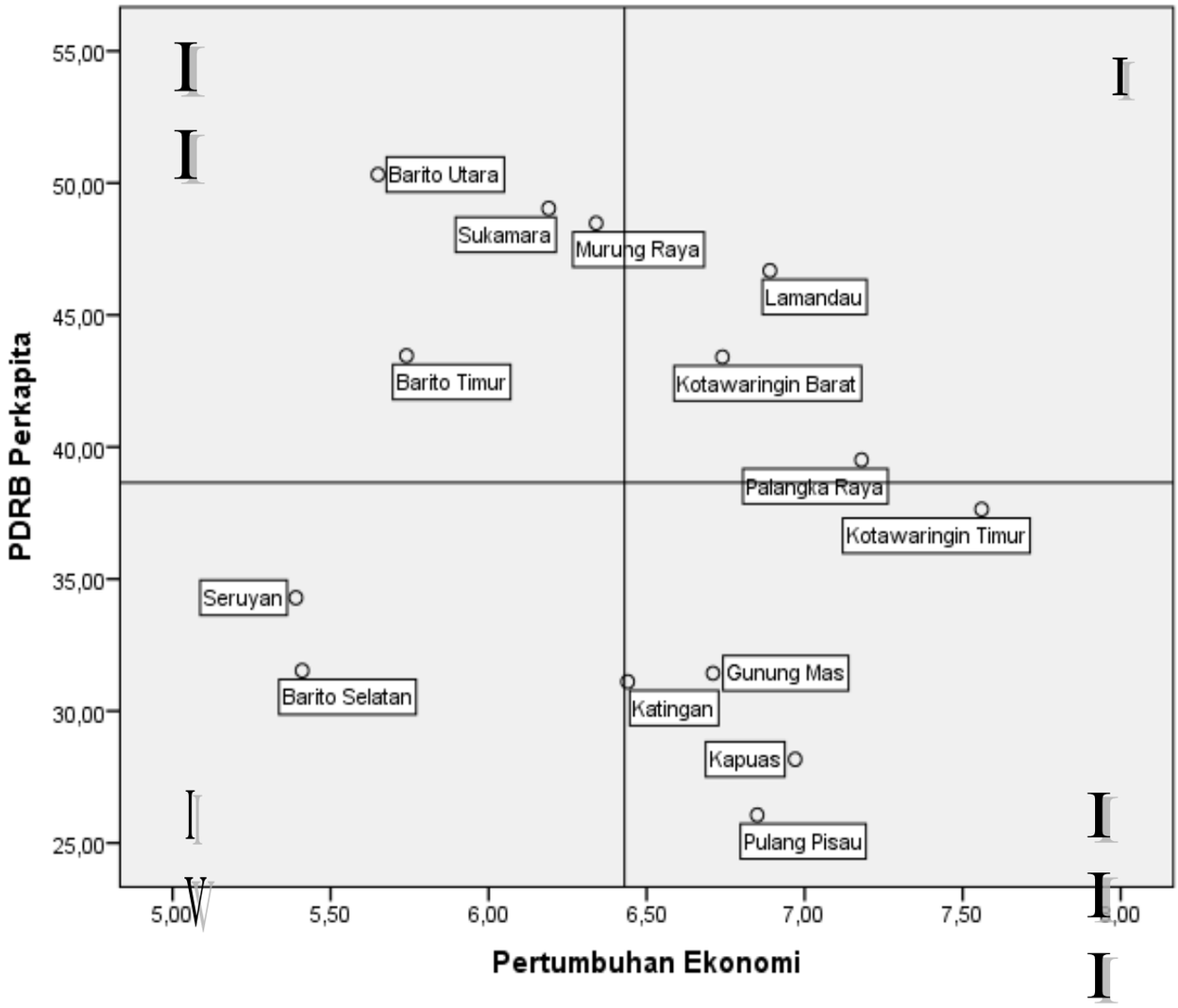
Beberapa indikator untuk mengukur daya saing adalah:

1. Indikator makroekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor.
2. Indikator kualitas infrastruktur. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan sektor infrastruktur, sektor ini diketahui telah mengalami peningkatan dari semula dari peringkat 96 menjadi peringkat 90.
3. Indikator kesehatan dan pendidikan dasar yang meningkat dari peringkat 82 menjadi peringkat 62. Menurut laporan Program (Millenium Development Goals/MDG's), pada 2010 bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama

dalam masalah gizi buruk, kematian ibu sewaktu melahirkan, dan penyakit HIV AIDS.

Secara umum, daya saing dapat dilihat dari posisi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu penilaian yang dilakukan dan dijadikan parameter umum keunggulan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah analisis tipologi klassen. Dengan menggunakan data tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita tahun 2011-2016, hasil analisis Tipologi Klassen terhadap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.25
Hasil Analisis Tipologi Klassen terhadap Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Tengah



Analisis tersebut membagi daerah dalam empat kuadran wilayah, yaitu:

- Kuadran 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.

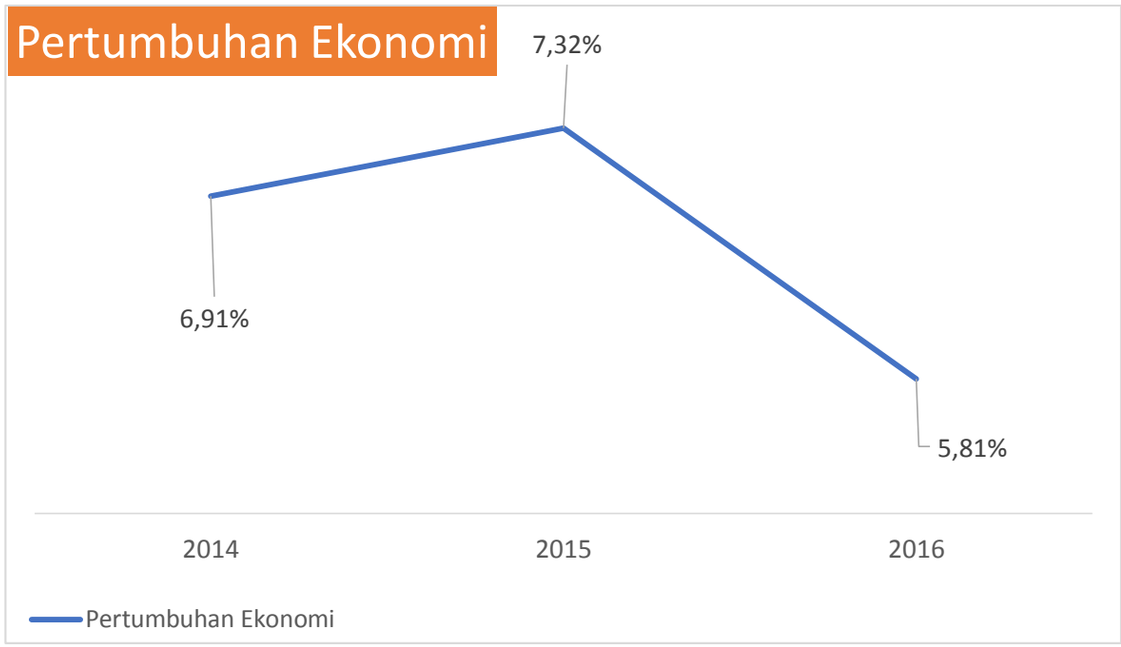
- Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.
- Kuadran 4. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Hasil analisis Tipologi Klassen di atas menunjukkan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam kuadran I, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan tingkat pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kondisi saat ini, yakni melalui optimalisasi sektor unggulan untuk mendorong peningkatan PDRB di semua sektor.

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 – 2015 meningkat dari 6,91% menjadi 7,32%. Namun pada tahun 2015 – 2016 terjadi penurunan dari 7,32% menjadi 5,81%.



Gambar 2. 26: Pertumbuhan Ekonomi

2.5.1.2. Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Salah satu misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup”, menyiratkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan adanya upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemandirian ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian.

Pada Tahun 2016 Sektor Pertanian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebesar 24,13 persen,meskipun kontribusinya dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 68 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor Pertanian, terhadap PDRB (%)	27,70	26,35	25,88	24,36	24,13

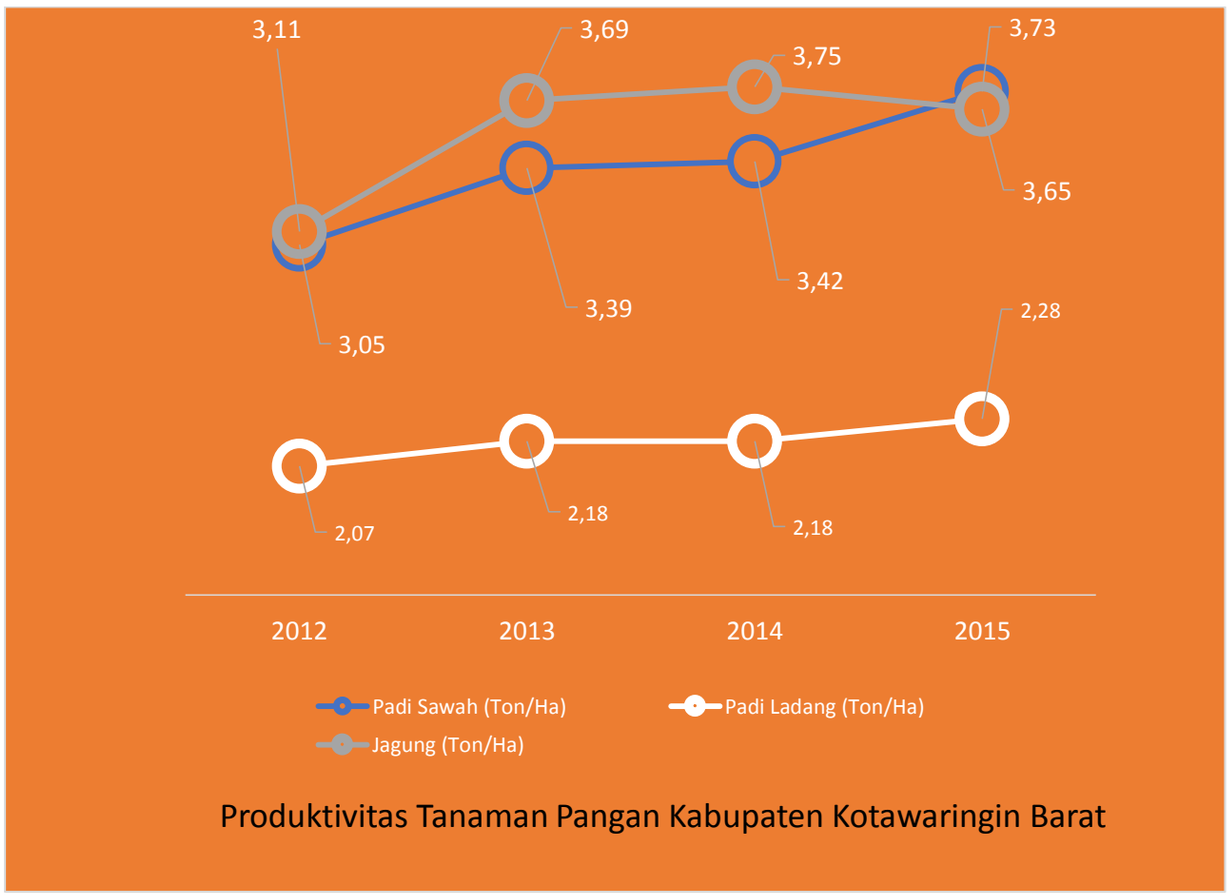
Sumber : Publikasi BPS Kab. Kotawaringin Barat 2017

Tabel 2.69: Capaian kinerja Urusan Pertanian di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 -2016

No	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	***Luas tanam tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ha)	7.033	7.403	7.251	7.200	7.848	6.866	8.453	5.412	9.065	4.209
	Padi ladang (Ha)	3.581	3.895	3.681	3.104	3.781	2.862	3.881	1.454	3.981	746
	Jagung (Ha)	1.272	814	1.336	503	1.402	638	1.472	1.526	1.546	2.438
2,	***Luas Panen Tanaman Pangan***										
	Padi sawah (Ha)	6.681	6.915	6.889	6.823	7.456	6.914	8.030	4.000	8.612	4.731
	Padi ladang (Ha)	3.681	3.368	3.497	2.814	3.592	2.674	3.687	1.664	3.782	1.296
	Jagung (Ha)	1.208	811	1.269	488	1.332	616	1.399	608	1.469	1.171
3.	***Produktivitas tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ton/Ha)	3,05	2,99	3,23	3,39	3,55	3,42	3,79	3,73	4,10	3,63

No	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,07	2,01	2,10	2,18	2,11	2,18	2,12	2,28	2,13	2,05
	Jagung (Ton/Ha)	3,11	3,69	3,16	3.69	3.20	3,75	3,25	3,65	3.30	3,73
4.	***Produksi tanaman pangan***										
	Padi sawah (Ton)	20.385	20.655	22.224	23.130	26.467	23.646	30.435	14.928	35.308	17.174
	Padi ladang (Ton)	7.052	6.769	7.330	6.148	7.579	5.837	7.816	3.797	8.056	2.657
	Jagung (Ton)	3.757	2.991	4.010	1.799	4.262	2.308	4.547	2.219	4.848	4.368

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2. 27: Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian produktivitas tanaman pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produktivitas tanaman padi sawah mencapai 2,99 Ton/Ha, naik menjadi 3,39 Ton/Ha pada tahun 2013, di tahun 2014 naik menjadi 3,42 Ton/Ha dan terus meningkat hingga mencapai 3,73 Ton/Ha pada tahun 2015. Tanaman padi ladang juga mengalami peningkatan capaian produktivitas dari 2,01 Ton/Ha pada tahun 2012, menjadi 2,28 Ton/Ha pada tahun 2015. Capaian prooduktivitas tanaman jagung pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 3,69 Ton/Ha, lalu mengalami peningkatan hingga 3,73 Ton/Ha pada tahun 2016.

Tabel 2. 70: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Kontribusi sub sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (%)		24,69		23,36		22,96		21,56	-	21,25
2.	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	57.306.735	263.608.993,65	161.306.735,49	263.608.993,65	161.306.735,49	31.074.462,39	199.182	189.439,16	-	189.439,16
3.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	66.320	50.545	67.820	48.018	67.820	48.018	79.820	55.160	-	55.160
4.	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	1	1	1	-	1	15	-	15
5.	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Milyar Rupiah)	11.000.000.000	14.152.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	12.000.000.000	14.670.000.000	3.000.000.000	12.447.807.384	-	12.447.807.384
6.	Kemitraan/Plasma	20.000	23.957,91	25.958,00	28,785,91	25.957,91	32.634.59	25.958,00	28.785,91	-	28.785,91
7.	Pengembangan/ perluasan areal perkebunan	217.436,00	233.447,42	219.753,00	204.868,62	219.753,29	192.846,56	225.833,00	212.426	-	212.426
a.	Karet	17.034	17.407	17.434	17.451,50	17.834	17.907	18.284	14.560,30	-	14.560,30
b.	Kelapa sawit	197.909	213.547,21	199.909	184.695,33	199.909	173.048,34	204.909	196.541,30	-	196.541,30
c.	Kelapa	1.161	1.181,51	1.177	1.176,51	1.176,51	1.069,52	1.205	738,75	-	738,75
d.	Lada	1.012	970,20	875	875,20	875,20	578,20	1.042	318,6	-	318,6
e.	Lainnya	320	341,5	358,58	313,50	358,58	243,50	394	267,51	-	267,51
8.	Produksi komoditi perkebunan	3.815.537	3.908.557	4.103.985	3.029.378	4.103.985	3.593.559	16.402	2.981.823,68	-	2.981.823,68
a.	Karet (lump)	14.750	6.481,13	6.805,19	8.012,06	6.805,19	7.619,19	15.600	7.253,83	-	7.253,83
b.	Kelapa (kopra)	342	356,23	374,04	358,57	374,04	343,83	347	265,45	-	265,45
c.	Kelapa Sawit (Tbs)	3.800.000	3.901.270,81	4.096.334,35	3.020.668,88	4.096.334,35	3.585.307,15	.550.000	2.974.134,28	-	2.974.134,28
d.	Lada (putih/hitam)	425	426,98	448,33	316,81	448,33	268,95	432	156,49	-	156,49
e.	Lainnya	20,15	22,30	23,40	21,50	23,4	20,24	23,40	13,63	-	13,63

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015

Sub Sektor Tanaman Perkebunan yang merupakan komponen dari Sektor Pertanian menjadi penyumbang kontribusi yang paling besar setelah Industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu tercatat sebesar 21,25 persen pada tahun 2016. Melihat fenomena ini bisa dikatakan bahwa sub sektor tanaman perkebunan (terutama kelapa sawit) sangat mempengaruhi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat. Apabila golongan ini mengalami gangguan maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

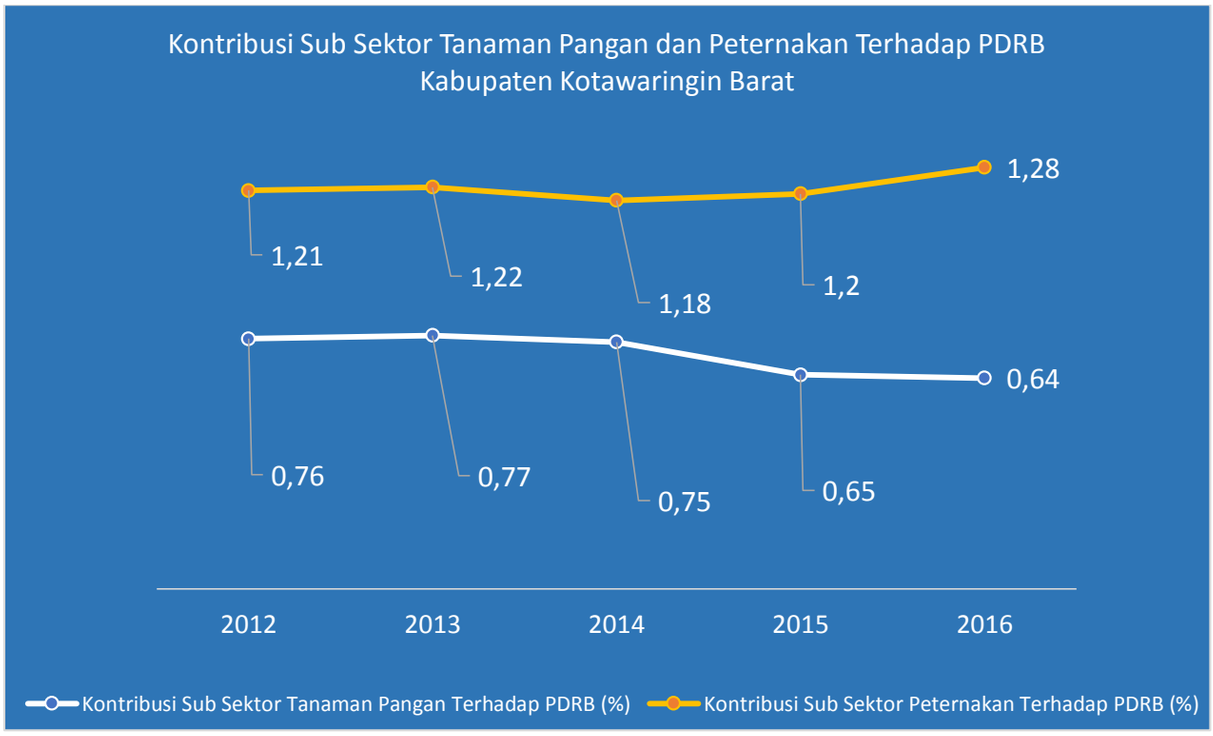
Produksi perkebunan per komoditi dari 2012 – 2015 terjadi penurunan pada semua komoditi di sebabkan karena pengaruh musim kemarau panjang., Penurunan produksi komoditas kelapa dalam lebih disebabkan oleh umur tanaman sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

Tabel 2.71: Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan RPJMD 2012- 2016

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	***Populasi Ternak***										
	Sapi (ekor)	12.809	11.797	14.681	11.148	16.777	13.155	18.726	14.397	20.872	17.203
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.086	2.097	2.225	2.118	2.373	2.398	2.530	2.764	2.699	2.538
	Babi (ekor)	5.009	5.025	5.371	5.327	5.761	5.498	6.178	5.718	6.625	5.881
	Ayam buras (ekor)	314.257	315.121	354.482	342.230	399.856	343.941	451.037	345.661	508.770	346.843
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	-	-	-	38.000	46.500	-	50.794
	Ayam ras pedaging (ekor)	165.668	157.466	183.461	163.699	203.164	166.973	224.984	158.253	249.148	210.115
	Itik (ekor)	37.959	38.055	40.355	39.708	42.901	40.317	45.608	41.527	48.485	42.574
2.	***Produksi Daging Ternak***										
	Sapi (Ton)	561,30	565,64	591,81	551,99	623,29	552,96	694,99	572,24	737,42	625,86
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing / Domba(Ton)	48,76	49,01	51,60	49,43	54,61	49,62	57,79	58,14	61,16	33,02
	Babi (Ton)	96,40	87,81	102,28	94,00	108,52	93,25	115,14	94,47	122,16	86,53
	Ayam buras (Ton)	320,51	289,47	354,48	317,36	393,64	388,09	435,95	340,50	482,82	400,6
	Ayam Ras Petelur (Ton)		-	-	-	-	-	-	-	-	20,39
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	766,60	807,73	839,04	885,56	839,86	886,34	892,1	817,78	947,59	1.031,75
	Itik (Ton)	13,05	14,38	13,70	15,77	14,41	17,78	15,14	14,12	15,9	17,09
3.	***Produksi Telur***										
	Ayam buras (Ton)	199,81	189,45	224,08	207,98	251,31	208,76	281,84	207,98	316,09	212,71
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	-	-	171,00	209,25	-	366,39
	Itik (Ton)	127,87	124,97	138,13	133	149,20	133,42	161,17	133,19	174,09	179,97
4.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	-	0,76	-	0,77	-	075	-	0,65	-	0,64

No.	Indikator Kinerja RPJMD 2012-2016	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5.	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	-	1,21	-	1,22	-	1,18	-	1,20	-	1,28
6.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	-	29,80	-	28,32	-	27,70	-	26,38	-	26,06

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2. 28: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Peternakan Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Populasi sapi potong dari tahun 2012–2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,70%, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah populasi bila dibandingkan pada tahun 2012 yang disebabkan adanya mutasi ternak sapi ke luar daerah.

Populasi ternak kambing/domba dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 9,83%, Populasi ternak babi dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 4,41%, lokasi pengembangan terbesar berada di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Populasi ternak unggas dari tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami peningkatan populasi sebesar 3,32%, dan tahun 2015 populasi ayam ras petelur mulai diusahakan dengan sekala ekonomis dengan populasi sebesar 46.500 ekor. melampau target populasi sebesar 38.500 ekor atau 122%.

Secara umum populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah ternak sapi, kambing, ayam petelur dan ayam ras pedaging. Peningkatan populasi sapi, kambing/domba dikarenakan jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalam memelihara ternak sapi juga meningkat, terutama pola pengembangan integrasi sawit-sapi. Populasi ayam petelur mulai tahun 2015 mulai meningkat karena banyak masyarakat yang berminat usaha ayam petelur yang lebih menguntungkan.

Selanjutnya dari sisi produksi nampak bahwa produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat terus naik dari tahun ke tahun. Produksi daging mengalami peningkatan disebabkan populasi sapi, kambing/domba, babi, ayam ras pedaging meningkat, sedangkan produksi telur berfluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2012-2015. Produksi telur ayam buras sempat mengalami penurunan pada Tahun 2015 karena banyak ayam buras yang tidak sedang dalam masa produksi, namun pada Tahun 2015 produksi telur mengalami peningkatkan dikarenakan populasi ayam petelur meningkat.

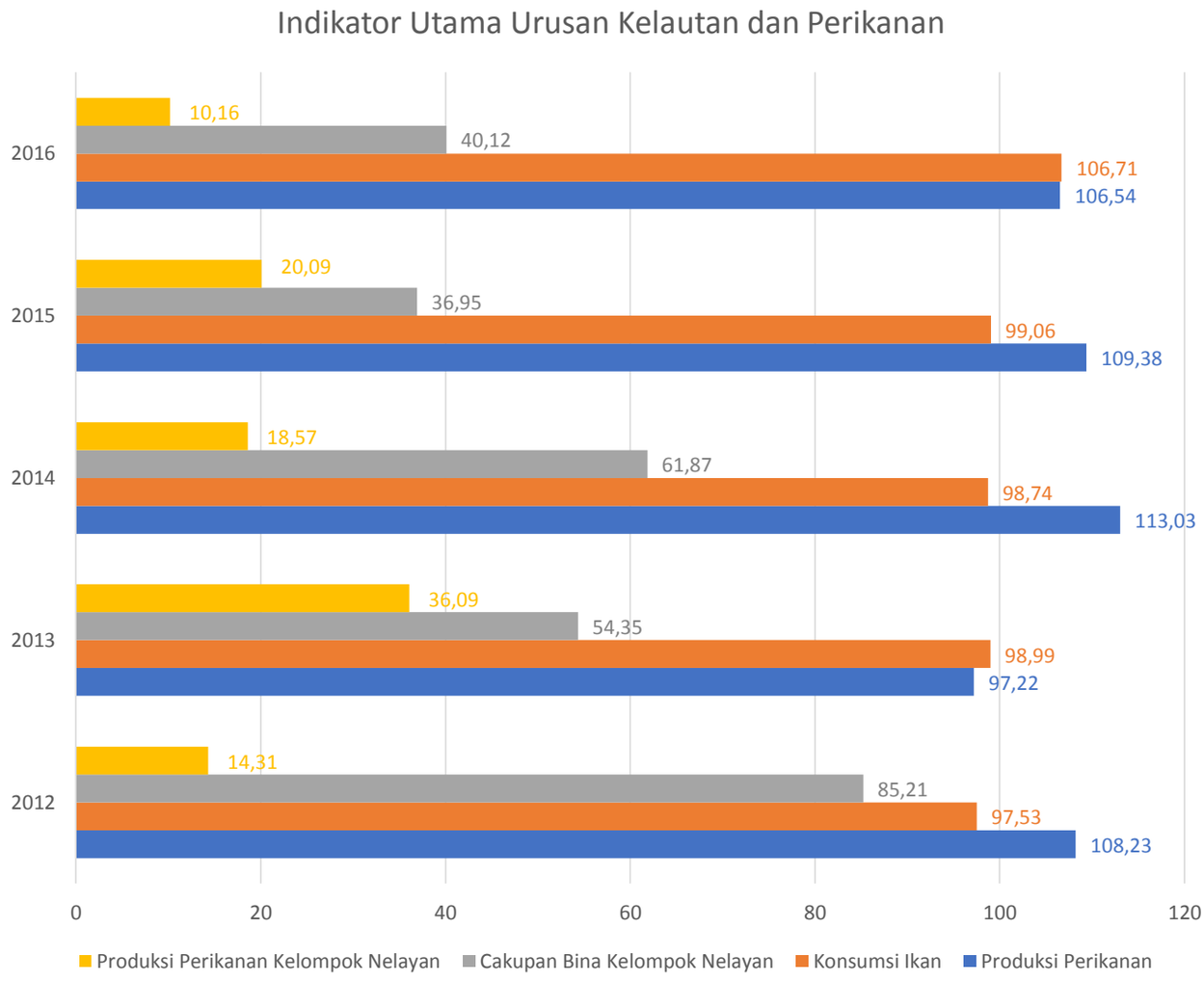
2.5.1.3. Perikanan dan Kelautan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2012 sampai 2016 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.72: Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan	Capaian Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	108,23	97,22	113,03	109,38	106,54
2.	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	97,53	98,99	98,74	99,06	106,71
3.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	85,21	54,35	61,87	36,95	40,12
4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	14,31	36,00	18,57	20,09	10,16

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017



Gambar 2.29: Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuatif dimana terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 106,71 pada tahun 2016. Pada indikator cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan pernah mencatat angka tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 85,21 %.Kondisi yang sama juga terjadi pada Produksi Perikanan Kelompok dimana pada tahun 2013 menunjukkan capaian tertinggi sebesar 36,09 % dan pada tahun 2016 capaiannya mengalami penurunan menjadi 10,16 %.

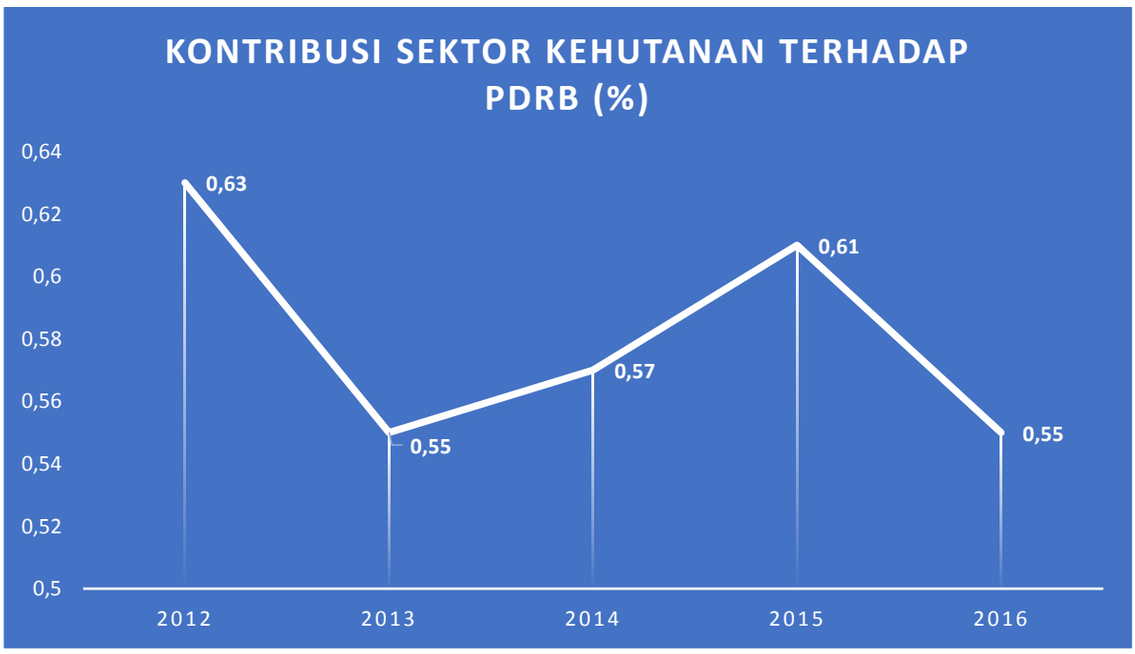
Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Luas Areal Penangkapan ikan di perairan umum yang mencapai 135.00 Ha, Potensi Perikanan Lestari 50% /tahun : (48.120 ton/th); dengan rincian Perairan Umum 5.400 ton/th dan Perairan laut 42.720 ton/th, dan Lahan pertambakan udang sebesar 766 Ha.

2.5.1.4. Kehutanan

Tabel 2.73: Data Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Di Kabupaten

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	-	-	-	3,29	-
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-
3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61	0,55
4.	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25	25
5.	Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan (Ha)	1.241,50	292	75	1.400	300

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2.30: Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)

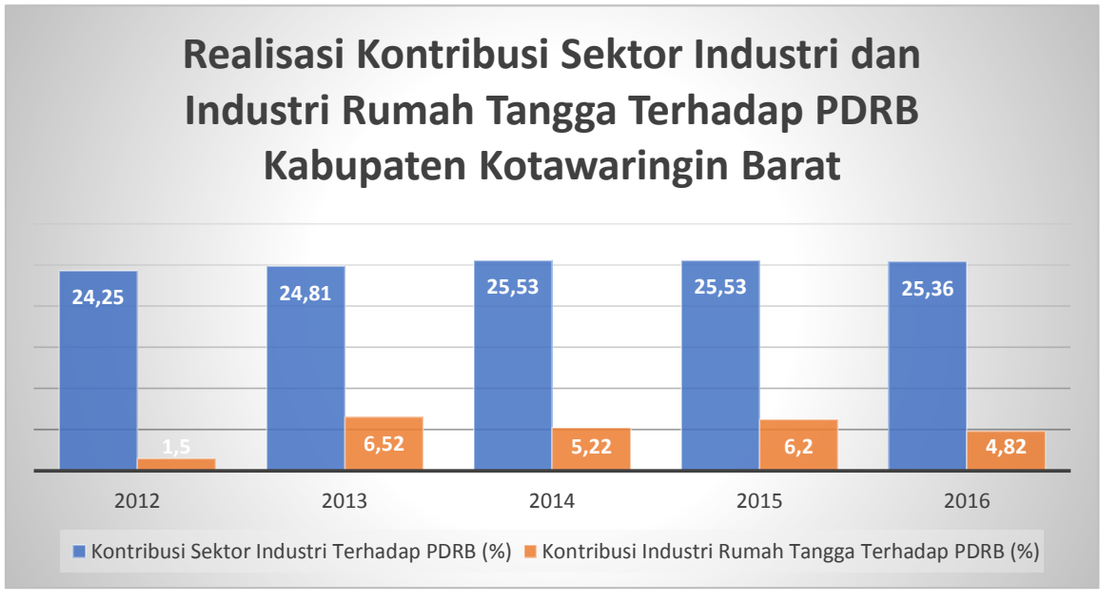
Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi kehutanan yang cukup tinggi, dengan luas potensi hutan mencapai 985.437 Ha. Hutan rakyat dan lahan terbuka hijau terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013, yaitu sebanyak 100 Ha pada tahun 2014 dan 155,25 Ha pada tahun 2015. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kondisi yang fluktuatif, mengalami peningkatan dan penurunan.

2.5.1.5. Industri

Tabel 2.74: Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target di RPJMD Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,25	24.25	15,30	24,81	25.43	25,53	15,35	25,53	-	25,36
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,3	1,5	1,35	6,52	6,2	5,22	1,4	6,2	-	4,82
3.	Pertumbuhan Industri (unit)	2,17	71	2,18	28	43	55	2,19	43	-	17
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (Klpk)	12	3	12	7	19	16	12	19	-	0

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016



Gambar 2.31: Realisasi Kontribusi Sektor Industri dan Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 24,25%, meningkat pada tahun 2013 menjadi 24,81%, tahun 2014 dan 2015 mencapai 25,53%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 25,36%. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri mengalami peningkatan secara drastis dari 1,5% pada tahun 2012 menjadi 6,52% pada tahun 2013. Namun, penurunan terjadi di tahun 2014 menjadi 5,22% dan kembali meningkat menjadi 6,2% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 kembali menurun

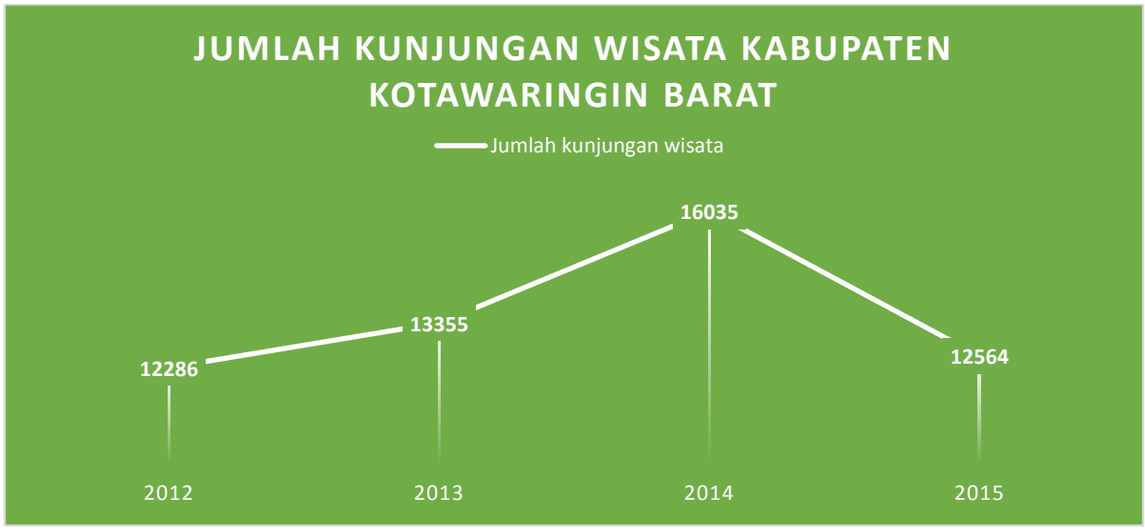
menjadi 4,82%. Pertumbuhan industri bersifat fluktuatif hingga pada 2016 mencapai 17 unit. Sedangkan, cakupan bina kelompok pengrajin terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19 kelompok pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016 belum terdata.

2.5.1.6. Pariwisata

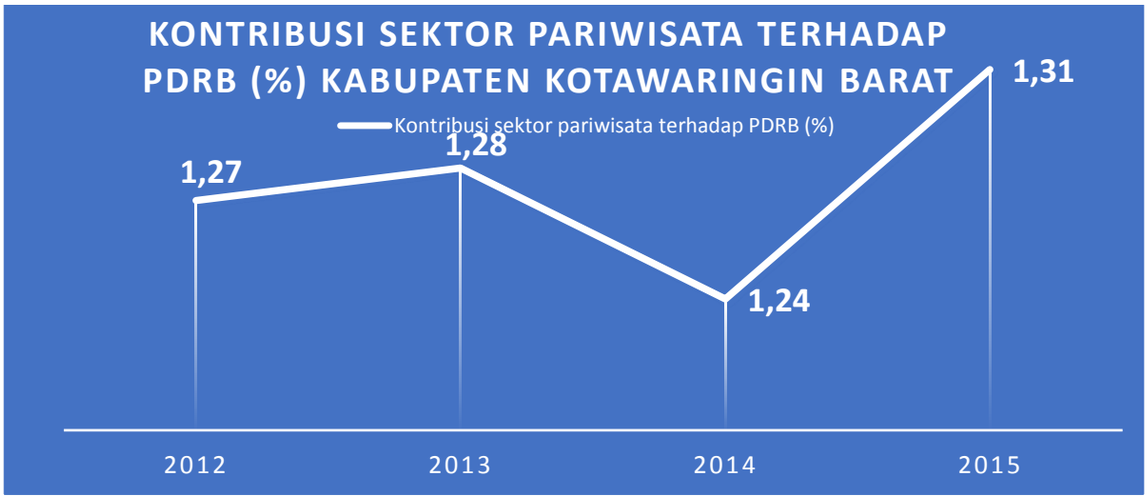
Tabel 2.75: Indikator Kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan RPJMD 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target RPJMD	Capaian Kinerja				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	29.400	12.286	13.355	16.035	12.564	15.106
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	-	1,27	1,28	1,24	1,31	-

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015



Gambar 2.32: Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2.33: Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) kab. Kotawaringin Barat

Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan jumlah kunjungan mencapai 12.564 orang. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 meningkat sebanyak 0,01% dari tahun sebelumnya, kemudian menurun sebanyak 0,04% di tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 0,07% di tahun 2015 mencapai 1,31%.

2.5.1.7. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.mencerminkan kemampuan petani. Angka NTP di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.76: Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	**Nilai Tukar Petani**	*98,66*	*102,41*	*98,69*	*97,74*	*98,81*

Sumber : BPS Prov.Kalteng Tahun 2012-2016

2.5.1.8. Angka Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.77: Angka Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2012-2016 dalam (000)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pengeluaran RT rata-rata (pangan)	5.936,56	5.744,72	5.808,72	5.782,26	7.311,375
2	Pengeluaran RT rata-rata (non pangan)	5.870,44	6.112,28	6.099,28	6.196,74	7.238,63
3	Total Pengeluaran RT	11.807,00	11.857,00	11.908,00	11.979,00	14.550,00

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
4	Jumlah RT	64.546	68.600	70.865	72.886	75.133
5	Rasio (1/2)	101,13%	93,99%	95,24%	93,31%	101,01%

Sumber : Statistik Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2013-2017

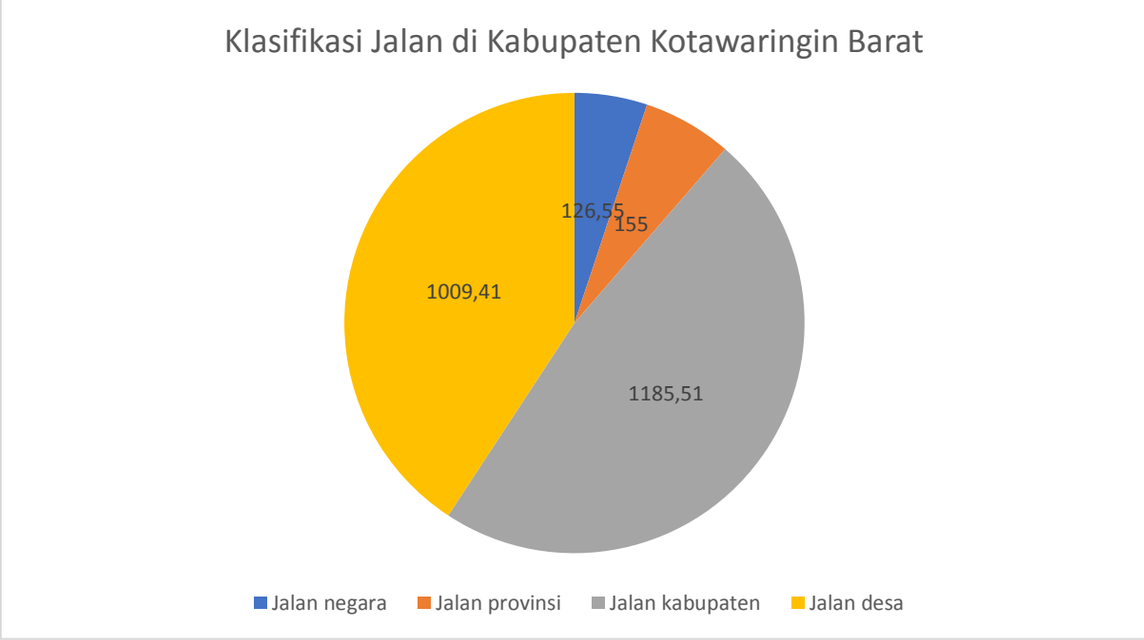
2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.5.2.1. Perhubungan

Tabel 2.78:Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Statusnya Tahun 2012 – 2016

No.	Klasifikasi Jalan	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
1	Jalan negara	126,55	5,11	148,56	6,02	148,56	6,02	156,96	6,36	156,96	6,35
2	Jalan provinsi	155	6,26	63,70	2,58	63,70	2,58	55,40	2,24	55,40	2,24
3	Jalan kabupaten	1.185,51	47,87	1.220,95	49,51	1.222,84	49,51	1.222,84	49,51	1.224,37	49,55
4	Jalan desa	1.009,41	40,76	1.033.02	41,89	1.034,55	41,89	1.034,55	41,89	1.034,09	41,85
Jumlah		**2.476,67**	**100**	**2.466,23**	**100**	**2.469,65**	**100**	**2.469,75**	**100**	**2.470,82**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017



Gambar 2. 34: Klasifikasi Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Panjang Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 jumlah Panjang jalan menurun sebesar 10,44 km dari tahun sebelumnya, lalu meningkat sebanyak 3,52 km hingga tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan sebanyak 1,07 km di tahun 2016 dengan total Panjang jalan sebesar 2.470,82 km.

Tabel 2.79: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2012 - 2016

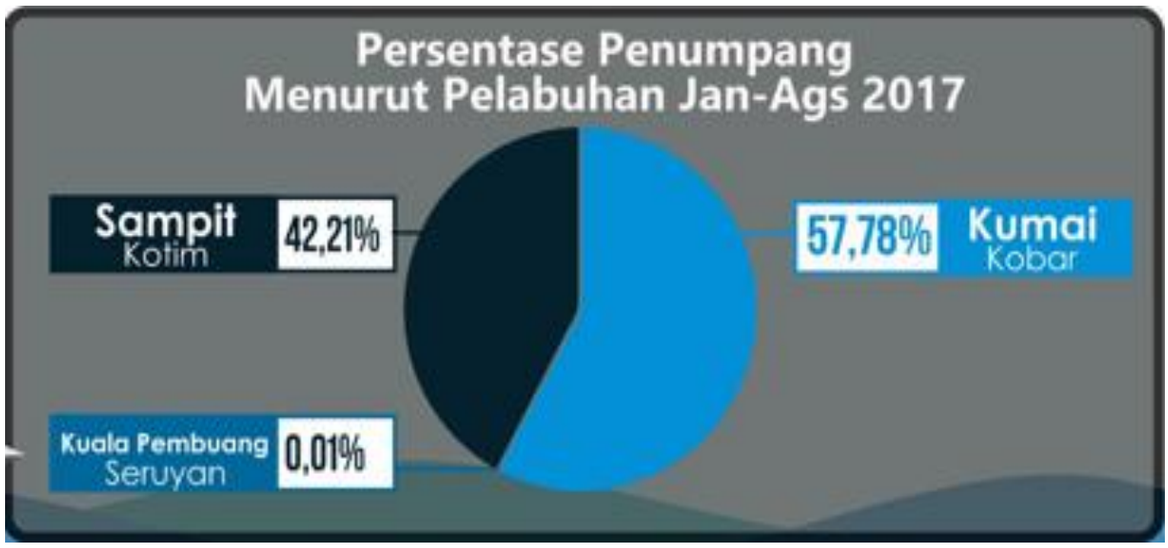
No.	Indikator	Tingkat Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	4
3.	Jumlah Terminal	4	4	4	4	4
4.	Jumlah Halte	11	11	11	12	12
5.	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3	3
6.	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	9	9
7.	Jumlah Dermaga LLASDP	16	16	17	19	22
8.	Jumlah Trayek LLASDP	3	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Barat



Gambar 2. 35. Persentase Penumpang Penerbangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki satu bandara dengan persentase penumpang mencapai 33,61% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.36. Persentase Penumpang Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tiga pelabuhan laut, salah satu pelabuhan yaitu Pelabuhan Kumai memiliki persentase penumpang mencapai 57,78% dari total penumpang di Provinsi Kalimantan Tengah.

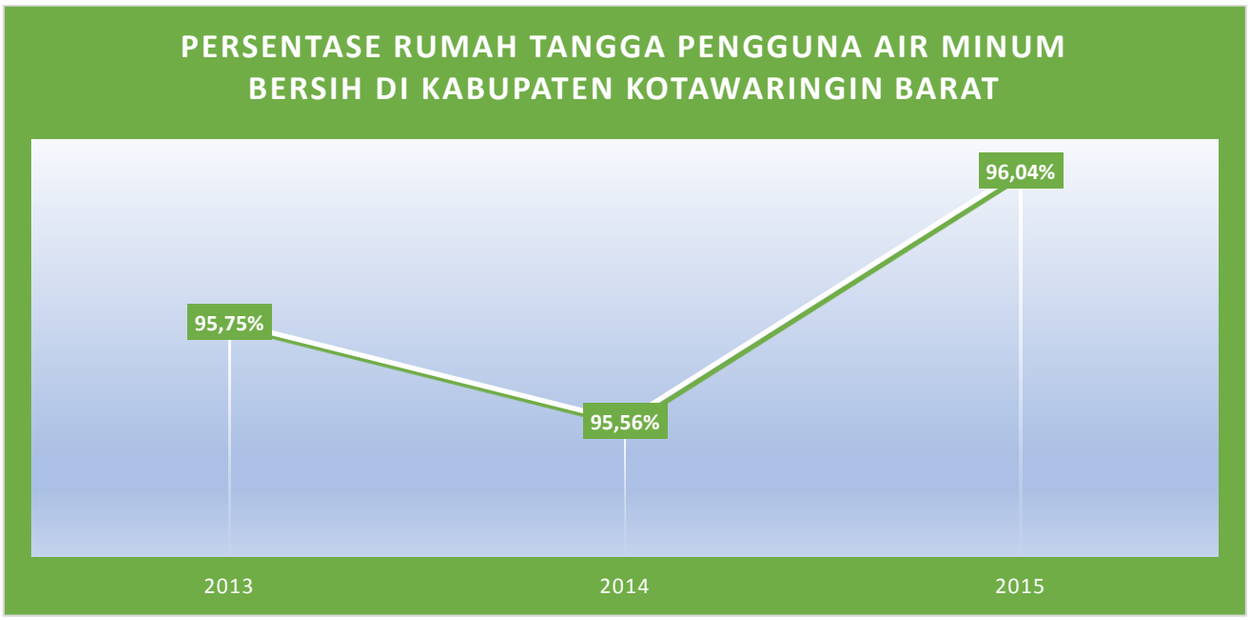
2.5.2.2. Air Bersih Dan Listrik

Tabel 2.80: Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2012 – 2016

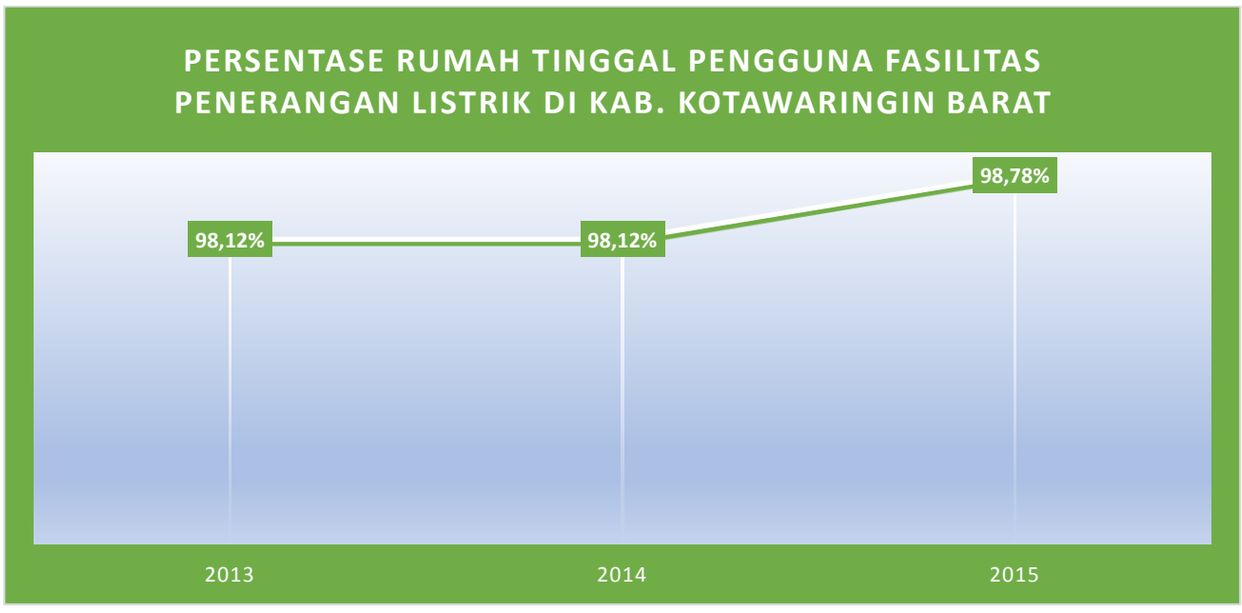
No	Urusan Pemerintahan / Indikator kinerja	Capaian Kinerja					Target di akhir tahun RPJMD	Interpretasi
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	91,08	95,75	95,56	96,04	83,76	90	Belum tercapai
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	78,40	76,29	81,63	86,43	86,49	97,79	Belum tercapai
3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	95,73	98,12	98,12	98,78	98,79	80	Melampaui
4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	3,35	3,34	3,10	2,74	1,99	2,5	Melampaui
5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah	96,65	96,66	96,90	97,26	98,01	97,50	Melampaui

Sumber : Dinas PU dan BPS Kab. Ktw Barat

6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok	43,20	47,92	50,19	55,19	62,07	75	Belum tercapai
7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,65	Melampaui
8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	Sesuai
9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,06	0,1	0,12	0,09	0,14	Belum Tercapai



Gambar 2.37: Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 2.38: Persentase Rumah Tinggal Pengguna Fasilitas Penerangan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat diperlukan indikator-indikator kinerja yang mampu mendukung sasaran pembangunan tersebut. Presentase rumah tangga pengguna air minum bersih merupakan salah satu indikatornya. Tahun 2013 – 2015 presentase rumah tangga pengguna air minum bersih Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada angka 95,56 – 96,04 dengan target pada RPJMD di angka 90. Secara interpretasi pencapaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Itu artinya standar hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal penggunaan air minum bersih sudah sangat baik dan sadar akan pentingnya mengkonsumsi air bersih. Sementara untuk indikator persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik dari tahun 2013 – 2015 mengalami kenaikan dari 98,12 menjadi 98,78 dan berhasil melampaui target pada RPJMD di angka 80. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan akses listrik.

Tabel 2.81: Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pelanggan (RT)	47.034,00	47.034,00	54.750,00	129.242,00	-
2	Daya Tersambung (Kva)	55.062,12	55.062,12	66.942,57	66.942,57	-
3	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	-	98,12	98,12	98,78	98,80
4	Jumlah Rumah Tangga	64.546,00	68.600,00	70.865,00	72.886,00	75.133,00
5	Rasio Elektrifikasi	-	-	-	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Diolah)

Tabel 2.82: Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Umum (Pemerintah dan Swasta)	12	12	11	11	13
2	BPR	2	2	3	3	3
3	Jumlah	14	14	14	14	16

Sumber: Statistik Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Diolah)

Tabel 2.83: Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016*
1.	Jenis dan jumlah restoran	-	-	-	-	163
	- restoran	-	-	-	-	
	- rumah makan	-	-	-	-	
2.	Jenis dan Jumlah hotel	30	30	30	30	30
	- hotel berbintang	2	2	2	3	3
	- hotel melati	28	28	28	27	27

Sumber: LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (diolah)

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk kesuatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.Daya saing investasisuatu daerah tidak terjadi dengan serta merta.Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus – menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemudahan perijinan,keamanan dan ketertiban daerah.

2.5.3.1. Kriminalitas

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, pada tahun 2014 di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat naiknya jumlah demo, namun hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, karena menyangkut beberapa peraturan baik di pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Berikut tabel kondisi iklim investasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.84 Angka Kriminalitas Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	20	23	28	33	59
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	3	2	2	1	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	15	30	20	19	17
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	17	30	19	21	22
5	Jumlah Kasus Pencurian	114	76	118	90	110
6	Jumlah Kasus Penipuan	5	19	11	7	10
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1	-	1	-	-
	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	469	425	414	420	453
	Jumlah Demo	6	6	12	2	5
	Jumlah Penduduk	252.999	261.200	269.629	278.141	286.714
	Angka Kriminal	18,54	16,27	15,35	15,10	15,80

Sumber : Polres Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tabel 2.85 Jumlah dan Jenis Perda Yang Mendukung Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah					
	- Pajak Daerah	9	10	11	11	11
	- Retribusi	-	-	-	-	19
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	9	10	11	11	11

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat 2012-2016 (diolah)

2.5.3.2. Perkembangan Investasi

Tabel 2.86: Perkembangan Investasi 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	PMDN (Rp)	5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	3.710.499.700.000
2.	PMA ($)	619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	1.996.616,40

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat 2012-2016 (diolah)

2.5.3.3. Desa Berstatus Swasembada

Tabel 2.87: Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Desa	81	81	81	81	81
2	Desa Swasembada	-	-	-	-	-
3	Persentase (2/1)*100%	-	-	-	-	-

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat 2012-2016 (diolah)

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

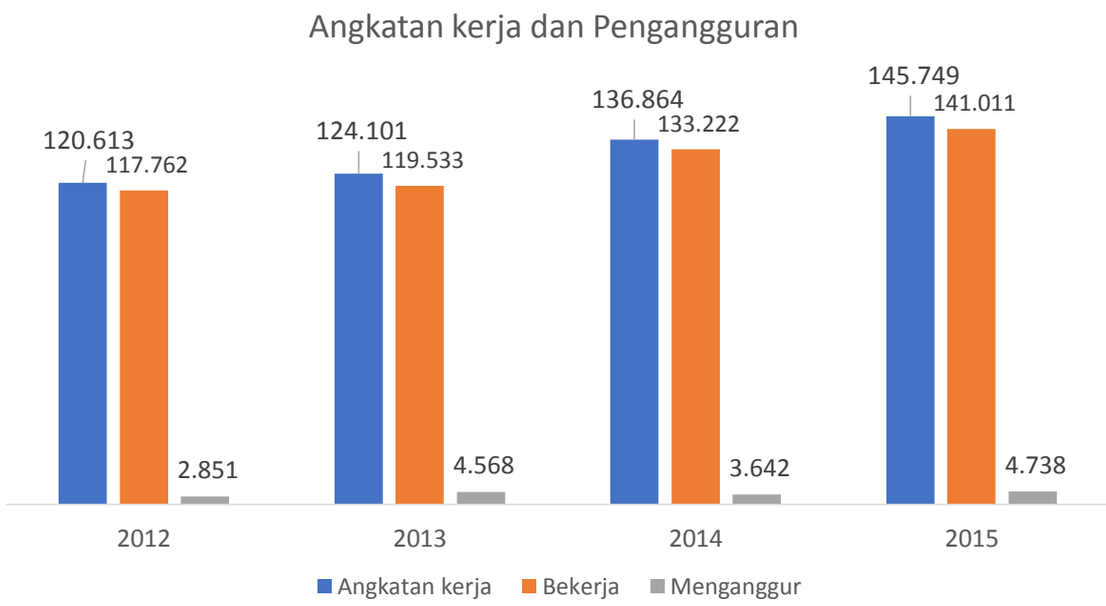
2.5.4.1. Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dari data pada tahun 2012 – 2016 jumlah daya serap masyarakat yang bekerja dari kategori angkatan kerja Kabupaten Kotawaringin Barat cukup baik. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dari tahun 2012 hingga 2016 yang diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.88: Capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2016 berdasarkan Indikator RPJMD 2012-2016

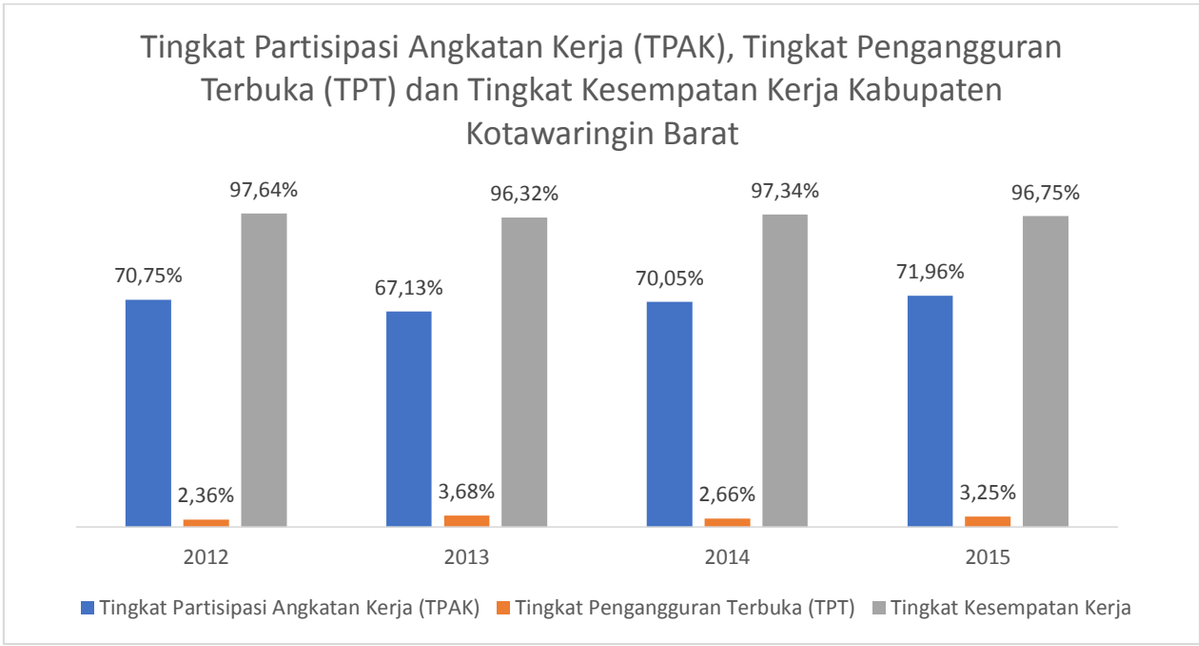
No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545	209.717
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749	155.605
3.	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	133.222	141.011	150.689
4.	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738	4.916
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,75 %	67,13 %	70,05%	71,96 %	74,19
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,36	3,68	2,66	3,25	3,16
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,64	96,32	97,33	96,45	96,84
8.	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56,796	54.112
9.	Sekolah	11.158	15.141	17.465	18.956	18.981
10.	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	36.698	29.366
11.	Lainnya	3.421	5.886	5.446	6.346	5.765

Sumber : LKPJ Bupati Ktw. Barat Tahun 2012-2016 (diolah)



Gambar 2.39: Angkatan kerja dan Pengangguran

Angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berhasil ditekan secara signifikan. Terlihat dari tahun 2012 – 2013 jumlah penduduk yang menganggur justru mengalami kenaikan dari 2.851 ke 4.568 kemudian dari tahun 2013 – 2014 mengalami penurunan dari 4.568 ke 3.642 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2014 – 2015 yaitu dari 3.642 ke 4.738.



Gambar 2.40: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2014, TPAK Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat 2,92% dari tahun berikutnya dan kembali

mengalami peningkatan sebanyak 1,91% di tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, TPT sempat mengalami penurunan sebanyak 1,02% dari tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebanyak 0,59% di tahun 2015. Kondisi yang fluktuatif seperti ini disebabkan penyerapan tenaga kerja penduduk usia kerja belum maksimal.

2.5.4.2. Rasio Ketergantungan

Tabel 2.89: Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	75.900	73.223	75.312	76.705	77.951
2	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	5.490	6.382	7.157	7.535	7.952
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 dan 2)	81.390	81.618	82.469	84.240	85.903
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	171.610	163.525	187.160	193.901	200.811
5	Rasio Ketergantungan (3/4)	47,43%	49,91%	44,06%	43,44%	42,78%

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012-2016 (diolah)

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka rasio ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 42,78% pada tahun 2016.

2.5.4.3. Rasio Lulusan

Tabel 2.90: Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	7.187	7.886	6.467	6.741	7.451
2.	Jumlah lulusan S2	203	227	185	212	249
3.	Jumlah lulusan S3	2	4	2	2	3
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	7.392	8.117	6.654	6.955	7.703

5.	Jumlah Penduduk *)	252.999	261.200	269.629	278.141	286.714
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	292,18	310,76	246,78	250,05	268,66

Sumber : LKPJ Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2012-2015 (diolah)

2.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pembangunan

Berdasarkan uraian capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, secara singkat rekapitulasi capaian kinerja pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.91: Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1)	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1.1	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1.1	**Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah , Kepegawaian dan Persandian**							
1.1.1.1	**Pertumbuhan PDRB**	6,7	6,99	6,9	7,32	5,81	7,32	<
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,03	3,17	6,89	5,86	5,73	5,86	<
	Pertambangan dan Penggalian	5,72	7,18	(-11,04)	0,70	5,90	0,70	>
	Indsutri pengolahan	6,22	7,60	7,92	6,81	5,23	6,81	<
	Pengadaan Listrik dan Gas	9,66	8,86	10,94	17,96	3,65	17,96	<
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,56	4,94	9,54	8,20	5,03	8,20	<
	Konstruksi	7,97	9,44	6,73	8,69	5,48	8,69	<
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,44	7,24	4,90	8,67	7,08	8,67	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Transportasi dan Pergudangan	8,39	14,02	5,16	7,87	5,73	7,87	<
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	8,04	8,96	9,18	8,84	9,18	<
	Informasi dan Komunikasi	10,09	6,39	8,20	7,68	7,77	7,68	>
	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,19	10,03	13,16	10,29	6,23	10,29	<
	Real Estate	9,74	9,37	9,14	8,78	6,53	8,78	<
	Jasa Perusahaan	9,48	9,90	7,95	7,09	4,15	7,09	<
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,02	9,70	9,76	5,84	9,76	<
	Jasa Pendidikan	2,32	6,51	7,17	8,05	4,06	8,05	<
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,77	7,42	6,86	4,39	6,86	<
	Jasa Lainnya	6,93	5,56	5,83	8,05	6,96	8,05	<
1.1.1.2	**Inflasi**	5,58	3,99	6,29	7,97	4,08	3	<
1.1.1.3	**PDRB Perkapita (ADHB)**	36.240.949,8	39.459.730,09	43.699.763,38	47.127.461,97	50.523.940,23	47.127. 461,97	>
	PDRB Perkapita (ADHK)	32.566.379,45	33.748.407,35	34.948.761,82	36.358.226,94	37.319.202,41	36.358. 226,94	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.1.1.3.1	**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam Juta Rupiah**	9.168.960,20	10.306.881,50	11.782.723,50	13.106.339,40	14.485.921,00	14.578.644,10	<
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.732.704,70	2.918.476,20	3.275.175,00	3.453.449,60	3.775.183,90	3.641.428,06	>
	Pertambangan dan Penggalian	165.002,90	180.262,90	170.779,90	178.541,20	199.976,10	186.655,22	>
	Indsutri pengolahan	2.223.038,10	2.557.543,40	3.007.665,60	3.345.999,40	3.674.222,60	3.722.392,54	<
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.453,00	3.545,10	4.230,70	6.437,00	6.854,60	9.793,88	<
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.574,30	8.350,20	10.009,40	11.492,40	12.468,10	13.195,12	<
	Konstruksi	748.255,70	853.762,50	971.321,70	1.103.333,40	1.228.807,50	1.253.286,72	<
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.092.119,70	1.229.551,70	1.414.215,00	1.644.760,60	1.835.617,60	1.912.889,79	<
	Transportasi dan Pergudangan	683.899,10	822.714,60	937.672,80	1.092.337,10	1.217.972,10	1.272.512,48	<
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115.987,70	132.236,80	151.088,90	171.901,20	200.246,80	195.580,37	>
	Informasi dan Komunikasi	90.458,90	99.599,00	116.329,30	128.076,00	139.983,40	141.008,86	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Jasa Keuangan dan Asuransi	429.195,80	502.906,90	603.160,70	693.110,00	761.271,00	796.473,43	<
	Real Estate	165.177,50	188.299,80	203.163,30	240.223,90	272.923,30	284.045,01	<
	Jasa Perusahaan	4.115,30	4.877,20	5.732,50	6.432,20	6.939,10	7.217,30	<
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	283.222,50	331.890,50	375.914,00	419.649,90	470.965,60	468.474,27	>
	Jasa Pendidikan	237.629,60	265.091,50	298.535,60	339.955,80	375.290,80	387.122,83	<
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.504,00	111.058,50	130.909,90	148.270,30	166.715,10	167.932,92	<
	Jasa Lainnya	84.621,50	96.714,70	106.819,20	122.369,40	140.483,20	140.183,32	>
1.1.1.3.2	**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010 dalam Juta Rupiah**	8.239.294,00	8.815.084,00	9.423.199,70	10.112.713,60	10.699.937,80	10.852.964,24	<
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.355.547,20	2.430.133,10	2.597.566,20	2.749.876,50	2.907.562,40	2.911.019,26	<
	Pertambangan dan Penggalian	140.985,40	151.113,20	134.436,50	135.371,60	143.353,10	136.319,20	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Indsutri pengolahan	2.061.316,30	2.217.996,90	2.393.769,80	2.556.754,50	2.690.480,40	2.730. 869,48	<
	Pengadaan Listrik dan Gas	3.894,10	4.239,30	4.703,00	5.547,90	5.750,20	6.544,30	>
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.152,40	7.505,50	8.221,60	8.896,00	9.343,10	9.625,47	<
	Konstruksi	697.800,00	763.670,20	815.094,60	885.898,20	934.460,20	962.882, 75	<
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.007.960,60	1.080.903,70	1.133.837,90	1.232.135,60	1.319.377,50	1.338. 961,76	<
	Transportasi dan Pergudangan	646.977,00	737.655,20	775.715,30	836.753,30	884.708,50	902.605, 78	<
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.906,50	107.934,40	117.608,00	128.405,80	139.756,10	140.193, 45	<
	Informasi dan Komunikasi	88.771,00	94.447,00	102.192,50	110.037,50	118.590,00	118.488, 38	>
	Jasa Keuangan dan Asuransi	367.448,70	404.316,90	457.537,70	504.621,90	536.083,90	556.547, 49	<
	Real Estate	143.252,00	156.668,60	170.990,50	186.011,30	198.148,90	202.343, 09	<
	Jasa Perusahaan	3.672,60	4.036,30	4.357,30	4.666,20	4.859,70	4.997,03	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	242.866,10	259.908,40	285.129,90	312.953,40	331.239,20	343.497,65	<
	Jasa Pendidikan	205.619,40	219.004,20	234.713,20	253.615,90	263.906,90	274.031,98	<
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.312,60	96.579,90	103.746,60	110.859,10	115.724,40	118.464,03	<
	Jasa Lainnya	74.812,10	78.971,20	83.579,10	90.308,90	96.593,30	97.578,77	<
1.1.1.4	**Pertumbuhan Ekonomi**							
1.1.1.4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	6,70	6,99	6,91	7,30	5,81	7,3	<
1.1.1.4.2	Pertumbuhan Ekonomi Prop. Kalteng	6,87	7,37	6,21	7,01	6,36	-	-
1.1.1.4.3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	6,23	5,78	5,02	4,79	5,02	-	-
1.1.1.5	**Indikator Kemiskinan**							
1.1.1.5.1	Garis Kemiskinan (Rp)	263.840	273.467	279.080	293.436	319.064	-	-
1.1.1.5.2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	14.244	14.209	14.209	14.102	14.221	-	-
1.1.1.5.3	Angka Kemiskinan (%)	5,63	5,44	5,27	5,07	4,96	2	<
1.1.1.6	**Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Kotawaringin Barat 2011 - 2015**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.1.1.6.1	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	170.468	184.860	195.373	202.545	209.738	209.738	=
1.1.1.6.2	Angkatan Kerja (jiwa)	120.613	124.101	136.864	145.749	155.605	-	-
1.1.1.6.3	Bekerja (jiwa)	117.762	119.533	132.222	141.011	150.689	-	-
1.1.1.6.4	Menganggur (jiwa)	2.851	4.568	3.642	4.738	4.916	-	-
1.1.1.6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,75	6.713	70,05	71,96	74,20	80	<
1.1.1.6.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,36	3,68	2,66	3,25	3,16	2	>
1.1.1.6.7	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	97,64	96,32	97,33	96,75	96,84	-	-
1.1.1.6.8	Bukan Angkatan Kerja	49.855	60.759	58.509	56.796	54.112	-	-
1.1.1.6.9	Sekolah	11.158	15.141	17.465	14.855	18.981	-	-
1.1.1.6.10	Mengurus Rumah Tangga	35.276	39.732	35.598	37.949	29.366	-	-
1.1.1.6.11	Lainnya	3.421	5.886	5.446	3.992	5.765	-	-
1.1.1.7	**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat**							
1.1.1.7	Jumlah Grup Kesenian	86	86	86	86	58	60	<
1.1.1.7	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1	5	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.1.1.7	Jumlah Klub Olah Raga	77	96	120	122	42	100	<
	Jumlah Gedung Olah Raga	7	7	8	8	18	9	>
1.1.1.8	**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat**	68,63	69,51	70,14	70,60	71,13	76,5	<
1.2	**Kesejahteraan Sosial**							
1.2.1	**Pendidikan**							
1.2.1.1	**Angka Melek Huruf**	95,52	96,43	96,12	97,00	97,05	100	<
1.2.1.2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	7,49	7,58	7,82	8,01	8,13	9,1	<
1.2.1.3	**Angka Harapan Lama Sekolah**	11,28	11,90	11,93	12,22	12,33	12	>
1.2.2	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**							
1.2.2.1	Jumlah tenaga/satuan linmas (orang)	-	1.226	1.226	1.226	1.226	210	>
1.2.2.2	Jumlah pos jaga/ronda (unit)	4	4	8	5	-	-	-
1.2.2.3	Jumlah tenaga/satuan linmas yang dilatih (orang)	-	400	-	-	-	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.2.4	Tingkat gangguan kebisingan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6	Data laporan hasil monitoring	2 kec.	-	-	-	6 buku	-	-
1.2.2.7	Kondisi daerah yang kondusif (kec)	6	6	6	6	6	6	=
1.2.2.8	Tingkat Kehamonisan umat beragama .(org)	90	90	90	90	90	90	=
1.2.2.9	Tingkat Kehamonisan antar etnis (org)	-	-	220	300	200	250	<
1.2.2.10	Tingkat partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda (org)	-	1000	80	80	40	-	-
1.2.2.11	Peningkatan SDM tokoh lintas agama dan forum (forum)	5	4	4	3	3	4	<
1.2.2.12	Implementasi SKB 3 Menteri (org)	75	50	200	300	84	300	<
1.2.2.13	Tingkat penyalahgunaan miras & narkoba (org)	50	50	400	300	-	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.2.14	Tingkat praktek prostitusi (org)	-	200	100	-	230	-	-
1.2.2.15	Data laporan hasil monitoring	-	6 Kec.	-	-	10 buku	-	-
1.2.2.16	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pendidikan politik (org)	60	360	70	120	150	-	-
1.2.2.17	Jumlah parpol dan ormas/LSM (parpol/ormas dan LSM)	38 / 102	20 / 50	12/ 70	12 / 70	12 / 40	-	-
1.2.2.18	Jumlah data base parpol dan ormas/LSM (buku)	-	10	-	10	-	-	-
1.2.2.19	Data laporan hasil monitoring (kec)	6	6	-	6	6	-	-
1.2.2.20	Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya bencana	140 org	15 org	100 org	100 org	-	-	-
1.2.3	**Satpol PP**							
1.2.3.1	**Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat**							
1.2.3.1.1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	11	1	3	3	43	-	-
1.2.3.1.2	Minuman Keras (Miras)	37	20	50	80	61	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.3.1.3	PSK liar/prostitusi/Pasangan Mesum	15	57	20	39	81	-	-
1.2.3.1.4	Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)	1	4	6	6	13	-	-
1.2.3.1.5	Premanisme	-	2	-	-	-	-	-
1.2.3.1.6	Judi Togel	-	-	-	1	-	-	-
1.2.3.1.7	Mucikari	-	-	-	14	9	-	-
1.2.3.1.8	KTP	-	-	-	9	4	-	-
1.2.3.1.9	Ngelem Fox	-	-	-	1	6	-	-
1.2.4	**Penanggulangan Bencana**							
1.2.4.1	**Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat**							
1.2.4.1.1	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah mendapat Sosialisasi/ Pelatihan/ Pembinaan	-	-	5	12	23	-	-
1.2.4.1.2	Jumlah Personil Penanggulangan Bencana yang Terlatih	-	-	-	5	5	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.4.1.3	Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	-	-	70%	75%	75%	-	-
1.2.5	**Sosial**							
1.2.5.1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	15	15	17	17	21	18	-
1.2.5.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%/ kasus)	68,75	68,75	68,75	21,29	(2.675)	80	-
1.2.5.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%/ kasus)	68,42	68,42	33,51	33,51	(1.024)	68,42	-
1.2.6	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**							
1.2.6.1	**Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2012 - 2015**	**35.924**	**24.759**	**33.375**	**33.916**	**32.643**	**46.112**	<
1.2.6.1.1	IUD	740	783	943	1015	1.054	-	-
1.2.6.1.2	MOP	94	115	119	140	134	-	-
1.2.6.1.3	MOW	702	697	736	758	762	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.6.1.4	IMPLANT	2.442	2.436	3.162	3175	2.463	-	-
1.2.6.1.5	SUNTIK	20.515	13.482	19.324	19.174	18.261	-	-
1.2.6.1.6	PIL	10.542	6.519	8.190	8.610	9.085	-	-
1.2.6.1.7	KONDOM	889	727	736	1.044	884	-	-
1.2.6.2	**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**							
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3,8	2,8	3	3	=
	Jml peserta KB aktif	35.924	24.759	33.375	33.916	32.643	-	-
	Jml Pasangan Usia Subur (PUS)	45.847	32.154	49.238	49.578	45.852	-	-
1.2.7	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1.2.7.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,80	1,75	1,45	1,36	1,38	1	>
1.2.7.2	**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Volume dan Nilai Ekspor Pertambangan							
1.2.7.2.1	***Volume Ekspor (MT)***							
	• Zircon Sand	18.623	11.642	10.346	13.998	12.446	-	-
	• Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-
	• Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-
	• Ilmenite	5.505	4.923	-	-	-	-	-
1.2.7.2.2	***Nilai Ekspor(dalam Ribuan Rp)***							
	• Zircon Sand	4.270.600	2.328.400	2.069.200	2.779.600	2.489.200	-	-
	• Lump Ore Zink	-	-	-	-	-	-	-
	• Iron Ore	-	-	-	-	-	-	-
	• Ilmenite	174.060	123.075	-	-	-	-	-
1.2.7.3	**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.2.7.3.1	Kontribusi sektor listrik terhadap PDRB	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	-	-
1.2.7.4	**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Rasio Elektrifikasi**							
1.2.74.1	PLN (%)	47,32	64,69	66,05	87,27	79,22	-	-
1.2.74.2	Non PLN (%)	52,68	18,51	18,60	12,77	20,77	-	-
2)	**PELAYANAN UMUM**							
2.1	**Pelayanan Urusan Wajib**							
2.1.1	**Pendidikan**							
2.1.1.1	**Pendidikan Dasar**							
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	97,66	97,87	99,82	99,53	94,81	-	-
2.1.1.1.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	179,99	179,99	185,00	162,09	162,15	-	-
2.1.1.1.3	Rasio Terhadap Murid	1:17,77	1:18,07	1:32	1:21	1:21		
2.1.1.1.4	Angka Partisipasi Kasar							
2.1.1.1.4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	17,46	23,57	25,37	30,03	30,03	27,58	>
2.1.1.1.4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,55	115,00	117,35	118,14	118,20	119,5	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.1.5	Angka Partisipasi Murni							
2.1.1.1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	-	-	17,61	27,78	-	-	-
2.1.1.1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,50	97,85	98,60	98,79	98,80	98,82	<
2.1.1.1.6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,40	0,20	0,20	0,20	0,14	0,14	=
2.1.1.1.6.1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
2.1.1.1.6.2	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,65	52,94	52,94	97,08	98,00	83,54	>
2.1.1.1.6.3	Angka Kelulusan							
2.1.1.1.6.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	94,80	98,92	98,92	100,00	100,00	97,09	>
2.1.1.1.6.5	**Angka Melanjutkan**							
2.1.1.1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85,62	89,67	89,67	99,75	99,75	93,50	>
2.1.1.1.6.6	Fasilitas Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.1.1.6.7	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	75,85	80,26	89,00	33,05	33,10	100	<
2.1.1.2	**Pendidikan Menengah**							
2.1.1.2.1	**Angka Partisipasi Sekolah**							
	b. SLTP/MTs	90,18	97,73	100	95,42	99,25	99,25	=
	c. SMU/MA/SMK	66,35	68,28	73,05	73,83	95,37	95,37	=
2.1.1.2.2	**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah**	300	310,12	310,12	123	322,19		
	b. SLTP/MTs	300	310,12	310,12	123,00	332,19	342,16	>
	c. SMU/MA/SMK	640,92	660,15	660,15	326,00	743,00	743	=
2.1.1.1.3	**Rasio Terhadap Murid**	1:17,77	1:18,07	1:32	1:21	1:21		
	b. SLTP/MTs	1:13,73	1:13,32	1:28	1:19	1:14	1:14	=
	c. SMU/MA/SMK	01:12,8	1:14,50	1:28	1:14	1:14	1:13	<
2.1.1.1.4	Angka Partisipasi Kasar							
2.1.1.1.4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	91,93	95,89	95,89	98,88	98,90	98,00	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	76,88	78,92	87,59	87,59	87,60	70,09	>
2.1.1.1.5	Angka Partisipasi Murni							
2.1.1.1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,16	80,92	80,92	86,60	86,65	82,50	>
2.1.1.1.5.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	63,45	74,03	74,03	75,06	75,10	67,24	>
2.1.1.1.6	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,80	1,19	1,19	0,40	0,70	1,54	<
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,80	1,60	1,60	1,10	0,70	0,70	=
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,64	91,34	91,34	95,56	98,50	98,45	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72,58	77,16	77,16	95,56	99,00	98,00	>
	Angka Kelulusan							
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	57,21	99,58	99,58	100,00	100,00	83,76	>
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	66,86	99,09	99,09	99,09	99,00	81,26	>
	Angka Melanjutkan							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95,07	99,64	99,64	99,66	99,66	96,99	>
	Fasilitas Pendidikan							
	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	86,3	87,75	89,50	52,78	52,80	100	<
	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	80,00	82,00	88,00	88,00	88,10	98,20	<
2.1.2	**Kesehatan**							
2.1.2.1	Rasio Pos Yandu Persatuan Balita	-	-	1:119,17	1:121,91	1:123,54	N/A	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Perstauan Penduduk	1:2.582	1:2.666	1:2.751	1:2.838	1:2.926	N/A	=
2.1.2.3	Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2012 - 2016							
2.1.2.3.1	BOR (%)	76,36	71,22	72,41	77,00	53,98	60-85	<
2.1.2.3.2	LOS (hari)	3,46	3,10	3,19	3,54	2,47	6-9	<
2.1.2.3.3	TOI (hari)	1,07	1,25	1,22	1,06	2,10	1-3	=
2.1.2.3.4	BTO (kali)	80,62	83,87	82,74	79,34	69,98	40-50	>
2.1.2.3.5	GDR (%)	27,5	25,0	31,5	34,8	36,16	<40	>
2.1.2.3.6	NDR (%)	9,9	10,5	16,5	14,4	12,03	<25	>
2.1.2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)	74,66	98,89	89,40	62	64,50	80	<
2.1.2.5	Cakupan Pertolongan Tenaga Kesehatan yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	94,03	118,99	98	87	73	90	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.6	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 – 2016 (%)	74,04	89,30	89,40	91,50	64,80	100	<
2.1.2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Tahun 2012 – 2016 (%)	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB Paru Tahun 2012 – 2016 (%)	50	45	50	98,46	95	85	>
2.1.2.9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Tahun 2013 – 2016 (%)	100	100	100	100	100	100	=
2.1.2.10	Cakupan Yankes Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2012 – 2016	85	90	95	100	100	100	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.2.11	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012-2016 (%)	127,90	100,94	96,50	92,60	83,13	98	<
2.1.3	**Pertanahan**							
2.1.3.1	Luas tanah bersertifikat	808,88	808,88	808,88	808,88	-	-	-
2.1.3.2	Luas tanah yang belum bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Jumlah bidang tanah bersertifikat	103.470	103.470	103.470	103.470	16		
2.1.3.4	Jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	Jumlah aset tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten	769	769	769	769	-	-	-
2.1.3.6	Jumlah aset tanah dalam penguasaan pemkab yang sudah bersertifikat	401	429	429	429	-	-	-
2.1.3.7	Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten dengan status hak pakai/ hak guna bangunan kepada pihak ketiga	1.254	1.254	1.254	1.254	-	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.3.8	Jumlah Ijin lokasi yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan tanah kas desa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Konflik pertanahan yang terjadi	5	4	3	3	3	-	-
2.1.3.10	Konflik pertanahan yang terselesaikan	4	4	3	3	3	-	-
2.1.4	**Kependudukan**							
2.1.4.1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Nasional	76,70	32,67	81,30	120,85	97,78	88	>
2.1.4.2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Elektronik KTP (e_KTP)	30,69	71,56	73,10	54,13	90,00	78	>
2.1.4.3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KK Nasional	52,66	58,64	78,22	76,25	76,6	88	<
2.1.4.4	Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	18,73	28,09	52,08	58,36	61,26	33	>
2.1.4.5	Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan dan Akta lainya	229	163	217	271	167	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.5	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
2.1.5.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan IKK							
2.1.5.1.1	Jumlah Desa/kel yang Terperbaharui Profil Desanya (desa)	-	25	75	77	77	94	<
2.1.5.1.2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi (desa)	81	81	81	81	94	94	=
2.1.5.1.3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (kali)	1	1	1	1	1	1	=
2.1.5.1.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih (orang)	-	-	188	-	-	188	-
2.1.5.1.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1	1	1	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.5.2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan RPJMD							
2.1.5.2.1	Jumlah Aparatur Desa, Anggota BPD Kelembagaan Desa dan SM2L yang mengalami Peningkatan Pemahaman tentang Pembangunan Partisipatif	90	90	90	120	120		
2.1.5.2.2	Jumlah Siswa/Siswi yang mendapat penyaluran dana PMT-AS untuk anak sekolah di Desa Tertinggal	1.509	1.104	325	276	-		
2.1.5.2.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring	94	94	94	94	94		
2.1.5.2.4	Jumlah Desa yang dapat difasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	94	94	94	94	94		
2.1.5.2.5	Jumlah Fasilitasi Pembentukan BUMDes	-	6	25	57	-		
2.1.5.2.6	Jumlah Perempuan yang terlatih dalam Pelatihan Keterampilan P2W	30	30	30	60	60		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.5.2.7	Jumlah Profil Desa Yang Terperbahurui	-	25	75	77	77	94	<
2.1.5.2.8	Jumlah pelaksanaan BBG-RM	1	1	1	1	1	1	=
2.1.5.2.9	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih	-	-	188	-	-	188	-
2.1.5.2.10	Jumlah Juara Lomba Desa/Kelurahan	6	6	6	6	6	-	-
2.1.5.2.11	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	2	1	-	1	1	1	=
2.1.5.2.12	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	5	5	7	7	7	-	-
2.1.6	**Koperasi dan UMKM**							
2.1.6.1	Prosentase Koperasi aktif (%)	78,08	78,81	80,49	81,10	81,61	75,32	>
2.1.6.2	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-	26	<
2.1.6.3	Jumlah UMKM (Unit)	10.564	10.828	11.245	11.349	11.349	62	>
2.1.7	**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.7.1	Ketersediaan web site pemerintah daerah	-	-	16	16	16	1	>
2.1.7.2	Ketersediaan informasi daerah dalam bentuk digital	400 Majalah Digital, 400 CD kilas Kobar, 100 CD kegiatan	• 100 cd kegiatan • 350 CD kilas kobar • 350 cd majalah digital	• 82 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	• 62 CD Kegiatan • 350 CD Kilas Kobar • 350 CD majalah digital	-	-
2.1.7.3	Ketersedian bulletin, buku dan poster pemerintah daerah,foto,spanduk, baliho	400 Buletin Marunting Batu Aji, 400 warta bergambar, 350 buku	• 50 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati	• 15 album foto kegiatan • 100 Buku Himpunan Pidato Bupati • 400 buletin	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin	• 20 album foto kegiatan • 150 Buku Himpunan Pidato Bupati • 500 buletin	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
		profil pangkalan bun, 300 buku sejarah kerajaan kotawaringin, 150 Buku himpunan pidato,12 album foto	• 400 Kalender Meja • 350 buletin • 350 warta bergambar • 350 photo bupati/wakil • 10 photo mantann bupati • 100 lembar spanduk • 240 m2 baleho	• 400 Buku sejarah Kerajaan dan kab. Ktw.barat • 400 Buku Profil Kota P.bun • 400 Kalender Meja • 400 Kalender dinding • 276 m2 baleho kegiatan	• 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 150 Buah Photo Presiden dan Wakil Presiden RI • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan	• 3000 Tabloid Warta Kobar (3 Edisi) • 500 Kalender Meja • 500 Kalender dinding • 279 m2 baleho kegiatan • 98 lembar spanduk kegiatan • 5 buah baleho kecamatan		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
			• 13 media langganan koran	• 125 lembar spanduk kegiatan • 830 Photo Bupati/Wakil	• 98 lembar spanduk kegiatan			
2.1.7.4	Terselenggaranya pameran/ ekspo	-	-	1 kali	1 kali	• 150 Buku Himpunan Pidato Bupati	Ada	>
2.1.7.5	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	18 Media	6 Media	6 Media	7 media	5	10	<
2.1.7.6	Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ Media Online	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal,radio RRI, SBTV dan TVRI)	5 Media (2 Radio lokal, RRI, SBTV dan TVRI)	6 media	4	6	<
2.1.7.8	Jumlah Pemberitaan melalui media cetak	-	5 media	5 media	7 media	7	10	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.7.9	Siaran Keliling /Publikasi Keliling	-	-	46 kali	48 kali	47	-	-
2.1.8	**Penanaman Modal**							
2.1.8.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	42	29	35	45	67	<
2.1.8.1.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
2.1.8.1.2	PMDN (Rp)	5.896.800.000.000	6.044.026.347.434	6.518.940.123.391	714.448.540.000	3.710.499.700.000	3.500.000.000.000	>
2.1.8.1.3	PMA ($)	619.450.000	792.229.370,40	920.119.034	455.203,99	1.996.616,4	650.000.000	<
2.1.8.2	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	879,79	667,86	-	-	-
2.1.8.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	3.500,1	2.544,03	474,91	108,81	-	1.500	-
2.1.9	**Perdagangan**							
2.1.9.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	11,91	11,93	12,02	12,59	12,67	18,00	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.9.2	Ekspor Bersih Perdagangan ($)	547.585.488	215.253.097,17	183.735.699,94	186.428.669,99	120.298.709,60	400.000	>
2.1.9.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	53.865.000	-	-	-	-	-	-
2.1.10	**Transmigrasi**							
2.1.10.1	Jenis sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah transmigrasi	2 unit mesin penggiling padi, 1 unit tambatan klotok berikut selter dan siring batu sepanjang 5 meter serta buku-buku hasil identifikasi kawasan transmigrasi.	Pembangunan workshop, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan kantor koperasi Pembinaan Pembangunan KTM di desa Tanjung Terantang dan penyelesaian sengketa	Pembangunan tambatan klotok dan shelter, Sarana TPQ, Badan jalan	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang, Penimbunan badan jalan dan Pembuatan siring batu	Pengadaan tanah kuburan di UPT kumai seberang (0,5 Ha), Penimbunan badan jalan (700 m2) dan Pembuatan siring batu (220 m3)	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
			lahan transmigrasi					
2.1.11	**Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan**							
2.1.11.1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.465/ 72,69	2.452/ 72,37	2.576/ 73,38	2.588/ 74,63	2.589/ 74,65	-	-
2.1.11.2	Penguatan Cadangan Pangan	1 unit	-	57,8%	61,4%	60,39%	-	-
2.1.11.3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12 / Th	12/Th	-	-
2.1.11.4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	90	90	90	60	-	-
2.1.11.5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	83,72	84,56	84,95	92,7	-	-
2.1.11.6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	0	0	10	20	70,77	-	-
2.1.11.7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.12	**Ketahanan Pangan Berdasarkan Ketersediaan Pangan (Beras)**							
2.1.12.1	Jumlah penduduk (Jiwa)	253.000	261.000	269.629	278.398	286.714	-	-
2.1.12.2	Jumlah produksi (Ton)	17.277	18.445	18.573	11.996	12.494	-	-
2.1.12.3	Jumlah Kebutuhan (Ton)	30.805	30.744	32.830	33.890	34.910	-	-
2.1.12.4	Jumlah Kekurangan (Ton)	13.527	12.298	14.256	22.099	22.417	-	-
2.1.13	**Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga**							
2.1.13.1	Prestasi Olahraga Tingkat Nasional							
	a. POPNAS	12	6	9	4	7	-	-
	b. POSPENAS	16	6	5	3	3	-	-
2.1.13.2	Jumlah organisasi pemuda	61	83	97	105	235	110	>
2.1.13.3	Jumlah organisasi (klub) olah raga	77	96	120	122	124	15	>
2.1.13.4	Gedung olah raga/balai remaja	7	7	8	8	8	10	<
2.1.13.5	Lapangan olahraga	144	150	150	150	150	305	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.14	**Perpustakaan**							
2.1.14.1	Jumlah Perpustakaan	228	232	292	403	343	-	-
2.1.14.2	Jumlah Anggota Perpustakaan	3.820	4.711	5.621	7.012	8.732	2.247	>
2.1.14.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	13.735	23.469	28.450	62.585	93.737	11.767	>
2.1.14.4	Jumlah Peminjam	8.491	6.965	11.017	34.270	73.393	10.407	>
2.1.14.5	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	13.970	15.473	16.645	18.173	21.799	24.743	<
2.1.14.6	Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk	228 : 245.143 (1:1075)	232 : 261.200 (1:1125)	292 : 269.629 (1:923)	328 : 278.141 (1:847)	343 : 286.714 (1:835)	-	-
2.1.14.7	Rasio Jumlah Pustakawan terhadap Jumlah Penduduk	2 : 245.143	2 : 261.200	3 : 269.629	1 : 278.141	1 : 286.714	-	-
2.1.15	**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2012-2015**							
2.1.15.1	Pengelolaan arsip secara baku (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.15.2	Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan	2	2	-	-	5	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.1.15.3	Jumlah SKPD yang mempunyai arsiparis	3	3	-	4	4	36	<
2.1.15.4	Ratio Jumlah SKPD terhadap Arsiparis (%)	4:36 (1:9)	4:36 (1:9)	4:36 (1:9)	4:36 (1:9)	4:36 (1:9)	36:36 (1:1)	<
2.1.15.5	Arsip audio visual	265	265	265	-	265	-	-
2.1.15.6	Arsip Foto/Album	269	0	279	309	30	-	-
2.1.15.7	Pembinaan kearsipan ke pemerintah desa	-	-	-	21	21	-	-
2.1.15.8	Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola	-	-	19.462	19.515	19.515	-	-
2.1.15.9	Jumlah Arsip Statis/Vital yang dikelola	-	-	1.001	1.008	7	-	-
2.2	**Pelayanan Urusan Pilihan**							
2.2.1	**Pertanian**							
2.2.1.1	**Tanaman Pangan**							
2.2.1.1.1	**Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**							
	Padi sawah (Ton/Ha)	2,99	3,39	3,42	3,73	3,63	4,1	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Padi ladang (Ton/Ha)	2,01	2,18	2,18	2,28	2,05	2,13	<
	Jagung (Ton/Ha)	3,69	3.69	3,75	3,65	3,73	3,30	>
2.2.1.1.2	***Luas tanam tanaman pangan***							
	Padi sawah (Ha)	7.403	7.200	6.866	5.412	4.209	9.065	>
	Padi ladang (Ha)	3.895	3.104	2.862	1.454	746	3.981	<
	Jagung (Ha)	814	503	638	1.526	2.438	1.546	>
2.2.1.1.3	***Luas Panen Tanaman Pangan***							
	Padi sawah (Ha)	6.915	6.823	6.914	4.000	4.731	8.612	<
	Padi ladang (Ha)	3.368	2.814	2.674	1.664	1.296	3.981	<
	Jagung (Ha)	811	488	616	608	1.171	1.546	<
2.2.1.1.4	***Produksi tanaman pangan***							
	Padi sawah (Ton)	20.655	23.130	23.646	14.928	17.174	17.174	=
	Padi ladang (Ton)	6.769	6.148	5.837	3.797	2.657	2.657	=
	Jagung (Ton)	2.991	1.799	2.308	2.219	4.368	4.368	=
2.2.1.1.5	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	0,76	0,77	075	0,65	0,64	3,85	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.2	**Peternakan**							
2.2.1.2.1	**Populasi Ternak**							
	Sapi (ekor)	11.797	11.148	13.155	14.397	17.203	-	-
	Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing /Domba (ekor)	2.097	2.118	2.398	2.764	2.538	2.699	<
	Babi (ekor)	5.025	5.327	5.498	5.718	5.881	6.625	<
	Ayam buras (ekor)	315.121	342.230	343.941	345.661	346.843	508.771	<
	Ayam ras petelur (ekor)	-	-	-	46.500	50.794	-	-
	Ayam ras pedaging (ekor)	157.466	163.699	166.973	158.253	210.115	249.148	<
	Itik (ekor)	38.055	39.708	40.317	41.527	42.574	-	-
2.2.1.2.2	***Produksi Daging Ternak***							
	Sapi (Ton)	565,64	551,99	552,96	572,24	625,86	-	-
	Kerbau (Ton)	-	-	-	-	-	-	-
	Kambing / Domba(Ton)	49,01	49,43	49,62	58,14	33,02	61,16	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Babi (Ton)	87,81	94,00	93,25	94,47	86,53	122,16	<
	Ayam buras (Ton)	289,47	317,36	388,09	340,50	400,6	479,58	<
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	-	20,39	-	-
	Ayam Ras Pedaging (Ton)	807,73	885,56	886,34	817,78	1.031,75	1.099,19	<
	Itik (Ton)	14,38	15,77	17,78	14,12	17,09	15,88	>
2.2.1.2.3	***Produksi Telur***							
	Ayam buras (Ton)	189,45	207,98	208,76	207,98	212,71	316,09	<
	Ayam Ras Petelur (Ton)	-	-	-	209,25	366,39	-	-
	Itik (Ton)	124,97	133	133,42	133,19	179,97	174,10	>
2.2.1.2.4	Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,21	1,22	1,18	1,20	1,28	4,78	<
2.2.1.3	**Perkebunan**							
2.2.1.3.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	24,69	23,36	22,96	21,56	21,25	40	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.1.3.2	Kontribusi PDRB sub-sektor perkebunan terhadap sektor pertanian (%)	83,75	82,48	82,58	81,82	81,54	82,50	<
2.2.1.3.3	Eksport per tahun dari komoditas perkebunan (US$)	263.608.993,65	263.608.993,65	31.074.462,39	189.439	189.439,16	173.306.735,49	<
2.2.1.3.4	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	50.545	48.018	48.018	65.960	55.160	81.320	<
2.2.1.3.5	Jumlah Industri pengolahan turunan CPO	1	1	-	-	15	1	>
2.2.1.3.6	Sumbangan sektor perkebunan terhadap PAD (Rupiah)	14.152.000.000	14.670.000.000	14.670.000.000	2.709.661.252	12.447.807.384	13.000.000.000	<
2.2.1.3.7	Kemitraan/Plasma	23.957,91	28,785,91	32.634.59	28.786,00	28.785,91	2.500	>
2.2.1.3.8	**Pengembangan/ perluasan areal perkebunan**	233.447,42	204.868,62	192.846,56	212.083,00	212.426		
	Karet	17.407	17.451,50	17.907	18.083	14.560,30	18.684	<
	Kelapa sawit	213.547,21	184.695,33	173.048,34	192.699	196.541,30	209.909	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Kelapa	1.181,51	1.176,51	1.069,52	777	738,75	1.220	<
	Lada	970,20	875,20	578,20	298	318,6	1.052	<
	Lainnya	341,5	313,50	243,50	227	267,51	-	-
2.2.1.3.9	Produksi komoditi perkebunan	3.908.557	3.029.378	3.593.559	1.104.056	2.981.823,68		
	Karet (lump)	6.481,13	8.012,06	7.619,19	7.433	7.253,83	16.100	<
	Kelapa (kopra)	356,23	358,57	343,83	268	265,45	350	<
	Kelapa Sawit (Tbs)	3.901.270,81	3.020.668,88	3.585.307,15	1.096.178	2.974.134,28	4.760.000	<
	Lada (putih/hitam)	426,98	316,81	268,95	162	156,49	435	<
	Lainnya	22,30	21,50	20,24	14,59	13,63	-	-
2.2.1.4	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)	-	(-4,96)	(-1,83)	(-5,21)	(-1,10)	4	<
2.2.1.5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	29,80	28,32	27,80	26,35	26,06	-	-
2.2.2	**KEHUTANAN**							
2.2.2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	-	-	-	3,29	-	3.078	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,55	0,57	0,61	0,55	2	<
2.2.2.4	Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan Tahun 2012 - 2015							
2.2.2.4.1	Kayu Meranti	43.775,35	27.689,61	40.219,03	38.608,07	-	-	-
2.2.2.4.2	Kayu Rimba Campuran	1.996,07	2.772,03	6.223,98	5.741,29	-	-	-
2.2.2.4.3	Kayu Indah	68,87	-	-	-	-	-	-
2.2.2.5	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	75	34	100	155,25	155,25	100,00	>
2.2.3	**Kelautan dan Perikanan**							
2.2.3.1	Produksi perikanan (Jumlah Produksi dibagi target daerah dikalikan 100%)	108,23	112,69	129,96	121,57	106,54		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.2	Komsumsi Ikan (Jumlah komsumsi dibagi target daerah dikalikan 100%)	99,38	99,71	100,05	107,79	106,71		
2.2.3.3	Cakupan Bina kelompok Nelayan (Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok nelayan pada tahun n dikalikan 100%)	20,00	22,22	25,00	33,33	40,12		
2.2.3.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Jumlah produksi ikan hasil kelompok nelayan dibagi jumlah produksi ikan daerah dikalikan 100%)	18,89	20,90	25,57	24,95	10,16		
2.2.3.5	**Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**							
2.2.3.5.1	Produksi perikanan (TON)	11.537,34	11.985,66	12.577,03	13.207,34	19.922,39	13.925,99	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.3.5.2	Perikanan tangkap (TON)	9.968,20	10.217,40	10.472,80	10.682,26	14.792,70	10.895,90	>
2.2.3.5.3	Perikanan Budi daya (TON)	1.569,14	1.768,26	2.104,23	2.525,08	5.129,69	3.030,09	>
2.2.3.5.4	Konsumsi ikan (KG/KAPITA)	37,23	37,61	37,98	38,36	41,35	38,75	>
2.2.3.5.5	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan (KELOMPOK)	398	451	461	497	453	-	-
2.2.3.5.6	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibina (KELOMPOK)	234	230	231	169	182	-	-
2.2.3.5.7	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	414,22	463,77	1.357,13	431,3	493,97	26.903,60	<
2.2.3.5.8	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	8.839,39	9.201,96	10.338,75	10.152,69	10.402	9.100	>
2.2.3.5.9	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	36,31	37,23	37,5	38	41,35	42,16	<
2.2.4	**Pariwisata**							
2.2.4.1	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	12.286	13.355	16.035	12.564	15.106	29.400	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2.2.4.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. (%)	1,27	1,28	1,24	1,31	-	-	-
2.2.4.3	**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian**							
2.2.4.3.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	24,25	24,81	25,53	25,53	25,36	15,50	>
2.2.4.3.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	1,5	6,52	5,22	6,2	4,82	1,5	>
2.2.4.3.3	Pertumbuhan Industri (unit)	71	28	55	43	17	2,20	>
2.2.4.3.4	Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok)	3	7	16	19	-	-	-
3)	**DAYA SAING DAERAH**							
3.1	**Kemampuan Ekonomi**							

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.1.1	Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah , Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran Komsumsi Pangan Rumah Tangga Perkapita (Rp000)	5.936,56	5.744,72	5.808,72	5.782,26	7.311,375	-	-
3.1.1.2	Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Rumah Tangga Perkapita (Rp000)	5.870,44	6.112,28	6.099,28	6.196,74	7.238,63	-	-
3.1.1.3	Produktifitas Total Daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Nilai Tukar petani (Kalteng)	98,66	102,41	98,69	97,74	98,81	-	-
3.2	Fasilitas Wilayah / Infratruktur							
3.2.1	**Perhubungan**							
3.2.1.1	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1	1	=
3.2.1.2	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3	4	<
3.2.1.3	Jumlah Terminal	4	4	4	4	4	4	=
3.2.1.4	Jumlah Halte	11	11	11	12	12	12	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.1.5	Jumlah Jaringan Trayek AKDP	3	3	3	3	3	3	=
3.2.1.6	Jumlah Jaringan Trayek Perdesaaan	5	5	5	9	9	9	=
3.2.1.7	Jumlah Dermaga LLASDP	16	16	17	19	19	19	=
3.2.1.8	Jumlah Trayek LLASDP	3	4	4	4	4	4	=
3.2.2	**Pekerjaan Umum**							
3.2.2.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	19,55	19,89	34,36	36,06	36,33	0,27	>
3.2.2.2	Rasio Jaringan Irigasi	0,54	0,85	0,86	0,75	0,70	0,79	<
3.2.2.3	Luas Wilayah Kebanjiran	16,00	15,00	14,00	13,80	12,00	15,00	>
3.2.2.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,99	100,00	100,00	75,49	77,96	97,79	<
3.2.2.5	Persentase penanganan sampah	66,72	68,93	70,45	51,63	80,80	75,81	>
3.2.2.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,42	1,48	1,57	2,2	1,26	7,5	<
3.2.2.7	**Klasifikasi Jalan Berdasarkan Statusnya (km)**							
3.2.2.7.1	Jalan negara	126,55	148,56	148,56	156,96	156,96	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.7.2	Jalan provinsi	155	63,70	63,70	55,40	55,40	-	-
3.2.2.7.3	Jalan kabupaten	1.185,51	1.220,95	1.222,84	1.222,84	1.224,37	-	-
3.2.2.7.4	Jalan desa	1.009,41	1.033.02	1.034,55	1.034,55	1.034,09	-	-
3.2.2.14.	**Klasifikasi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaannya (km)**	**2.476,67**	**2.466,23**	**2.469,65**	**2.469,75**	**2.470,82**	-	-
3.2.2.14.1	Jalan Aspal	663,84	656,99	1.018,41	1.022,37	1.090,11	-	-
3.2.2.14.2	Jalan Batu/kerikil	168,66	137,10	102,38	100,65	70,10	-	-
3.2.2.14.3	Jalan Tanah	1.276,91	1.436,85	1.098,68	1.082,92	1.046,79	-	-
3.2.2.14.4	Tidak dirinci: -Beton -Titian -Lainnya	367,26	111,54 27,89 95,86	125,00 29,11 96,16	137,81 29,85 96,16	137,81 29,85 96,16	-	-
3.2.2.15	**Klasifikasi Jalan Berdasarkan Kondisi Fisiknya (km)**	**2.476,67**	**2.466,23**	**2.469,65**	**2.469,75**	**2.470,82**	-	-
3.2.2.15.1	Jalan Baik	484,18	490,46	845,98	890,50	959,29	-	-
3.2.2.15.2	Jalan Sedang	1.069,31	816,60	784,19	761,46	735,56	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.15.3	Jalan Rusak Ringan	661,52	856,56	620,51	608,00	619	-	-
3.2.2.15.4	Jalan Rusak Berat	261,66	302,61	218,97	209,79	156,97	-	-
3.2.2.16	**Klasifikasi Jalan Berdasarkan Statusnya (km)**						-	-
	Jalan negara	126,55	148,56	148,56	156,96	156,96	-	-
3.2.2.16.1	Jalan provinsi	155	63,70	63,70	55,40	55,40	-	-
3.2.2.16.2	Jalan kabupaten	1.185,51	1.220,95	1.222,84	1.222,84	1.224,37	-	-
3.2.2.16.3	Jalan desa	1.009,41	1.033.02	1.034,55	1.034,55	1.034,09	-	-
3.2.2.17	**Klasifikasi Jalan berdasarkan Kelas Jalan (km)**	**2.477,17**	**2.466,23**	**2.469,65**	**2.469,75**	**2.470,82**	-	-
3.2.2.17.1	Kelas I	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.17.2	Kelas II	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.17.3	Kelas III	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.17.4	Kelas III A	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.17.5	Kelas III B	281,55	212,26	212,26	212,36	212,36	-	-
3.2.2.17.6	Kelas III C	415,70	451,14	456,12	465,90	467,43	-	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.17.7	Kelas Tidak dirinci	1.779,92	1.802,83	1.801,27	1.791,49	1.791,03	-	-
3.2.2.18	**Urusan Perumahan**							
3.2.2.18.1	Persentase rumah tangga pengguna air minum bersih	91,08	95,75	95,56	96,04	83,76	25,00	>
3.2.2.19..2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (jamban sendiri)	78,40	76,29	81,63	86,43	86,49	97,79	<
3.2.2.19.3	Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik	95,73	98,12	98,12	98,78	98,79	80,00	>
3.2.2.19.4	Persentase rumah tinggal dengan lantai tanah	3,35	3,34	3,10	2,74	1,99	2,5	>
3.2.2.19.5	Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah	96,65	96,66	96,90	97,26	98,01	97,5	>
3.2.2.19.6	Persentase rumah tinggal dengan dinding tembok	43,20	47,92	50,19	55,19	62,07	75	<
3.2.2.19.7	Rasio rumah layak huni	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,65	>
3.2.2.19.8	Rasio permukiman layak huni	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.2.19.9	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,12	0,06	0,1	0,12	0,09	0,14	<
3.2.1.2.	**Jumlah orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum**							
3.2.1.3	**Dst**							
3.2.2	**Penataan Ruang**							
3.2.2.1	Ketaatan pada RTRW	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.2	**Luas Wilayah Produktif**							
3.2.2.3	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	-
3.2.2.4	Perda RTRW	-	-	-	-	-	1	<
3.2.2.5	Dokumen RDTR	2	2	-	-	-	-	-
3.2.3	**Lingkungan Hidup**							
	Persentase Penanganan sampah	*65*	*68,93*	*70,45*	*51,63*	*80,80*	*75,81*	>
	Jumlah Duta Lingkungan (orang)	-	-	2	-	-	2	<
	Jumlah Kader lingkungan (orang)	50	39	39	40	-	50	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
	Jumlah Adhiwiyata (orang)	50	50	50	50	50	426	<
	Pencemaran status mutu air	2	2	2	2	2	2	=
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air:	-	-	-	-	-	600	<
	Mangrove (bibit)	3.000	3.000	-	-	-	-	-
	Ruang Terbuka Hijau (bibit)	600	1.000	678	200	-	-	-
	Biopori (Lubang Tanam)	1.000	2.000	32.000	-	-	-	-
	Penegakan Hukum Lingkungan	1	1	1	4	-	5	<
3.3	**Dst.**							

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

a. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
d. pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara garis besar terdiri dari penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang mumpuni akan sangat menentukan kelangsungan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2011 hingga tahun 2016. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Adapun rangkuman data dari rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I	**Pendapatan**	**771.039.121.032**	**875.984.792.231**	**1.012.105.155.890**	**1.007.379.613.115**	**1.329.903.835.400**	**12,1**
I.1	**Pendapatan asli Daerah**	**65.265.940.704**	**86.595.997.786**	**121.929.676.088**	**123.301.575.004**	**148.818.066.600**	**19,1**
I.1.1	Pajak Daerah	18.163.795.420	18.164.283.078	24.317.570.204	26.679.640.330	38.351.000.000	**17,5**
I.1.2	Retribusi Daerah	33.645.759.867	16.256.170.502	12.880.041.243	13.680.698.799	14.014.206.000	**-12,8**
I.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	4.720.678.018	4.352.739.271	5.051.549.448	6.298.061.742	7.050.925.000	**9,0**
I.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.735.707.399	47.822.804.934	79.680.515.194	76.643.174.135	89.401.935.600	**105,4**
I.2	**Dana perimbangan**	**583.842.053.425**	**654.073.605.571**	**743.476.846.280**	**710.945.739.168**	**999.504.184.473**	**12,4**
I.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	68.961.212.425	70.498.011.571	95.042.382.280	61.705.486.168	68.077.342.000	**2,5**
I.2.2	Dana alokasi umum	486.941.691.000	566.405.844.000	597.665.464.000	614.824.773.000	662.249.343.000	**6,5**
I.2.3	Dana alokasi khusus	27.939.150.000	17.169.750.000	50.769.000.000	34.415.480.000	294.898.744.400	**176,4**
I.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**121.931.126.903**	**135.315.188.874**	**130.567.267.932**	**173.132.298.943**	**179.759.912.356**	**8,8**
I.3.1	Hibah	17.257.682.055	18.061.618.076	3.500.000.000	25.784.718.247	4.900.000.000	**95,9**
I.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	**0,0**
I.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya ***)	54.918.945.848	66.645.438.798	67.737.996.932	46.020.008.696	78.525.571.400	**12,3**
I.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****)	49.754.499.000	44.958.532.000	52.629.271.000	94.067.572.000	58.634.768.000	**9,7**
I.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	5.649.600.000	6.700.000.000	7.260.000.000	0	**5,4**
I.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0	0	13.800.000.000	**20,0**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
II	**Belanja**	**719.465.512.100**	**1.007.578.083.000**	**1.113.961.783.800**	**1.111.699.635.508**	**1.231.699.546.500**	**12,2**
II.1	**Belanja tidak langsung**	**352.077.888.100**	**433.708.870.000**	**461.605.017.750**	**505.942.125.000**	**600.423.641.000**	**11,6**
II.1.1	Belanja pegawai	313.492.771.100	359.206.191.000	360.879.241.000	402.296.892.100	450.474.587.000	**14,8**
II.1.2	Belanja bunga				0	1.050.000.000	
II.1.3	Belanja subsidi						
II.1.4	Belanja hibah	7.019.125.000	41.598.630.000	55.423.885.450	6.321.828.000	15.376.173.000	**116,1**
II.1.5	Belanja bantuan sosial	0	1.630.000.000	4.108.700.000	1.695.000.000	660.000.000	**6,5**
II.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	1.347.869.000	1.979.343.000	2.866.132.000	4.086.656.700	4.448.006.600	**28,6**
II.1.7	Belanja bantuan keuangan	27.718.123.000	27.944.706.000	34.924.068.300	89.291.748.200	127.914.399.400	**44,9**
II.1.8	Belanja tidak terduga	2.500.000.000	1.350.000.000	3.402.991.000	2.250.000.000	500.475.000	**-1,1**
II.2	**Belanja langsung**	**367.387.624.000**	**573.869.213.000**	**652.356.766.050**	**605.757.510.508**	**631.275.905.500**	**13,4**
II.2.1	Belanja pegawai	22.653.271.300	27.911.870.650	52.684.874.519	67.951.961.314	74.538.770.138	**30,1**
II.2.2	Belanja barang dan jasa	121.231.070.016	148.464.231.093	199.707.710.260	228.544.759.749	231.030.800.716	**14,5**
II.2.3	Belanja modal	223.503.282.684	397.493.111.257	399.964.181.271	309.260.789.445	325.706.334.646	**12,2**
III	**Pembiayaan**	**119.347.894.085,04**	**222.788.332.591,70**	**166.601.025.388,19**	**153.062.132.605,69**	**139.922.595.702,26**	**8,9**
III.1	Penerimaan	116.678.994.085,24	212.688.332.509,41	160.101.467.644,91	141.562.132.617,27	99.424.595.732,03	**3,2**
III.2	Pengeluaran	2.668.900.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	40.498.000.000,00	**114,4**

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend perkembangan yang positif,

khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat yang semakin baik, namun proporsi dana perimbangan masih menjadi komponen yang dominan dalam Pendapatan Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 2: Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan %)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**645.687.706.364,35**	**771.039.121.031,98**	**875.984.792.231,00**	**995.973.790.300,39**	**1.007.379.613.114,98**	**1.322.594.838.557,43**	**15,83**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**48.201.992.905,35**	**65.265.940.703,51**	**86.595.997.785,86**	**121.929.676.088,15**	**123.301.575.004,31**	**143.330.741.728,12**	**25,25**
1.1.1.	Pajak daerah	9.431.794.163,25	18.163.795.420,40	18.164.283.078,43	24.317.570.203,77	26.679.640.329,53	33.359.659.422,17	32,24
1.1.2.	Retribusi daerah	27.409.641.762,00	33.645.759.866,61	16.256.170.502,25	12.880.041.242,50	13.680.698.798,50	14.203.971.989,00	(7,93)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.216.918.525,62	4.720.678.017,73	4.352.739.270,83	5.051.549.447,77	6.298.061.741,70	7.050.925.491,34	11,37
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.143.638.454,48	8.735.707.398,77	47.822.804.934,35	79.680.515.194,11	76.643.174.134,58	88.716.184.825,61	109,66
1.2.	**Dana Perimbangan**	**517.762.011.239,00**	**583.842.053.425,00**	**654.073.605.571,00**	**743.476.846.280,00**	**710.945.739.168,00**	**999.504.184.473,00**	**14,93**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	57.887.933.559,00	68.961.212.425,00	70.498.011.571,00	95.042.382.280,00	61.705.486.168,00	75.757.165.453,00	8,77
1.2.2.	Dana alokasi umum	432.771.977.680,00	486.941.691.000,00	566.405.844.000,00	597.665.464.000,00	614.824.773.000,00	662.249.343.000,00	8,99
1.2.3.	Dana alokasi khusus	27.102.100.000,00	27.939.150.000,00	17.169.750.000,00	50.769.000.000,00	34.415.480.000,00	261.497.676020,00	157,57

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**79.723.702.220,00**	**121.931.126.903,47**	**135.315.188.874,14**	**130.567.267.932,24**	**173.132.298.942,67**	**179.759.912.356,31**	**19,37**
1.3.1	Hibah	15.267.736.276,00	17.257.682.055,00	18.061.618.076,00	3.500.000.000,00	25.784.718.247,00	4.983.000.000,00	98,62
1.3.2	Dana darurat							
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	38.319.945.444,00	54.918.945.848,47	66.645.438.798,14	67.737.996.932,24	46.020.008.695,67	64.476.297.693,31	14,87
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	25.986.020.500,00	49.754.499.000,00	44.958.532.000,00	52.629.271.000,00	94.067.572.000,00	58.634.768.000,00	27,99
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	150.000.000,00	-	5.649.600.000,00	6.700.000.000,00	7.260.000.000,00	-	6,74
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	36.349.069.541,00	100,00

Sumber : BPKAD, 2011-2016

Berdasarkan pada Tabel 3.2 di atas, rata-rata perkembangan realisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011-2016 sebesar 25,25%, sementara rata-rata perkembangan realisasi Dana Perimbangan sebesar 14,93% dan rata-rata perkembangan realisasi Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,37%. Secara umum, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trendperkembangan yang positif dengan rata-rata perkembangan sebesar 15,83%.Termasuk perkembangan positif pada pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan **25,25%** dan angka pertumbuhan setiap tahun meningkat.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada periode 2011-2016 realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 3: Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**292.158.512.004,88**	**334.957.011.670,00**	**383.270.125.507,80**	**393.997.082.307,00**	**489.211.302.621,00**	**614.487.165.510,00**	**16,33**
1	Belanja Pegawai	257.830.637.847,88	**303.461.692.920,00**	339.234.052.307,80	350.333.883.370,00	391.985.759.085,00	466.082.652.719,00	12,71
2	Belanja Bunga	151.666.665,00	0	0	0	0	858.680.569,00	100,00
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Belanja Hibah	7.291.976.016,00	6.876.600.000,00	14.588.800.000,00	5.167.862.437,00	4.701.953.000,00	19.840.520.000,00	70,97
5	Belanja Bantuan Sosial	5.414.870.300,00	0	1.592.500.000,00	2.934.400.000,00	843.350.000,00	354.550.000,00	-36,24
6	Belanja Bagi Hasil	21.199.677.176,00	24.616.707.000,00	1.925.188.350,00	2.576.672.200,00	2.942.068.700,00	1.980.543.000,00	-12,14
7	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	25.544.084.850,00	32.890.044.300,00	86.903.487.836,00	125.252.605.309,00	79,04
8	Belanja Tidak Terduga	269.684.000,00	2.011.750,00	385.500.000,00	94.220.000,00	1.834.684.000,00	117.613.913,00	4.128,25
B	**Belanja Langsung**	**290.563.727.080,23**	**338.822.549.492,65**	**535.617.981.566,70**	**660.044.030.287,30**	**550.536.360.774,22**	**666.461.609.806,64**	**20,48**
1	Belanja Pegawai	22.264.839.300,00	19.254.521.800,00	25.202.095.629,00	48.537.215.797,00	52.749.489.049,00	50.370.524.366,00	22,83
2	Belanja Barang dan Jasa	107.326.169.420,23	107.108.070.246,25	152.188.265.476,42	218.602.174.503,43	206.834.420.562,59	233.452.739.255,56	18,60
3	Belanja Modal	160.972.718.360,00	212.459.957.446,40	358.227.620.461,28	392.904.639.986,87	290.952.451.162,63	382.638.346.185,08	23,17
	Jumlah	**582.722.239.085,11**	**673.779.561.162,65**	**918.888.107.074,50**	**1.054.041.112.594,30**	**1.039.747.663.395,22**	**1.280.948.775.316,64**	**17,71**

Sumber : BPKAD, 2017

Kondisi belanja daerah mengalami perkembangan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2011, total belanja sebesar Rp. 582.722.339.085,11 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 673.779.561.162,65. Pada tahun 2013 total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai Rp 918.888.107.074,50 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.054.041.112.594,30. Pada tahun 2015 total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 1.039.747.663.395,22 dan pada Tahun 2016 total belanja daerah adalah sebesar Rp. 1.280.948.775.316,64.Rata-rata perkembangan total belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode tahun 2011-2016 mencapai 17,71 %, dengan rata-rata perkembangan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,33% dan rata-rata perkembangan Belanja Langsung sebesar 20,48%.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan dana cadangan; dan/atau
d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Pinjaman daerah; dan
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 6 tahun terakhir (2011-2016) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3. 4: Rata-Rata perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016

No	Uraian		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata perkembangan(%)
1.	Penerimaan Pembiayaan								
	a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & SILPA BLUD	60.410.241.046,00	116.547.722.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	99.100.732.450,03	21,82
	b	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00
	c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0,00
	d	Penerimaan pinjaman daerah & obligasi	0	0	0	0	30.000.000.000,00	0	0,00
	e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	671.994.660,00	131.271.100,00	209.243.285,00	423.552.200,00	265.728.800,00	283.578.076,00	10,16
	F	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan			**61.082.235.706,00**	**116.678.994.085,24**	**212.688.332.509,41**	**160.101.129.106,91**	**141.640.132.617,27**	**99.156.971.964,41**	**21,41**
2	Pengeluaran pembiayaan								
	a	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00

No	Uraian		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata perkembangan(%)
	b	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	0	2.000.000.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	10.498.000.000,00	109,39
	c	Pembayaran pokok utang	7.500.000.000,00	668.900.000,00	=	=	=	30.000.000.000,00	=
	d	Pemberian pinjaman daerah	0	=	=	=	=	=	0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan			**7.500.000.000,00**	**2.668.900.000,00**	**10.100.000.000,00**	**6.499.557.768,0**	**11.500.000.000,00**	**40.498.000.000,00**	**437,24**
Pembiayaan netto			**53.582.235.706,00**	**114.010.094.085,24**	**202.588.332.509,41**	**153.601.571.338,91**	**130.140.132.617,27**	**58.305.035.205,20**	**19,16**

Sumber : BPKAD, 2017

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas tampak bahwa rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan netto Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 sebesar 19,16% dengan rata-rata perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 21,41%. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata perkembangan sebesar 21,81%. Pembayaran pokok utang Tahun 2011 merupakan pembayaran pokok utang pada perbankan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah Tahun 2010, sedangkan pembayaran pokok utang Tahun 2012 merupakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.

3.1.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan Daerah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2015 tampak pada tabel berikut.

Tabel 3. 5: Neraca Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015

URAIAN			Tahun				Rata-Rata perkembangan (%)
			2012	2013	2014	2015	
ASSET							
Asset Lancar							
1.	Kas dan setara kas		212.718.183.385,41	159.677.915.444,91	111.423.452.118,27	99.147.300.758,03	(22,06)
2.	Piutang		139.873.419,57	1.002.917.328,47	11.489.341.639,47	22.841.163.618,16	587,14
	-	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	-	-	-	-	
	-	Piutang Pajak Netto	*139.873.419,57*	*1.002.917.328,47*	11.489.341.639,47	22.841.163.618,16	587,14
3.	Piutang Retribusi		937.352.511,00	39.145.000,00	233.802.066,00	460.274.852,00	166,10
	-	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	-	-	-	-	
	-	Piutang Retribusi Netto	*937.352.511,00*	*39.145.000,00*	*233.802.066,00*	460.274.852,00	166,10
4.	Penyisihan Piutang		-	-	-	(12.877.680.140,10)	0
5.	Piutang lainnya		18.315.902,80	10.709.020.249,90	24.779.769.955,03	28.098.741.679,06	19.504,40
	-	Penyisihan Piutang Lainnya Tidak Tertagih	-	-	-	(4.133.291.783,74)	0
	-	Piutang Lainnya Netto	*18.315.902,80*	*10.709.020.249,90*	*24.779.769.955,03*	32.232.033.462,80	19.509,96
6.	Beban Dibayar dimuka		-	-	-	225.874.146,00	0
7.	Bagian lancar tuntutan ganti rugi		*16.800.000,00*	*5.200.000,00*	*13.770.000,00*	27.226.100,00	64,49
8.	Persediaan		7.267.784.751,00	10.953.515.577,47	21.297.142.949,96	27.036.344.493,84	57,36
	Jumlah Asset Lancar		**221.098.309.969,78**	**182.387.713.600,75**	**169.237.278.728,73**	**164.959.245.506,99**	**(9,08)**

URAIAN		Tahun				Rata-Rata perkembangan (%)
		2012	2013	2014	2015	
Investasi Jangka Panjang						
1.	Investasi Non Permanen	10.078.365.362,00	8.959.287.462,00	6.005.708.679,00	5.605.021.223,00	**(6,91)**
2.	Investasi Permanen	40.564.241.218,00	51.478.498.165,42	69.228.964.508,00	80.870.973.277,00	**26,07**
Jumlah Investasi jangka Panjang		**50.642.606.580,00**	**60.437.785.627,42**	**75.234.673.187,00**	**86.475.994.500,00**	**19,59**
Asset tetap						
1.	Tanah	201.190.404.960,00	462.106.845.923,00	464.486.992.929,07	466.338.554.709,07	**43,53**
2.	Peralatan dan Mesin	174.432.368.485,52	210.457.366.631,52	238.084.699.189,52	276.666.907.235,52	**16,66**
3.	Gedung dan Bangunan	445.798.473.560,87	523.131.341.713,04	604.426.579.301,21	646.446.562.171,21	**13,28**
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.054.242.500.524,84	1.290.320.146.787,99	1.475.909.067.860,99	1.756.839.402.506,38	**18,60**
5.	Aset Tetap Lainnya	16.050.889.363,00	16.891.477.389,00	14.259.349.271,00	16.315.317.288,00	**1,36**
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	75.684.687.788,91	106.606.472.000,15	203.491.415.038,76	125.327.735.248,00	**31,11**
7.	Akumulasi penyusutan	-	-	-	(1.205.426.852.205,77)	**0**
	Jumlah Aset Tetap	**1.967.399.324.683,14**	**2.609.513.650.444,70**	**3.000.658.103.590,55**	**2.082.507.626.952,41**	**5,68**
Asset Lainnya						
1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	0
2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	79.296.022,56	6.208.515,00	-	-	(64,06)
3.	Tagihan lainnya	380.680.692,00	339.380.677,00	223.904.391,00	197.721.231,00	(18,86)
4.	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	0
5.	Asset tak berwujud	8.350.180.033,00	15.431.854.585,00	19.902.533.985,00	26.164.248.185,00	(48,41)

URAIAN		Tahun				Rata-Rata perkembangan (%)
		2012	2013	2014	2015	
6.	Amortisasi	0	0	0	(10.774.182.477,60)	0
7.	Aset Lain-lain	18.413.617.812,00	8.771.030.600,00	17.567.801.177,00	13.511.737.161,00	8,28
	Jumlah Aset Lainnya	**27.223.774.559,56**	**24.548.474.377,00**	**37.694.239.553,00**	**29.099.524.099,40**	**6,97**
	JUMLAH ASSET	**2.266.364.015.792,48**	**2.876.887.624.049,87**	**3.282.824.295.059,28**	**2.363.042.391.058,80**	**4,34**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	333.538,00	49.048.301,00	6.283.102,00	7.259,14
2.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	565.011.302,31	0
3.	Utang belanja	-	-		3.904.176.614	0
4.	Utang jangka Pendek Lainnya	11.073.380.526,00	15.751.585.486,68	18.650.431.037,40	47.810.774.101,02	72,33
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.073.380.526,00	15.751.919.024,68	18.699.479.338,40	52.286.245.119,33	80,19
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
1.	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.073.380.526,00	15.751.919.024,68	18.699.479.338,40	52.286.245.119,33	80,19
EKUITAS DANA						
1.	Ekuitas Dana Lancar					

URAIAN			Tahun				Rata-Rata perkembangan (%)
			2012	2013	2014	2015	
	-	Sisa Lebih Pebiayaan anggaran (SiLPA)	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	-	(51,70)
	-	Pendapatan yang ditangguhkan	239.094.161,00	5.000,00	-	-	(66,67)
	-	Cadangan Piutang	1.112.341.833,37	11.756.282.578,00	36.516.683.660,50	-	355,84
	-	Cadangan Persediaan	7.267.784.751,00	10.953.515.577,47	21.297.142.949,96	-	15,05
	-	Dana yang disediakan untuk Utang Jangka Pendek	(11.073.380.526,00)	(15.751.585.486,68)	(18.650.431.037,40)	-	(13,12)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar			210.024.929.443,78	166.635.794.575,70	150.537.799.390,33	-	(43,44)
2. Ekuitas Dana Investasi							
	-	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	50.642.606.580,00	60.437.785.627,42	75.234.673.187,00	-	(18,73)
	-	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.967.399.324.683,14	2.609.513.650.444,70	3.000.658.103.590,55	-	(17,46)
	-	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	27.223.774.559,56	24.548.474.377,00	37.694.239.553,00	-	(18,76)
	-	Dana yang harus disediakan untuk Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi			2.045.265.705.822,70	2.694.499.910.449,12	3.113.587.016.330,55	-	(17,57)
JUMLAH EKUITAS DANA			**2.255.290.635.266,48**	**2.861.135.705.024,82**	**3.264.124.815.720,88**	**2.310.756.145.939,47**	**3,91**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			**2.266.364.015.792,48**	**2.876.887.624.049,50**	**3.282.824.295.059,28**	**2.363.042.391.058,80**	**4,34**

Sumber : DPKD, 2016

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar *(current ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio)*.

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1	**Rasio Likuiditas**					
1.1	Rasio lancar (*current ratio*)	19,97	11,58	9,05	3,15	10,94
1.2	Rasio quick (*quick ratio*)	19,31	10,88	7,91	2,64	10,19
2.	**Rasio Solvabilitas**					
2.1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0049	0,0055	0,0057	0,0221	0,01
2.2	Rasio hutang terhadap modal	0,0049	0,0055	0,0057	0,0226	0,01
3	**Rasio Aktivitas**					
3.1	Rata-rata umur piutang	-	27,07	72,22	111,05	70,11

Sumber: DPKAD 2016, data diolah

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2012-2015 rendah, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Baratkurang dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2012 mencapai 19,97 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 19,97 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayarkewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (total debt to total asset ratio) dan rasio hutang terhadap ekuitas *(total debt to equity ratio)*. Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Dari tabel 3.6, Rasio Total Hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 berturut-turut adalah sebesar berkisar 0,0049; 0,0055; 0,0057 dan 0,0221. Pada tahun 2012 rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 0,0049 artinya sebesar Rp 0,0049 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didanai oleh hutang sebesar 0,0049, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Dari tahun 2012-2015, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang cenderung meningkat.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga

dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya.

Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2. Dari tabel 3.6 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 70,11 hari, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo 27,07; 72,22 dan 111,05 hari berturut-turut pada tahun 2013, 2014, dan tahun 2015.

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.1.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 sebagaimana telah

disampaikan pada Tabel 3.3, gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 6 tahun (2011-2016) tampak pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3. 7: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Proporsi
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	Rata-rata (%)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**48,32**	**49,71**	**41,71**	**37,38**	**47,05**	**47,97**	**44,84**
1.1	Belanja Pegawai	42,20	45,04	36,92	33,24	37,70	36,39	39,02
1.2	Belanja Bunga	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Belanja Hibah	1,17	1,02	1,59	0,49	0,45	1,55	0,94
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,21	0,00	0,17	0,28	0,08	0,03	0,35
1.6	Belanja Bagi Hasil	3,56	3,65	0,21	0,24	0,28	0,15	1,59
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	2,78	3,12	8,36	9,78	2,85
1.8	Belanja Tidak Terduga	0,16	0,00	0,04	0,01	0,18	0,01	0,08
2	**Belanja Langsung**	**51,68**	**50,29**	**58,29**	**62,62**	**52,95**	**52.03**	**55,16**
2.1	Belanja Pegawai	3,97	2,86	2,74	4,60	5,07	3,93	3,85
2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,57	15,90	16,56	20,74	19,89	18,22	18,53
2.3	Belanja Modal	28,13	31,53	38,98	37,28	27,98	29,87	32,78
	Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100,00**

Sumber: DPKAD 2017

Dari data Tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir (tahun 2011-2016) proporsi belanja langsung meningkat terus, dan di dalam belanja langsung tersebut proporsi belanja pegawainya cenderung meningkat dan belanja modalnya berfluktuasi.

2) Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.3, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2011-2015 dirinci pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3. 8: Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2011	303.022.690.595,88	590.222.239.085,11	51,34
2	Tahun anggaran 2012	348.383.519.649,31	676.448.461.162,65	51,50
3	Tahun anggaran 2013	406.331.183.450,18	928.988.107.074,50	43,74
4	Tahun anggaran 2014	436.082.983.350,00	1.060.540.670.362,30	41,12
5	Tahun anggaran 2015	464.670.214.141,32	1.051.247.663.395,22	44,20
6	Tahun anggaran 2016	466.082.652.719,00	1.280.948.775.316,64	36,39

Sumber: DPKAD 2016 dan Analisa Data

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011-2016 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kotawaringin Barat relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD.

3.1.3.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD.Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Guna menutup defisit dan surplus tersebut diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukan bahwa realisasi belanja Kabupaten Kotawaringin Barat masih di bawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surplus realisasi, sebagaimana tampak pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3. 9: Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	**645.668.401.364,35**	**772.238.241.694,49**	**875.984.792.231,00**	**1.011.571.513.402,66**	**1.041.107.473.802,98**	**1.322.594.838.557,43**
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	582.722.239.085,11	673.769.246.555,32	918.895.547.833,50	1.053.798.680.924,30	1.039.534.340.193,22	1.280.948.775.316,64
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000,00	2.668.900.000,00	10.100.000.000,00	6.499.557.768,00	11.500.000.000,00	40.498.000.000,00
A	Defisit riil	55.446.162.279,24	95.800.095.139,17	-53.010.755.602,50	-48.726.725.289,64	-9.926.866.390,24	41.646.063.240,79
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	60.410.241.046,00	116.547.722.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	99.100.732.450,03
5.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	30.000.000.000,00	0
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	671.994.660,00	131.271.100,00	209.243.285,00	423.552.200,00	265.728.800,00	283.578.076,00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	61.082.235.706,00	116.678.994.085,24	212.688.332.509,41	160.101.129.106,91	141.640.132.617,27	99.156.971.964,41
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	116.528.397.985,24	212.479.089.224,41	159.677.576.906,91	111.374.403.817,27	131.713.266.227,03	100.305.035.205,20

Sumber: BPKAD 2017

Dari Tabel 3.8 di atas tampak bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada periode 2011 sampai 2016 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 6 tahun terakhir (2011-2016) terlihat pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3. 10: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	112,74	102,23	104,88	103,96	85,58	237,96
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	23,05	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,25	0,12	0,10	0	0,20	0,34
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0	0	0	0	0	240,85

Sumber: BPKAD 2017

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2011-2016 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 6 tahun terakhir (2011-2016) tampak pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 11: Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	60.410.241.046,00	100,00	116.547.722.985,24	100,00	212.479.089.224,41	100,00	159.677.576.906,91	100,00	111.374.403.817,27	100,00		
2.	Pelampauan penerimaan PAD	3.182.687.905,35	5,27	10.466.128.910,13	8,98	-2.247.663.214,14	-1,06	12.631.422.600,09	7,91	-1.849.371.051,69	-1,66		
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	16.034.675.239,00	26,54	28.702.540.405,00	24,63	10.763.060.571,00	5,07	3.317.382.280,00	2,08	-6.512.924.332,00	-5,85		
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	16.298.647.220,00	26,98	28.557.569.379,36	24,50	-6.383.503.868,56	-3,00	-14.449.705.877,43	-9,05	9.269.668.586,67	8,32		
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	42.745.896.914,89	-70,76	-45.696.265.544,67	-39,21	-88.682.535.166,50	-41,74	1.499.099.002,66	0,94	-72.165.295.314,78	-64,80		
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum erselesaikan	0	0,00	0	0,00	333.538,00	0,00	49.048.301,00	0,03	6.283.102,00	0,01		
7.	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Ditengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman daerah yang bersumber dari Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

3.1.4 Proyeksi Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak posistif dan daya ungkit yang siginifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terkait dengan hal terebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kapasitas riil keuangan daerah yang dimaksud merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama lainnya.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi dan pajak daerah tersebut dipungut
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan
- Penerimaan dana bagi hasi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil diperoleh

Untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap kemampuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi forecast, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan

sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.1.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

1) Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
   - Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   - Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
   - Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB
2) Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
   - Peningkatan DAU cukup kecil dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;
   - Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
3) Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
4) Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2017-2022 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Belanja Rutin diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur; (2) Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif; (3) Pemanfaatan berpihakan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan; (4) Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertanian arti luas dan pariwisata); dan

(5) Mensinergikan fokus pembangunan dengan pemanfaatan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

Sebagai upaya untuk mensinergikan dengan proses pencapaian visi dan 5 (lima) misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlandaskan strategi dan arah kebijakan ekonomi daera yang isinya sebagai berikut

1. Menciptakan klaster perekonomian cepat tumbuh berbasis potensi Unggulan
2. Kebijakan yang afirmatif terhadap sektor unggulan (pupuk, bibit, harga jual, modal, perijinan
3. Menjaga dan menumbuhkan iklim Investasi perdagangan yang kondusif dan kompetitif.
4. Membangun Sistem Inovasi Daerah (SIDA) melalui pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (prukab).
5. Berorientasi pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiscal daerah.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 12: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Rupiah)

No.	Uraian	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
		(APBD)										
1	**PENDAPATAN**	**1.311.782.236.500**	-1,69	**1.289.644.404.000**	**39,35**	**1.797.141.073.000**	**13,14**	**2.033.262.447.000**	**11,61**	**2.269.383.268.000**	**10,40**	**2.505.504.070.000**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**154.892.190.000**	19,73	**185.457.434.000**	**14,80**	**212.902.300.000**	**13,57**	**241.782.894.000**	**12,11**	**271.063.488.000**	**10,95**	**300.744.082.000**
1.1.1.	Pajak daerah	44.980.000.000	27,12	57.180.000.000	7,77	61.622.600.000	15,90	71.418.999.500	8,96	77.815.400.000	16,70	90.811.799.100
1.1.2.	Retribusi daerah	15.546.206.000	18,69	18.452.318.000	15,42	21.298.302.220	13,14	24.096.619.300	11,61	26.894.936.380	10,40	29.693.253.460
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yg dipisahkan	7.265.000.000	28,14	9.309.174.000	6,92	9.953.050.000	13,14	11.260.750.000	11,61	12.568.450.000	10,40	13.876.150.000
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	87.100.984.000	15,40	100.515.942.000	19,41	120.028.347.780	12,48	135.006.525.200	13,91	153.784.701.620	8,18	166.362.879.440
1.2.	**Dana Perimbangan**	**963.269.044.000**	**-6,76**	**898.156.928.000**	**45,41**	**1.305.978.000.000**	**13,14**	**1.477.567.000.000**	**11,61**	**1.649.155.446.000**	**10,40**	**1.820.743.874.000**
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak / bukan pajak	68.077.342.000	1,33	68.981.515.000	35,20	93.265.958.540	13,14	105.519.880.100	11,61	117.773.801.540	10,40	130.027.723.220
1.2.2.	Dana alokasi umum	662.249.343.000	-1,41	652.906.913.000	38,96	907.281.009.630	13,14	1.026.486.463.450	11,61	1.145.691.363.390	10,40	1.264.896.245.130
1.2.3.	Dana alokasi khusus	222.942.359.000	-20,94	176.268.500.000	73,28	305.431.031.830	13,14	345.560.656.450	11,61	385.690.281.070	10,40	425.819.905.650
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**203.621.002.500**	**1,18**	**206.030.042.000**	**36,40**	**278.960.773.000**	**12,53**	**313.912.553.000**	**11,23**	**349.164.334.000**	**9,98**	**384.016.114.000**
1.3.1	Hibah	3.000.000.000	1.112,66	38.179.800.000	-89,00	4.110.000.000	13,14	4.650.000.000	11,61	5.190.000.000	10,40	5.730.000.000
1.3.2	Dana darurat	-		-		-		-		-		-

No.	Uraian	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemda lainnya ***)	65.452.716.500	8,06	70.725.351.000	26,79	89.670.221.180	11,24	99.751.709.700	10,41	110.133.199.220	13,51	125.014.688.515
1.3.4	Dana penyesuaian dan otsus****)	121.363.286.000	-31,12	83.595.758.000	98,89	166.267.701.820	13,14	188.113.093.300	11,61	209.958.484.780	8,07	226.903.875.485
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	13.805.000.000	-2,00	13.529.133.000	39,79	18.912.850.000	13,14	21.397.750.000	11,61	23.882.650.000	10,40	26.367.550.000

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui:

a. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
b. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022.
c. Mendanai kegiatan program prioritas untuk mendukung capaian target visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan program prioritas dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
d. Mendanai program-program prioritas lanjutan (program-program unggulan) yang belum terlaksana pada RPJMD tahun 2012-2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan.

Sementara itu, dari total proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun anggaran sebagaimana telah disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja selama 5 (lima) tahun kedepan baik untuk belanja tidak langsung, maupun belanja langsung. Proyeksi belanja daerah tersebut memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a. Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022
b. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
c. Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 13: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (milyar rupiah)

No	*Uraian*	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
		(APBD)										
A	***Belanja Tidak Langsung***	**629.807.759.500**	**0,05**	**630.151.041.000**	**27,79**	**805.260.032.840**	**7,14**	**862.758.733.700**	**26,26**	**1.089.303.969.190**	**10,40**	**1.202.641.954.423**
1	*Belanja Pegawai*	446.861.667.000	5,31	470.584.816.200	10,71	520.987.089.000	8,00	562.666.056.000	31,26	738.548.091.111	8,78	803.364.825.555
2	*Belanja Bunga*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	*Belanja Subsidi*	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	*Belanja Hibah*	26.465.365.000	-70,15	7.898.680.000	89,00	15.000.000.000	0,00	15.000.000.000	299,41	59.911.718.306	20,44	72.158.517.265
5	*Belanja Bantuan Sosial*	2.448.000.000	0,00	2.448.000.000	40,85	3.448.000.000	1,51	3.500.000.000	366,84	16.339.559.538	47,21	24.052.839.088
6	*Belanja Bagi Hasil*	6.052.621.000	24,96	7.563.231.800	9,64	8.292.091.000	13,14	9.381.562.000	62,56	15.250.255.569	10,40	16.836.987.362
7	*Belanja Bantuan Keuangan*	142.566.455.500	-2,39	139.156.313.000	81,47	252.532.852.840	5,81	267.211.115.700	-3,79	257.075.736.729	10,40	283.823.501.244

No	Uraian	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
8	*Belanja Tidak Terduga*	5.413.651.000	-53,82	2.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000	0,00	5.000.000.000	-56,43	2.178.607.938	10,40	2.405.283.908
B	***Belanja Langsung***	**676.410.364.000**	**3,10**	**697.369.805.000,00**	**23,03**	**858.000.000.000**	**15,15**	**988.000.000.000**	**19,44**	**1.180.079.299.955**	**10,40**	**1.302.862.117.292**
1	*Belanja Pegawai*	92.490.814.520	33,56	123.534.865.894,80	-23,60	94.380.000.000	4,68	98.800.000.000	7,50	106.207.136.996	- 14,13	91.200.348.210
2	*Belanja Barang dan Jasa*	240.757.550.668	8,38	260.939.352.188,20	-7,93	240.240.000.000	11,04	266.760.000.000	15,02	306.820.617.988	6,16	325.715.529.323
3	*Belanja Modal*	343.161.998.812	-8,82	312.895.586.917,00	67,27	523.380.000.000	18,93	622.440.000.000	23,23	767.051.544.971	15,50	885.946.239.759
	Jumlah	**1.306.218.123.500**	**1,63**	**1.327.520.846.000**	**25,29**	**1.663.260.032.840**	**11,27**	**1.850.758.733.700**	**22,62**	**2.269.383.269.145**	**10,40**	**2.505.504.071.714**

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan untuk:

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu,
b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis;
c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib antara lain pembayaran utang pokok, dan penyertaan modal pada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan agenda pembangunan dan asumsi tersebut di atas, maka proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.14: Proyeksi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Penerimaan Pembiayaan**						
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	4.435.887.000,00	28.188.000.000,00	105.111.252.759,63	92.584.027.667,41	81.549.805.126,22	71.830.648.154,71
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	20.000.000.000,00	76.268.842,93	40.951.113,48	21.987.926,27	11.806.001,37
f	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		**4.435.887.000,00**	**48.188.000.000,00**	**105.187.521.602,56**	**92.624.978.780,89**	**81.571.793.052,48**	**71.842.454.156,08**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**						
a	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
b	Penyertaan Modal(investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.311.558.000,00	17.977.298.270,20	16.414.054.942,36	14.986.745.816,94	13.683.550.528,51
c	Pembiayaan Pokok Utang	0	-	-	-	-	-
d	Pemberiaan Pinjaman Daerah	0					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**10.000.000.000,00**	**10.311.558.000,00**	**17.977.298.270,20**	**16.414.054.942,36**	**14.986.745.816,94**	**13.683.550.528,51**
Pembiayaan Netto		**(5.564.113.000,00)**	**37.876.442.000,00**	**87.210.223.332,36**	**76.210.923.838,53**	**66.585.047.235,55**	**58.158.903.627,57**

3.1.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka Pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, guna pembiayaan belanja langsung / program. Berikut ini merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 15: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Proyeksi					
		APBD Th 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	1,311,782,236,500.00	1,289,644,404,000	1,797,141,073,000	2,033,262,447,000	2,269,383,268,000	2,505,504,071,171
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	4,435,887,000.00	28,188,000,000.00	105,111,252,759.63	92,584,027,667.41	81,549,805,126.22	71,830,648,154.71
	Total Penerimaan	1,316,218,123,500.00	1,317,382,404,000.00	1,902,252,325,759.63	2,125,846,474,667.41	2,350,933,073,126.22	2,577,334,718,154.71
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung	629,809,759,500.00	630,151,041,000	939,141,664,005	1,045,262,466,575	1,089,303,969,190	1,202,641,954,423
5	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000.00	10,311,558,000	17,977,298,270.20	16,414,054,942.36	14,986,745,816.94	13,683,550,528.51
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	676,408,364,000.00	677,369,805,000.00	945,133,363,484.43	1,064,169,953,150.05	1,246,642,358,119.28	1,361,009,213,203.20

Pendapatan pada proyeksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga diproyeksikan di akhir tahun mencapai Rp. 2,505,504,071,715, Sisa Lebih Riil Perhitungan anggaran menurun setiap tahunnya. Jika di total antara komponen pendapatan dan sisa lebih rill perhitungan anggaran menjadi total penerimaan,untuk mengetahui sisa lebih riil penghitungan anggaran maka penerimaan dikurangi belanja tidak langsung ditambah pengeluaran pembiayaan. Proyeksi menunjukkan kapasitas riil kemampuan meningkat secara signifikan, harapannya kapasitas rill anggaran dapat optimal untuk alokasi program-program yang dicanangkan pada program prioritas II, III dan I.

Tabel 3.16: Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Uraian	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Prio 1	Rp. 101,772,898,701	15	Rp 110,545,317,726	15	Rp 164,907,173,357	17.66	Rp 166,314,040,409	17	Rp 152,267,962,699	15	Rp 152,500,411,481	14
Prio 2	Rp 556,383,113,461	81	Rp 601,836,187,995	80	Rp 717,123,351,572	76.78	Rp 751,215,886,968	77	Rp 792,788,423,191	78	Rp 834,273,067,973	79
Prio 3	Rp 29,216,865,688	4	Rp 39,579,136,600	5	Rp 51,955,237,706	5.56	Rp 57,522,721,505	6	Rp 68,252,152,562	7	Rp 73,911,852,465	7

Data menunjukkan Kerangka Pendanaan Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas mengarah terhadap prioritas II, yakni adalah prioritas yang langsung mengacu terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah. Makna dari prioritas diatas adalah merujuk terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tepatnya pasal 158, yakni :

a. Prioritas Pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas Kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas ketiga sebagaimana dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemererintahan lainnya.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Analisis Tahapan RPJP Berjalan

Visi pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006-2025 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada 12 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukungn terhadap pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustry dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan system berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas,
8. kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan msyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat

bagi pencegahan masalah social kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan.

11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dasar penentuan arahan strategi pembangunan di tahap ke III (2017-2022) berlandaskan dari pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2 (2012-2016). Terdapat 9 kata kunci pembangunan yang perlu difokuskan penataannya dan nantinya akan dijadikan dasar dari tahapan RPJM yang akan dilakukan ke depan. Adapun ke-9 kata kunci pembangunan yang perlu menjadi fokus antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan.
2. Perbaikan tingkat kesehatan.
3. Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup.
4. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial.
5. Optimalisasi potensi sumber daya unggulan.
6. Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi.
7. Kapasitas aparatur pemerintah.
8. Pemerataan struktur ekonomi dan peningkatan PAD.
9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi fokus pembangunan tahap ke-3 (2017-2022) adalah:

1. Aspek pendidikan.
2. Aspek kesehatan.
3. Aspek keamanan dan ketertiban.
4. Aspek pengelolaan sumber daya alam.
5. Aspek aparatur pemerintahan.

4.2. RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi "**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**". Misi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Berlandaskan pada misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

4.3. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 adalah “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 10 Tujuan pembangunan yang tertuang dalamdalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, meliputi:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas.
2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, daerah Pesisir dan Pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara konsisten.
6. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

4.3.1. Isu-isu strategis Provinsi

1. **Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun**

   Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kalimantan Tengah sendiri, khususnya Kota Palangka Raya pada tahun 2015 yang lalu mengalami bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan perlu dilanjutkan.

2. **Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing**

   Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pentingnya menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya

saing tinggi dalam persaingan global adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial maupun ekonomi. Realisasi potensi SDM yang telah menjadi tenaga kerja di Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Sebanyak 46,92% penduduk yang bekerja di Kalimantan Tengah adalah penduduk dengan pendidikan SD ke bawah sementara penduduk yang bekerja dengan pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 11,42%. Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah.

3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan merupakan pelaksanaan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian kualitas lingkungan hidup dengan tetap menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengurangi prinsip etika lingkungan. Provinsi Kalimantan Tengah telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan *Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce* sejak tahun 2009. Melalui GCF ini telah lahir berbagai kerjasama terkait penyelamatan lingkungan hidup, terutama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru dunia.terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan

4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapatyang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah. Namun adanya keterbatasan aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan

peningkatan aksesibilitas wilayah baik di internal maupun eksternal Provvinsi Kalimantan Tengah.

5. **Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan**

   Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Provinsi Kalimantan Tengah yang dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan, keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini. Peran aktif pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergi.

6. **Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.**

   Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saingproduk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas wilayah sangat diperlukan guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya.

   Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain.

7. **Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi**

   Eksploitasi setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan perekonomian daerah dengan berimbas positif pada penyerapan tenaga kerja,peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusiamaupun infrastruktur melalui CSR serta tetap memperhatikan lingkungan hidup untuk menghindari degradasi lingkungan

8. **Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh**

   Sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan berlandaskan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

4.4. Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya

Dalam rangka menjaga sinkronisasi pembangunan dengan daerah lainnya, amka perlu dilihat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar kabupaten Kotawaringin Barat. Daerah yang berbatasan denga Kotawaringin Barat adalah kabupaten Lamandau dengan periode pembangunan tahun 2014-2018 dan Kabupaten Sukamara dengan periode pembangunan tahun 2013-2018. Telaah Dokumen RPJMD daerah lainnya tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4. 1: Telaah Dokumen RPJMD Daerah Lainnya

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Lamandau	2014-2018	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) (2017) 2. Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan (2017) 3. Pengembangan sarana infrastuktur transportasi (lanjutan) (2017) 4. Pengembangan sarana infrastuktur transportasi (lanjutan) 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) (2018) 6. Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan) (2019)	1. Perkembangan pariwisata di kabupaten lamandau dapat menjadi potensi yang sangat besar bagi Kotawaringin Barat, mengingat salah satu akses masuk (jalur udara) kabupaten tersebut masih berada di kabupaten Kotawaringin Barat 2. Selain untuk mendukung pariwisata, kerjasama antar daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan juga dapat meningkatkan efisiensi pembangunan termasuk mengantisipasi kemacetan dimasa yang akan datang
2	Kabupaten Sukamara	2013-2018	1. Meningkatnya kerjasama dengan daerah lainnya dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan secara, proporsional. 2. Meningkatnya kuantitas	1. Proses Pembangunan di berbagai sektor akan lebih efektif jika bekerjasama dengan daerah lainnya. Khususnya dengan focus pembangunan yang sama, dalam hal ini sektor pariwisata dan pertanian. 2. Seperti halnya kabupaten lamandau, Kabupaten Sukamara juga mengembangkan sektor kepariwisataannya melalui

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. 3. Menghapus keterisolasian intra/inter wilayah. 4. Tersedianya dan meningkatnya kualitas infrastruktur dasar irigasi. 5. Berkembangnya usaha ekonomi produktif bagi masyarakat dan perempuan dengan pengembangan UKM UMKM, dan Koperasi. 6. Berkembangnya kebudayaan yang berdasarkan kepada nilainilai luhur masyarakat melalui peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam pelestariannya untuk memperkuat promosi pariwisata daerah. 7. Meningkatnya daya tarik dan kemitraan kepariwisataan. 8. Meningkatnya mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana.	keunggulan budaya lokal. Hal tersebut dapat menjadi potensi yang baik untuk melaksanakan pengembangan pariwisata. 3. Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektifitas antar daerah dapat dilaksanakan kerjasama dalam membangun konektifitas antar kabupaten serta daerah-daerah terpencil

4.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, agroindustri, dan pariwisata ekologis.. untuk mencapai penataan ruang tersebut telah ditetapkan 6 kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
b. pengembangan pertanian dan perkebunan didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
c. pengembangan dan pelestarian potensi sumber daya kelautan sepanjang Pantai Kumai tetap menjaga lingkungan;
d. pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya Kerajaan Kotawaringin dan pariwisata ekologis mencakup hutan untuk Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau;
e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
f. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah.

Enam kebijakan penataan ruang tersebut dilakukan melalui 9 strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. 9 strategi tersebut adalah:

a. mendorong terselenggaranyapembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan tetap dapat menjamin berlangsungnya konservasi hutan,tersedianya air tanahdanair permukaan, penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan;
b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
c. memastikan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan lindung Taman Nasional Tanjung Puting,Taman Wisata Tanjung Keluang dan Suaka Margasatwa Sungai Lamandau ;
e. mewujudkan Kota Pangkalan Bun sebagai pusat pelayanan regional;

f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
g. mempertahankan fungsi kawasan hutan dan non hutan;
h. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas guna membuka keterisolasian kawasan tertinggal; dan
i. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan berbasis keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan.

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 dibagi menjadi 5 tahapan. Yaitu tahun 2017 -2022, tahun 2022 -2027, tahun2027 -2032, tahun 2032 -2037. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat perode jangka menengah pertama (2017-2022) adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan struktur ruang

a. Perwujudan pusat kegiatan
   1) Pengembangan Struktur Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
   2) Pemantapan fungsi Pusat dan Sub Pusat kegiatan
b. Perwujudan sistem prasarana
   1) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Amin jaya - Kabupaten Seruyan
   2) Peningkatan Jalan Negara Pangkalan Bun ke Nangabulik
   3) Program pembangunan kawasan perumahan baru
   4) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perkotaan
   5) Program peningkatan lingkungan perumahan kampung perdesaan
   6) Penyediaan lisiba dan kasiba
   7) Perbaikan kualitas sarana pendidikan
   8) Perbaikan kualitas sarana kesehatan
   9) Perbaikan kualitas sarana
   10) Program pengaturan, pembinaan kegiatan perdagangan di kawasan perdesaan
   11) Penyediaan jaringan transmisi
   12) Mencari sumber energi baru (mikro hidro, angin)
   13) Penyediaan jaringan transmisi
   14) Penyediaan TPS
   15) Penyediaan TPA
   16) Pengolahan Sampah

2. Perwujudan pola ruang

a. Perwujudan kawasan lindung
   1) Penataan ulang batas Kawasan Taman Nasional
   2) Penataan ulang batas kawasan, penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan.
   3) Inventarisasi penggunaan kawasan
   4) Reboisasi kawasan yang telah rusak terbakar
   5) Inventarisasi penggunaan sempadan pantai, sungai, danau
   6) Sosialisasi kepada masyarakat
   7) Identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan
   8) Pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan (kegiatan mitigasi, kesiagaan, dan pemadaman api)
   9) Program pengembangan dan pelestarian mangrove

b. Perwujudan kawasan budidaya
   1) Penataan kawasan hutan produksi
   2) Pengembangan hutan rakyat pada kawasan hutan dan tanah milik masyarakat
   3) Pengembangan dan intensifikasi basah
   4) Pengembangan dan intensifikasi kering untuk tanaman pangan
   5) Intensifikasi hortikultura
   6) Pengembangan budidaya perikanan darat
   7) Pengembangan budidaya laut
   8) Pengelolaan limbah industri terpadu
   9) Perencanaan obyek-obyek wisata
   10) Pengembangan obyek-obyek wisata
   11) Promosi objek wisata
   12) Promosi objek wisata
   13) Perencanaan obyek-obyek wisata
   14) Pengembangan obyek-obyek wisata
   15) Promosi objek wisata
   16) Perencanaan obyek-obyek wisata
   17) Pengembangan obyek-obyek wisata
   18) Promosi objek wisata

3. Perwujudan kawasan strategis kabupaten

a. Kawasan pertumbuhan ekonomi
   1) Pemantauan Pengendalian perpindahan penduduk antar wilayah sebagai upaya untuk mengatur penyebaran penduduk
   2) Pengembangan fasilitas angkutan udara dan pelabuhan
   3) Peningkatan penyediaan fasilitas prasarana kota
   4) Pengendalian pusat-pusat pelayanan pengarahan pengembangan pada area perkotaan di luar
   5) Pengembangan prasarana kota terpadu
   6) Pengembangan sistem angkutan perkotaan terpadu dengan sistem regional
   7) Pemantauan perkembangan kegitatan dalam kawasan

b. Kawasan tertinggal
   1) Pengarahan alokasi pusat-pusat pelayanan dan permukiman
   2) Peningkatan dan penyediaan fasilitas prasarana

c. Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
   1) Pengendalian dan pengawasan terhadap semua bentuk kegiatan yang berpotensi untuk mengurangi kapasitas dan kualitas sumber daya air
   2) Pengembangan objek wisata alam dan pendidikan
   3) Pemantauan perkembangan kegiatan dalam kawasan

4.6. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

4.6.1 Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat persuasif, dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada Pedoman Umum Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, memiliki 6 (enam) prinsip KLHS yang seyogyanya dianut sebagai berikut ini:

Prinsip 1: Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan.

Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program(*Improvement of the Policy, Plan, and/or Program*)

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program.

Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial(*Social Learning and Capacity Building*)

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnyamengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya.

Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (*Influencing Decision Making*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip 5: Akuntabel (*Accountable*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak.

Prinsip 6: Partisipatif

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS.

4.6.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap program prioritas pembangunan, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan supaya implementasi program pembangunan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Rekomendasi tersebut adalah:

1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana pendidikan, tenaga pendidik.
2. Peningktan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi tepat guna.
3. Peningkatan mutu dan kualitas sarana kesehatan.
4. Pendampingan oleh tenaga-tenaga professional dalam pengenalan dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan bagi masyrakat.
5. Pengawasan dalam pembangunan sarana-prasarana.
6. Pendampingan terhadap masyarakat untuk mengetahui prioritas kebutuhan sarana-prasarana masyrakat.
7. Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur alih fungsi lahan sesuai Undang-Undang 41 tahun 2009;
8. Penyesuaian antara RTRW dangan moratorium kehutanan
9. Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan

10. Pembentukan kelompok masyarakat siaga kebakaran hutan secara mandiri yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah
11. Pelaku industri/investor yang akan membangun usahanya harus memiliki IPAL dan pembangunannya harus sesuai tata ruang dan kaidah pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
12. Peningkatan fasilitas dan komponen pendukung penegak hukum.
13. Meningkatkan penyuluhan kepada aparat hukum dan masyarakat untuk menjaga keamanan, kejujuran dan keadailan.
14. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka turut sertamenjaga keamanan, kejujuran dan keadilan.

4.7. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawarigin Barat adalah sebagai berikut ini:

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah;
2. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah;
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government;
5. belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan;
6. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana;
7. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah;
8. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah;
9. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya;

10. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
11. Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru;
12. Masih adanya anak putus sekolah;
13. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar.
14. APK PAUD rendah (rata-rata 30,03%);
15. Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th);
16. Masih kurangnya minat baca masyarakat;
17. Belum semua puskesmas terakreditasi;
18. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar;
19. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional;
20. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir;
21. Masih adanya balita gizi buruk;
22. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
23. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan;
24. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlit berprestasi;
25. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah;
26. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah;
27. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya local;
28. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten;
29. Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga;
30. Belum berkembangnya sektor industri hilir;
31. Keterbatasan dukungan infrastruktur;
32. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang;
33. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional;
34. Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global;
35. Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok;
36. Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha;
37. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan;
38. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi;

39. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP);
40. Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan);
41. Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi;
42. Basis populasi induk (akseptor) masih rendah;
43. Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul;
44. Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan;
45. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat;
46. Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan;
47. Masih rendahnya SDM petani dalam penguasan teknologi budidaya perkebunan;
48. Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian;
49. Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian;
50. minimnya pengeolaan agribisnis usaha pertanian;
51. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian;
52. Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT);
53. Ketergantungan produk hortikultura dari luar darah;
54. Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah;
55. Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat;
56. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya;
57. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll;
58. Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan;
59. Masih bayak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hokum;
60. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan;
61. Tingginya konsumsi beras perkapita;
62. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan;
63. Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah);
64. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal;
65. Kemampuan kelompok tani masih rendah;
66. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi;
67. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;
68. Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan;

69. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM;
70. Penggalian pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah;
71. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi;
72. Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD;
73. Target PAD selama 4 th tidak tercapai;
74. Belum semua desa terhubung akses jalan darat;
75. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik;
76. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota;
77. Belum semua masyarakat terlayani air bersih;
78. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat;
79. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang;
80. Masih terjadinya erosi pada tebing sungai;
81. Banyak desa yang belum sepakat tentang batas desa karena persoalan di desa yang kompleks;
82. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan;
83. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman;
84. Masih tingginya angka backlog;
85. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB;
86. Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan);
87. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan;
88. Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanahan;
89. Meningkatnya konflik pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
90. Belum tersedia angkutan dalam kota;
91. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan;
92. Masih terbatasnya pelayanan angkutan udara;
93. Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan keamanan trasnportasi darat, laut/ sungai dan udara;
94. Ketersediaan area parkir belum memadai;
95. Study perencanaan perhubungan belum lengkap;
96. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mengelola air tanah dan air permukaan sesuai aturan perundang-undangan;
97. Belum terkelolanya Tempat Pemakaman Umum;
98. Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan;
99. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana;

100. Adanya intrusi air laut akibat kemarau panjang;
101. Adanya kawasan rawan bencana gelombang pasang dan banjir;
102. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup;
103. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan;
104. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan;
105. Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
106. Masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium gambut;
107. Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana;
108. Belum terfasilitasi mitigasi bencana;
109. Kurangnya jumlah personil PB;
110. Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam;
111. Belum optimalnya ketahanan ideologi berbangsa;
112. Belum optimalnya kewaspadaan masyarakat;
113. Pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal belum terlembagakan secara baik;
114. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah;
115. Pengelolaan dana bergulir belum terlembagakan secara baik;
116. Peran Perempuan dalam Bidang Pembangunan terutama di struktur Pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
117. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
118. Pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan masih kurang;
119. Masih terdapatnya anak yang berhadapan hukum;
120. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang layak untuk anak-anak;
121. Kasus KDRT pada anak meningkat (0,3%);
122. Sistem Pencatatan KDRT bagi Petugas PUSK, Satgas desa, Petugas UPPA, Polres/Polsek belum berjalan;
123. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
124. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
125. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas;

126. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum optimal;
127. Masih belum optimalnya pengembangan Loka Latihan Kerja (LLK) milik pemerintah sesuai pasar kerja;
128. Masih tingginya kasus perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja;
129. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
130. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk;
131. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat;
132. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
133. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata;
134. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
135. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal sekitar obyek wisata (sadar wisata);
136. Belum optimalnya promosi wisata;
137. Belum adanya sistem terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

4.8. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan sudah mejadi permasalahan yang umum dihadapi ketika melaksanakan pembangunan. Namun meskipun sangat umum dihadapi, isu kemiskinan masih menjadi perhatian yang sangat penting untuk sesegera mungkin ditanggulangi. Hal tersebut dikarenakan karena factor kemiskinan jika dibiarkan dapat dapat menyebabkan permasalahan lainnya. Sepertihalnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, isu kemiskinan masih menjadi isu yang sangat serius untuk segera diselesaikan karena angka kemiskinan di kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi.

2. **Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja**

   Kualitas dan kuantitas ASN dalam akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mash rendah ditunjukkan dengan nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah. hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah serta masih terbatasnya kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. **Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.**

   Penguasaan ASN dalam penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan secara Elektronik masih terbatas. Hal ersebut ditunjukkan dengan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

4. **Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

   Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi konsentrasi pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD diakrenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga nantinya ADD dapat dimanfaatan secara efektif dan efisien.

5. **Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan**

   Pendidikan merupakan pintu yang digunakan untuk menngkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun jika dilihat dari angka APK PAUD dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, nilainya masih cukup rendah. Hal itu didukung dengan fakta bahwa nilai APK PAUD yang masih diangka 30,03% dan masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai permasalahan. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan..

6. **Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan**

   Selain akses terhadap pendidikan, sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan kelayakannya.

Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun jika mengacu pada SNP masih terdapat sarana-prasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP.

7. **Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar**

   Tenaga pengajar merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan terhadap siswa didiknya. Oleh karena itu Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya kualitas tenaga pengajar harus diperhatikan baik dari segi kapasitas keilmuan dan kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat sekolah yang tidak dilengkapi dengan rumah dinas, serta masih elum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan pada masyarakat.

8. **Kurangnya minat baca masyarakat**

   Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingginya minat baca juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam menilai kualitas sumberdaya manusia. Jika dilihat dari kondisi empiris di Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

9. **Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar**

   Selain akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melihat kondisi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat beberapa fasilitas layanan kesehatan yang belum optimal seperti belum semuanya puskesmas yang ada mendapat akreditasi, belum terpenuhinya kebuthan obat-obatan sesuai standar, serta masih belum sesuainya RSUD dengan kualifikasi standar rumah sakit rujukan regional.

10. **Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan**

    Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat

dari nilai angka harapan hidup termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

11. **Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda**

    Pemuda sebagai penerus bangsa merupakan asset yang sangat berharga. Keaktifan pemuda dalam mengikuti atau melakukan hal-hal positif merupakan salah satu kontribusi yang daik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas social ekonomi di masyarakat. Oleh karena hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pemuda sehingga organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi pengembangan potensi-potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda di kabupaten Kotawaringin Barat. Namun kondisi yang ada sekarang, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih belum berjalan optimal.

12. **Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga**

    Salah satu pengembangan terhadap bakat-bakat pemuda adalah melalui berbagai cabang olahraga. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan sarana-prasarana yang layak pakai. Namun jika dilihat kondisi yang ada saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olah raga masih belum dilakukan secara optimal.

13. **Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri**

    Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan. Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya Rencana Induk pembangunan industry kabupaten. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industry khususnyasektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industry hilir.

14. **Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa**

    Kondusifitas aktifitas perdagangan barang dan jasa masih rendah, salah satu penyebabnya adalah peran daerah dalam melakukan perlindungan dunia usaha yang masih belum optimal. Hal tersebut berdampah pada tingginya fluktuasi harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang masih belum optimal juga semakin menurunkan kondusifitas aktifitas perdagangan khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil.

15. **Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertaninan, Perikanan dan Peternakan**

    Kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah

16. **Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah**

    Ketahanan pangan yang masih rendah tercermin dari tingkat konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan. Serta rendahnya keragaman pangan masyarakat (Pola Harapan Pangan) yang masih rendah.

17. **Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat)**

    Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM

18. **Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD**

    Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehigga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi. Selain itu penggalian PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

19. **Rendahnya Kualitas danKuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi**

    Dalam kondisi baik selain itu untuk daerah perkotaan masih memiliki masalah terkait drainase yang masih belum optimal. Dari segi akses, belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat. Dari sisi sanitasi hidup masyarakat juga masih tergolong rendah. Masih terdapatnya kawasan kumuh di perkotaan. Dari segi Transportasi, masih belum adanya angkutan dalam kota dan masih terbatasnya angkutan udara. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

20. **Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

    Dari segi kebencanaan, Kabupaten Kotawaringin Barat jga masih belum optimal. Masih banyak kawasan yang masuk dalam moratorium gambut serta masih kurangnya sosialisasi tentang Desa Siaga Bencana dan fasilitasi tentang tanggap bencana. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam.

21. **Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama**

    Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya ketahanan ideology berbangsa serta kewaspadaan masyarakat yang masih lemah.

22. **Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir**

    Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum belum optimal.

23. **Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak**

    Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang

berhadapan dengan hokum. Selain itu pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

24. **Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.**

    Keterlibatan masyarakat mutlak dilakukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan secara partisipatif. Selain itu tingkat perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja juga masih tinggi.

25. **Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek *Attraction, Accessibility, Ammenity,* dan *Ancillary Service* Destinasi Wisata**

    Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah *Aspek Attraction, Accessibility*, *Ammenity*, dan *Ancillary Service* Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal. Dari segi kesadaran masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

26. **Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat**

    Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui pembuatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Namun, saat ini branding yang dibuat masih belum optimal. Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini asih belum ada system yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dantantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktorstrategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR

K : KETAKWAAN

H : HARMONIS

L : LANGGENG

A : AMAN

S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :

N : NASIONALIS

U : UNGGUL

R : RELIGIUS

A : AMANAH

N : NYATA

I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun kabupaten kotawaringin barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inpiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
VISI "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS "	
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

5.2 MISI

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu **”**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**,** maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di*breakdown* ke dalam tiap misi.

Misi 1 Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup

Misi 4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata

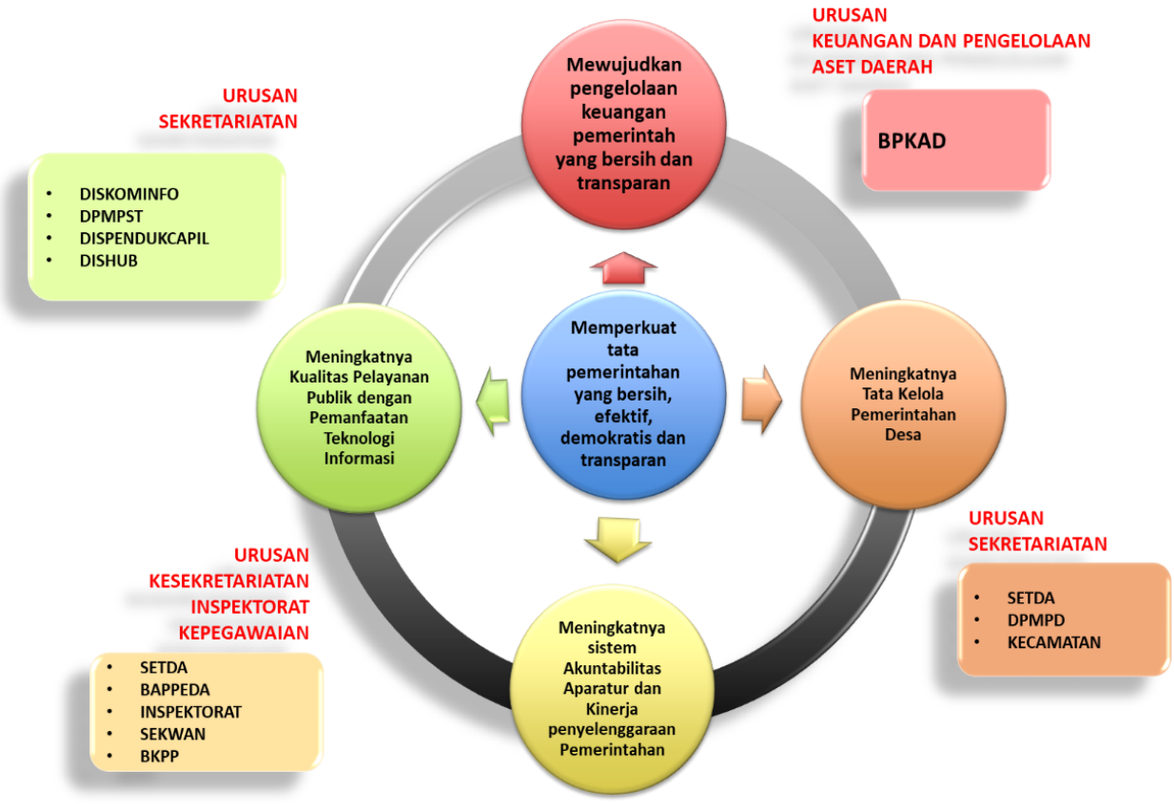


Gambar 5. 1: Ilustrasi Misi Pembangunan Daerah

Enam butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat diperjelas sebagai berikut.

Misi I "Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan"

Salah satu tolok ukur pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah Indeks *Good Governance*. Misi I Kabupaten Kotawaringin Barat terfokus terhadap tujuan diatas, dengan menetapkan 4 sasaran yakni 1) Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan; 2) Meningkatnya sistem Akuntabilitas Aparatur dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan; 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.



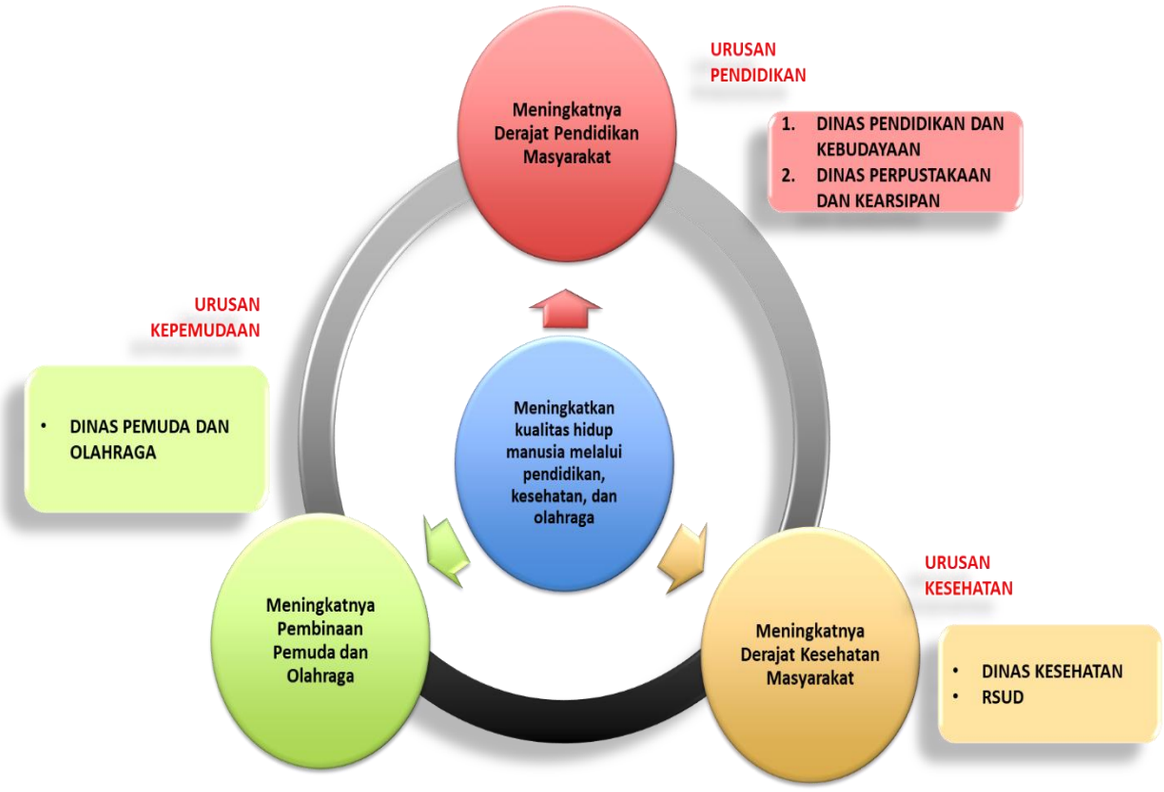
Gambar 5. 2: PerencanaanTerintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-1 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-1** sebagai berikut:

Misi II "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Olahraga."

Ditetapkan 1 Tujuan dan 3 Sasaran untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi II. Untuk mencapai hal

tersebut dapat dicapai melalui 3 sasaran yang meliputi 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan 3) Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.Sebagai upaya mencapai Misi Ke-2 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-2** sebagai berikut:



Gambar 5.3: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2

MISI III "Mendorong Penguatan Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Pada Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Industri Serta Pengelolaan Potensi Daerah Dan Sumber Energi Melalui Infrastruktur dan Memperhatikan Lingkungan Hidup"

Misi III Kabupaten Kotawaringin Barat terfokus terhadap peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan hidup. Kemudian kaidah misi tersebut diinterpretasikan terhadap 4 sasaran yang meliputi 1) Pertumbuhan ekonomi sektor primer; 2) Pengembangan potensi daerah; 3) Pemerataan aksesibilitas; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-3 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-3** sebagai berikut:

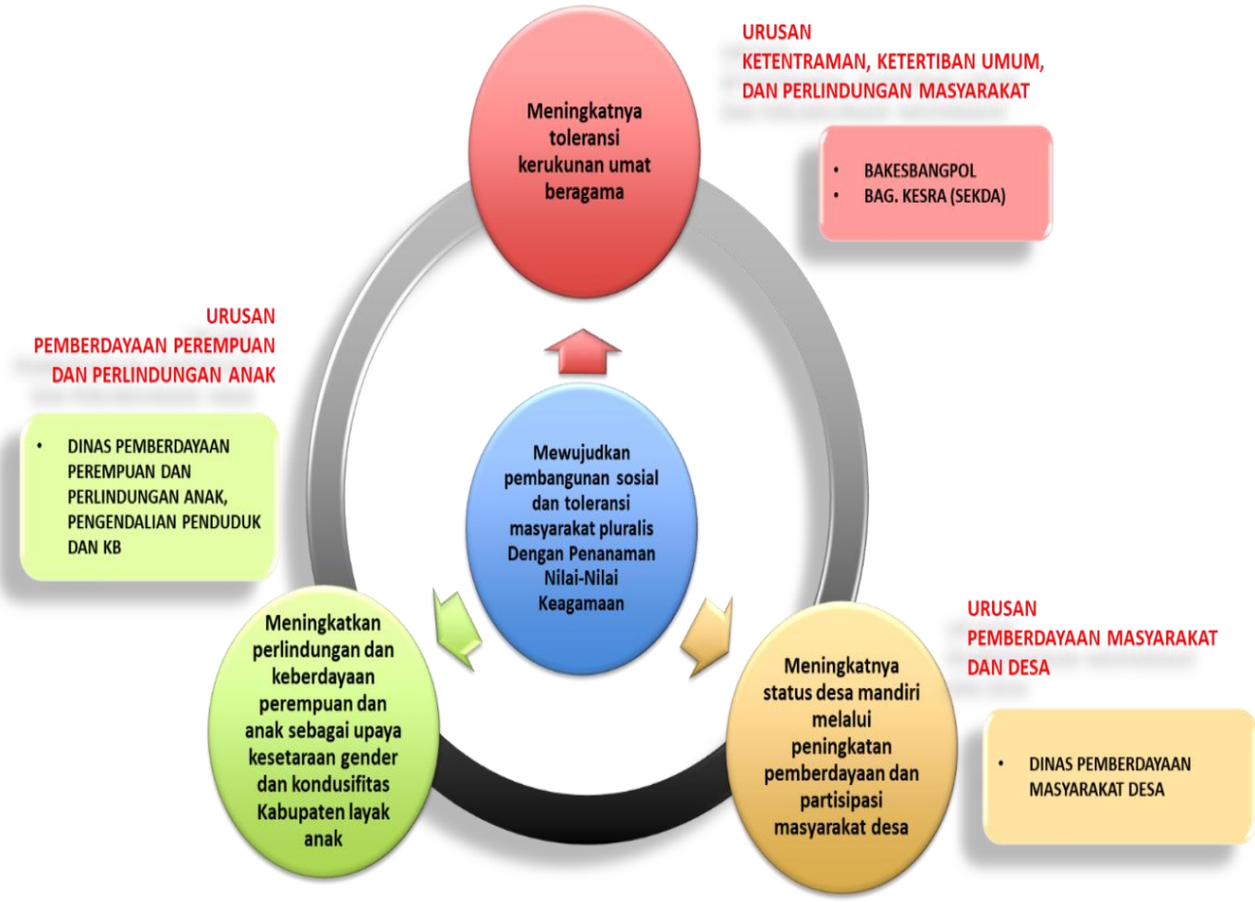


Gambar 5.4: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3

MISI IV "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat"

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan meningkatkan toleransi antar umat beragama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan perelindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-4 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-4** sebagai berikut:

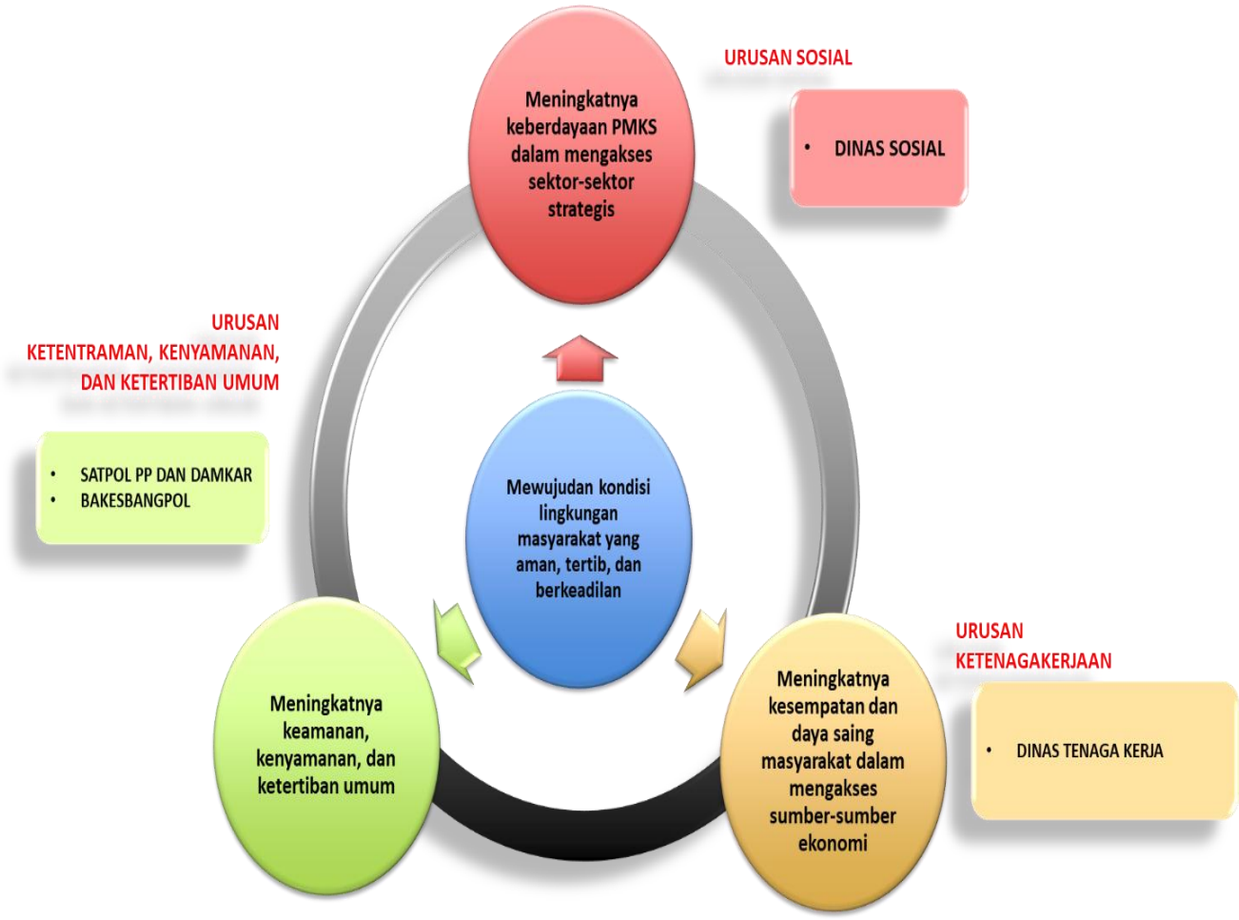


Gambar 5.5: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4

MISI V "Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis."

Misi kelima adalah terfokus terhadap mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Indikator tujuan yang merupakan fokus capaian yakni Angka Kemiskinan dengan sasaran dari Misi V adalah 1) Pemberdayaan PMKS; 2) Menekan pengangguran; dan 3) Meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-5 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-5** sebagai berikut:



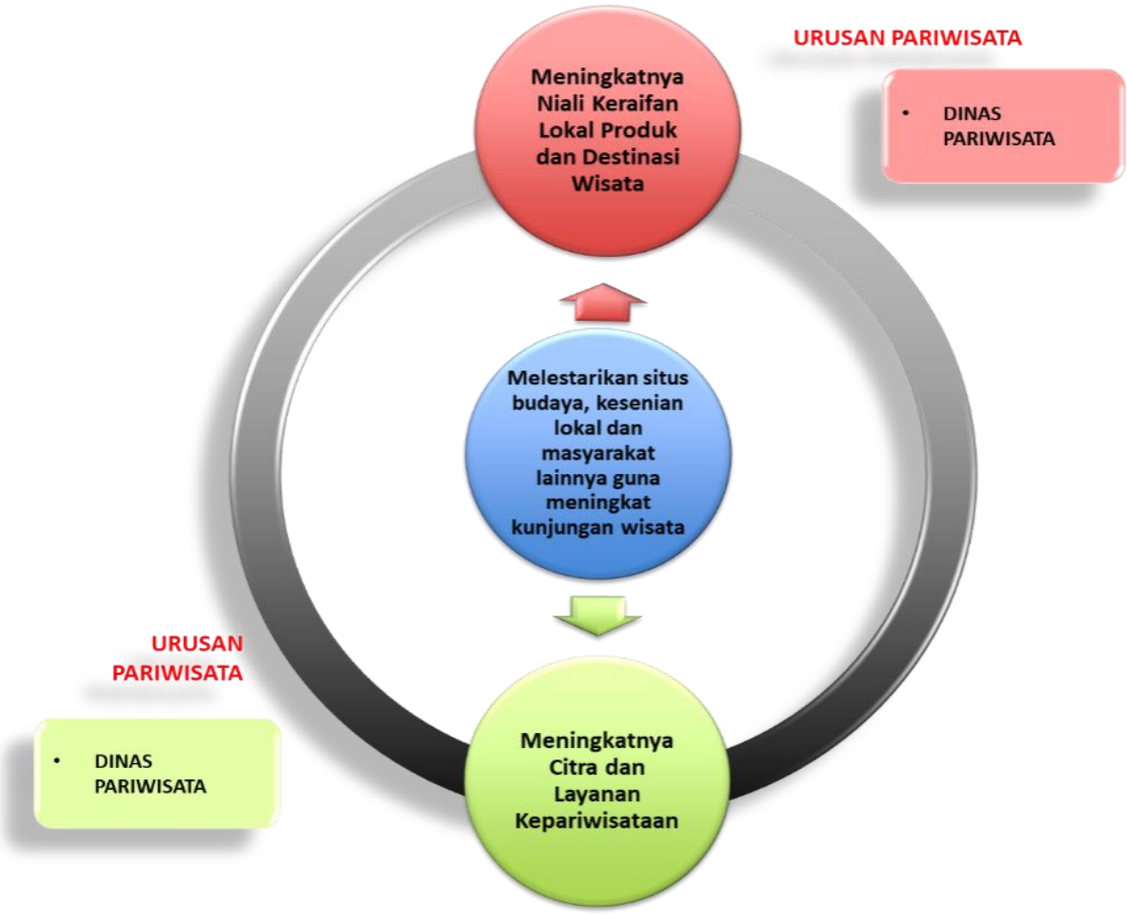
Gambar 5.6: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5

Menindak lanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021, maka berikut ini merupakan kerangka arsitektur Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2021 sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

MISI VI **"Melestarikan Situs Budaya, Kesenian Lokal Dan Masyarakat Lainnya Guna Meningkat Kunjungan Wisata"**

Perspektif Misi VI lebih diarahkan terhadap pembangunan pariwisata. Misi VI dapat dicapai dengan meningkatkan nilai kearifan lokal dan meningkatkan citra layanan kepariwisataan.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-6 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-6** sebagai berikut:



Gambar 5.7: Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6

5.3. Platform Bupati Terpilih

Penyusunan RPJM ini memuat VISI, MISI dan PROGRAM KERJA Bupati **Hj. NURHIDAYAH, SH, MH** dan Wakil Bupati **AHMADI RIANSYAH.**Sebagai tindak lanjut dari janji politik yang telah dikampanyekan oleh Bupati dan wakil Bupati Terpilih, berikut merupakan **VISI** (rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir pemerintahan):

"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu: I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR, K=KETAKWAAN, H=HARMONIS, L=LANGGENG, A=AMAN, S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu: N=NASIONALIS, U=UNGGUL, R=RELIGIUS, A=AMANAH, N=NYATA, I=INSPIRATIF.

MISI (rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan VISI) adalah:

1) Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2) Meningkatkan kwalitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3) Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6) Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Visi dan Misi tersebut diterjemahkan dalam beberapa program pembangunan bupati terpilih sebagai berikut:

Sekertariat Daerah

- Meningkatkan pengawasan di setiap bagian;
- Mensinergikan kinerja intra dan atau antar bagian;
- Tertib administrasi dan pelayanan publik dengan mengikuti kemajuan iptek;
- Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan memperhatikan kwalitas dan kwantitas yang baik dan seimbang;
- Pembangunan rumah jabatan Bupati;
- Revitalisasi rumah jabatan Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
- Pemindahan Base Camp Mobil Pemadam Kebakaran;
- Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati

Bagian-Bagian:

1. Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, integritas, konsisten, transparansi, akuntabel;
- Penguatan sistem pelaporan dan kinerja instansi;
- Penerapan e-government mewujudkan manajemen birokrasi modern;

- Peningkatan akses publik dan implementasi open government di seluruh instansi;
- Pemantapan kerja sama dan harmonisasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi lainnya;
- Peningkatan sinergisitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- Ada Coffe Break di SKPD;
- Menciptakan standar pelayanan masyarakat yang prima dengan motto Melayani dengan IKHLAS, RAMAH, SENYUM, dan TEPAT WAKTU;
- Penyelesaian Tata Batas antara Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

2. Hukum

- Sosialisasi hukum dan perundang-undangan ke setiap Desa/Kelurahan;
- Aktualisasi peraturan perundang-undangan dan menegakkan supremasi hukum;
- Pembuatan peraturan/petunjuk teknis dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Evaluasi peraturan dengan pembaharuan/revisi mengikuti keadaan kekinian;
- Sebagai advokasi atas permasalahan hukum yang ada dan penegakan hak azasi manusia (HAM);

3. Adm. Perekonomian, Infrastruktur dan SDA

- Peningkatan pengembangan kawasan ekonomi baru;
- Pemberdayaan ekonomi pedesaan dan rakyat melalui suprastruktur dan revitalisasi infrastruktur;
- Penataan dan pemberdayaan perekonomian pada sektor informal;
- Percepatan infrastruktur pedesaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa,
- Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan sarana dan prasarana umum, pemukiman dan ekonomi secara efisiensi, mudah dan murah;
- Peningkatan pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan perekonomian daerah;
- Pemetaan sumber daya alam yang layak untuk diexplorasi dan diexploitasi yang ramah lingkungan;
- Pemberdayaan dan mengikut sertakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan SDA;

- Pembuatan suprastruktur pengelolaan sumber daya alam yang terarah berwawasan lingkungan, kelestarian dan konservatif;
- Melakukan promosi tentang SDA yang potensial untuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- Target pertumbuhan ekonomi diatas 7% dengan tingkat inflasi dibawah 5%;

4. Adm. Pembangunan

- Pembuatan regulasi dalam penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah;
- Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan dengan sistem modernisasi yaitu mengikuti perkembangan iptek;

5. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

- Meningkatkan pembinaan mentalitas masyarakat, menciptakan kondisi aman, tentram dan dinamis;
- Meningkatkan jaminan perlindungan bagi masyarkat kurang mampu;
- Memberi bimbingan partisipatif dan penumbuhan etos kerja masyarakat;
- Meningkatkan kerukunan umat dan antar umat dalam kehidupan bergama;
- Memberdayakan peranan lembaga keagamaan dalam pembangunan;
- Meningkatkan harmonisasi antara agama;
- Bantuan sarana dan prasarana ibadah secara seimbang dan merata serta perayaan hari-hari besar keagamaan; Bantuan sosial secara efektif dan tepat guna dan peralatan untuk rukun kematian;
- Pemberian insentif bagi guru-guru informal dan pemuka agama;

6. Umum

- Melakukan urusan rumah tangga dengan proporsional, tertib dan efisien dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal;
- Inventarisasi, pengurusan dokumen serta pengarsipan atas aset pemerintah;
- Pendataan pemakaian asset dan penertiban pemakaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Penerapan hak dan kewajiban atas pemakaian asset sesuai ketentuan dengan standar biaya umum;

- Revisi standar biaya umum dengan penyesuaian kekinian dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan perekonomian;
- Bantuan hibah sarana keamanan untuk POLRI dan TNI;

7. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

- Memperhatikan keseimbangan kwalitas dengan kwantitas;
- Mengutamakan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi;
- Melakukan standarisasi dan spek sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan manfaat;
- Menetapkan harga sesuai kewajaran (tidak melakukan Mark Up);
- Pengadaan tepat waktu dan adanya garansi;
- Kelengkapan dokumen dan surat lainnya serta taat pajak;

8. Protokol Komunikasi

- Tertib jadwal Bupati dan Wakil Bupati;
- Kesiapan alat kelengkapan keprotokolan;
- Peningkatan keterbukaan informasi publik dan komunikasi;
- Melakukan peliputan setiap kejadian dan publikasi secara rutinitas;
- Peningkatan Sosialisasi/penyebaran berita terhadap suatu kejadian luar biasa;
- Gerakan Jumat bersih dan Program Sambung Rasa dan Aspirasi;

9. Organisasi

- Peningkatan manajemen dalam reformai birokrasi, melakukan revitalisasi dan restrukturisasi dengan prinsif efektif, efisien, kompetensi dan profesionalis;
- Monitoring dan evaluasi kinerja ASN dengan berpedoman pada azass-azas umum pemerintahan yang baik;
- Penempatan dan mutasi ASN pada jabatan dan eselon dengan Sistem Merit dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penegakan displin ASN sesuai sumpah jabatan, memiliki nilai dasar, taat etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN;

Dinas dan Badan

1. Pendidikan dan Kebudayaan

- Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas;
- Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataaan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;
- Meningkatkan manejerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi ikulum nasional dengan muatan lokal;
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi;
- Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru-putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu;
- Memberikan insentif pada PAUD;
- Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan, serta pemberian insentif yang layak bagi guru honor dan kontrak;
- Pemberian bea siswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran BOS tepat waktu dan sasaran penggunaannya;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;
- Peningkatan tertib administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dengan memperhatikan hal-hal yang khusus dan luar biasa;
- Perbaikan asrama mahasiswa daerah;
- Pemberian insentif untuk guru PAUD/TK;
- Tambahan extra kurikuler pendidikan keagamaan dan moral (nilai afektif);
- Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;
- Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;
- Menjadikan Budaya sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;
- Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;
- Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;

- Penggalian dan pengembangan budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);

2. Kesehatan

- Peningkatan pelayanan dokter dan kesehatan yang profesional teristimewa kepada warga miskin dan penyandang disabilitas;
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- Menyiapkan dan rekrutmen tenaga para medis dan medis yang profesional dan spesialis;
- Peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat, secara khusus pengadaan rumah dinas untuk personil Polindes;
- Motivasi dan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran dan perilaku hidup sehat;
- Peningkatan layanan kesehatan siaga (on call) di tingkat desa;
- Peningkatan kelas Rumah Sakit Semanggang menjadi RS tipe D Pratama;
- Revitalisasi fungsi Puskesmas dan peningkatan status Puskesmas Kumai dan Kotawaringin Lama dan menjadi Rumah Sakit Rakyat;
- Pemberantasan dan konservasi daerah-daerah endemik;
- RSUD Menjadi Rujukan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu dari desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
- Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi untuk pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
- Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
- Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
- Pembukaan jalan kecamatan Arut Utara ke Kabupaten; ' Pembangunan Water Front City;
- Pembangunan Jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
- Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;

- Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
- Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai lagi peruntukannya;
- Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
- Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
- Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
- Penyiapan Konservasi Air dan penyedian air baku;
- Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Relokasi pemukiman warga yang rawan banjir dan bencana lainnya;
- Pembangunan jalan lingkungan dan drainase untuk terciptanya pemukiman asri dan sehat;
- Pembuatan saranan dan prasarana MCK dan lainnya, khususnya didaerah padat penduduk dan pinggiran sungai;
- Penyediaan kecukupan air bersih yang hy genis;
- Kontrol dan pendataan pemanfaatan air bawah tanah;
- Program bedah rumah dan atau layak huni bagi masyarakat tidak mampu;
- Pembuatan regulasi perizinan dan alih fungsi dan pelayanan yang prima;
- Pengawasan terhadap pengembang property dan menjadikannya sebagai mitra;
- Kecukupan ketersedian energi dan penerangan jalan;
- Pengendalian sampah dengan partsipasi dan swadaya masyarakat sekitar;

5. Sosial

- Jaminan Perlindungan dan peningkatan pelayanan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin/kurang mampu;
- Bantuan/pemberian iuran BPJS bagi seluruh warga miskin/tidak mampu;
- Tanggap dalam mengantisipasi, memberi pertolongan dan bantuan bagi warga yang kena musibah dan bencana alam;

- dengan Perguruan Tinggi, LSM, ORMAS, OKP, Pemerhati Sosial dan lembaga lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam menangani masalah-masalah sosial;
- Mengadakan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan bagi penyandang masalah sosial;
- Penghapusan dan pemberantasan prostitusi, gelandangan dan pengemis;
- Pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif dan penyelenggaraan kursus keterampilan;
- Pemberian bantuan modal usaha dan mengandeng para pengusaha sebagai mitra;

6. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

- Meningkatkan peranan perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan;
- Pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mandiri dan partisipatif dalam urusan rumah tangga, kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan anak;
- Perlindungan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya tanpa diskriminasi;
- Penyuluhan antisipasi terhadap kejahatan seksual pada anak;
- Membuat proteksi dan langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak akibat KDRT dan kejahatan seksual;
- Sosialisasi tanggung jawab Negara/Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali dalam perlindungan anak;
- Mengadakan perlindungan hukum kepada anak-anak disabilitas yaitu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam interaksinya dan partisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif;
- Penghapusan KDRT dan kejahatan pada anak;
- Penyuluhan tentang kewajaran batas umur untuk nikah dan program KB;
- Terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, pintar dan berkwalitas;

7. Lingkungan Hidup

- Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RTRW Daerah;

- Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah disektor perkebunan, industi maupun pertambangan;
- Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan, serta membangun lingkungan hidup yang produktif;
- Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- Mempertahankan status Adipura;
- Membuat program tempat terbuka hijau (RTH) didaerah perkotaan dan padat penduduk;
- Penataan Taman agar kota lebih cantik, indah dan asri;
- Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan;
- Pemberian izin/regulasi AMDAL secara cermat dan selektif;
- Melakukan penindakan terhadap pelaku pengerusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemetaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berpotensi diexplorasi dan exploitasi;
- Pendataan dan penataan usaha Pertambangan Rakyat;

8. Kepemudaan dan Olah Raga

- Pembinaan dan pemberdayaan OKP/Karang Taruna dan Ikatan Komunitas untuk menciptakan lapangan kerja khususnya di Desa dan Kelurahan;
- Pelatihan pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di Desa;
- Memberdayakan OKP sebagai sosial kontrol di Pedesaan;
- Pembinaan kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa dan negara;
- Penyuluhan tentang pengaruh negatif NAPZA/ Narkoba dan perilaku seks bebas;
- Kerjasama dengan BNN Kabupaten dalam pemberantasan Narkoba;
- Mengadakan event/turnament dari berbagai cabang olahraga;
- Melengkapi sarana dan prasarana olah raga yang reprensentatif, sebagai langkah awal untuk pelaksanaan PORDA Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Sport Center Pangkalan Bun;
- Perbaikan dan peningkatan kualitas Lapangan Sepak Bola Senggora Kumai;
- Pemberian insentif bagi pengurus organisasi Cabang-cabang Olahraga;

- Memberikan insentif bagi pelatih yang sudah bersertiiikat serta pemberiaan award kepada juara-juara baik ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional;

9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program yustisia kependudukan;
- Seluruh penduduk mempunyai E-KTP, dan masyarakat yang berdomisili wajib memiliki KTP Kab. Kotawaringin Barat;
- Penyuluhan tentang pentingnya catatan sipil dan UU tentang Kependudukan;
- Validasi Data Kependudukan/Pendataan faktual penduduk Kotawaringin Barat;
- Seluruh masyarakat memiliki akte lahir, yang menikah memiliki akte pernikahan, dan yang meninggal dunia, keluarganya mengurus akte kematian;

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan;
- Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa;
- Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa;
- Memberdayakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Desa;
- Mengadakan pelatihan dan pembinaan peningkatan ekonomi warga desa;
- Pemberian tambahan insentif bagi perangkat desa dan Ketua RW/RT;
- Perekrutan tenaga pendamping di desa;
- Fasilitator dalam Pilkades dan pemilihan BPD, Tata ruang Desa, Tugas dan fungsi Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD;
- Program pengadaan listrik tenaga surya (solar power);

11. Perhubungan

- Memaksimalkan fungsi terminal bus umum, angkot dan truk pengangkut barang;
- Pembangunan terminal barang di Batu Belaman;
- Penataan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta keamanan;
- Penataan angkutan perkotaan dan pedesaan serta kelayakan kendaraan;
- Pengadaan sarana dan prasarana transportasi;

- Pengadaan jembatan timbang untuk penggunaan jalan sesuai kelasnya;
- Pembangunan dermaga ferry penyeberangan Sei Kapitan-Kumai seberang dan Kumai seberang-Pangkalan Banteng;
- Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan pihak otoritas dalam penggunaan dan peningkatan fungsi Bandara dan Pelabuhan;
- Perencanaan pemindahan pelabuhan laut dalam Pangkalan Bun;
- Penataan Master plan Bandara Internasional;

12. Komunikasi, Imformatika, Statistik dan Persandian

- Bantuan sarana dan prasaranan jaringan internet hingga kepedesaan;
- Peningkatan komunikasi dua arah antara stake holder;
- Keterbukaan informasi publik dan kemudahan mendapatkan informasi;
- Pembuatan data stastitik yang akurat dan up to date (kekinian);
- Optimalisasi Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH);

13. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;
- Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk. peningkatan investasi;
- Sosialisasi potensi daerah dan SDA upaya mengandeng para investor;
- Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;
- Mendorong para Investor untuk penyediaan sumber energi;

14. Perpustakaan dan Kearsipan

- Mengoptimalkan arti dan pentingnya perpustakaan ke setiap desa;
- Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dan modern;
- Kecukupan dan ketersedian bulat-buku sesuai dengan kemajuan teknologi;
- Optimalisasi pengarsipan/dokumentasi dengan kecanggihan teknologi;
- Kemudahan akses secara IT dalam program keterbukaan infomasi publik;

15. Pariwisata

- Penataan Pangkalan Park dan menggandeng mitra usaha untuk pengelolaan dan pengadaan panggung hiburan dan ajang penampilan minat dan bakat menampilkan kesenian dan budaya lokal maupun daerah lain dalam bingkai keanekaragaman budaya;
- Pelestarian situs-situs sejarah;
- Memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata alam dan religi;

- Peningkatan Promosi destinasi wisata yang ada ke tingkat Nasional dan Manca Negara dan mengadakan event yang berskala Nasional dan Internasional;
- Penggalian daerah wisata yang baru dan berpotensi untuk dijual;
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kepariwisataan;
- Pengadan fasilitas WIFI gratis ditempat rekreasi umum (Bundaran Pancasila dan Pangkalan Bun);
- Mengadakan pelayanan prima untuk peningkatan sumber PAD;
- Peningkatan kerja sama dengan Perhotelan, Biro Perjalanan, Biro Wisata dan Para Guide (penuntun atau penterjemah);

16. Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Meningkatkan budidaya peternakan dengan memberi bantuan kepada kelompok usaha bersama;
- Mengadakan diversifikasi ternak yang berpotensi dikembang biakkan;
- Vaksinasi ternak peliharaan masyarakat;
- Mengadakan pelatihan pengembangbiakan ternak secara teknologi;
- Pengadaan benih ternak dan bantuan untuk pegolahan pakan ternak;
- Optimalisasi Pengembangan program integrasi Sawit-Sapi

17. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

- Optimalisasi/Target pencetakan persawahan seluas 27.000 HA;
- Mensinergikan program dengan pihak TNI dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian;
- Tahun pertama panen raya padi seluas 200 HA;
- Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4000 s/d 12.000 HA;
- Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah;
- Pengembangan sistem budi daya produksi dari hulu ke hilir yang tersistematis untuk mendapat nilai tambah;
- Budidaya jagung oleh masyarakat untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan ternak;

- Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dipedesaan; Pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat;
- Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersedian bibit unggul yang tahan hama dan penyakit;
- Menjaga ketersedian bibit/benih, pupuk dan racun;
- Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian;

18. Ketahanan Pangan

- Meningkatkan swasembada beras dan diversifikasi pangan menuju ketahanan pangan;
- Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan dalam antisipasi kerawanan pangan;
- Ketersediaan pangan untuk daerah bencana dan daerah paceklik;
- Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan pangan;
- Pengembangan produk pertanian dalam bentuk home industri untuk persedian;
- Mensosialisasikan fungsi lahan pertanian untuk terciptanya ketahan pangan;
- Mengawasi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lainnya;
- Menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan ketersediaan sewaktu-waktu;
- Mendirikan usaha penampungan atas over produksi pangan;

19. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah

- Peningkatan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha disetiap Desa/Kelurahan ditargetkan 100 kelompok binaan;
- Pembinaan home industri dengan pemberian bantuan peralatan seperti usaha pembuatan batu bata, batako, kerajian meubel, rotan dan anyam-anyaman, aksesoris dan batu mulia serta usaha makanan ringan;
- Pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan;
- Mengadakan kerja sama dengan korporasi besar sebagai bina mitra untuk Koperasi dan UKM;

- Meningkatkan manajemen promosi ditingkat daerah, nasional dan internasional;
- Mengoptimalkan fungsi pasar untuk transaksi yang aman dan nyaman dan revitalisasi pasar tradisional untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
- Menjalin kerjasama dengan para Distributor untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan sembilan bahan pokok;
- Mengarahkan pihak perusahaan untuk transaksi jual-beli di pasar terdekat;
- Pembangunan pasar modern terintegrasi sebagai pusat grosir;
- Pemberdayaan dan penguatan partisipasi perusahaan/korporasi ikut membangun perekonomian masyarakat (CSR=Corporate Social Responsibility);
- Merencanakan kawasan terpadu untuk usaha industri, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan hasil peternakan;
- Optimalisasi Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;
- Pendirian perusahaan daerah untuk promosi dan menampung over produk hasil-hasil home industri, kelompok usaha bersama dan UKM yang khas, layak dan punya nilai jual, yang berbahan dasar dari hasil daerah;

20. Perikanan

- Pengadaan benih ikan sebagai stimulans dan peralatan bagi usaha tambak dan keramba ikan;
- Pengadaan bantuan kapal nelayan/kelotok dan mesin untuk kelompok nelayan;
- Pengadaan bantuan net/ alat tangkap ikan dan cold storage;
- Pendataan dan pembinaan bagi kelompok usaha keramba (budidaya ikan air tawar) serta pemberian bantuan benih ikan;
- Mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan stabilisasi harga;
- Membina pelaku industri UKM dengan bahan dasar ikan agar berdaya saing;
- Promosi hasil produk unggulan dan khas ke luar daerah;
- Membangun pabrik es untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan dan pedagang;
- Menjaga ketersedian BBM untuk para nelayan;

21. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Terciptanya lapangan kerja sebanyak 15.000 TK;
- Membuka lapangan kerja baik sektor formal dan maupun informal;
- Mengadakan pelatihan kerja berbagai keterampilan yang potensial bagi anak putus sekolah dan lulusan SLTA untuk siap sebagai tenaga kerja terampil di sektor formal dan informal;
- Melatih tenaga kerja bersertifikat dalam berbagai bidang sebanyak 1500 orang;
- Memberi bantuan modal dan peralatan usaha bagi peserta pelatihan dengan bentuk KUBE;
- Membina peserta transmigrasi untuk pengolahan lahan dengan komoditas unggulan dan yang sesuai struktur dan kontur tanahnya;
- Program transmigrasi lokal untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah;

22. SatPol Pamong Praja dan Dam-Kar

- Optimalisasi Satpol PP dalam pelaksanaan dan pengamanan Perda;
- Peningkatan kekondusifan masyarakat dan bersinergi dengan POLRI dan TNI;
- Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih;
- Pelatihan dan Peningkatan kesiap-siagaan personil dan penambahan insentif;
- Penambahan personil dengan status honor daerah dengan honor yang layak sesuai dengan beban kerja;

23. Perencanaan Pembangun Daerah

- Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan Progran Jangka Panjang Pembangunan Nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah;
- Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya;
- Merencanakan/membuat program pembangunan (master plan) Kotawaringin Barat dalam Program Jangka Panjang berikutnya;
- Pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

24. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Inventarisasi, pengurusan dokumen serta pengarsipan atas asset;

- Pendataan pemakaian asset dengan penertiban pemakaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Revisi standar biaya umum dengan penyesuaian kekinian dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan perekonomian dan inflasi;
- Memaksimalkan pendayagunaan asset untuk meningkatkan PAD;
- Pengadaan asset yang urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha;
- Penyesuaian anggaran dengan skala prioritas, seimbang dan proporsional;
- Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi, tranparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- Pengawasan, tertib anggaran, evaluasi, pelaporan secara periodik dan tepat waktu;

25. Pendapatan Daerah

- Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;
- Pembuatan/revisi regulasi sesuai keadaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi;
- Target APBD yang progressif, pencapaian kisaran sebesar RP.2,5 Triliun;
- Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sesuai klasifikasi tanah, peruntukan dan kemajuan wilayah secara proporsional;
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat bayar paj ak dan retribusi;
- Peningkatan mutu pelayanan publik serta tertib pemungutan uang;
- Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- Melakukan upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang sah;

26. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Melakukan manejemen ASN agar profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN;
- Mengadakan Lelang Jabatan dan Penempatan dan pengangkatan (promosi jabatan) harus dengan sistem Merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;
- Penerapan ASN melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada Azas-azas umum penyelenggaraan negara;
- Penegakan displin ASN dengan memberikan penghargaan (award) atas prestasi dan kinerja baiknya, pemberian hukuman (punishment) atas

pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memfaslitasi ASN dalam peningkatan pendidikannya sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- Memberikan pelatihan manajerial untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK;
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan sesuai dengan jabatan;
- Pelaksanaan penerimaan calon PNS yang transparan dan bebas KKN;

27. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pemberian bantuan pembinan untuk Partai Politik yang mempunyai fraksi di DPRD;
- Pembinaan dan dukungan serta pemberian bantuan untuk ormas-ormas terdaftar;
- Melakukan pendidikan politik tentang Empat Pilar berbangsa dan bernegara;
- Melakukan pembangunan karakter bangsa dengan ajaran TRISAKTI, yaitu : Berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- Membudayakan jiwa gotong royong sebagai tanggung jawab bersama membangun daerah dengan prinsip hidup bersama dalam keberagaman sosial (living together in plural society);
- Meningkatkan kerja sama, menjalin komunikasi dan hamonisasi setiap elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

28. Sekertariat DPRD

- Peningkatan sarana dan prasarana DPRD yang memadai dan representatif;
- Peningkatan sinergi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur dari Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dan solusi penyelesaian secara cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengadaan fasilitas pendukung untuk optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat;
- Memberikan penghargaan bagi Anggota DPRD yang purna tugas;

29. Inspektorat

- Meningkatkan fungsi pengawasan menjaga kebocoran anggaran;
- Memberikan bimbingan penggunaan anggaran dan monitoring berkala;
- Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP;
- Melakukan tindakan pengembalian dana ke kas daerah bagi temuan;
- Maturitas SPIP

30. Penanggulangan Bencana Daerah

- Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;
- Pengadan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah prioritas pencegahan Karhutla;
- Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan potensi bencana dan cara penanggulangan serta kerja sama dalam mengantisipasi;
- Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan repressif serta proteksi yang bersifat konservatif paska kejadian luar biasa KLB);

31. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddim

- Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
- Peningkatan pelayan yang prima, sistematis dan modern;
- Ketercukupan obat-obatan;
- Perekrutan tenaga para medis, dokter umum dan spesialis yang memadai;
- Upaya peningkatan Type/kelas Rumah Sakit;
- Mewujudkan menjadi Rumah Sakit rujukan;

Kecamatan, Kelurahan dan Desa

1. Kecamatan

- Meningkatkan pelaksanaan tupoksinya sebagai pemerintah wilayah;
- Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;
- Pendampingan kepada Kelurahan dan Desa didalam menerbitkan Peraturan dan Penggunaan Dana serta pertanggung jawabannya;
- Peningkatan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah;
- Penyelesaian dan penentuan tata batas antar kelurahan dan desa;

- Mengadakan kerja sama atau menjalin komunikasi aktif dengan korporasi di wilayahnya untuk pengadaan/perbaikan infra struktur serta tanggap bencana;

2. Kelurahan

- Peningkatan pembinaan warga menuju kehidupan perkotaan dan pendataan serta pengawasan bagi warga pendatang baru;
- Meningkatkan pelaksanaan tupoksinya sebagai Perangkat Kelurahan;
- Pelayanan masyarakat yang prima dan mengoptimalkan kinerja sebagai Ujung tombak pemerintahan;
- Penyaluran insentif kepada Ketua RW/RT tepat waktu;

3. Desa

- Meningkatkan kemampuan Kepala Desa dan Perangkatnya serta BPD akan tugas dan tanggung jawabnya;
- Pelaksanaan administrasi desa secara sistematis sesuai perkembangan iptek;
- Pembuatan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya serta memperhatikan kearifan lokal;
- Penerbitan surat-surat harus terinventaris dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Penggunaan Dana Desa sesuai APBDes yang telah dibuat serta pertanggung jawaban sesuai pedoman/petimjuk teknisnya;
- Penggalian sumber-sumber dana desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat hukum desa;
- Pembentukan dan pembinaan usaha-usaha masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan;
- Pemberian insentif kepada Ketua RW/RT tepat waktu;
- Melakukan kerja sama yang baik dengan tenaga pendamping desa;
- Terciptanya Desa Mandiri, aman, tentram dan sejahtera;

5.4 Tujuan Dan Sasaran

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan Sasaran Pembangunan:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.



Gambar 5.8: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 1

5.4.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kualitas sumberdaya manusia, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi-II Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 5.9: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 2

5.4.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan, dengan Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan

2) Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah

3) Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi

4) Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi-III Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 5.10: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 3

5.4.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan, dengan Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.

2) Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.
3) Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi-IV Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 5. 2: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 4

5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi V

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V yakni Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan Sasaran Pembangunan:

1) Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.
2) Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi
3) Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi-V Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 5. 32: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 5

5.4.6 Tujuan dan Sasaran Misi VI

Sebagai upaya untuk mencapai Misi VI yakni Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Pariwisata Daerah dengan Sasaran Pembangunan:
   1) Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata
   2) Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui *Desain Logical Framework* Pencapaian Misi-VI Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. 43: Pohon Kinerja Pencapaian Misi 6

5.5 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.

Tabel 5. 1: Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	T.1 Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	IKD 1. Indeks *Good Governance*	S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	C	CC	B	A	A	A	A	Setda Bappeda
					Indeks Profesionalitas Aparatur	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	BKD
					Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
				S.3 Meningkatnya Kualitas	% PD yang menerapkan E-Gov	NA	40%	50%	60%	75%	80%	85%	Setda Diskominfo DPK

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	NA	85	87	90	95	96	99	Dispendukcapil DPMPST Setda Sekwan Dishub Kecamatan
				S.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu	NA	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,9	Setda DPMD Kecamatan
2	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui	T.2 Meningkatkan kualitas kualitas	IKD.2. Indeks Pembangu	S.5 Meningkatnya derajat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,61	12,8	13	13,19	13,38	13,57	Dinas Pendidikan dan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	pendidikan, kesehatan, dan olahraga.	sumberdaya manusia	nan Manusia	pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8,05	8,24	8,43	8,63	8,82	9,01	9,20	Kebudayaan
					Indeks Minat Baca	NA	NA	10%	20%	30%	40%	60%	
				S.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,21	70,40	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	Dinas Kesehatan
					Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	NA	50%	60%	70%	80%	90%	90%	RSUD
				S.7 Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda	NA	20%	25%	30%	30%	40%	60%	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup	T.3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	IKD 3. Pertumbuhan Ekonomi	S.8 Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-2.22%	N/A	5%	10%	15%	20%	25%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-23,30%	N/A	5%	8%	11%	14%	20%	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	-23.30%	N/A	10%	12%	13%	15%	15%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
													Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
													Dinas Perikanan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,95	N/A	92,9	93,1	93,4	93,8	94,2	Dinas Ketahanan Pangan
					Persentase Koperasi yang berkualitas	N/A	N/A	5,5	6,5	7,5	9,5	10	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Persentase pertumbuhan wirausaha baru	N/A	N/A	13	34	56	786	100	
				S.9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN	N/A	N/A	8%	12%	16%	20%	24%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	Badan Pendapatan Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				S.10 Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Indeks Williamson	N/A	N/A	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Dinas PUPR
													Dinas Perhubungan
													Dinas Perkim
			IKD 4. ndeks Kulaitas Lingkungan Hidup I	S.11 Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana	1. Indeks Kualitas Air	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
					2. Indeks Kualitas Udara	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%	
					3. Indeks Tutupan Hutan	N/A	56,83%	59%	61%	63%	65%	67%	
					Indeks Resiko Bencana	N/A	115%	108%	101%	94%	87%	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Meningkatkan kualitas kehidupan	T.4 Mewujudkan pembangunan sosial dan	IKD 5. Indeks Pembangu	S.12 Meningkatnya toleransi	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	N/A	0,65%	0,68%	0,7%	0,72%	0,74%	0,76%	Badan Kesatuan Bangsa Politik

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	beragama dan bermasyarakat.	toleransi masyarakat pluralis	nan Masyarakat	kerukunan antar umat beragama									Setda
				S.13 Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	NA	0%	5%	5%	6%	6%	12%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				S.14 Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak	Indeks Pemberdayaan Gender	NA	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,3	DP3AP2KB
					Kategori Kabuipaten Layak Anak	NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	
5	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.	T.5 Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan	IKD 6. Angka Kemiskinan	S.15 Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	20%	18,50%	17,00 %	15,50 %	14,00 %	12,50 %	10,00%	Dinas Sosial

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				S.16 Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,15	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,5	Dinas Tenaga Kerja
				S.17 Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	NA	10%	10%	15%	18%	20%	23%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 2. Bakesbangpol

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Organisasi Perangkat Daerah
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata	T.6 Peningkatan Pariwisata Daerah	IKD 7. Tourism Intencity Index	S.18 Meningkatnya Niali Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata Khas Lokal	NA	70%	75%	78%	80%	83%	85%	Dinas Pariwisata
					Persentase Jenis Produk Kepariwisataan Khas Lokal	NA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
				S.19 Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	20,11%	20%	20%	25%	30%	35%	40%	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	NA	10%	15%	15%	20%	25%	30%	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan proses *consecutive* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternative strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternatif strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan alternatif strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Pada akhirnya rumusan alternative tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktifitas FGD, *scoring*, analisis *balanced score card*. Berikut penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk

meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran srategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)	
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Meningkat 2. Persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat 3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat 4. Persentase rumah tinggal pengguna fasilitas penerangan listrik Meningkat 5. Persentase rumah tinggal dengan lantai bukan tanah Meningkat 6. Prosentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani meningkat 7. Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan Meningkat 8. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2012 – 2015 Meningkat 9. Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Peternakan di Kab. Kotawaringin Barat Meningkat 10. Capaian kinerja Urusan Pertanian sub sektor Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat Meningkat 11. Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Meningkat 12. Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan Meningkat 13. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kontribusi Sektor Ketenagalistrikan Meningkat 14. Cakupan bina kelompok pengrajin (Kelompok Meningkat 15. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) Meningkat 16. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Rasio Elektrifikasi Meningkat 17. IPM kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat 18. PDRB Harga Konstan, Harga Berlaku dan Perkapita Meningkat 19. Angka Partisipasi Murni dan Kasar Meningkat 20. Angka Harapan Lama Sekolah Meningkat 21. Angka Harapan Lama Sekolah	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan Daerah. 2. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Nilai akuntabilitas kinerja masih rendah 4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government. 5. belum tersedianya data, informasi sektoral untuk menunjang pemerintahan yang bersih dan efektif dan transparan 6. Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil karena terbatasnya SDM, sarana dan prasarana 7. Belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah. 8. Kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan yang bersumber dari ADD masih rendah 9. Penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan merata belum terwujud sepenuhnya. 10. Sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 11. Belum semua sekolah yang berada di pedesaan dilengkapi dengan Rumah Dinas Guru. 12. Belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan standar. 13. Belum semua puskesmas terakreditasi. 14. Belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar. 15. Sarana dan prasarana kesehatan khususnya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin belum memenuhi standar rumah sakit rujukan regional. 16. Kurangnya pengawasan perlindungan lahan pertanian 17. Belum adanya pemetaan ulang terhadap alih fungsi lahan pertanian 18. minimnya pengelolaan agribisnis usaha pertanian 19. Rendahnya peranserta Kelompok Pengawas Masyarakat. 20. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya. 21. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai 22. Belum optimalnya pembinaan dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan 23. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olah raga dan atlit berprestasi 24. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah 25. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi serta bahasa daerah 26. Belum adanya dokumen rencana induk pembangunan industri kabupaten. 27. Belum berkembangnya industri kecil/ industri rumah tangga. 28. Belum berkembangnya sektor industri hilir. 29. Keterbatasan dukungan infrastruktur 30. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang. 31. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan pasar tradisional. 32. Belum optimalnya peran daerah dalam perlindungan dunia usaha 33. Masih rendahnya cakupan pelayanan irigasi. 34. Kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya penggunaan benih/ bibit yang unggul 35. Belum tersedianya peta dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan	36. Masih rendahnya tingkat produktivitas komoditi kelapa sawit rakyat 37. Belum tersedianya informasi pasar produk perkebunan 38. Masih rendahnya SDM petani dalam penguasan teknologi budidaya perkebunan 39. Kurangnya budidaya jenis ikan lokal seperti Haruan, Papuyu, Baung dll. 40. Kurangnya teknologi pengolahan hasil perikanan 41. Kurang terwujudnya pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan 42. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tidak optimal 43. Kemampuan kelompok tani masih rendah 44. Rendahnya peran serta Badan Pengawas Koperasi. 45. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM 46. Penggalian pendapatan asli daerah belum didasarkan pada data potensi daerah. 47. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi. 48. Belum adanya tatakelola pembinaan dan pengawasan BUMD 49. Target PAD selama 4 th tidak tercapai 50. Belum semua desa terhubung akses jalan darat. 51. Kondisi jalan dan jembatan belum semuanya baik. 52. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota. 53. Belum semua masyarakat terlayani air bersih. 54. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat 55. Kurangnya Informasi tentang penataan ruang 56. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman. 57. Masih tingginya angka backlog 58. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB 59. Kurangnya penguasaan lahan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan. 60. Masih belum optimalnya koordinasi pengelolaan pertanahan. 61. Belum tersedia angkutan dalam kota. 62. Belum terkelolanya angkutan umum ke Ibukota Kecamatan. 63. Ketersediaan area parkir belum memadai 64. Study perencanaan perhubungan belum lengkap 65. Masih rendahnya kewaspadaan menghadapi ancaman bencana. 66. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup. 67. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan. 68. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau perkotaan. 69. Kurang tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup 70. Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana 71. Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. 72. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Kotawaringin Barat. 73. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata. 74. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata. 75. Belum berkembangnya ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

OPPORTUNITY (PELUANG)	THREAT (ANCAMAN)
1. Jumlah penduduk produktif meningkat 2. Masih banyaknya lahan tidur (belum dimanfaatkan) 3. Masuk Kawasan Strategis Nasional Pariwisata 4. Potensi Ekowisata Besar 5. Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat Meningkat 6. Potensi Komoditas Kelapa Sawit dan Karet Baik 7. Potensi Komoditas Ayam Buras, Udang Putih dan Ikan Lais Baik 8. Sektor pertanian dan Industri Pengolahan menguat	1. Masih adanya anak putus sekolah. 2. APK PAUD rendah (rata2 30,03%) 3. Rata2 lama sekolah rendah (8,05 th) 4. Masih kurangnya minat baca masyarakat. 5. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. 6. Masih adanya balita gizi buruk. 7. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal 8. Menurunnya nilai ekspor dampak ekonomi global 9. Masih tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok 10. Pengembangan kawasan pertanian terkendala oleh status kawasan hutan. 11. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP). 12. Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian (Alsintan) 13. Ancaman penyakit reproduksi dan penyakit menular ternak cukup tinggi 14. Basis populasi induk (akseptor) masih rendah; 15. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian 16. Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) 17. Ketergantungan produk hortikultura dari luar darah 18. Hasil Produksi Tanaman Pangan belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan daerah 19. Masih bayak kelompok yang belum terdaptar/berbadan hukum 20. Tingginya konsumsi beras perkapita. 21. Rendahnya konsumsi protein hewani, sayuran dan buah-buahan. 22. Rendahnya Keragaman Pangan Masyarakat (Pola Harapan Pangan rendah) 23. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha. 24. Kurangnya peran serta Investor dalam pembangunan. 25. Jumlah penduduk dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Meningkat

Gambar 6. 1: Pemetaan Isu-Isu Sektoral Berdasarkan 4 Kuadran SWOT

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang "membumi" dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

S - O	W - O
Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep *Green Economy.*	Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan Reformasi Birokrasi. Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah.
S - T	**W - T**
Membangun Generasi Muda Berkualitas Dan Dinamis Melalui Komitmen Afirmasi Terhadap Akses Pendidikan Dan Media Pembelajaran Lainnya Yang Berorientasi Pada Kreatifitas Pengelolaan Potensi Lokal.	Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial Yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya.

Gambar 6. 2: Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2017-2022

Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategisatas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparative advantage.* Dengan demikian, tindakan strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat adalah

“Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep Green Economy”.

Penciptaan ekonomi mandiri merupakan upaya mewujudkan daya dan kemampuan diri untuk dapat membangun dan mengelola perekonomian daerah sendiri tanpa bergantung dengan pihak manapun. Sedangkan optimalisasi pada strategi ini dimaksudkan sebagai upayameningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sektor unggulan di Kotawaringin Barat. Berdasarkan pada analisis data capaian bab dua, terlihat bahwa sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian dalamarti luas, energi dan bahkan sektor UMKM dan organisasi kepemudaan mengalami peningkatan yang konsisten. Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 7,3% pada tahun 2015. Angka tersebut bahkan berada di atas provinsi dan nasional. Meskipun tren peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, capaian tersebut merupakan sinyal positif bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami progress. Namun perlu diberikan catatan bahwa belum sepenuhnya sektor-sektor potensial tersebut terkelola secara maksimal. Padahal, asset alam Kotawaringin Barat sangat besar, dan IPM Kotawaringin Barat juga relative baikkarena meningkat sebesar 2.07% sejak tahun 2011 – 2015.Sektor prioritas seperti Pertanian dalam arti luas dan Industri Pengolahan sampai saat ini masih mendominasi kontribusi perolehan PDRB.

Kabupaten Kotawaringin Barat sangat berpotensi untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7.5%, langkah strategisnya dengan memaksimalkan pengelolaan pertanian dan industri pengolahan secara optimal. Hasil pertanian dalam arti luas seperti kebun sawit, peternakan sapi dan bahkan ikan kedepannya akan dikelola secara mandiri sehingga gairah industri pengolahan Kotawaringin Barat akan semakin besar. Dengan demiikian, ada interaksi kausalitas antara pertanian dalam arti luas dengan industri pengolahan, oleh karena itu, langkah yang diambil terhadap kedua sektor tersebut harus bersifat simultan sehingga impact positif seperti penurunan TPT, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai dengan maksimal.Melalui pengelolaan yang optimal, memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, sangat mungkin kemandirian pertumbuhhan ekonomi Kotawaringin Barat dapat secara akseleratif meningkat pada akhir periode RPJMD ini. Perlu diperhatikan pula, dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor

tersebut, pemerintah akan memberdayakan BUMD dan BUMDes sebagai garda terdepan sebagai kendaraan utama peningkatan tersebut.

Strategi S-T mengupayakan Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang beresikoterjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Pada strategi S-T ini, pemerintah menetapkan strategi yang berbunyi

“Membangun Generasi Muda Berkualitas Dan Dinamis Melalui Komitmen Afirmasi Terhadap Akses Pendidikan Dan Media Pembelajaran Lainnya Yang Berorientasi Pada Kreatifitas Pengelolaan Potensi Lokal”.

Ketetapan strategi tersebutmerupakan respon atas hasil identifikasi kekuatan dimana kualitas pembangunan manusia di Kotawaringin Barat telah baik, disaat yang sama pemerintah dihadapkan dengan beragam ancaman mulai dari aspek budaya, demografi dan sektor unggulan pemerintah seperti penerapan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan sejenisnya. Melalui setrategi ini diharapkan Kotawaringin Barat memiliki generasi yang siap dan berkualitas untuk berkontribusi membangun Kotawaringin Barat sesuai dengan potensi lokalitas Kotawaringin Barat. Membangun generasi yang handal ini sejalan dengan concern Presiden dalam RPJMN dengan serius menaruh perhatian kepada anak.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Mengisi, mengadakan dan bahkan menambah asset tertentu untuk mengatasi kelemahan. Kedua, jika tidak memungkinkan untuk melakukan investasi karena keterbatasan jangkauan finansial atau sejenisnya yang memberatkan upaya investas, maka diperlukan upaya divestasi. Pada sektor bisnis umum dikenal istilah divestasi sebagai upaya pelepasan asset atau dengan kata lain menjual asset. Namun pada sektor public, istilah divestasi tidak seekstrim itu, pasalnya upaya divestasi sebenarnya lebih

kepada meminjamkan asset daerah untuk dikelola pihak lain yang keuntungannya tetap diutamakan kepada daerah seperti melalui pajak, retribusi atau penyerapan tenaga kerja. Skenario terbaik adalah bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Terdapat dua strategi yang muncul atas interaksi kelemahan dan peluang yang ada di Kotawaringin Barat. Strategi W-Opertama yaitu

"Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi *(E-Governance*) Dan Reformasi Birokrasi"

Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara teknis belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi tantangan administrasi pengelolaan daerah saat ini. Pada saat yang sama, begitu banyak peluang potensial yang jika dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat untuk Kotawaringin. Sehingga melalui strategi ini, diharapkan kecakapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan teknologi informasi meningkat dan mampu menciptakan inovasi yang pada akhirnya dapat menggiring pada optimalisasi reformasi birokrasi.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Strategi W-O *kedua* yaitu "**Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dasar Dan Sarana Prasarana Penunjang Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan Antar Daerah**". Strategi tersebut menekankan agenda pembangunan pada pemerataan dimana aksessibilitas dan infrastruktur berasas waterfront city sebagai instrument utama perwujudan pemerataan tersebut. Pada dasarnya pemerataan didefinisikan sebagai sebuah upaya pembangunan berkeadilan yang merata sehingga ketimpangan pembangunan antara daerah satu dengan lainnya rendah atau bahkan tidak ada. Sasaran pemerataan pembangunan dapat diarahkan kepada beberapa sektor seperti pemerataan pembangunan fisik, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Pada strategi ini, *leverage point* yang ingin disasar adalah pembangunan fisik dengan harapan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor lain.

Aksessibilitas sebagai instrumen pemerataan didasarkan pada temuan lapangan dimana akses jalan belum sepenuhnya melayani wilayah yang ada di Kotawaringin Barat. Artinya, akses antar ruang di Kotawaringin Barat belum begitu baik. Bahkan, ditemukan pula bahwa akses darat dari desa ke kota belum tersedia. Hal ini tentu menghambat proses pembangunan. Tidak hanya itu, arus hulu-hilir ekonomi tidak akan berjalan optimal, sehingga masyarakat pedesaan akan mendapatkan hambatan dalam memasarkan produk mereka. Peningkatan aksessibilitas *out-in* juga perlu untuk diperhatikan. Sarana seperti Bandara dan Pelabuhan dan prasarananya yang memadai dapat sangat akseleratif meningkatkan perekonomian. Disamping itu, aksesibilitas terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga belum optimal. Meskipun perolehan IPM meningkat, dengan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar yang tidak segera di sempurnakan, maka tidak menutup kemungkinan IPM akan mengalami penurunan. Melalui penguatan aksessibilitas ini, diharapkan sektor potensial seperti pariwisata dapat terbangun dengan baik. Seperti diketahui, status Kotawaringin Barat masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Pariwisata serta memiliki cagar alam. Merujuk pada konseptual teori pembangunan ekowisata terdapat 5 hal utama, salah satunya adalah aksessibilitas.

Selanjutnya, modernitas infrastruktur sebagai instrument pemerataan. Hal ini sebenarnya dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih modern dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Seperti misalnya infrstruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pusat perekonomian, ruang public,

kawasan ruang terbuka hijau dan sejenisnya. Infrastruktur modern ini sebenarnya merupakan pendukung optimalisasi pembangunan aksesibilitas.Sebagaimana aksessibilitas, modernitas infrastruktur juga dapat membantu mengoptimalkan 5 hal utama pembangunan pariwisata yaitu utamanya amenitas.Perlu digaris-bawahi bahwa konsep dasar yang melatarbelakangi pembangunan aksessiblitas antar ruang dan modernitas infrastruktur di Kotawaringin Barat tersebut tersebut adalah konsep *waterfront city.* Konsep ini pertamakali dikenalkan di Amerika pada tahun 1970an oleh James Rouse sebagai upaya melepaskan wilayah bantaran sungai di Kota Baltimore dari kelumpuhan ekonomi karena kekumuhan yang parah. Dari pemikiran *urban designer* Amerika ini lah mulai ramai diperdengarkan kosep *Waterfront City.* Dalam perancangannya perlu ada arah yang jelas dari pembangunan *waterfront city* ini, missal diarahkan untuk pariwisata, atau perekonomian atau mungkin pemukiman.

Terakhir yaitu strategi W-T. Strategi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *demage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Dengan demikian, strategi yang ditetapkan yaitu "**Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial YangBerwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya"**. Salah satu opsi upaya yang dapat dilakukan diantaranya Melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dan pengarusutamaan budaya dengan membentuk kelompok-kelompok penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas. Upaya ini diiharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, pencegahan pelanggaran hukum dan menjaga kondusifitas pembangunan, serta mewujudkan kesadaran hidup berkeragaman yang tentram.

Berdasarkan analisis di atas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan "St"):

St 1. Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (*E-Governance*) Dan Reformasi Birokrasi.

St 2. Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep *Green Economy*.

St 3. Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.

St 4. Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep Waterfront City yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah.

St 5. Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Tabel 6. 1: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi

Visi: **Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas**			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**
Misi I "Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"			
Tujuan I. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	**Sasaran 1.** Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	Opini atas audit BPK	**Strategi 1:** Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (*E-Governance*) Dan Reformasi Birokrasi.
	Sasaran 2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan aparatur	• Nilai SAKIP Kabupaten • Indeks Profesionalitas Aparatur • Maturitas SPIP	
	Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	• Persentase PD yang menerapkan E-Gov • Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Publik	
	Sasaran 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu.	

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**
Misi II "Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga"			
Tujuan II. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	**Sasaran 5**. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Angka Harapan Lama Sekolah • Rata-Rata Lama Sekolah • Indeks Minat Baca	**Strategi 2:** Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.
	Sasaran 6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Angka Harapan Hidup • Prosentase Lembaga Layanan Kesehatan yang Terakreditasi	
	Sasaran 7. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda	
Misi III "Misi 3 Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup"			
Tujuan III. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	**Sasaran.8** Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan • Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan • Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan • Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**Strategi 3**: Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy

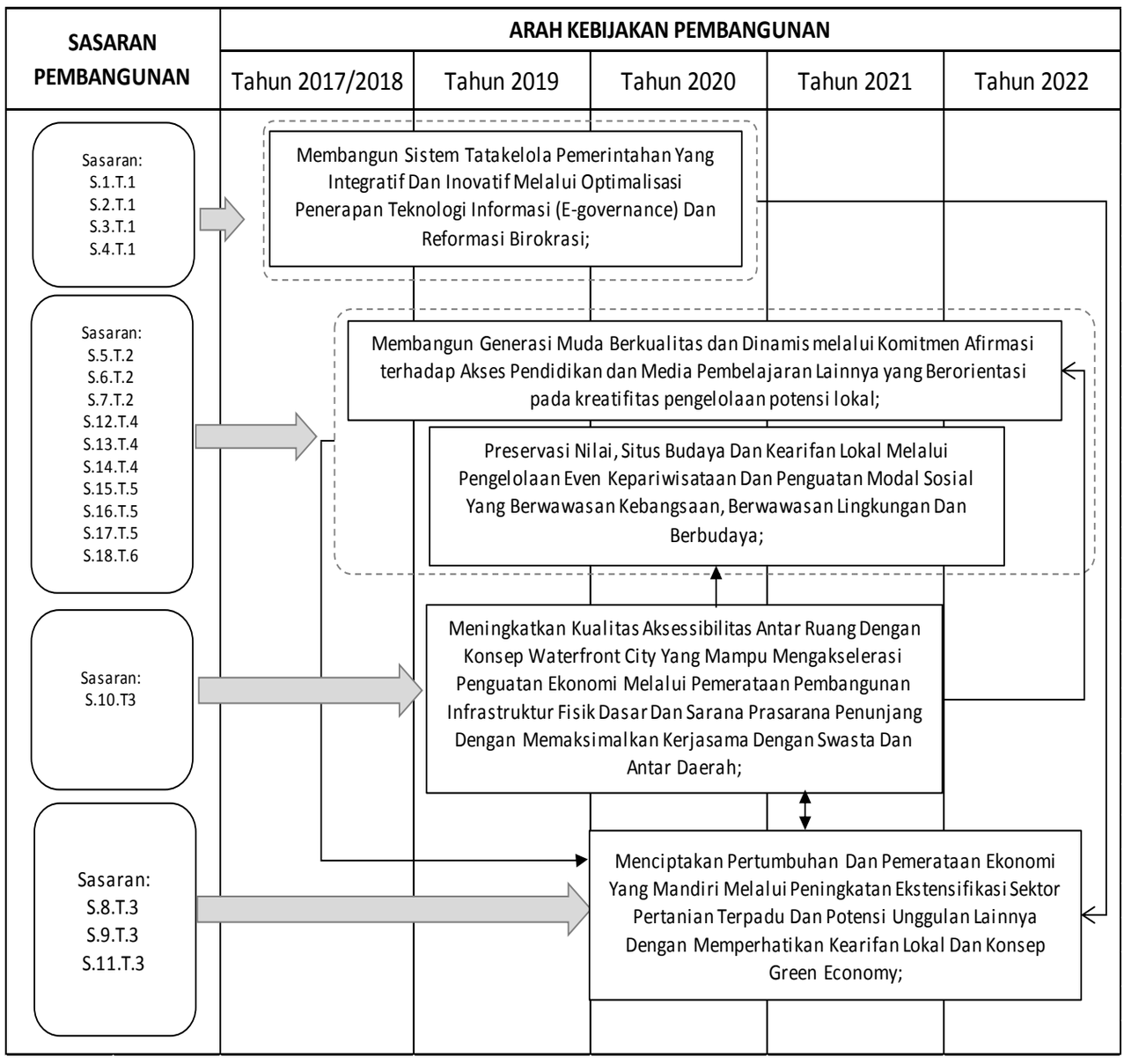
Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**
		• Persentase Koperasi Usaha Mikro yang berkualitas • Persentase pertumbuhan wirausaha baru	
	Sasaran.9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	• Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN • Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	
	Sasaran.11 Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana	• Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara • Indeks Tutupan Hutan • Indeks Resiko Bencana	
	Sasaran.10 Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	Indeks Williamson	**Strategi 4:** Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep Waterfront City yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar

Visi: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Strategi**
			dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah.
Misi IV Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat			
Tujuan IV. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis	**Sasaran.12** Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	**Strategi 5**: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya
	Sasaran 13. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri	
	Sasaran 14. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kabupaten layak anak	• Indeks Pemberdayaan Gender • Kategori Kabupaten Layak Anak	

Misi V "Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis"			
Tujuan V Mewujudan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan dengan penerapan nilai-niali keagamaan	**Sasaran 15**. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	**Strategi 5**: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.
	Sasaran 16. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	
	Sasaran 17. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya	
Misi VI "Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata"			
Tujuan VI Peningkatan Pariwisata Daerah	**Sasaran 18**. Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	• Persentase Destinasi Wisata Khas Daerah Terkelola • Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisataan	**Strategi 5**: Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya.
	Sasaran 19. Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	• Persentase Peningkatan Wisman dan Wisnus • Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	

6.2. Arah Kebijakan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan:



Gambar 6. 3: Arah Kebijakan Pembangunan

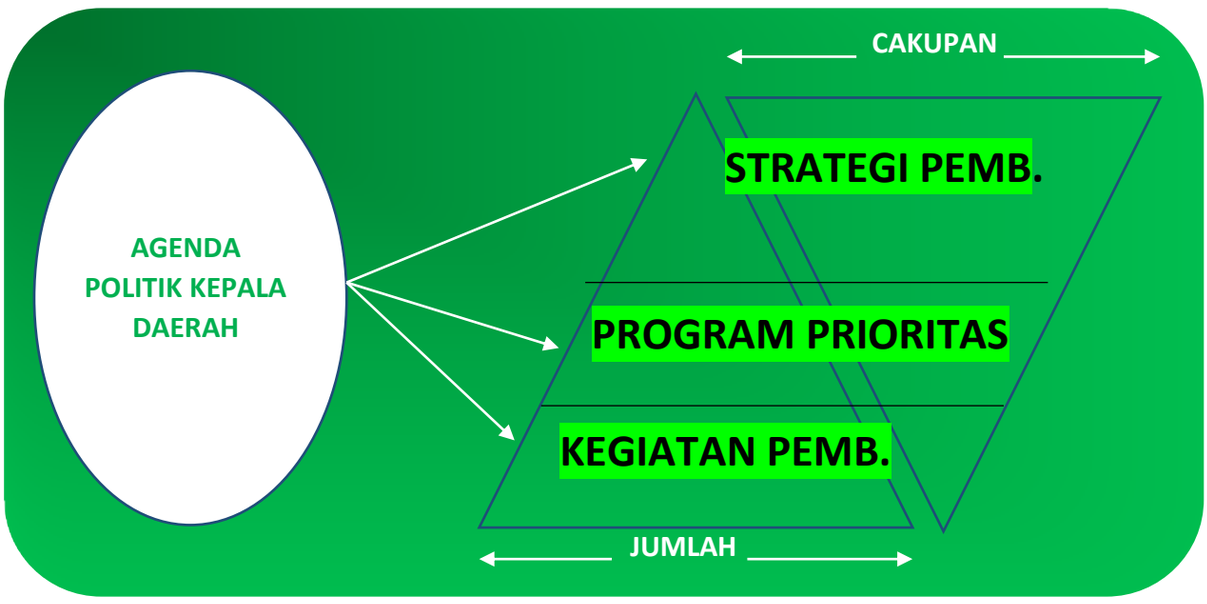
Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadiprasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. 2: Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD tahun 2017-2022

TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Menciptakan Kondisi Aman Guna Mengoptimalkan Potensi Sumber DayaMenuju Kotawaringin Barat yang Maju.	Pemantapan Infrastruktur untuk Mengurangi Disparitas Antar Wilayah di Kotawaringin Barat	Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kulitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah	Ekstensivikasi Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas, Industri Pengolahan serta Kepariwisataan Daerah melalui Investasi, Divestasi(*Public Private Partnership,* Kerjasama Antar Daerah) dan Penguatan *Local Participation* khususnya di tingkat Desa	Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisataan terhadap Pendapatan Daerah	Stabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawarngin Barat

6.3. Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioirtas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permen 13 Tahun 2006, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 6. 4: Ilustrasi Transformasi agenda Politik kepala daerah

Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji politik agenda pembangunan Bupati Terpilih. Berikut pendefinisian agenda politik Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tabel 6. 3: Pendefinisian Agenda Politik kepala daerah

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
1	Pembuatan regulasi dalam penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah;	Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
2	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan;	
3	Peningkatan manajemen dalam reformai birokrasi, melakukan revitalisasi dan restrukturisasi dengan prinsif efektif, efisien, kompetensi dan profesionalis;	Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian
4	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN dengan berpedoman pada azass-azas umum pemerintahan yang baik;	
5	Penegakan displin ASN sesuai sumpah jabatan, memiliki nilai dasar, taat etika profesi, bebas dari interven si politik, bersih dari praktik KKN;	
6	Program yustisia kependudukan;	Program Penataan Administrasi Kependudukan
7	Seluruh penduduk mempunyai E-KTP, dan masyarakat yang berdomisili wajib memiliki KTP Kab. Kotawaringin Barat;	Program Penataan Administrasi Kependudukan
8	Penyuluhan tentang pentingnya catatan sipil dan UU tentang Kependudukan;	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
9	Validasi Data Kependudukan/Pendataan faktual penduduk Kotawaringin Barat;	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan
10	Seluruh masyarakat memiliki akte lahir, yang menikah memiliki akte pernikahan, dan yang meninggal dunia, keluarganya mengurus akte kematian;	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
11	Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12	Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa	
13	Bantuan sarana dan prasaranan jaringan internet hingga kepedesaan;	Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
14	Keterbukaan informasi publik dan kemudahan mendapatkan informasi;	Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah
15	Pembuatan data stastitik yang akurat dan up to date (kekinian);	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
16	Optimalisasi Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH);	
17	Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
18	Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan Progran Jangka Panjang Pembangunan Nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah;	Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah
19	Merencanakan/membuat program pembangunan (master plan) Kotawaringin Barat dalam Program Jangka Panjang berikutnya;	
20	Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya;	Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah
21	Penyesuaian anggaran dengan skala prioritas, seimbang dan proporsional;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
22	Pengawasan, tertib anggaran, evaluasi, pelaporan secara periodik dan tepat waktu;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
23	Mengadakan Lelang Jabatan dan Penempatan dan pengangkatan (promosi jabatan) harus dengan sistem Merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;	Program Pengembangan karir
24	Penerapan ASN melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada Azas-azas umum penyelenggaraan negara;	
25	Penegakan displin ASN dengan memberikan penghargaan (award) atas prestasi dan kinerja baiknya, pemberian hukuman (punishment) atas pelanggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Program Pembinaan Aparatur
26	Memberikan pelatihan manajerial untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK;	
27	Mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan sesuai dengan jabatan;	Program Pendidikan kedinasan
28	Pengadaan fasilitas pendukung untuk optimalisasi tugas dan fungsi DPRD sebagai perwakilan rakyat;	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29	Meningkatkan fungsi pengawasan menjaga kebocoran anggaran;	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
30	Memberikan bimbingan penggunaan anggaran dan monitoring berkala;	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
31	Peningkatan evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk predikat WTP;	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
32	Melakukan tindakan pengembalian dana ke kas daerah bagi temuan;	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
33	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah;	Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
34	Penggunaan Dana Desa sesuai APBDes yang telah dibuat serta pertanggung jawaban sesuai pedoman/petunjuk teknisnya;	
35	Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, kompetensi dan pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
36	Meningkatkan status guru honor sekolah menjadi honor daerah dengan syarat dan ketentuan , serta pemberian insentif yang loayak bagi guru honor dan kontrak	
37	Memberikan insentif untuk guru PAUD/TK	
38	Peningkatan efisiensi, efektifitas, rotasi dan pemerataan penempatan guru dan kepala sekolah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal	Program manajemen pelayanan pendidikan
39	Meningkatkan manajerial sistem pendidikan secara profesional dengan implementasi kurikulum nasional dengan muatan lokal	
40	Peningkatan sarana dan prasrana pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan sesuai perkembangan teknologi	
41	Pemberian beasiswa bagi murid berprestasi, bantuan bagi murid yang kurang mampu, penyaluran bos tepat waktu dan sasaran penggunanya	
42	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan	
43	Peningkatan tertib administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dengan mempertimbangkan hal-hal khusus dan luar biasa	
44	Memberikan insentif pada PAUD	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
45	Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu	Program Pendidikan Sekolah Dasar
46	Pakaian gratis bagi siswa baru di tingkat SD dan SMP yang terdiri seragam merah-putih/biru putih, seragam pramuka, seragam batik dan sepatu	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
47	Peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat, secara khusus pengadaan rumah dinas untuk personil polindes	Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan
48	Revitalisasi fungsi puskesmas dan perubahan status Puskesmas Kumai dan Kotawaringin Lama menjadi Rumah Sakit Rakyat	
49	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	
50	Peningkatan layanan kesehatan siaga (on Call) di Tingkat Desa	
51	Peningkatan pelayanan dokter dan kesehatan yang profesional teristimewa kepada warga miskin dan penyandang disabilitas	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
52	Motivasi dan penyuuhan untuk peningkatan kesadaran dan perilaku hidup sehat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
53	Peningkatan Kelas rumah sakit Semanggang menjadi RS Tipe B Pratama	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
54	Mengadakan Event/turnamen dari berbagai cabang olahraga	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
55	Pemberian Insentif bagi pengurus organisasi Cabang-Cabang olah raga	
56	Memnerikan insentif bagi pelatih yang sudah bersertifikat serta pemberian award kepada juara-juara baik ditingkat daerah, Nasional, dan Internasional	
57	Melengkapi sarana prasarana olah raga yang representatif, sebagai langkah awal untuk pelaksanaan PORDA provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
58	Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Sport Center Pangkalan Bun	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
59	Pembinaan dan pemberdayaan OKP/Karang Taruna dan Ikatan Komunitas untuk menciptakan lapangan kerja khususnya di Desa dan kelurahan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
60	Pelatihan Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan di desa	
61	Memberdayakan OKP sebagai sosial kontrol di pedesaan	
62	Pembinaan kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa dan negara	
63	Penyuluh tentang pengaruh negatif NAPZA/Narkoba dan perilaku sex bebas	
64	Kerjasama dengan BNN Kabupaten dalam pemberantasan narkoba	
65	Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi untuk pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
66	Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu dari desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
67	Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;	
68	Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;	
69	Pembangunan Jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;	
70	Pembukaan jalan kecamatan Arut Utara ke Kabupaten; '	
71	Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
72	Pembangunan Water Front City;	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
73	Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
74	Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai lagi peruntukannya;	Program pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman
75	Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
76	Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;	
77	Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;	
78	Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;	Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
79	Penyiapan Konservasi Air dan penyedian air baku;	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
80	Penyediaan kecukupan air bersih yang hygenis;	
81	Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan;	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
82	Kontrol dan pendataan pemanfaatan air bawah tanah;	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
83	Relokasi pemukiman warga yang rawan banjir dan bencana lainnya;	Program pengendalian banjir
84	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase untuk terciptanya pemukiman asri dan sehat;	Program Pengembangan Kawasan Permukiman
85	Pembuatan saranan dan prasarana MCK dan lainnya, khususnya didaerah padat penduduk dan pinggiran sungai;	
86	Program bedah rumah dan atau layak huni bagi masyarakat tidak mampu;	
87	Kecukupan ketersedian energi dan penerangan jalan;	
88	Pengendalian sampah dengan partsipasi dan swadaya masyarakat sekitar;	
89	Pembuatan regulasi perizinan dan alih fungsi dan pelayanan yang prima;	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
90	Pengawasan terhadap pengembang property dan menjadikannya sebagai mitra;	
91	Memaksimalkan fungsi terminal bus umum, angkot dan truk pengangkut barang;	Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
92	Pembangunan terminal barang di Batu Belaman;	
93	Penataan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta keamanan;	
94	Sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan pihak otoritas dalam penggunaan dan peningkatan fungsi	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
	Bandara dan Pelabuhan;	
95	Penataan Master plan Bandara Internasional;	Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan
96	Penataan angkutan perkotaan dan pedesaan serta kelayakan kendaraan;	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
97	Pengadaan sarana dan prasarana transportasi;	
98	Pengadaan jembatan timbang untuk penggunaan jalan sesuai kelasnya;	
99	Pembangunan dermaga ferry penyeberangan Sei Kapitan-Kumai seberang dan Kumai seberang-Pangkalan Banteng;	Pembangunan dermaga dan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana/ fasilitas ASDP
100	Perencanaan pemindahan pelabuhan laut dalam Pangkalan Bun;	
101	Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RTRW Daerah;	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
102	Pemetaan dan pengawasan Sumber Daya Alam yang berpotensi diexplorasi dan exploitasi;	
103	Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah disektor perkebunan, industi maupun pertambangan;	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
104	Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan, serta membangun lingkungan hidup yang produktif;	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
105	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;	Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
106	Mempertahankan status Adipura;	
107	Membuat program tempat terbuka hijau (RTH) didaerah perkotaan dan padat penduduk;	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
108	Penataan Taman agar kota lebih cantik, indah dan asri;	
109	Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan;	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
110	Pemberian izin/regulasi AMDAL secara cermat dan selektif;	Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup
111	Melakukan penindakan terhadap pelaku pengerusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku;	
112	Pendataan dan penataan usaha Pertambangan Rakyat	Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
113	Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
114	Pengadan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah prioritas pencegahan Karhutla;	
115	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan potensi bencana dan cara penanggulangan serta kerja sama dalam mengantisipasi;	
116	Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan repressif serta proteksi yang bersifat konservatif paska kejadian luar biasa KLB);	Program Tanggap Darurat
117	Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;	
118	Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
119	Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk. peningkatan investasi;	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
120	Mendorong para Investor untuk penyediaan sumber energi;	
121	Sosialisasi potensi daerah dan SDA upaya mengandeng para investor;	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
122	Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal
123	Peningkatan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian, dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		Program Pengembangan Usaha Koperasi
124	Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha disetiap Desa/Kelurahan ditargetkan 100 kelompok binaan;	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
125	Pembinaan home industri dengan pemberian bantuan peralatan seperti usaha pembuatan batu bata, batako, kerajian meubel, rotan dan anyam-anyaman, aksesoris dan batu mulia serta usaha makanan ringan;	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
126	Pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga ringan;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
127	Mengadakan kerja sama dengan korporasi besar sebagai bina mitra untuk Koperasi dan UKM;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
128	Meningkatkan manajemen promosi ditingkat daerah, nasional dan internasional;	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
129	Mengoptimalkan fungsi pasar untuk transaksi yang aman dan nyaman dan revitalisasi pasar tradisional untuk pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
130	Menjalin kerjasama dengan para Distributor untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan sembilan bahan pokok;	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
131	Mengarahkan pihak perusahaan untuk transaksi jual-beli di pasar terdekat;	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
132	Pembangunan pasar modern terintegrasi sebagai pusat grosir;	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
133	Pemberdayaan dan penguatan partisipasi perusahaan/korporasi ikut membangun perekonomian masyarakat (CSR= Corporate Social Responsibility);	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
134	Merencanakan kawasan terpadu untuk usaha industri, hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan hasil peternakan;	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri
135	Optimalisasi Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
136	Pendirian perusahaan daerah untuk promosi dan menampung over produk hasil-hasil home industri, kelompok usaha bersama dan UKM yang khas, layak dan punya nilai jual, yang berbahan dasar dari hasil daerah;	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
137	Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
138	Target APBD yang progressif, pencapaian kisaran sebesar RP.2,5 Triliun;	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah
139	Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sesuai klasifikasi tanah, peruntukan dan kemajuan wilayah secara proporsional;	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
140	Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat bayar pajak dan retribusi;	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
	Peningkatan mutu pelayanan publik serta tertib pemungutan uang;	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
141	Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
142	Melakukan upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang sah;	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
143	Meningkatkan budidaya peternakan dengan memberi bantuan kepada kelompok usaha bersama;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
144	Mengadakan diversifikasi ternak yang berpotensi dikembang biakkan;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
145	Vaksinasi ternak peliharaan masyarakat;	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
146	Mengadakan pelatihan pengembangbiakan ternak secara teknologi;	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
147	Pengadaan benih ternak dan bantuan untuk pegolahan pakan ternak;	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
148	Optimalisasi Pengembangan program integrasi Sawit-Sapi	Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
149	Optimalisasi/ Target pencetakan persawahan seluas 27.000 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
150	Mensinergikan program dengan pihak TNI dalam pembukaan dan pengolahan lahan pertanian;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
151	Tahun pertama panen raya padi seluas 200 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
152	Untuk Swasembada pangan, mengoptimalkan penanaman padi 4000 s/d 12.000 HA;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
153	Budidaya pola terpadu tanaman hortikultura dan pengembangan tanaman organik yang merupakan komoditas unggulan, alternatif dan tanaman khas daerah;	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
154	Budidaya jagung oleh masyarakat untuk konsumsi sendiri dan kebutuhan ternak;	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
155	Penguatan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dipedesaan; Pembinaan perkebunan inti dan plasma serta perkebunan rakyat;	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
156	Pengadaan peralatan pertanian dan mekanisasi, ketersedian bibit unggul yang tahan hama dan penyakit;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
157	Menjaga ketersedian bibit/benih, pupuk dan racun;	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
158	Mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam mengolah lahan pertanian;	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
159	Meningkatkan swasembada beras dan diversifikasi pangan menuju ketahanan pangan;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
160	Melakukan sosialisasi diversifikasi pangan dalam antisipasi kerawanan pangan;	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
161	Ketersediaan pangan untuk daerah bencana dan daerah paceklik;	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
162	Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan pangan;	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
163	Pengembangan produk pertanian dalam bentuk home industri untuk persedian;	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
164	Mensosialisasikan fungsi lahan pertanian untuk terciptanya ketahan pangan;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
165	Mengawasi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lainnya;	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
166	Menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan ketersediaan sewaktu-waktu;	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
167	Mendirikan usaha penampungan atas over produksi pangan;	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
168	Pengadaan benih ikan sebagai stimulans dan peralatan bagi usaha tambak dan keramba ikan;	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
169	Pengadaan bantuan kapal nelayan/kelotok dan mesin untuk kelompok nelayan;	Program Pengembangan Perikanan
170	Pengadaan bantuan net/ alat tangkap ikan dan cold storage;	Program Pengembangan Perikanan
171	Pendataan dan pembinaan bagi kelompok usaha keramba (budidaya ikan air tawar) serta pemberian bantuan benih ikan;	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
172	Mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan stabilisasi harga;	Program Pengembangan Perikanan
173	Membina pelaku industri UKM dengan bahan dasar ikan agar berdaya saing;	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
174	Promosi hasil produk unggulan dan khas ke luar daerah;	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
175	Membangun pabrik es untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan dan pedagang;	Program Pengembangan Perikanan
176	Menjaga ketersedian BBM untuk para nelayan;	Program Pengembangan Perikanan
177	Meningkatkan pembinaan mentalitas masyarakat, menciptakan kondisi aman, tentram dan dinamis	Program Pembinaan Kemasyarakatan
178	Meningkatkan jaminan perlindungan bagi masyarkat kurang mampu	(*Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat*)

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
179	Memberi bimbingan partisipatif dan penumbuhan etos kerja masyarakat;	Program Pembinaan Kemasyarakatan
180	Meningkatkan kerukunan umat dan antar umat dalam kehidupan bergama;	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
181	Memberdayakan peranan lembaga keagamaan dalam pembangunan;	*(Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan)*
182	Meningkatkan harmonisasi antara agama;	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
184	Bantuan sarana dan prasarana ibadah secara seimbang dan merata serta perayaan hari-hari besar keagamaan;	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
185	Bantuan sosial secara efektif dan tepat guna dan peralatan untuk rukun kematian;	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
186	Pemberian insentif bagi guru-guru informal dan pemuka agama	*(Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Agama)*
187	Jaminan Perlindungan dan peningkatan pelayanan serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin/kurang mampu	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINNAN SOSIAL
188	Bantuan/pemberian iuran BPJS bagi seluruh warga miskin/tidak mampu;	*(Kegiatan Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi jaminan sosial serta penataan lingkungan bagi Fakir Miskin)*
189	Tanggap dalam mengantisipasi, memberi pertolongan dan bantuan bagi warga yang kena musibah dan bencana alam;	*(Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Alam)*
190	Meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga disabilitas;	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
191	Kanalisasi kegiatan masyarakat yang positif serta membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM, ORMAS, OKP, Pemerhati Sosial dan lembaga lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam menangani masalah-masalah sosial;	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
192	Mengadakan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan bagi penyandang masalah sosial;	*(Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)*
193	Penghapusan dan pemberantasan prostitusi, gelandangan dan pengemis;	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
194	Pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif dan penyelenggaraan kursus keterampilan;	*(Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)*
195	Pemberian bantuan modal usaha	*(Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha*

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
	dan mengandeng para pengusaha sebagai mitra	*bagi Keluarga Miskin)*
		(Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin)
196	Meningkatkan peranan perempuan dalam pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan;	*(Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender)*
197	Pemberdayaan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mandiri dan partisipatif dalam urusan rumah tangga, kesehatan, perbaikan gizi dan perlindungan anak;	*(Kegiatan Pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan)*
198	Perlindungan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya tanpa diskriminasi;	Program pengembangan Kabupaten Layak Anak
199	Penyuluhan antisipasi terhadap kejahatan seksual pada anak;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
200	Membuat proteksi dan langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak akibat KDRT dan kejahatan seksual;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
201	Sosialisasi tanggung jawab Negara/Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua atau Wali dalam perlindungan anak;	*(Kegiatan Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk)*
202	Mengadakan perlindungan hukum kepada anak-anak disabilitas yaitu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam interaksinya dan partisipasi dalam masyarakat secara penuh dan efektif;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
203	Penghapusan KDRT dan kejahatan pada anak;	Program Peningkatan Perlindungan Anak
204	Penyuluhan tentang kewajaran batas umur untuk nikah dan program KB;	Kegiatan Advokasi, penggerakan dan penyuluhan KB
205	Terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, sehat, pintar dan berkwalitas	Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
206	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
207	Pendampingan didalam pembuatan Peraturan Desa dan Penyusunan APBDesa;	*(Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Desa)*
208	Penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan Dana Desa;	*(Kegiatan Monitoring & Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)*
209	Memberdayakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Desa;	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
210	Mengadakan pelatihan dan pembinaan peningkatan ekonomi	Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
	warga desa;	Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertingga
211	Pemberian tambahan insentif bagi perangkat desa dan Ketua RW/RT;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
212	Perekrutan tenaga pendamping di desa;	*(Kegiatan Peningkatan kapasitas pendampingan Desa)*
213	Fasilitator dalam Pilkades dan pemilihan BPD, Tata ruang Desa, Tugas dan fungsi Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD;	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
214	Program pengadaan listrik tenaga surya (solar power);	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
215	Terciptanya lapangan kerja sebanyak 15.000 TK;	Peningkatan Kesempatan Kerja
216	Membuka lapangan kerja baik sektor formal dan maupun informal;	
217	Mengadakan pelatihan kerja berbagai keterampilan yang potensial bagi anak putus sekolah dan lulusan SLTA untuk siap sebagai tenaga kerja terampil di sektor formal dan informal;	*(Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja)*
218	Melatih tenaga kerja bersertifikat dalam berbagai bidang sebanyak 1500 orang;	*(Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja)*
219	Memberi bantuan modal dan peralatan usaha bagi peserta pelatihan dengan bentuk KUBE;	Peningkatan Kesempatan Kerja
220	Membina peserta transmigrasi untuk pengolahan lahan dengan komoditas unggulan dan yang sesuai struktur dan kontur tanahnya;	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
221	Program transmigrasi lokal untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
222	Optimalisasi Satpol PP dalam pelaksanaan dan pengamanan Perda;	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
223	Peningkatan kekondusifan masyarakat dan bersinergi dengan POLRI dan TNI;	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
224	Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih;	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
225	Pelatihan dan Peningkatan kesiap-siagaan personil dan penambahan insentif;	Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan
226	Penambahan personil dengan status honor daerah dengan honor yang layak sesuai dengan beban kerja	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
227	Pemberian bantuan pembinan untuk Partai Politik yang mempunyai fraksi di DPRD; 0 Pembinaan dan dukungan serta pemberian bantuan untuk ormas-ormas terdaftar; 0 Melakukan pendidikan politik tentang Empat Pilar berbangsa dan bernegara;	Pendidikan politik masyarakat
228	Melakukan pembangunan karakter bangsa dengan ajaran TRISAKTI, yaitu : Berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;	Pengembangan wawasan kebangsaan
229	Membudayakan jiwa gotong royong sebagai tanggung jawab bersama membangun daerah dengan prinsip hidup bersama dalam keberagaman sosial (living together in plural society);	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
230	Meningkatkan kerja sama, menjalin komunikasi dan hamonisasi setiap elemen masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
231	Penataan Pangkalan Park dan menggandeng mitra usaha untuk pengelolaan dan pengadaan panggung hiburan dan ajang penampilan minat dan bakat menampilkan kesenian dan budaya lokal maupun daerah lain dalam bingkai keanekaragaman budaya;	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
232	Memperbaiki sarana dan prasarana obyek wisata alam dan religi;	
233	Penggalian daerah wisata yang baru dan berpotensi untuk dijual;	
234	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan kepariwisataan;	
235	Pengadan fasilitas WIFI gratis ditempat rekreasi umum (Bundaran Pancasila dan Pangkalan Bun);	
236	Mengadakan pelayanan prima untuk peningkatan sumber PAD;	
237	Pelestarian situs-situs sejarah;	Program Pengembangan Nilai Budaya
238	Meningkatkan pelestarian budaya daerah lokal dan dan daerah lainnya dalam rangka keberagaman dengan melibatkan elemen masyarakat;	
239	Bantuan alat kesenian dan budaya daerah yang ada untuk pelestarian;	
240	Menjadikan Budaya sebagai alat	

NO	PROGRAM POLITIS	DEFINISI NOMENKLATUR PROGRAM
	pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, penyangga budaya nasional yang dinamis;	
241	Mengadakan Festival Budaya Nusantara dan Karnaval Budaya Nusantara;	
242	Pelestarian cagar budaya dan situs-situs bersejarah;	
243	Penggalian dan pengembangan budaya lokal yang menunjukkan jati diri Kotawaringin Barat (Marunting Batu Aji);	
244	Peningkatan Promosi destinasi wisata yang ada ke tingkat Nasional dan Manca Negara dan mengadakan event yang berskala Nasional dan Internasional;	Program pengembangan pemasaran pariwisata
245	Peningkatan kerja sama dengan Perhotelan, Biro Perjalanan, Biro Wisata dan Para Guide (penuntun atau penterjemah);	Program pengembangan kemitraan

Berdasarkan amanat Permendagri No 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif *balanced scorecard*. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat/layanan (P1) adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan (P3) yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dalam rangka melihat keterkaitan antara strategi dengan program prioritas daerah, maka berikut klasifikasi program terhadap strategi pembangunan daerah Kotawaringin Barat

Tabel 6. 4 : Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (*E-Governance*) Dan Reformasi Birokrasi.	P1	• Program Pelayanan Pencatatan Sipil • Program Peningaktan Pelayanan Angkutan • Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
		P2	• Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan • Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH • Program litren pemb. daerah • Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup • Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi • Program Perencanaan Sosial dan Pmerintahan • Program Penataan Administrasi Kependudukan • Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		P3	• Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah • Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan • Program peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi • Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa • Program implementasi dan pengembangan e-government • Program pengembangan data/informasi/statistik daerah • Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika • Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan • Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa • Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		P4	• Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2	Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal.	P1	• Program pendidikan anak usia dini (PAUD) • Pogram pendidikan Nonformal • Program Pendidikan Sekolah Dasar • Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan • Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Program Upaya kesehatan Masyarakat • Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		P2	• Program manajemen pelayanan pendidikan • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		P3	• Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan • Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan • Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		P4	
3	Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep Green Economy	P1	• Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri • Program Pengembangan IKM • Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri • Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri • Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar • Program Peningkatan Produksi Hortikultura • Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan • Program Peningkatan Produksi Perkebunan • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Program Peningkatan Agribisnis Peternakan • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengembangan Perikanan • Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan • Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan • Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan • Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan • Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan • Program Peningkatan kualitas

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			kelembagaan koperasi • Program Pengembangan Usaha Koperasi • Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro • Program Penumbuhan Wirausaha Baru
		P2	
		P3	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
		P4	• Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal • Program Ekstensifikasi Pajak Daerah • Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat • Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah • Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
4	Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep *Waterfront City* yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah	P1	• Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program pembangunan infrastruktur perdesaan • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh • Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ • Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemelihraaan Prasarana dan fasilitas ASDP • Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Areal Pemakaman • Program Pembangunan saluran

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			drainase/gorong-gorong • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya • Program pengendalian banjir • Program Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup Dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
		P2	• Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan • Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah • Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang • Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam • Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Program Pengendalian kebakaran hutan • Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup • Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah • Program Kesadaran Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan

NO	STRATEGI	BSC	Program Prioritas Pembangunan Daerah
			• Program Tanggap Darurat
		P3	
		P4	
5	Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya	P1	• Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan • Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama • Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan • Program Pembinaan Kemasyarakatan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan" • Program peningkatan kualitas Hidup perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan • Program Peningkatan Perlindungan Anak • Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya" • Program Pngembangan Ekonomi Kreatif
		P2	• Program pengembangan Kabupaten Layak Anak
		P3	• Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina • Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminalProgram pengembangan pemasaran pariwisata • Program pengembangan kemitraan • Program Pengembangan Nilai Budaya • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		P4	

Tabel 6. 5 : Program Pembangunan Daerah dan kerangka Pendanaan tahun 2017

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	**Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**	**Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**	**Indeks Good Governance**	**S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan**	**Opini atas audit BPK**	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK	N/A	N/A	Rp	BPKAD
							Persentase Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah yag Akuntabel dan Tepat Waktu	%	N/A	N/A		
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Kabupaten**	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%		66,7 %	Rp 249.959.088	Setda

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki SOP Bidang Administrasi dan Pemerintahan	%	N/A	100	Rp 150,040,912	
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan SDM Pemdes dan Pilkades	%		100 %	Rp 134.300.000	
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	%	100	100	Rp 1.331.667.350	Inspektorat
						Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	%	100	100	Rp 391.200.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	N/A	N/A	Rp 50.949.000	
						Program Pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Perencanaan dan Litbang	%	0%	80	Rp 47.007.500	Bappeda
						Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	N/A	80	Rp 1.808.153.700	
							Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	N/A	80		
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi	%	N/A	80	Rp 109.562.500	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program perencanaan sosial budaya	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya	%	N/A	80	Rp 178.330.500	
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	%	N/A	80	Rp 349.185.000	
					Indeks Proffesionalisme ASN	Program Pembinaan Aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin	%	N/A	N/A	Rp 1.203.141.400	BKPP
						Program Pengembangan Karir	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%	833.272.250		Rp. 1.465.078.500	
						Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	%	3.263.410.000		Rp. 1.837.805.000	
					Maturitas SPIP	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas	%	100	100	Rp 391,200,000.00	Inspektorat

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						pengawasan	SDM APIP					
						Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Infrastruktur yang Diperlukan dalam mencapai Level 3	%	N/A	N/A	Rp 50,949,000.00	
				S.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	**Persentase PD yang menerapkan E-Gov**	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Tahun	N/A	1	Rp 248.231.000,00	DISKOMINFO
						Program kerjasama informasi dan media massa	Tingkat kerjasama informasi dan media massa	Tahun	N/A	1	Rp 799,411,004.00	DISKOMINFO
					Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	N/A	82	Rp 546.313.025,00	Dispendukcapil
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Tingkat Kesadaran Publik dalam Berlalu Lintas	%	N/A		Rp 510.200.000,00	DISHUB

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase cakupan Kapasitas pelayanan Anggota DPRD	%	100	90	Rp 5,738,164,250.00	Setwan (DPRD)
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	**Persentase Desa mandiri**	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	N/A	100	Rp 44,000,000.00	Setda
						Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	N/A	90	Rp 590.473.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana	%	N/A	N/A	Rp 105,382,500	Kecamatan
2	**Meningkatkan kualitas hidup**	**Meningkatkan kualitas sumber**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**	**Angka Harapan Lama Sekolah**	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Jumlah guru bersertifikat pendidik		0	0	Rp 1,800,000,000.00	Dinas Pendidikan

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.	**daya manusia**				Kependidikan	jumlah kelompok kerja guru yang terbina		8	8		
							jumlah pelatihan pendidikan dan tenaga pendidik terlaksana jumlah guru honor		3	3		
						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah operator IT yang terlatih monitoring evaluasi kegiatan terlaksana	Orang	N/A	N/A	Rp 465,000,000.00	
					Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	TKN pembina yang dibangun ruang kelas baru bertambah jumlah ruang kelas tercukupi mebeluer alat praktik dan peraga tersedia		1 1 1 2	1 1 1 2	Rp 1,355,000,000.00	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
							perssentase BOP TK yang tersalur					
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah USB terbangun ruang kelas baru bertambah jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur jumlah ruang kelas terehabilitasi				Rp 25,850,985,558.00	
						Program Pendidikan Menengah	Jumlah USB terbangun ruang kelas baru bertambah jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur jumlah ruang kelas terehabilitasi				Rp 6.686.000.000.00	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
					Indeks Minat Baca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%			Rp 686,362,250	DPK
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas				Rp23.398.247.000	DINKES
						Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Menurunkan Angka kesakitan				Rp935.039.750	
						Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	Meningkatnya FKTP yang terakreditasi				Rp36.800.202.000	
						Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan				Rp1.831.276.100	
					Mutu Layanan Rumah Sakit	Program pengadaan, peningkatan sarana dan	Cakupan layanan sarana dan prasarana	paket	N/A	1 tahun	Rp 51,462,586,250.00	RSUD

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	rumah sakit					
						Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan		1tahun	Rp 78.000.000.000	
						Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai/ SDM yang mengikuti pelatihan	Kegiatan	N/A	1 tahun	Rp 342,000,000.00	
				Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga	**Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda**	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terlaksananya event-event olahraga di semua cabang	-	N/A-	100	Rp 2,920,389,000.00	DISPORA
						Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga	%	N/A	100	Rp 224,900,000,00	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan oprasional pemuda dan kegiatan lainny	-	N/A	100	Rp 1,012,598,000.00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
3	**“Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah & sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup”**	**Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan**	**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah industri kecil menengah yang berkembang	IKM	n/a	21	Rp 199,563,000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang berkembang	IKM	n/a	3	Rp 116,258,000,00	
						Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah IKM potensial	IKM	n/a	8	Rp 24,275,000,00	
						Program Pembinaan Lingkungnan Sosial Lingkup Industri Kecil	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Orang	n/a	100	Rp 119.650.000	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%	n/a	8	Rp 576,251,800	
						Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai	(%)	80%	85 %	Rp 63.775.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah Sarana Prasarana Pasar Rakyat yang ditingkatkan	Pasar	n/a	5	Rp.3.000.000.000	
							Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaanya	Pasar		1		
						Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah realisasi export	US $ (jt)	120	124,80	Rp 178,600,000	
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Pameran	n/a	1	Rp 366.625.000	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Kwintal/ha		28,46	Rp 4,055,034,100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM petani/pelaku agribisnis	%		20	Rp 853,925,000	
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Meningkatnya produksi pertanian/	%		10	Rp 163,975,000	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Produksi	perkebunan					
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian/ perkebunan	%		10	Rp 1,567,941,300	
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnyan produktivitas pertanian/perkebunan	%		10	Rp 1,257,767,200	
						Program Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang terpasilitasi	orang			Rp 291,013,200	
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/ternak	%	90	90	Rp 747,640,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non	%	8	8	Rp 2,144,477,650	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
							ruminansia					
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	14,05	15,19	Rp 4.245.780.050	Dinas Perikanan
						Program Pengembangan Perikanan	Persentase peningkatan produksi nelayan	%	5,00	5,00	Rp 1.569.365.000	
						Program pengembangan usaha hasil perikanan	Persentase usaha hasil perikanan yang dikembangkan	%	38,00	45,00	Rp 885.505.500	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan ketahanan pangan daerah	%	60,3	60	Rp 458,198,000	Dinas Ketahanan Pangan
						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kegiatan lembaga tani	%	100	100	Rp 113,800,000	
					Persentase Koperasi yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	n/a	10	Rp 992,097,000	Dinas Perindustrian Perdagangan

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
					Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang berkembang	UMKM	n/a	173	Rp 866,647,500	Koperasi dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang berkembang	UMKM	n/a	113	Rp 189,355,000	
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi terkait pengembangan promosi dan akses permodalan	UMKM		180	Rp 171,537,500	
						Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang terdata	UMKM	n/a	1500	Rp 146.467.500	
				Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	**Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN**	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Investor	n/a		Rp 134,005,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kotawaringin Barat		n/a		Rp 145,000,000	
						Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					Rp 223,200,000	
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan asli daerah	%	6	6	Rp 2,127,788,100	Badan Pendapatan Daerah
				Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	**Indeks Williamson**	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong	Persentase pembangunan turap/talud/ bronjong	%	100	100	Rp 1,622,514,400	Dinas PUPR
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	%	71,83	77,46 %	Rp 171,244,310,650	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	Jiwa	124.697	133.141	Rp 13,134,501,400	
						Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km	939,82	945	Rp 5,728,191,350	
						Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	Kecamatan	6	6	Rp 194,727,500	
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani	DI+ DIR	20	20	Rp 22,270,218,300	
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	Buah	4	8	Rp 2,220,067,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Daya Air Lainnya						
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah penduduk terlayani air mium	jiwa	207.888	208.469	Rp 10,162,398,800	
						Program Pengendalian Banjir	Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	Kawasan	7	7	Rp 10,410,517,600	
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	ha	80,7	84,9	Rp 8,657,632,000	
						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	kk	51,218	521,17	Rp 403,901,500	
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	%	N/A		Rp 929,982,000	Dinas Perhubungan
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang				Rp 940.400.000	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Perhubungan	dihasilkan					
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas ASDP	Presentase tingkat kepuasan publik terhadap ketersediaan fasilitas ASDP	%	N/A		Rp 2.371.826.360	
						Program Pengembangan Perumahan	**Prosentase kecukupan data perumahan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan**	%	-	60	Rp 320,000,000	Dinas Perkim
						Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	**Prosentase penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	%	-	50	Rp 150,000,000	
			Indeks IKLH	**Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana**	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks**	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kebijakan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, cakupan	%	34,78	39, 29	Rp 9,228,889,003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
					Tutupan Hutan		pengelolaan persampahan berbasis masyarakat					
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan kualitas air, udara dan tanah.cakupan titik pengawasan pada penataan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah	%	33,88	37,732	Rp 834,608,800	
						Program Perlindungam dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan SDA	%	33,88	37,372	Rp 19,500,000	
						Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Cakupan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA serta keserasian/kelestarian LH	%		37,732	Rp 550,000,000	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pembuatan kampung organik Cakupan pembuatan taman keanekaragaman hayati Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	%	33,88	37,732	Rp 461,475,000	
						Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	%	33,88	37,372	Rp 20,000,000	
						Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	%	33,88	37,372	Rp 37,441,500	
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH dikawasan perkotaan	%	9,00	9,20	Rp 1,728,535,500	
					Indeks Resiko Bencana	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	**Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana**	%	50	50	Rp 602,865,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Tanggap Darurat	**Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif**	%	60	70	Rp 97.700.000	
4	**Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.**	**Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan**	**Indeks Pembangunan Masyarakat**	**Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama**	**Persentase penurunan konflik antar umat beragama**	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik yang bernuansa SARA		N/A	0	Rp 280.705.000	Bakesbangpol
						Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			4 instansi	Rp 535.560.000	
						Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	%	N/A	90	Rp 448.205.000	Setda

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase jumlah kegiatan pemerintah daerah di bidang mental dan keagamaan	%	N/A	100	Rp 136,050,000	Setda
				Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	**Peningkatan jumlah Desa Mandiri**	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, usaha ekonomi masyarakat, masyarakat miskin dan desa tertinggal	Persentase Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, usaha ekonomi masyarakat, masyarakat miskin dan desa tertinggal	%	N/A	60 %	Rp 190.899.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang dibina	%	N/A	70	Rp 1,195,746,300	
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa					Rp 239.700.100	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
						Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	%	N/A	90	Rp 590.473.100	
				Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layakk anak	**Indeks Pemberdayaan Gender**	Program peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan				Rp 125,251,500	DP3AP2KB
						Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan				Rp 614.849.800	
						Program Keluarga Berencana	Ratio Peserta KB				Rp 26.912.500	
					Kategori Kabupaten Layak Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Lembaga PUG Aktif				Rp 194.900,000	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	**Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.**	**Mewujudankondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan**	**Angka Kemiskinan**	**Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis**	**Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk**	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)	Orang	80	80	Rp 389,995,500	Dinas Sosial
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.	Persentase fakir miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	%			Rp 474,175,000	
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Orang			Rp 373,220,000	
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	Orang			Rp 113,500,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
										Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi	**Persentase Penurunan jumlah Penganggur an Terebuka Terehadap Jumlah Penduduk**	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan pelatihan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prasarana LLK				Rp 1,912,284,300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi
						Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja				Rp 272,708,542	
						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum jaminan sosial bagi tenaga kerja				Rp 267,078,250	

									Kinerja Awal RPJMD	2017		OPD
No	**Misi**	**Tujuan (T)**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran (S)**	**Indikator Sasaran**	**Program (Pg)**	**Indikator Program**	**Satuan**		**Target**	**Rp.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	**Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap tahun sebelumnya**	Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota LINMAS yg mendapat pelatihan		N/A	90	Rp 1.952.412.500	Satpol PP dan DAMKAR
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah penyakit masyarakat		N/A	90	Rp 239.368.320	
6	**Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata**	**Peningkatan Pariwisata Daerah**	**Tourism Intensity**	**Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata**	**Persentase Destinasi Wisata Khas Daerah Terkelola**	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	*Lenght of stay*	hari	3	3	Rp 2,167,782,500	Dinas Pariwisata
				Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	**Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus**	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase pelaksanaan promosi pariwisata	**%**	80	80	Rp 1,469,763,000	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	Program pengembangan kemitraan	Prosentase peningkatan jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional	orang	85	85	Rp 74,800,000	

Tabel 6. 4: Justifikasi empat perspektif balanced Sore Card Strategi, terhadap program pembangunan daerah

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	**Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**	**Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**	**Indeks Good Governance**	**S1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan**	**Opini atas audit BPK**	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat		WTP	Rp 2,553,343,800	WTP	1.233.994.462	WTP	Rp 1.296.254.230	WTP	Rp 1.585.967.261	WTP	Rp 1.643.250.000	WTP	Rp 1.643.250.000	BPKAD
							Persentase Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan Tepat Waktu	%		100		100		100		100		100		100		
				S2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	**Nilai SAKIP Kabupaten**	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%		66,7	Rp 199,358,000	66,7	Rp 150,000,000	75	Rp 175,000,000	85	Rp 175,000,000	100	Rp 250,000,000	100	Rp 250,000,000	Sekda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD yg telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	%	N/A	29	Rp 171.414.000	58	Rp.	100	Rp	100	Rp.0	100	Rp.	100	Rp.	Inspektorat
						Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 314.813,000	80	Rp 801.000,000	90	Rp 1.337.000,000	90	Rp 2.150,000,000	90	Rp 1.700,000,000	90	Rp 1.700,000,000	Bappeda
						Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%		80	Rp 657,849,600	80	Rp 879.288.500	90	Rp. 990.736,000	90	Rp 1.261.505.000	90	Rp 1.500.000,000	90	Rp 1.500.000,000	Bappeda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 180.545000	80	Rp 1,140,000,000	90	Rp 1,510.000,000	90	Rp 1.250,000,000	90	Rp 950,000,000	90	Rp 950,000,000	Bappeda
						Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 370,500,000	80	Rp 1,316,100,000	90	Rp 1.490.145,000	90	Rp 1.850.000,000	90	Rp 2.150,000.000	90	Rp 2.150,000.000	Bappeda
						Program Perencanaan Sos. dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam	%		80	Rp 715,350,000	80	Rp 1,753,500,000	90	Rp 1.873.200,000	90	Rp 1.750.000,000	90	Rp 2.300,000.000	90	Rp 2.300,000.000	Bappeda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							pengambilan kebijakan															
					Maturitas SPIP	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	N/A	75	Rp 121,971,400	80	Rp 128,069,970	85	Rp 137,500,000	90	Rp 144,375,000	95	Rp 151,593,750	95	Rp 151,593,750	Inspektorat
						Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	%		100	Rp 361,781,800	100	Rp 414,375,000	100	Rp 462,093,750	100	Rp 450,698,438	100	Rp 610,233,359	100	Rp 610,233,359	Inspektorat
					Indeks Profesionalitas ASN	Program Pengembangan karir	Presentase ASN yang sesuai Kompetensi	%		80	Rp. 861.039.000	82	Rp 767.000.000	85	Rp 1.160.000.000	88	Rp 1.410.000.000	90	Rp 1.580.000.000	90	Rp 1.580.000.000	BKPP

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Prosentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi	%		71	Rp 2.132.684.000	72	Rp 2.598.500.000	73	Rp 3.000.000.000	74	Rp 2.698.012.458	75	Rp 2.264.225.893	75	Rp 130.000.000	BKPP
						Program Pembinaan Aparatur	Prosentase Penurunan Pelanggaran Disiplin	%		4,00	Rp 359.005.000	4,15	Rp 295.000.000	4,50	Rp 405.000.000	4,75	Rp 435.000.000	5,00	Rp 375.000.000	5,00	Rp 375.000.000	BKPP
						Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian	Persentase SKPD yang memiliki SOP Bidang Administrasi dan Pemerintahan	%		-	Rp 0	100	Rp 350,000,000	100	Rp 390,000,000	100	Rp 450,000.000	100	Rp.475.000.000	100	Rp.475.000.000	Setda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota DPRD	%		92	Rp 3,734,900,000	94	Rp 4,609,682,705	96	Rp 7,078,351,396	98	Rp 4,496,469,801	100	Rp 9,876,252,576	100	Rp 9,876,252,576	Sekwan
				S.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	**% PD yang menerapkan E-Gov**	Program layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan		3	Rp 225,145,000	8	Rp 700,000,000	11	Rp 1,400,000,000	11	Rp 2,400,000,000	11	Rp 1,400,000,000	44	Rp 1,400,000,000	Diskominfo
						Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan		9	Rp 335.535.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	57	Rp 2.400.000.000	Diskominfo

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	Cakupan Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	%		104	Rp 106,539,000	107	Rp 400,000,000	107	Rp 2,100,000,000	107	Rp 2,200,000,000	107	Rp 1,570,000,000	532	Rp 1,570,000,000	Diskominfo
						Program implementasi dan pengembangan e-government	Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Gov	Kegiatan		6	Rp 221,937,900	12	Rp 600,000,000	12	Rp 675,000,000	12	Rp 675,000,000	12	Rp 675,000,000	54	Rp 675,000,000	Diskominfo
						Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tingkat Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Dokumen		120	Rp 44,615,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	920	Rp 250,000,000	Diskominfo
						Program Pengamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Kegiatan		1	Rp 37,715,000	1	Rp 283,500,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	5	Rp 200,000,000	Diskominfo

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Daerah																
					rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			69,49	Rp. 359.981.600	76,75	RP. 641.256.500	83,12	Rp. 612.025.552	86,87	Rp. 659.392.345	89,75	Rp. 882.913.572	89,75	Rp. 882.913.572	Dispendukcapil
						Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			-	-	85	Rp. 132.200.000	87,5	Rp. 172.500.000	89,5	Rp. 186.000.000	90,5	Rp. 201.500.000	90,5	Rp. 201.500.000	Dispendukcapil
						Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan			-	-	3	Rp. 78.500.000,00	6	Rp. 101.500.000,00	10	Rp. 139.000.000,00	15	Rp. 194.000.000,00	15	Rp. 194.000.000,00	Dispendukcapil
						Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri			1.250	Rp. 28.250.000	1.100	Rp. 478.255.000	1.000	Rp. 725.680.000	950	Rp. 644.728.032	900	Rp. 342.143.010	900	Rp. 342.143.010	Dispendukcapil

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Ketepatan waktu penyelesian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan	%		100	Rp 223,855	100	Rp 874,500,000	100	Rp 874,500,000	100	Rp 1,130,600,000	100	Rp 1,195,000,000	100	Rp 1,195,000,000	DPMTSP
						Program Pengendalian Lalu Lintas dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase Tingkat Kesadaran Publik dalam Berlalu Lintas	%			0		Rp 1,596,913,600		Rp 1,965,090,703		Rp 2,066,054,405		Rp 2,337,000,905		Rp 2,337,000,905	Dishub
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	**% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan,**	Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	% Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar			16	Rp 148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu		dan tepat waktu															
						Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terakomodirnya Usulan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Desa		81	Rp 590.473.100	81	Rp 1,250,000,000	81	Rp 1,495,000,000	81	Rp 1,445,000,000	81	Rp 1,440,000,000	81	Rp 1,440,000,000	DPMD
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana	%			Rp 48.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC.AMATAN
2	**Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendi**	**Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**	**Angka Harapan Lama Sekolah**	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang	0	1250	Rp 4,285,479,000	1250	Rp 4,714,026,900	1400	Rp 5,185,429,590	1540	Rp 5,703,972,549	1800	Rp 6,274,369,804	1800	Rp 6,274,369,804	Dispendik bud
							Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok	8	5		5		5		5		5		5		
							Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga	kegiatan	3	3		3		3		3		3		3		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	dikan, kesehatan, dan olahraga.						pendidik terlaksana															
							Jumlah guru honor	orang	-	55		55		55		55		55		55		
						Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah operator IT yang terlatih	orang	1	6	Rp 502,010,000	3	Rp 552,211,000	8	Rp 607,432,100	9	Rp 668,175,310	6	Rp 734,992,841	6	Rp 734,992,841	
							Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen	2	3		3		3		3		3		3		
					Rata-Rata Lama Sekolah	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun	Unit	1	1	Rp 2,001,528,500	1	Rp 2,201,681,350	0	Rp. 2,421,849,485	0	Rp. 2,664,034,434	0	Rp 2,930,437,877	0	Rp 2,930,437,877	
							Ruang kelas baru bertambah	ruang	1	2		2		2		2		2		2		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler	ruang	1	6		6		6		6		6		6		
							Alat praktik dan peraga tersedia	paket	2	2		2		2		2		2		2		
							Persentase BOP TK yang tersalur	persen	-	82		84		87		89		91		91		
						Pogram pendidik	Ruang belajar	ruang		2	Rp 803,83	0	Rp 884,22	0	Rp 972,64	2	Rp 1.069,	0	Rp 1.176,	0	Rp 1,17	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						an Non formal	pendidikan kesetaraan terbangun				8,800		2,680		4,948		909,443		900,387		6,900,387	
							Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terdata	lembaga		21		21		21		21		21		21		
						Program Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah USB Terbangun	Unit		1	Rp 17,096,825,000	0	Rp 18,806,507,500	1	Rp 20,687,158,250	0	Rp. 22,755,874,075	0	Rp. 25,031,461,483	0	Rp 25,031,461,483	
							Ruang kelas baru bertambah	ruang		6		6		6		6		6		6		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		9		9		9		9		9		9		
							Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		12		12		12		12		12		12		
							Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		5		5		5		5		5		5		
							Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		5		5		5		5		5		5		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah USB Terbangun	Unit		0	Rp 11,310,110,000	0	Rp. 12,441,121,000	0	Rp 13,685,233,100	0	Rp 15,053,756,410	0	Rp 16,559,132,051	0	Rp 16,559,132,051	
							Ruang kelas baru bertambah	ruang		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		15		15		15		15		15		15		
							Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		3		3		3		3		3		3		
							Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
							Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
							Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		3		3		3		3		3		3		
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegema	Presentase Peningkatan Perpustakaan yang dibina	%		-	-	60	Rp. 90.000.000	70	Rp.120.000.000	70	Rp. 150.000.000	80	Rp. 200.000.000	80	Rp. 200.000.000	DPK

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Perpustakaan	ran Membaca																
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prosentase menurunkan angka kesakitan	%		85	Rp. 607.344.400	85	Rp 1.595.000.000	85	Rp. 1.740.000.000	87	Rp. 1.885.000.000	90	Rp 2.035.000.000	90	Rp. 2.035.000.000	DINKES
						Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	Prosentase Meningkatnya FKTP yang terakreditasi	%		3 Pus	0	3 Pus	Rp. 525.000.000	3 Pus	Rp. 907.500.000	18 Pus	Rp. 998.250.000	18 Pus	Rp. 1.098.075.000	18 Pus	Rp. 1.098.075.000	
						Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	%		80	Rp. 2.367.000.000	90	Rp. 5.380.000.000	90	Rp. 5.918.000.000	100	Rp. 6.509.800.000	100	Rp. 7.160.780.000	100	Rp. 7.160.780.000	
							Persentase Rumah Sakit yang dibangun dan Puskesmas serta jariangannya yang direhab	%		15 Pkt	Rp. 201.800.000	15 Pkt	Rp. 1.040.000.000	15 Pkt	Rp. 2.040.000.000	15 Pkt	Rp. 2.040.000.000	18	Rp. 3.040.000.000	18	Rp. 3.040.000.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Persentase peningkatan jaminan kesehatan	%		100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 10.780.000.000	100 %	Rp. 12.280.000.000	100 %	Rp. 12.280.000.000	
							Persentase Pelayanan kefarmasian, makanan, minuman dan alat kesehatan	%		50 %	Rp. 58.618.600,00	60 %	Rp. 75.000.000	70 %	Rp. 82.500.000	80 %	Rp. 90.750.000	90 %	Rp. 106.330.262	90 %	Rp. 106.330.262	
							Persentase sumber daya manusia kesehatan	%		60 %	Rp. 8.494.917.200	80%	Rp. 9.920.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	100%	Rp. 13.400.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	
							Persentase peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah	%		80 %	Rp. 357.000.000	80%	Rp. 1.883.200.000	80 %	Rp. 2.071.520.000	80 %	Rp. 2.278.672.000	80 %	Rp. 2.506.539.200	80 %	Rp. 2.506.539.200	
						Program Kualitas Pelayanan Upaya kesehatan	Prosentase Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	%		78 %	Rp. 277849400	80%	Rp. 400.000.000	80 %	Rp. 600.000.000	85 %	Rp. 912.500.000	90 %	Rp. 912.500.000	90 %	Rp. 912.500.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Masyarakat																
					Mutu Layanan Rumah Sakit	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Paket		1 th	Rp 37.149.014.000	1 th	Rp 33.377.400.000	1 th	Rp 34.750.562.000	1th	Rp 38.482.131.960	1 th	Rp 42.965.597.529	1 th	Rp 42.965.597.529	RSUD
						Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah in service training yang diadakan	kegiatan			Rp 430.000.000		Rp 367.800.000		Rp 389.649.000		Rp 421.732.470		Rp 467.609.669		Rp 467.609.669	
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standart pelayanan kesehatan	buku		-	-		**1.013.350.000**		**781.100.500**		**804.533.515**		**828.669.520**		**828.669.520**	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Meningkatnya Pembinaan pemuda dan olahraga	**Prosentase peningkatan peraihan Prestasi Pemuda**	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terlaksananya Event-event Olahraga di semua cabang	-		100	Rp 1,792,150,000	100	Rp 1,300,000,000	100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,275,000,000	100	Rp 16,182,240,580	100	Rp 16,182,240,580	DISPORA
						Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan Prasarana Olahraga	-		12 bulan	Rp 983,500,000	12 bulan	Rp 13,850,544,136	12 bulan	Rp 13,875,743,187	12 bulan	Rp 16,623,830,735	12 bulan	Rp 4,462,250,000	12 bulan	Rp 4,462,250,000	
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pemuda dan Kegiatan lainnya	-		100	Rp 870,403,700	100	Rp 956,635,000	100	Rp 1,125,000,000	100	Rp 1,250,000,000	100	Rp 1,500,000,000	100	Rp 1,500,000,000	
4 4 5 4 1 1 0	**“Mendorong penguatan kemandirian ekonomi**	**Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkel**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan**	**Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah IKM potensial	IKM		10	Rp 34,000,000	12	Rp 34,000,000	14	Rp 34,000,000	16	Rp 34,000,000	18	Rp 34,000,000	18	Rp 34,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan
						Program Pengembangan	Jumlah Industri kecil Menengah	IKM		23	Rp 181,587,500	35	Rp 256,500,000	45	Rp 284,150,000	55	Rp 313,565,000	65	Rp 354,921,500	65	Rp 354,921,	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur	**anjutan**				Industri Kecil Menengah	yang berkembang														500	Koperasi dan Usaha Mikro
						Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam standarisasi industri	IKM		12	Rp 101,603,000	15	Rp 123,020,000	18	Rp 145,000,000	20	Rp 161,000,000	20	Rp 164,000,000	20	Rp 164,000,000	
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%		5	Rp 227,570,000	8	Rp 250,000,000	11	Rp 275,000,000	14	Rp 302,000,000	20	Rp 333,000,000	20	Rp 333,000,000	
						Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	%		8,9	Rp 44,155,000	8,5	Rp 78,000,000	8,5	Rp 85,000,000	8	Rp 94,000,000	8	Rp 25,000,000	8	Rp 25,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	dan memperhatikan lingkungan hidup”					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah realisasi ekspor	US$ (Jt)		125	Rp 139,510,000	133,56	Rp 153,461,000	142,91	Rp 168,807,100	154,34	Rp 185,687,810	155,77	Rp 204,256,591	155,7	Rp 204,256,591	
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%		10	Rp 72,525.000	20	Rp 69.273,000	30	Rp 78.700.000	40	Rp 88,800,000	50	Rp 111.000,000	50	Rp 111.000,000	
						Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat yang ditingkatkan			5	Rp 7,948,915,000	5	Rp 10,985,000,000	3	Rp 2.247,000,000	3	Rp 2.251,000,000	3	Rp 2.755,000,000	3	Rp 2.755,000,000	
							Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaannya			3		3		3		3		3		3		

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Kwintal/ Ha		28,46	Rp 1,523,246,605	29,38	Rp 3,660,854,669,65	30,11	Rp 3,827,415,806,77	31,60	Rp 6,469,770,094,86	33,16	Rp 6,875,869,148,20	33,16	Rp 6,875,869,148,20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Meningkatnya produktivitas holtikultura	Ton/ Ha/ Thn		3,55	Rp 1,231,628,000	3,59	Rp 3,958,935,000	3,64.	Rp 5,603,880,000	3,68	Rp 6,125,400,000	3,72	Rp 6,344,501,000	3,72	Rp 6,344,501,000	
						Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produktivitas perkebunan	Ton/ Ha/ Thn		4,26	Rp 944,785,700	4,35	Rp 10,117,065,280	4,43	Rp 13,004,538,220	4,52	Rp 18,835,429,218	4,61	Rp 21,275,117,490.75	4,61	Rp 21,275,117,490.75	
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan SDM Petani	%		10	Rp 1,914,500,000	12	Rp 5,841,750,000	13	Rp 8,027,000,000	14	Rp 11,295,740,000	15	Rp 12,688,011,600	15	Rp 12,688,011,600	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan Lapangan	Tenaga Penyuluh yang terpasilitasi	Orang		88.00	Rp 773,321,000	86.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/trnak	%		75	Rp 920,806,950	80	Rp 1,546,000,000	85	Rp 1,602,100,000	90	Rp 1,703,810,000	95	Rp 1,821,691,000	95	Rp 1,821,691,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					Rp 930,826,600		Rp 3,250,000,000		Rp 3,890,000,000		Rp 4,750,000,000		Rp 5,060,000,000		Rp 5,060,000,000	
							Persentase peningakatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia	%		8		8		8		8		8		8	
						Program Peningkatan	Prosentase peningkatan usaha	%		10	Rp 466,820,800	10	Rp 1,040,000,000	10	Rp 1,210,000,00	10	Rp 1,310,000,00	10	Rp 1,721,000,00	10	Rp 1,721,00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Agribisnis Peternakan	bidang peternakan								0		0		0		0,000	
						Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Presentase peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	%		10	Rp 934.417.400	10	Rp 1,912,000,000	10	Rp 2,504,000,000	10	Rp 2,665,000,000	10	Rp 2,790,000,000	10	Rp 2,790,000,000,000	
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	%	14,05	9,68	Rp 3.961.293.500	11,16	Rp 4,969.983.350	14,21	Rp 4.969.983.350	7,90	Rp 7,732.307.267	9,84	Rp 9.834.000.532	9,84	Rp 9.834.000.532	Dinas Perikanan
						Program Pengembangan Perikanan	Peningkatan produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	%	5,00	5,00	Rp 2.726.135.200	5,00	Rp 5,850.000.000	5,00	Rp 7.350.000.000	4,52	Rp 12.750.000	4,33	Rp 11.950.000.000	4,33	Rp 11.950.000.000	
						Program Pengembangan	Peningkatan konsumsi ikan	%	38,00	47,00	Rp 2,690,000,000	50.50	Rp 3,600,000,000	52.50	Rp 4,415,000,00	55,00	Rp 2,550,000,00	57,60	Rp 5,625,000,00	57,60	Rp 5,625,00	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Usaha Hasil Perikanan	perkapita per tahun								0		0		0		0,000	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	%		60	Rp 455,198,000	60	Rp 170,000,000	70	Rp 423,000,000	80	Rp 500,000,000	100	Rp 505,000,000	100	Rp 505,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
						Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Angka kecukupan energi (AKE)	dokumen	2351,2	2155,0	Rp 317,616,300	2156,1	Rp 409,000,000	2157,2	Rp 505,000,000	2158,3	Rp 635,000,000	2159,4	Rp 682,500,000	2159,4	Rp 682,500,000	
						Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas	Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	%		<25 %	Rp 123,050,000	<25 %	Rp 185,000,000	<25 %	Rp 370,000,000	<25 %	Rp 475,000,000	<25 %	Rp 570,000,000	<25 %	Rp 570,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Harga Pangan																
						Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	%	5,64	1	Rp 211,751,200	1	Rp 300,000,000	1	Rp 325,000,000	1	Rp 438,500,000	1	Rp 585,000,000	1	Rp 585,000,000	
					Persentase Koperasi yang berkualitas	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (kenaikan 10 % Tiap tahun)	%	10	**10**	Rp 321,812,500	10	Rp 284,000,000	10	Rp 281,000,000	10	Rp 277,000,000	10	Rp 285,000,000	10	Rp 285,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah usaha koperasi	Koperasi	43	43	Rp 177,000,000	43	Rp 214,000,000	43	Rp 226,000,000	43	Rp 230,000,000	43	Rp 234,000,000	43	Rp 234,000,000	
					Persentase partumbuhan wirausa	Program Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang	UKM	20	20	Rp 121,943,000	40	Rp 223,000,000	40	Rp 231,000,000	40	Rp 238,000,000	40	Rp 247,000,000	40	Rp 247,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					ha baru	Usaha Mikro																
						Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	WUB	20	20	Rp 121,360,000	100	Rp 50,000,000	100	Rp 55,000,000	120	Rp 70,000,000	120	Rp 75,000,000	120	Rp 75,000,000	
				Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah	**Persentase Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN**	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Investor		83	Rp 342,850,000	85	Rp 479,200,000	91	Rp 428,300,000	91	Rp 565,000,000	100	Rp 610,000,000	100	Rp 610,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	Dok/ Kegiatan		13	Rp 662,912,500	16	Rp 1,081,667,500	16	Rp 1,022,876,737	16	Rp 1,610,000,000	16	Rp 1,450,000,000	16	Rp 1,450,000,000	
						Program Pengawasan dan pengen	Prosentase Pengawasan dan pengendalian	%	60 (6 Kec.)	60	Rp 371,910,000	60	Rp 379,000,000	70	Rp 443,000,000	70	Rp 750,000,000	80	Rp 825,022,251	80	Rp 825,022,251	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						dalian penanaman modal	Penanaman Modal															
					Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Proporni kenaikan Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	NA	500	Rp 275.319.400	600	Rp 638,447,000	700	Rp 1,070,000,000	800	Rp 1,389,000,000	900	Rp 1,725,000,000	900	Rp 1,725,000,000	Badan Pendapatan Daerah
						Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Jumlah objek pajak yang ditetapkan,	dokumen	NA	500	Rp 594.038,800	600	Rp 1,007,472,200	700	Rp 1,800,000,000	800	Rp 2,000,000,000	900	Rp 2,150,000,000	900	Rp 2,150,000,000	
							Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	dokumen	NA	400		420		440		460		500		500		
							Jumlah Keluhan Wajib Pajak	dokumen	NA	50		45		35		30		25		25		
						Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah	%	NA	30	Rp 1.410,944,800	30	Rp 1,270,000,000	30	Rp 2,100,000,000	30	Rp 2,500,000,000	30	Rp 2,700,000,000	30	Rp 2,700,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan pendapatan asli daerah	%	NA	18	Rp 926,140,000	37	Rp 610,00,000	56	Rp 1,427,000,000	75	Rp 1,800,000,000	94	Rp 2,250,000,000	79	Rp 2,250,000,000	
				Meningkatnya Pemerataan Aksesbilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi	**Indeks Williamson**	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km	945	950	Rp 5,449,000,000	955	Rp 6,200,000,000	960	Rp 6,200,000,000	965	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	970	Rp 6,200,000,000	Dinas PUPR
						Program pembangunan infrastruktur Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km	255	255	Rp 10,725,000,000	261	Rp 22,308,000,000	265	Rp 26,107,000,000	270	Rp 31,183,000,000	275	Rp 34,427,000,000	275	Rp 34,427,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Jumlah rumah tangga pengguna air bersih		52.117	54.808	Rp 650,000,000,000	54.811	Rp 1,593,428,000	54.813	Rp 1,864,796,000	54.816	Rp 2,227,335,000	54.820	Rp 2, 459, 080,000	54.820	Rp 2, 459, 080, 000	
						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	%	77,46	83.1	Rp 84,351,000,000	88.73	Rp 176,457,000,000	94.37	Rp 208,569,000,000	100	Rp 250,400,000,000	100	Rp 277,140,000,000	100	Rp 277, 140, 000, 000	
						Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	Kecamatan		6 Kec.	Rp 200,000,000	6 Kec.	Rp 1,200,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400, 000, 000	
						Program pengembangan wilayah	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	84,9	89.9	Rp 9,551,000,000	94.9	Rp 7,486,000,000	116.96	Rp 8,752,000,000	116.96	Rp 10,444,000,000	116.96	Rp 11,526,000,000	116.96	Rp 1,000,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						strategis dan cepat tumbuh															0	
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	Jiwa	208.469	219,231	Rp 2,070,268,000	219,240	Rp 5,311,426,000	219,248	Rp 6,215,985,000	219,257	Rp 7,424,449,000	219,268	Rp 8,196,935,000	219,268	Rp 8,196,935,000	
							Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	KK	57.532	62,439		67,556		72,889		74,711		76,579		76,579		
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase /gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	Jiwa	133.141	140,108	Rp 3,003,696,000	159,627	Rp 16,415,420,000	178.897	Rp 19,219,554,000	201.913	Rp 22,965,792,000	227.323	Rp 25,360,498,000	227.323	Rp 25,360,498,000	
						Program Pengembangan dan Pengelo	Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan Daerah	DI +DIR		20 DI +DIR	Rp 12.345.000.000	20 DI+ DIR	Rp 18.585.000.000	20 DI +DIR	Rp 18.575.000.000	20 DI +DIR	Rp 18.700.000.000	20 DI + DIR	Rp 18.700.000.000	20 DI + DIR	Rp 18.700.000.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						laan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Irigasi Rawa yang ditangani																
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air yang ditangani	Embung		5 embung	Rp 1.875.000,000	5 embung	Rp 7.875,000,000	5 embung	Rp 10.750.000.000	6 embung	Rp 13.600.000.000	6 embung	Rp 16.600.000.000	6 embung	Rp 16.600.000.000	
						Program pengendalian banjir	Jumlah Kawasan Banjir dan Pntai yang ditangani	Kawasan		7 kawasan	Rp 10.545.0000.000	7 kawasan	Rp 24.376.000.000	7 kawasan	Rp 30.194.000.000	7 kawasan	Rp 38.839.000.000	7 kawasan	Rp 41.267.000.000	7 kawasan	Rp 41.267.000.000	
						Program Perencanaan, Pemanfaatan,	Cakupan informasi penataan ruang	Kecamatan		1 kecamatan	Rp 898.340.000	1 kecamatan	Rp 3.064.285.000	1 kecamat	Rp 3.586.146.000	1 kecamatan	Rp 4.283.336.000	2 kecamat	Rp 4.729.001.000	2 kecamat	Rp 4.729.001.000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						dan Pengendalian Tata Ruang								an				an		an		
							Persentase Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	%		100 %		100 %		100 %		100%		100 %		100 %		
							Cakupan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	%		1	Rp 1,055,000,000												Dishub
						Program Pembangunan rehabilitasi sarana prasara	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	%				6	Rp 6,237,043,800	3	Rp 7,600,000,000	3	Rp 10,345,000,000	4	Rp 11,317,890,000	4	Rp 11,317,890,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						na dan Fasilitas Perhubungan																
						Program Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaaan Prasarana dan fasilitas ASDP	Presentase tingkat kepuasan publik terhadap ketersediaan fasilitas ASDP	%		108	Rp 1,485,900,000											
						Program Pembangunan dan Peningkatan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan kawasan pemukiman yang tertangani	%		30	Rp 730,000,000	50	Rp 4,310,000,000	60	Rp 8,465,000,000	65	Rp 10,275,000,000	70	Rp 12,585,000,000	70	Rp 12,585,000,000	Dinas Perkim
						Program Perencanaan, penataan, penguas	Prosentase Jumlah bidang Tanah yang ditata dalam penguasaan	%		50	Rp 351,600,000	55	Rp 480,000,000	60	Rp 593,000,000	63	Rp 700,000,000	67	Rp 800,000,000	67	Rp 800,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						an dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	, pemilikan dan penggunaan tanah di perumahan dan kawasan permukiman															
			Indeks IKLH	**Meningkatnya Kualitas LIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana**	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Hutan**	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kualitas air, udara, dan tanah.Cakupan titik pengawasan terhadap penaatan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah.	%	37,732	44,68	Rp 265,361,200	49,02	Rp 985,000,000	51,08	Rp 825,000,000	52,90	Rp 890,000,000	56,30	Rp 2,925,000,000	56,30	Rp 2,925,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
						Program Perlindungan dan Konservasi	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	%	37,732	44,68	Rp 61,545,000	49,02	Rp 197,000,000	51,08	Rp 214,000,000	52,90	Rp 349,000,000	56,30	Rp 549,000,000	56,30	Rp 549,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Sumber Daya Alam																
						Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam serta keserasian/ kelestarian lingkungan hidup	%	37,732							52,90	Rp 400,000,000	56,30	Rp 100,000,000	56,30	Rp 100,000,000	
						Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	%	37,732	44,68	Rp 55,260,000	49,02	Rp 90,000,000	51,08	Rp 430,000,000	52,90	Rp 580,000,000	56,30	Rp 610,000,000	56,30	Rp 610,000,000	
						Program Pengendalian kebakaran hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	%	37,732	44,68	Rp 46,719,000	49,02	Rp 177,500,000	51,08	Rp 189,500,000	52,90	Rp 210,000,000	56,30	Rp 220,000,000	56,30	Rp 220,000,000	
						Program pengawasan ketaatan pemegang	Jumlah Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	%		44,68	Rp 86,430,000	49,02	Rp 95,000,000	51,08	Rp 100,000,000	52,90	Rp 105,000,000	56,30	Rp 110,000,000	56,30	Rp 110,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						perijinan lingkungan hidup																
						Program peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata	%		44,68	Rp 384,295,000	49,02	Rp 612,500,000	51,08	Rp 664,250,000	52,90	Rp 740,750,000	56,30	Rp 818,000,000	56,30	Rp 818,000,000	
							Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	%		44,68		49,02		51,08		52,90		56,30		56,30		
						Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Cakupan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup	%		44,68	Rp 23,050,000	49,02	Rp 57,000,000	51,08	Rp 70,000,000	52,90	Rp 73,000,000	56,30	Rp 81,000,000	56,30	Rp 81,000,000	
						Program Pengelolaan ruang	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH	%	9,20	9,20	Rp 2,421,840,500	9,50	Rp 4,077,000,000	9,80	Rp 5,756,250,000	10,00	Rp 5,316,380,426	11,00	Rp 5,911,000,000	11,00	Rp 5,911,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						terbuka hijau (RTH)	di kawasan perkotaan														0	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Cakupan kelompok pengelola persampahan berbasis masyarakat.	%	39,29	44.78	Rp 8,073,101,000	49.64	Rp 15,991,740,000	54.67	Rp 18,515,337,273	59.35	Rp 23,689,505,910	64.93	Rp 24,751,432,186	64.93	Rp 24,751,432,186	
					Indeks Resiko Bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%		24	Rp 410,985,000	33	Rp 832,000,000	41	Rp 724,000,000	50	Rp 877,000,000	59	Rp 1,559,306,950	59	Rp 1,559,306,950	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	%	70	70	Rp 356,209,000	75	Rp 1,112,483,000	80	Rp 1,683,020,030	85	Rp 1,733,975,460	90	Rp 1,069,150,982	90	Rp 1,069,150,982	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	**Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.**	**Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis dengan penanaman nilai-nilai keagamaan**	**Indeks Pembangunan Masyarakat**	**Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama**	**Persentase penurunan konflik antar umat beragama**	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik yang bernuansa sara	Kasus		0	Rp 358,090,000	0	Rp 380.000.000	0	Rp 490.000.000	0	Rp 490.000.000	0	Rp 575.000.000	0	Rp 575.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Politik
						Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	%		90	Rp 1,722,369,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda
						Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keaga	Persentase jumlah keg.Pemerintah daerah dibidang mental dan keagamaan	%	100	100	Rp 2.477,804,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						maan																
						Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	%		100	Rp 223,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa	**Peningkatan jumlah Desa Mandiri**	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang dibina	%	70	80	Rp 1,462,929,900	85	Rp 1,399,000,000	90	Rp 1,470,424,242	95	Rp 1,867,442,291	100	Rp 1,925,037,442	100	Rp 1,925,037,442	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyara	Prosentase lembaga ekonomi Desa,UMKM ,usaha ekonomi masyarakat dan masyarakat miskin dan desa tertinggal yang dibina	%	60	70	Rp 400,901,800	75	Rp 678,800,000	80	Rp 899,000,000	85	Rp 1,335,000,000	90	Rp 1,565,000,000	90	Rp 1,565,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						kat Miskin, dan Desa Tertinggal																
				Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layak anak	**Indeks Pemberdayaan Gender**	Programpeningkatan kualitas Hidup perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan	Dok			Rp -	1	Rp 145,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 215,000,000	1	Rp 270,000,000	1	Rp 270,000,000	DP3AP2KB
						Programpeningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan	Dok		2	Rp 395,071,739	3	Rp 401,000,000	3	Rp 492,000,000	3	Rp 980,000,000	3	Rp 650,000,000	3	Rp 650,000,000	
						Programpeningkatan perlindungan Hak peremp	Lembaga Pokja,Satgas KDRT	Dok		1	Rp 51,040,000	4	Rp 145,000,000	4	Rp 275,000,000	4	Rp 295,000,000	4	Rp 370,000,000	4	Rp 370,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						uan																
						Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kader	Dok		1	Rp 38,990,000	1	Rp 120,000,000	1	Rp 132,000,000		Rp 145,000,000	1	Rp 133,000,000	1	Rp 133,000,000	
							Data Keluarga Sejahtera	Dok		2		2		2		2		2		2		
					Kategori Kabupaten Layak Anak	Program pengembangan Kabupaten Layak Anak	SRA, PRA, KRA. DELANA/KELANA	Dok		1	Rp 160,000,000	5	Rp 564,000,000	5	Rp 565,000,000	5	Rp 585,000,000	5	Rp 634,000,000	5	Rp 634,000,000	
						Program Peningkatan Perlindungan Anak	Lembaga PATBM Desa/Kelurahan	Dok			Rp -	2	Rp 175,000,000	2	Rp 186,000,000	2	Rp 205,000,000	2	Rp 244,511,744	2	Rp 244,511,744	
						Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk	Dok			Rp	2	Rp 79,000,000	2	Rp 109,088,182	2	Rp 120,000,000	2	Rp 225,000,000	2	Rp 225,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	**Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.**	**Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan**	**Angka Kemiskinan**	**Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis**	**Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk**	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	orang		80	Rp 332,140,500	80	Rp 952,000,000	80	Rp 1,105,000,000	80	Rp 1,035,000,000	80	Rp 1,500,000,000	80	Rp 1,500,000,000	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		100	Rp 265,650,000	100	Rp 440,647,190	100	Rp 538,150,000	100	Rp 598,150,000	100	Rp 720,000,000	100	Rp 720,000,000	
						Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejah	Prosentase Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	%		20	Rp 164,200,000	40	Rp 585,000,000	60	Rp 745,000,000	80	Rp 745,000,000	100	Rp 470,000,000	100	Rp 470,000,000	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						teraan Sosial (PMKS) Lainnya.																
						Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)	orang		302	Rp 120,200,000	302	Rp 427,500,000	302	Rp 513,000,000	302	Rp 553,000,000	302	Rp 660,000,000	302	Rp 660,000,000	
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	orang		40	Rp 105,400,000	40	Rp 210,000,000	40	Rp 230,000,000	40	Rp 1,230,000,000	40	Rp 230,000,000	40	Rp 230,000,000	
				Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber	**Persentase Penurunan jumlah Pengangguran Terbuka Terha**	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase peningkatan pelatihan dan sarana prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan	%			Rp 1,538,281,500		Rp 1,473,689,600		Rp 1,726,094,200		Rp 2,029,629,000		Rp 2,212,450,000		Rp 2,212,450,000	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				ekonomi	**dap Jumlah Penduduk**		prasarana LLK															
						Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	%			Rp 416,398,400		Rp 251,719,240		Rp 305,170,000		Rp 328,347,000		Rp 336,400,000		Rp 336,400,000	
						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum jaminan sosial bagi tenaga kerja				Rp 293,940,000		Rp 184,678,500		Rp 181,238,000		Rp 256,596,630		Rp 267,100,000		Rp 267,100,000	
				Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	**Persentase penurunan pelanggaran perda terhadap**	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase anggota Linmas yang mendapat pelatihan	%	90	90	Rp 3,334,175,000	90	Rp 3,388,244,200	90	Rp 3,442,417,400	90	Rp 3,501,979,140	90	Rp 3,567,724,454	90	Rp 3,567,724,454	Satpol PP

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					tahun sebelumnya	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase Penurunan jumlah penyakit masyarakat	%	90	90	Rp 892,658,397	90	Rp 915,658,397	90	Rp 922,658,397	90	Rp 957,958,397	90	Rp 962,888,397	90	Rp 962,888,397	
						Program Penegakkan Perda dan Perkada	Prosentase penyelenggaraan Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti	%				90	Rp 66,164,000	90	Rp 73,141,140	90	Rp 87,820,000	90	Rp 97,820,000	90	Rp 97,820,000	
						Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal(keamanan daerah)yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kamtramtibmas	instansi	4	4	Rp 608,350,000	4	Rp 2,100,000,000	4	Rp 2,300,000,000	4	Rp 2,800,000,000	4	Rp 3,100,000,000	4	Rp 700,000,000	Bakesbangpol

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			4	Rp 535.560.000	4	Rp 608.350.000	4	Rp 2.100.000.000	4	Rp 2.300.000.000	4	Rp 2.800.000.000	4	Rp 3.100.000.000	
6	**Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan Pariwisata Daerah**	**Peningkatan Pariwisata Daerah**	**Tourism Intensity**	**Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata**	**Persentase Destinasi Wisata Khas Daerah Terkelola**	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	*Lenght of stay*	Hari	3	3	Rp 1,623,999,400	3	Rp 3.390,000,000	3	Rp 3,279,924,242	4	Rp 6,028,683,733	4	Rp 6,650,000,000	4	Rp 6,650,000,000	Dinas Pariwisata
					Persentase Jenis Produk Lokal Kepariwisata	Program Pngembangan Ekonomi kreatif	*Spending of money*	Rp	15.000.000/org	15.000.000/org	Rp 759,000,000	15.000.000/org	Rp 1,786,906,850	20.000.000/org	Rp 1,775,000,000	20.000.000/org	Rp 3,200,000,000	20.000.000/org	Rp 3,430,589,693	20.000.000/org	Rp 3,430,589,693	

No	Misi	Tujuan (T)	Indikator Tujuan	Sasaran (S)	Indikator Sasaran	Program (Pg)	Indikator Program	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		OPD
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	katkan kunjungan wisata				**an**																	
				Meningkatnya Citra dan Layanan Kepariwisataan	**Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus**	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Prosentase pelaksanaan promosi pariwisata	**%**		80	Rp 1,267,000,000	80	Rp 2,350,000,000	80	Rp 2,575,000,000	90	Rp 3,100,000,000	90	Rp 3,450,000,000	90	Rp 3,450,000,000	
					Persentase Kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	Program pengembangan kemitraan	Prosentase peningkatan jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata	**%**			Rp 420,000,000		Rp 550,000,000		Rp 550,000,000		Rp 575,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Indikasi Program Prioritas disertai Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Program Prioritas II merupakan program dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Bupati terpilih yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Prioritas III merupakan program ditingkat OPD yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 7.1: Prioritas Alokasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

PROGRAM	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRIORITAS 1 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 101,772,898,701	Rp. 110,545,317,726	Rp. 164,907,173,357	Rp. 166,314,040,409	Rp. 152,267,962,699	Rp. 152,500,411,481
% Terhadap BL	15%	15%	17.66%	17%	15%	14%
PRIORITAS 2 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 556,383,113,461	Rp. 601,836,187,995	Rp. 717,123,351,572	Rp. 751,215,886,968	Rp. 792,788,423,191	Rp. 834,273,067,973
% Terhadap BL	81%	80%	76.78%	77%	78%	79%
PRIORITAS 3 :						
TOTAL (Rp)	Rp. 29,216,865,688	Rp. 39,579,136,600	Rp. 51,955,237,706	Rp. 57,522,721,505	Rp. 68,252,152,562	Rp. 73,911,852,465
% Terhadap BL	4%	5%	5.56%	6%	7%	7%
BELANJA LANGSUNG	**Rp. 687,372,877,850**	**Rp. 751,960,642,321**	**Rp. 933,985,762,635**	**Rp. 975,052,648,882**	**Rp. 1,013,308,538,452**	**Rp. 1,060,685,331,918**

Selain itu demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. tentunya perlu diperhatikan pula kapasitas riil Kabupaten Kotawaringin Barat. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Berikut merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 7.2: Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Tahun 2018-2022

Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasitas Riil Keuangan	835,622,044,000.00	853,644,069,437.74	945,133,363,484.43	1,064,169,953,150.05	1,246,642,358,119.28	1,361,009,213,203.20
Belanja	1.391.173.478.000	1.384.151.041.000	1.663.260.032.840	1.850.758.733.700	2.269.383.269.145	2.505.504.071.714
Belanja Tidak Langsung	615.301.474.000	630.151.041.000	805.260.032.840	862.758.733.700	1.089.303.969.190	1.202.641.954.423
Belanja Pegawai	431.058.417.000	470.584.816.200	520.987.089.000	562.666.056.000	738.548.091.111	803.364.825.555
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	26.816.865.000	7.898.680.000	15.000.000.000	15.000.000.000	59.911.718.306	72.158.517.265
Belanja Bantual Sosial	2.448.000.000	2.448.000.000	3.448.000.000	3.500.000.000	16.339.559.538	24.052.839.088
Belanja Bagi Hasil	8.701.168.700	7.563.231.800	8.292.091.000	9.381.562.000	15.250.255.569	16.836.987.362
Belanja Bantuan Keuangan	145.277.023.300	139.156.313.000	252.532.852.840	267.211.115.700	257.075.736.729	283.823.501.244
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	2.000.000.000.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	2.178.607.938	2.405.283.908
Belanja Langsung	775.872.004.000	754.000.000.000	858.000.000.000	988.000.000.000	1.180.079.299.955	1.302.862.117.292
Belanja Pegawai	104.171.564.791	90.480.000.000	94.380.000.000	98.800.000.000	106.207.136.996	91.200.348.210
Belanja Modal	262.140.137.674	226.200.000.000	240.240.000.000	266.760.000.000	306.820.617.988	325.715.529.323
Belanja Barang dan Jasa	409.560.301.353	437.320.000.000	523.380.000.000	622.440.000.000	767.051.544.971	885.946.239.759

Selanjutnya. berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan berdasarkan prioritas program tersebut.

Tabel 7.3: Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
				2017		
				target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	N/A			Rp 39,018,063,990	Seluruh SKPD
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Apatratur	N/A			Rp 3,040,150,000	Seluruh SKPD
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS				Rp 888,809,800	Seluruh SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Keg			Rp 373,424,000	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	N/A			Rp 52,645,499,911	Seluruh SKPD

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		SKPD Penanggung Jawab
				2017		
				target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompentensi sesuai bidangnya	%			Rp 5,806,951,000	Seluruh SKPD

Tabel 7.4. Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Orang		10	Rp 96,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	8	Rp 36,000,000	Seluruh SKPD
Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bimtek, dll)	Orang				15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	15	Rp 90,000,000	Seluruh SKPD
Program Penyusunan Dokumen Internal							Rp 39,417,500		Rp 50,000,000		Rp 58,000,000		Rp 75,000,000		Rp 75,000,000	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%			Rp 39,626,185,464		Rp 87,086,960,930		Rp 83,752,242,216		Rp 63,585,094,071		Rp 57,728,728,208		Rp 57,728,728,208	Seluruh SKPD

Program	Indikator Program	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%			Rp 3,332,735,000		Rp 3,766,621,277		Rp 3,781,308,489		Rp 4,238,724,390		Rp 4,249,968,187		Rp 4,249,968,187	Seluruh SKPD
Program fasilitasi pindah purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%			Rp 320,900,000		Rp 515,900,000		Rp 661,500,000		Rp 603,920,000		Rp 686,582,000		Rp 686,582,000	Seluruh SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%			Rp 1,135,402,095		Rp 1,296,515,035		Rp 1,456,274,278		Rp 1,649,939,780		Rp 1,953,145,908		Rp 1,953,145,908	Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%			Rp 60,745,736,967		Rp 66,148,778,595		Rp 70,167,658,404		Rp 74,878,790,309		Rp 79,987,504,064		Rp 79,987,504,064	Seluruh SKPD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%			Rp 5,288,358,200		Rp 5,926,980,020		Rp 6,319,057,022		Rp 7,127,494,149		Rp 7,693,483,114		Rp 7,693,483,114	Seluruh SKPD

Tabel 7.5: Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
Pendidikan						
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang	0		Rp 1,800.000.000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok	8			
	Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga pendidik terlaksana	kegiatan	3			
	Jumlah guru honor	orang				
Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah operator IT yang terlatih	orang			Rp 465.000.000	
	Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen				
Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler Alat praktik dan peraga tersedia Persentase BOP TK yang tersalur	unit ruang ruang paket persen	1 1 1 2		Rp 1.355.000.000	
Pogram pendidikan Nonformal	Ruang belajar pendidikan kesetaraan terbangun Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terdata	ruang lembaga			Rp 2.025.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program wajib belajar pendidikan Dasar sembilan tahun	Jumlah USB Terbangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur Jumlah ruang kelas terehabilitasi Jumlah kantor sekolah terbangun Jumlah rumah dinas guru terbangun Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit ruang ruang ruang unit unit unit			Rp 25.850.985.558	
Program Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah USB Terbangun Ruang kelas baru bertambah Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur Jumlah ruang kelas terehabilitasi Jumlah kantor sekolah terbangun Jumlah rumah dinas guru terbangun Jumlah rumah d inas terehabilitasi	unit ruang ruang ruang unit unit unit		-	Rp 6.686.000.000	
Kesehatan						
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan medis habis pakai Puskesmas	%	80	80	Rp 5.912.100.000	DINKES
	Jumlah Puskesmas yang menerima Distribusi obat sesuai denga cara disribusi obat yang baik dan benar	PKM	18	18		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, terjangkau, merata, efektif dan efisien melalui upaya promotid,preventif, kuratif dan rehabilitatif	%	100	100	Rp 20.240.448.860	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan kapasitas laboratorium dan pengawasan obat serta makanan	Tahun	1	1	Rp 777.485.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Puskesmas yang di laksanakan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya yang efektif dan efisien guna peningkatan keamanan penggunaan sediaan farmasi dan makanan	Puskesmas	15	15		
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pembinaan usaha jamu gendong dan jamu racikan	Orang	30	30	Rp 36.315.000	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Mengaktifkan Pokjanal desa siaga aktif melalui forum desa siaga	%	80	80	Rp 649.454.500	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pemberian tambahan makanan dan vitamin yang efektif dan efisien guna perbaikan gizi masyarakat	%	100	100	Rp 290.200.000	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat	%	100	100	Rp 842.366.800	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular	%	100	100	Rp 1.532.872.750	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas tuntas menyelesaikan persiapan akreditasi sampai pada tahap penilaian untuk 6 Puskesmas (Arut Selatan, Mendawai, Madurejo, Pangkalan Lada, Arut Utara dan Teluk Bogam)	%	100	100	Rp 1.271.418,250	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya sarana prasarana kesehatan di puskesmas dan jaringannya	%	100	100	Rp	8.414.855.000	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Masyarakat peserta asuransi kesehatan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 90%	Tahun	1	1	Rp	19.357.818.000	
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatkan derajat kesehatan pada dan balita	%	100	100	Rp	84,254,800	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan Lansia yang efektif dan efesien guna peningkatan derajat kesehatan	%	100	100	Rp	76,460,000	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi mendapatkan penanganan 90% melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran	Tahun	1	1	Rp	2,648,389,000	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Paket		1 Tahun	Rp	51,462.586.250	RSUD
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Pegawai/SDM Yang Mengikuti Pelatihan	Keg		1 Tahun	Rp	342.000.000	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		Keg.	1 tahun	Rp	78.000.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong	Persentase pembangunan turap/talud/bronjong	%	100	100	Rp 1.622.514400	Dinas PUPR
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	%	71,83	77,46	Rp 171.244.310.650	
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani	jiwa	124.697	133.141	Rp 13.134.501.400	
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi	km	939,82	945	Rp 3,722,642,800	
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	Kec	6	6	Rp 194.727.500	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan daerah irigasi rawa yang ditangani	DI+DIR	20	20	Rp 22.2790..218.300	
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	Embung/ buah	4	8	Rp 2.220.067.100	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	Jiwa	207.888	208.469	Rp 10,366,688,800	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Pengendalian Banjir	Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	kawasan	7	7	Rp	10.410.517.600	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Outcome : Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	80,7	84,9	Rp	7,615,560,000	
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	KK	51.218	52.117	Rp	10,298,901,500	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Program Pengembangan Perumahan					Rp	320,000,000	Dinas Perkim
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegehan tindak kriminal	Jumlah Pertisipasi Inter Instansi Vertikal (Kemanan Daerah) Yang Terlibat dalam Pencagahan Tindak Kriminal dan Menjaga Kantramtibmas	Instansi		4	Rp	535.560.000	Bakesbangpol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Yang Bernuansa SARA	-		0	Rp	280.705.000	
Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota linmas yang mendapat pelatihan	%	-	90	Rp	1.952.412.500	Satpol PP
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah penyakit masyarakat	-	-	90	Rp	239.368.320	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pengawasan dan pengendalian kantrantibmas	orang	N/A	N/A	Rp	13,625,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	%	N/A	90	Rp	448.205.,000	Setda
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase jumlah kagiatan pemerintah daerah dibidang mental dan keagmaan	%	N/A	100	Rp	136,050,000	
Sosial							
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)	orang			Rp	377.075,500	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnnya.	Persentase Fakir Miskin yang Dapat Meningkatkan Kemampuannya dalam memenuhi Kebutuhan Dasarnya	%			Rp	470,225,000	
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	orang			Rp	363,220,000	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	orang			Rp	113,500,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
Tenaga Kerja							
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan dan sarana dan prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prsarana LLK	%			Rp	1.912.284.300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Informasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	%			Rp 272,708,542	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	%			Rp 267,078,250	
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
Program peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan	Keg			Rp 52.012.512	DP3AP2KB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga oraganisasi permpuan	Keg			Rp 560.960.420	
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio peserta KB	Ratio			Rp 16.205.000	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Lembaga PUG aktif	Keg			Rp 226.215.418	
Pangan						
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	%	60	60,3	Rp 458,198,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kegiatan lembaga tani	%	100	100	Rp 113.800.000	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah tenaga penyuluh yang terfasilitasi	orang		-	Rp 291.013.200	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Pertanahan							
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	-	-	Rp	150,000,000	Dinas Perkim
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana							
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					Rp	7.740.586.000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan kualitas air, udara dan tanah. Cakupan titik pengawasan terhadap penaatan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah	%	33,88	37,73	Rp	834.608,800	
Program Perlindungam dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	%	33,88	37,73	Rp	61.545.000	
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan perlindungan. pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam serta keserasian/kelestarian lingkungan hidup	Persentase		37,732	Rp	550.000.000	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pembuatan kampung organik	%	33,88	37,73	Rp	461.475.000	
	Cakupan pembuatan taman Keanekaragaman Hayati						
	Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH						
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	%	33,88	37,73	Rp	20,000,000	
Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	%	33,88	37,73	Rp	73,547,000	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan	%	9,00	9,20	Rp	1,662,864,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana	%	50	50	Rp	602.865.000	BPBD
Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	%	60	70	Rp	97.700.000	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%		82	Rp	720.520.225	Dispendukcapil
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa							
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	-	90	Rp	590.473.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	Persentase Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal yang dibina	%		60	Rp	190.899.100	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang di bina	%		70	Rp	1,346,997,000	
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksannya kegiatan pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keg			Rp	485,213.813	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa					Rp	239.700.100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan SDM Pemdes dan Pilkades	%		100%	Rp	134.300.000	Setda
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kuangan	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana	Persen			Rp	105.382.500	Kecamatan
Perhubungan							
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	%			Rp	929,982,000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi ASDP	Presentase tingkat kepuasan publik terhadap ketersediaan fasilitas ASDP	Jenis		11	Rp	2.371.826.360	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Dok			Rp	940.400.000	
Komunikasi dan Informatika							
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat pengembangan komunikasi informasi dan media massa	tahun	N/A	1	Rp	248.231.000	Diskominfo
Program kerjasama informsi dan media massa	Tingkat kerjasama Informasi dan media massa	tahun	N/A	1	Rp	799.411.004	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%		10	Rp	551.197.750	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang Berkembang	UMKM		173	Rp	866.647.500	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang Berkembang	UMKM		113	Rp	189.355.000	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi terkait pengembangan promosi dan akses permodalan	UMKM		180	Rp	171.537.500	
Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah UMKM yang terdata	UMKM		1500	Rp	146.467.500	
Penanaman Modal							
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah adanya ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	investor	N/A		Rp	134.005.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					Rp	223.200.000	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	%			Rp	145.000.000	
Pemuda dan Olahraga							
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya kegiatan operasional pemuda dan kegiatan lainnya			100	Rp	1.012.598.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terlaksannya event-event olahraga disemua cabang			100	Rp	2.920.389.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya sarana dan prasarana olahraga			100	Rp	224.900.000	
Perpustakaan							
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%			Rp	686.362.250	DPK
	URUSAN PILIHAN						
Kelautan dan Perikanan							
Program pengelolaan perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budiaya	%	14,05	15,19	Rp	4.245.780.050	Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan	Persenatse peningkatan produksi nelayan	%	5,00	5,00	Rp	1.569.365.000	
Program pengembangan usaha hasil perikanan	Persentase usaha hasil perikanan yang dikembangkan	%	38,00	45,00	Rp	885.505.500	
Pariwisata							
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Lenght of stay	hari	3	3	Rp	679,033,000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peresentase pelaksanaan promosi pariwisata	%	80	80	Rp	1.469.763.000	
Program pengembangan kemitraan	Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional	orang	85	85	Rp	74.800.000	
Pertanian							
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatanya produktivitas tanaman pangan	Kwintal/ Ha		28,46	Rp	4.055.034.100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM Petani/Pelaku Agribisnis	%		20	Rp	853.925.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan	%		10	Rp	163.975.000	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkanya penggunaan teknologi pertanian/perkebunan	%		10	Rp	1.567.941.300	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan	%		10	Rp	1.257.767.200	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pafa hean/ternak	%		90,00	Rp	747.640.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia	%		8,00	Rp	2.144.477.650	
Perdagangan							
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentasepeningkatan pelakuusaha yang tertib niaga"	%	N/A	8,00	Rp	576.251.800	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Realisasi Export	US$ (Jt)	120	124,80	Rp	178.600.000	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Pamera n	N/A	1,00	Rp	366.625.000	
Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai	(%)	80%	85%	Rp	63.775.000	
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah Sarana Prasarana Pasar Rakyat yang ditingkatkan	Pasar	n/a	5	Rp.	3.000.000.000	
	Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaany	Pasar		1			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Perindustrian							
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah Industri Kecil Menengah yang Berkembang	IKM	N/A	21,00	Rp	199.563.000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang Berkembang	IKM	N/A	3,00	Rp	116.258.000	
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah IKM potensial	IKM	N/A	8,00	Rp	24.275.000	
Program Pembinaan Lingkungnan Sosial Lingkup Industri Kecil	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Orang	n/a	100	Rp	119.650.000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)							
Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang	%	N/A	80	Rp	47.007.500	Bappeda
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	N/A	80	Rp	1.439.103.700	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pemanfatan dokumen perencanaan ekonomi	%	N/A	80	Rp	117.362.500	
Program perencanaan sosial budaya	Persentase pemanfatan dokumen sosial budaya	%	N/A	80	Rp	178.930.500	
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase pemanfatan dokumen perencanaan infrastruktur	%	N/A	80	Rp	357.185.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD pada wilayah Irban yang telah menyelenggarakan SPIP PMPRB	%	N/A	Na	Rp	1,338,999,500	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanan kegiatan peningkataan kapasitas SDM APIP	%	N/A	100	Rp	391,200,000	
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	N/A	N/A	Rp	50,949,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)							
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	%	-	80,59	Rp	2.299.153.350	BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	%	14,21	6	Rp	2.127.788.100	Badan Pendapatan Daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang terlaksana	%	N/A	N/A	Rp	105.382.500	Kecamatan
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)							
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin	%	N/A	N/A	Rp	1.203.141.400	BKPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah aparatur yang kompetensinya meningkat	Orang	N/A	N/A	Rp	103.000.000	
Program pengembagan karir	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	%		78	Rp	1.465.078.500	
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	%	N/A	100	Rp	150,040,912	Setda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%		66,7%	Rp	249.959.088	
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	90	Rp	5.738.164.250	Sekwan

Tabel 7.6. Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Pendidikan																
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	Jumlah guru bersertifikat pendidik	orang		1250	Rp 4.285.479.000	1250	Rp 4.714.026.900	1400	Rp 5.185.429.590	1540	Rp 5.703.972.549	1800	Rp 6.274.369.804	1800	Rp 6.274.369.804	Dinas Pendidikan
	Jumlah kelompok kerja guru yang terbina	kelompok		5		5		5		5		5		5		
	Jumlah pelatihan pendidik dan tenaga pendidik terlaksana	kegiatan		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah guru honor	orang		55		55		55		55		55		55		
Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumalh operator IT yang terlatih	orang		6	Rp 502.010.000	3	Rp 552.211.000	8	Rp 607.432.100	9	Rp 668.175.310	6	Rp 734.992.842	6	Rp 734.992.842	
	Montoring evaluasi kegiatan terlaksana	Dokumen		3		3		3		3		3		3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	TKN Pembina yang dibangun	Unit		1	Rp 2.001.528.500	1	Rp 2.201.681.350	0	Rp 2.421.849.485	0	Rp 2.664.034.434	0	Rp 2.930.437.877	0	Rp 2.930.437.877	
	Ruang kelas baru bertambah	ruang		2		2		2		2		2		2		
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeler	ruang		6		6		6		6		6		6		
	Alat praktik dan peraga tersedia	paket		2		2		2		2		2		2		
	Persentase BOP TK yang tersalur	persen		82		84		87		89		91		91		
Pogram pendidikan Nonformal	Ruang belajar pendidikan kesetaraan terbangun	ruang		2	Rp 803.838.800	0	Rp 884.222.680	0	Rp 972.644.948	2	Rp 1.069.909.443	0	Rp 1.176.900.387	0	Rp 1.176.900.387	
	Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang terdata	lembaga		21		21		21		21		21		21		
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah USB Terbangun	Unit		1	Rp 17.096.825.000	0	Rp 18.806.507.500	1	Rp 20.687.158.250	0	Rp 22.755.874.075	0	Rp 25.036.461.483	0	Rp 25.036.461.483	
	Ruang kelas baru bertambah	ruang		6		6		6		6		6		6		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		9		9		9		9		9		9		
	Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		12		12		12		12		12		12		
	Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		5		5		5		5		5		5		
	Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		5		5		5		5		5		5		
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah USB Terbangun	Unit		0	Rp 11.310.110.000	0	Rp 12.441.121.000	0	Rp 13.685.233.100	0	Rp 15.053.756.410	0	Rp 16.559.132.051	0	Rp 16.559.132.051	
	Ruang kelas baru bertambah	ruang		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah ruang kelas tercukupi meubeleur	ruang		15		15		15		15		15		15		
	Jumlah ruang kelas terehabilitasi	ruang		3		3		3		3		3		3		
	Jumlah kantor sekolah terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah rumah dinas guru terbangun	unit		4		4		4		4		4		4		
	Jumlah rumah dinas terehabilitasi	unit		3		3		3		3		3		3		
Kesehatan																
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prosentase menurunkan angka kesakitan	%		85	Rp. 607.344.400	85	Rp 1.595.000.000	85	Rp. 1.740.000.000	87	Rp. 1.885.000.000	90	Rp 2.035.000.000	90	Rp. 2.035.000.000	DINKES
Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	ProsentaseMeningkatnya FKTP yang terakreditasi	%		3 Pus	0	3 Pus	Rp. 525.000.000	3 Pus	Rp. 907.500.000	18 Pus	Rp. 998.250.000	18 Pus	Rp. 1.098.075.000	18 Pus	Rp. 1.098.075.000	
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	%		80	Rp. 2.367.000.000	90	Rp. 5.380.000.000	90	Rp. 5.918.000.000	100	Rp. 6.509.800.000	100	Rp. 7.160.780.000	100	Rp. 7.160.780.000	
	Persentase Rumah Sakit yang dibangun dan Puskesmas serta jariangannya yang direhab	%		15 Pkt	Rp. 201.800.000	15 Pkt	Rp. 1.040.000.000	15 Pkt	Rp. 2.040.000.000	15 Pkt	Rp. 2.040.000.000	18	Rp. 3.040.000.000	18	Rp. 3.040.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Persentase peningkatan jaminan kesehatan	%		100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 7.297.059.600	100 %	Rp. 10.780.000.000	100 %	Rp. 12.280.000.000	100 %	Rp. 12.280.000.000	
	Persentase Pelayanan kefarmasian, makanan, minuman dan alat kesehatan	%		50 %	Rp. 58.618.600,00	60 %	Rp. 75.000.000	70 %	Rp. 82.500.000	80 %	Rp. 90.750.000	90 %	Rp. 106.330.262	90 %	Rp. 106.330.262	
	Persentase sumber daya manusia kesehatan	%		60%	Rp. 8.494.917.200	80%	Rp. 9.920.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	100 %	Rp. 13.400.000.000	
	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah	%		80%	Rp. 357.000.000	80%	Rp. 1.883.200.000	80%	Rp. 2.071.520.000	80%	Rp. 2.278.672.000	80%	Rp. 2.506.539.200	80 %	Rp. 2.506.539.200	
Program Kualitas Pelayanan Upaya kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	%		78%	Rp. 277849400	80%	Rp. 400.000.000	80%	Rp. 600.000.000	85%	Rp. 912.500.000	90%	Rp. 912.500.000	90 %	Rp. 912.500.000	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan	Cakupan Layanan Sarana Prasarana	Paket		1th	Rp 37.149.014.000	1 th	Rp 33.377.400.000	1 th	Rp 34.750.562.000	1th	Rp 38.482.131.960	1th	Rp 42.965.597.529	1th	Rp 42.965.597.529	RSUD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Prasarana Rumah Sakit	Rumah Sakit															
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah in service training yang diadakan	kegiatan		4	Rp 430.000.000	4	Rp 367.800.000	4	Rp 389.649.000	4	Rp 421.732.470	4	Rp 467.609.669	4	Rp 467.609.669	
Program Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan medis di rumah sakit	kunjungan		-	-	1tahun	Rp 539.000.000		Rp 565.950.000		Rp 565.950.000		Rp 726.679.800		Rp 726.679.800	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standart pelayanan kesehatan	buku		-	-		Rp 1.013.350.000		Rp 781.100.500		Rp 804.533.515		Rp 828.669.520		Rp 828.669.520	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan Baik dan sedang	Km	939,82 Km	950 Km	Rp 7.272.044.400	955 Km	Rp 6.200.000.000	Dpdp 3a	Rp 6.200.000.000	965 Km	Rp 6.200.000.000	970 Km	Rp 6.200.000.000	970 Km	Rp 6.200.000.000	Dinas PUPR
Program pembangunan infrastruktur Permukiman	Panjang jalan yang memenuhi Kondisi Jalan	Km	225	255	Rp 25.007.899.800	261 Km	Rp 22.307.988.360	265 Km	Rp 26.107.138.260	270 Km	Rp 31.182.685.380	275 Km	Rp 34.427.126.580	275 Km	Rp 34.427.126.580	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Baik dan sedang															
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih			54.808	Rp 906.800.000	54.811 KK	Rp 1.593.427.740	54.813 KK	Rp 1.864.795.590	54.816 KK	Rp 2.227.334.670	54.820 KK	Rp 2.459.080.470	54.820 KK	Rp 2.459.080.470	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	%	71,83 %	83,10%	Rp 49.084.605.600	88,73%	Rp 177.804.664.100	94,37%	Rp 209.262.389.500	100 %	Rp 251.250.960.450	100 %	Rp 278.092.878.100	100 %	Rp 278.092.878.100	
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/data base jalan dan jembatan	Kecamatan		6 Kec.	Rp 200,000,000	6 Kec.	Rp 1,200,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	6 Kec.	Rp 400,000,000	
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	84,9	89.9	Rp 10.556.525.016	94.9	Rp 7.485.996.120	116.96	Rp 8.752.379.420	116.96	Rp 10.444.228.460	116.96	Rp 11.525.708.860	116.96	Rp 11.525.708.860	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	Jiwa	207.888 jiwa	219,231	Rp 12.259.683.000	219,240	Rp 5.311.425.800	219,248	Rp 6.215.985.300	219,257	Rp 7.424.448.900	219,288	Rp 8.196.934.900	219,288	Rp 8.196.934.900	
	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	KK	53.475 KK	62.439 KK		63.649 KK		64.643 KK		64.643 KK		64.643 KK		64.643 KK		
Program Pembangunan dan Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	Jiwa	124.697 jiwa	140.108 jiwa	Rp 6.733.487.584	159.627 jiwa	Rp 16.415.419.980	178.897 jiwa	Rp 19.219.554.430	201.913 jiwa	Rp 22.965.791.590	227.323 jiwa	Rp 25.360.498.190	227.323 jiwa	Rp 25.360.498.190	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang ditangani	DI+DIR		20 DI+DIR	Rp 14.765.816.600	20 DI+DIR	Rp 18.585.000.000	20 DI+DIR	Rp 18.575.000.000	20 DI+DIR	Rp 18.700.000.000	20 DI+DIR	Rp 20.700.000.000	20 DI+DIR	Rp 20.700.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air yang ditangan	Embung		5	Rp 4.832.051.800	5	Rp 7.875.000.000	5	Rp 10.750.000.000	6	Rp 13.600.000.000	6	Rp 16.600.000.000	6	Rp 16.600.000.000	
Program pengendalian banjir	Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi	Kawasan		7 kawasan	Rp 10.871.616.600	7	Rp 24.376.402.000	7	Rp 30.194.089.000	7	Rp 38.838.932.000	7	Rp 41.266.682.000 0	7	Rp 41.266.682.000	
Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	Cakupan informasi penataan ruang	Kecamatan		**1**	Rp 898.340.000	1	Rp 3.064.285.000	1	Rp 3.586.146.000	1	Rp 4.283.336.000	2	Rp 4.729.001.000	2	Rp 4.729.001.000	
	Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Cakupan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		6 kecamatan		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan kawasan pemukiman yang tertangani	%		30	Rp 730,000,000	50	Rp 4,310,000,000	60	Rp 8,465,000,000	65	Rp 10,275,000,000	70	Rp 12,585,000,000	70	Rp 12,585,000,000	Dinas Perkim
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																
Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%		0	Rp 358.090.000	0	Rp 380.000.000	0	Rp 490.000.000	0	Rp 490.000.000	0	Rp 575.000.000	0	Rp 575.000.000	Bakesbangpol
Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegehan tindak krimi nal	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	instansi		4	Rp 608.250.000	4	Rp 2.100.000.000	4	Rp 2.300.000.000	4	Rp 2.800.000.000	4	Rp 3.100.000.000	4	Rp 3.100.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	%	90	90	Rp 3,334,175,000	90	Rp 3,388,244,200	90	Rp 3,442,417,400	90	Rp 3,501,979,140	90	Rp 3,567,724,454	90	Rp 3,567,724,454	Satpol PP
Program peningkatan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat	Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkada						Rp 328,035,000,000		Rp 344,436,750		Rp 361,658,588		Rp 379,741,517		Rp 379,741,517	
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase Penurunan jumlah penyakit masyarakat	%	90	90	Rp 892,658,397	90	Rp 915,658,397	90	Rp 922,658,397	90	Rp 957,958,397	90	Rp 962,888,397	90	Rp 962,888,397	
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%				90	Rp 66,164,000	90	Rp 73,141,140	90	Rp 87,820,000	90	Rp 97,820,000	90	Rp 97,820,000	
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan			90	Rp 1,722,369,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Beragama																
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan dan kemasyarakatan	%		90	Rp 1,720,000,000	90	Rp 1,475,000,000	90	Rp 1,475,000,000	90	Rp 1,625,000,000	90	Rp 1,775,000,000	90	Rp 1,775,000,000	
Program Peningkatan Pemahaman Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase jumlah kegiatan Pemerintah daerah dibidang mental dan keagamaan	%	100	100	Rp 2.477,804,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	%		100	Rp 223,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosial																
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya	orang		80	Rp 332,140,500	80	Rp 952,000,000	80	Rp 1,035,000,000	80	Rp 1,035,000,000	80	Rp 1,500,000,000	80	Rp 1,500,000,000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosial	Pembangunan Kesejahteraan Sosial (orang)															
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		100	Rp 265,650,000	100	Rp 440,647,190	100	Rpo 538,150,000	100	Rp 598,150,000	100	Rp 720,000,000	100	Rp 720,000,000	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Prosentase Fakir Miskin yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (orang)	%		20	Rp 164,200,000	40	Rp 585,000,000	60	Rp 745,000,000	80	Rp 745,000,000	100	Rp 470,000,000	100	Rp 470,000,000	
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (orang)	orang		302	Rp 120,200,000	302	Rp 427,500,000	302	Rp 513,000,000	302	Rp 553,000,000	302	Rp 660,000,000	302	Rp 660,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pembinaan	orang		40	Rp 105,400,000	40	Rp 210,000,000	40	Rp 230,000,000	40	Rp 1,230,000,000	40	Rp 230,000,000	40	Rp 230,000,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Tenaga Kerja																
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase peningkatan pelatihan dan sarana prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpeliharanya sarana dan prasarana LLK	%			Rp 1,538,281,500		Rp 1,473,689,600		Rp 1,726,094,200		Rp 2,029,629,000		Rp 2,212,450,000		Rp 2,212,450,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ptogram Peningkatan Kesempatan Kerja	Presentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	%			Rp 416,398,400		Rp 251,719,240		Rp 305,170,000		Rp 328,347,000		Rp 336,400,000		Rp 336,400,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum jaminan sosial bagi tenaga kerja	%			Rp 293,940,000		Rp 184,678,500		Rp 181,238,000		Rp 256,596,630		Rp 267,100,000		Rp 267,100,000	
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																
Program peningkatan kualitas Hidup perempuan	Lembaga pemberdayaan perempuan			-	Rp -	3	Rp 145,000,000	3	Rp 200,000,000	3	Rp 215,000,000	3	Rp 270,000,000	3	Rp 270,000,000	DP3AP2KB
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan	Dok		2	Rp 395,071,739	3	Rp 401,000,000	3	Rp 492,000,000	3	Rp 980,000,000	3	Rp 650,000,000	3	Rp 650,000,000	
Program peningkatan perlindungan Hak perempuan	Lembaga Pokja,Satgas KDRT	Dok		1	Rp 51,040,000	4	Rp 145,000,000	4	Rp 275,000,000	4	Rp 295,000,000	4	Rp 370,000,000	4	Rp 370,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kader	Dok		1	Rp 38,990,000	1	Rp 120,000,000	1	Rp 132,000,000		Rp 145,000,000	1	Rp 133,000,000	1	Rp 133,000,000	
	Data Keluarga Sejahtera	Dok		2		2		2		2		2		2		
Program pengembangan Kabupaten Layak Anak	SRA, PRA, KRA. DELANA/KELANA	Dok		1	Rp 160,000,000	5	Rp 564,000,000	5	Rp 565,000,000	5	Rp 585,000,000	5	Rp 634,000,000	5	Rp 634,000,000	
Program Peningkatan Perlindungan Anak	Lembaga PATBM Desa/Kelurahan	Dok			Rp -	2	Rp 175,000,000	2	Rp 186,000,000	2	Rp 205,000,000	2	Rp 244,511,744	2	Rp 244,511,744	
Proram Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Partisipasi Anak dan Hak Anak, Persentase Forum Anakk Tingkat Desa yang Terbentuk	Dok			Rp	2	Rp 79,000,000	2	Rp 109,088,182	2	Rp 120,000,000	2	Rp 225,000,000	2	Rp 225,000,000	
Pangan																
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	%		60	Rp 455,198,000	70	Rp 170,000,000	70	Rp 423,000,000	80	Rp 500,000,000	100	Rp 505,000,000	100	Rp 505,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Angka kecukupan energi (AKE)	Dok	2351,2	2155,0	Rp 317,616,300	2156,1	Rp 409,000,000	2157,2	Rp 505,000,000	2158,3	Rp 635,000,000	2159,4	Rp 682,500,000	2159,4	Rp 682,500,000	
Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	%		<25 %	Rp 123,050,000	<25 %	Rp 185,000,000	<25 %	Rp 370,000,000	<25 %	Rp 475,000,000	<25 %	Rp 570,000,000	<25 %	Rp 570,000,000	
Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	%	5,64	1	Rp 211,751,200	1	Rp 300,000,000	1	Rp 325,000,000	1	Rp 438,500,000	1	Rp 585,000,000	1	Rp 585,000,000	
Pertanahan																
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Peman	Jumlah bidang Tanah yang ditata dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan	%		60	Rp 351,600,000	62	Rp 480,000,000	65	Rp 593,000,000	68	Rp 700,000,000	70	Rp 800,000,000	70	Rp 800,000,000	Dinas Perkim

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
faatan Tanah	dan pemanfaatan tanah di perumahan dan kawasan permukiman															
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana																
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kualitas air, udara, dan tanah.Cakupan titik pengawasan terhadap penaatan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah.	Persentase		35%	Rp 275,290,000	36%	Rp 985,000,000	37%	Rp 825,000,000	38%	Rp 890,000,000	40%	Rp 2,925,000,000	40 %	Rp 2,925,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	Kecamatan		1	Rp 49,445,000	1	Rp 197,000,000	1	Rp 214,000,000	1	Rp 349,000,000	1	Rp 549,000,000	1	Rp 549,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam serta keserasian/kelestarian lingkungan hidup	Persentase								10	Rp 400,000,000	15	Rp 100,000,000	15	Rp 100,000,000	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase peningkatan kualitas udara	Persentase		30	Rp 55,260,000	31	Rp 90,000,000	32	Rp 430,000,000	33	Rp 580,000,000	34	Rp 610,000,000	34	Rp 610,000,000	
Program Pengendalian kebakaran hutan	Cakupan pengendalian kebakaran hutan	Kecamatan		3	Rp 46,719,000	6	Rp 177,500,000	6	Rp 189,500,000	6	Rp 210,000,000	6	Rp 220,000,000	6	Rp 220,000,000	
Program pengawasan ketaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	Jumlah Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup	Jumlah		20	Rp 86,430,000	25	Rp 95,000,000	30	Rp 100,000,000	30	Rp 105,000,000	30	Rp 110,000,000	30	Rp 110,000,000	
Program peningkatan kapasitas dan peran	Cakupan lembaga pendidikan yang meraih	Sekolah		15	Rp 381,611,000	15	Rp 612,500,000	21	Rp 664,250,000	27	Rp 740,750,000	33	Rp 818,000,000	33	Rp 818,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Adiwiyata															
	Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	Kecamatan		6		6		6		6		6		6		
Program penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Cakupan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup	Kasus		5	Rp 23,050,000	10	Rp 57,000,000	10	Rp 70,000,000	10	Rp 73,000,000	10	Rp 81,000,000	10	Rp 81,000,000	
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemenuhan penyediaan lahan RTH di kawasan perkotaan	Persentase		9.20	Rp 2,417,838,400	9.50	Rp 4,077,000,000	9.80	Rp 5,756,250,000	10	Rp 5,316,380,426	11	Rp 5,911,000,000	11	Rp 5,911,000,000	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok	Persentase		44.78	Rp 8,063,597,200	49.64	Rp 15,991,740,000	54.67	Rp 18,515,337,273	59.35	Rp 23,689,505,910	64.93	Rp 24,751,432,186	64.93	Rp 24,751,432,186	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pengelola persampahan berbasis masyarakat.															
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%		24	Rp 410,985,000	33	Rp 832,000,000	41	Rp 724,000,000	50	Rp 877,000,000	59	Rp 1,559,306,950	59	Rp 1,559,306,950	BPBD
Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	%	70	70	Rp 356,209,000	75	Rp 1,112,483,000	80	Rp 1,683,020,030	85	Rp 1,733,975,460	90	Rp 1,069,150,982	90	Rp 1,069,150,982	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			69,49	Rp. 359.981.600	76,75	RP. 641.256.500	83,12	Rp. 612.025.552	86,87	Rp. 659.392.345	89,75	Rp. 882.913.572	89,75	Rp. 882.913.572	Dispenduk capil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			-	-	85	Rp. 132.200.000	87,5	Rp. 172.500.000	89,5	Rp. 186.000.000	90,5	Rp. 201.500.000	90,5	Rp. 201.500.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan			-	-	3	Rp. 78.500.000,00	6	Rp. 101.500.000,00	10	Rp. 139.000.000,00	15	Rp. 194.000.000,00	15	Rp. 194.000.000,00	
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu			16	Rp 148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Setda
Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa	Desa			Rp 48.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Koordinasi, Pembinaan dan Pernyelenggaraan Pemerintahan, Perlayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketenteraman Ketertiban Umum	Index Kepuasan Masyarakat	Index	NA													
	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dibidang tatakerlola	Desa/ Keluarahan	NA				Rp 2.695.920.000		Rp 2.731.905.000		Rp 3.249.355.000		Rp 3.230.815.000		Rp 3.230.815.000	
	Jumlah Desa Mandiri Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan	Desa	NA													
	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dapat difasilitasi	%	NA													
Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa,UMKM dan Usaha Ekonomi	Prosentase lembaga ekonomi Desa,UMKM,usaha ekonomi masyarakat dan	%	60	70	Rp 400,901,800	75	Rp 678,800,000	80	Rp 899,000,000	85	Rp 1,335,000,000	90	Rp 1,565,000,000	90	Rp 1,565,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Masyarakat, Masyarakat Miskin, dan Desa Tertinggal	masyarakat miskin dan desa tertinggal yang dibina															Desa
Poram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang dibina	%	70	80	Rp 1,462,929,900	85	Rp 1,399,000,000	90	Rp 1,470,424,242	95	Rp 1,867,442,291	100	Rp 1,925,037,442	100	Rp 1,925,037,442	
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terakomodirnya Usulan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	Desa	81	81	Rp 590.473.100	81	Rp 1,250,000,000	81	Rp 1,495,000,000	81	Rp 1,445,000,000	81	Rp 1,440,000,000	81	Rp 1,440,000,000	
Perhubungan																
Program Pembangunan dan Rehabilitasi /pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLAJ	Kegiatan		1	Rp 1,055,000,000	6	Rp 3,436,000,000	3	Rp 3,100,000,000	3	Rp 7,145,000,000	4	Rp 11,361,000,000	4	Rp 11,361,000,000	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang dihasilkan	Dok		5	Rp 1,000,000,000	2	Rp 2,100,000,000	2	Rp 2,500,000,000	0						
Program Peningaktan Pelayanan Angkutan	Peresentase tingkat kesadaran publik dalam berlalu lintas	%					Rp 1,596,913,600		Rp 1,965,090,703		Rp 2,066,054,405		Rp 2,337,000,905		Rp 2,337,000,905	
Komunikasi dan Informatika																
Program layanan penyediaan informasi publik	Cakupan Layanan Penyediaan Informasi Publik Daerah	Keg		3	Rp 225,145,000	8	Rp 700,000,000	11	Rp 1,400,000,000	11	Rp 2,400,000,000	11	Rp 1,400,000,000	11	Rp 1,400,000,000	Diskominfo
Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Keg		9	Rp 335.535.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	12	Rp 2.400.000.000	
Program implementasi dan pengembangan e-government	Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Gov	Keg		6	Rp 221,937,900	12	Rp 600,000,000	12	Rp 675,000,000	12	Rp 675,000,000	12	Rp 675,000,000	12	Rp 675,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tingkat Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah	dok		120	Rp 44,615,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	200	Rp 250,000,000	
Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika	Cakupan Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	keg		104	Rp 106,539,000	107	Rp 400,000,000	107	Rp 2,100,000,000	107	Rp 2,200,000,000	107	Rp 1,570,000,000	107	Rp 1,570,000,000	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (kenaikan 10 % Tiap tahun)	%	10	10	Rp 321,812,500	10	Rp 284,000,000	10	Rp 281,000,000	10	Rp 277,000,000	10	Rp 285,000,000	10	Rp 285,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah usaha koperasi yang berkembang	Koperasi	43	43	Rp 177,000,000	43	Rp 214,000,000	43	Rp 226,000,000	43	Rp 230,000,000	43	Rp 234,000,000	43	Rp 234,000,000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang	UKM	20	20	Rp 121,943,000	40	Rp 223,000,000	40	Rp 231,000,000	40	Rp 238,000,000	40	Rp 247,000,000	40	Rp 247,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	WUB	20	20	Rp 121,360,000	100	Rp 50,000,000	100	Rp 55,000,000	120	Rp 70,000,000	120	Rp 75,000,000	120	Rp 75,000,000	
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Adanya ketertarikan investor beinvestasi	Investor		83	Rp 342,850,000	85	Rp 479,200,000	91	Rp 428,300,000	91	Rp 565,000,000	100	Rp 610,000,000	100	Rp 610,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	Dok/ Kegiatan		13	Rp 662,912,500	16	Rp 1,081,667,500	16	Rp 1,022,876,737	16	Rp 1,610,000,000	16	Rp 1,450,000,000	16	Rp 1,450,000,000	
Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Prosentase Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal	%	60 (6 Kec.)	60	Rp 371,910,000	60	Rp 379,000,000	70	Rp 443,000,000	70	Rp 750,000,000	80	Rp 825,022,251	80	Rp 825,022,251	
Program Optimalisasi pelayanan Perizinan dan non perizinan	Ketepatan waktu penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan	%	100	100	Rp. 698.757.500	100	Rp. 751.978.070	100	Rp. 800.000.000	100	Rp. 955.600.000	100	Rp.1.020.000.000	100	Rp.1.020.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	non perizinan															
Pemuda dan Olahraga																
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Terlaksananya Event-event Olahraga di semua cabang			100	Rp 1,792,150,000	100	Rp 1,300,000,000	100	Rp 2,000,000,000	100	Rp 2,275,000,000	100	Rp 16,182,240,580	100	Rp 16,182,240,580	DISPORA
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya sarana dan Prasarana Olahraga			12 bulan	Rp 983,500,000	12 bulan	Rp 13,850,544,136	12 bulan	Rp 13,875,743,187	12 bulan	Rp 16,623,830,735	12 bulan	Rp 4,462,250,000	12 bulan	Rp 4,462,250,000	
Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Pemuda dan Kegiatan lainnya			100	Rp 870,403,700	100	Rp 956,635,000	100	Rp 1,125,000,000	100	Rp 1,250,000,000	100	Rp 1,500,000,000	100	Rp 1,500,000,000	
Kebudayaan																
Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan adat yang diselenggarakan		-	-	-	4	Rp 400.000.000	4	Rp 440.000.000	4	Rp 484.000.000	5	Rp 532.400.000	5	Rp 532.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perpustakaan																
Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Presentase Peningkatan Perpustakaan yang dibina	%		-	-	60	Rp. 90.000.000	70	Rp. 120.000.000	70	Rp. 150.000.000	80	Rp. 200.000.000	80	Rp. 200.000.000	DPK
Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	Presentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%		-	-		Rp. 590.648.403		Rp.980.626.884		Rp. 1.300.977.054		Rp. 1.404.889.361		Rp. 1.404.889.361	
Program Pengelolaan dan Pelayanan Arsip	Persentase ketersedian Dokumen Arsip Dalam Bentuk Informatika	%		-	-		Rp. 571.052.864		Rp. 980.593.826		Rp. 1.300.977.127		Rp. 1.404.929.363		Rp. 1.404.929.363	
Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem	%		-	-		Rp. 590.848.402		Rp. 980.626.881		Rp. 847.325.002		Rp. 1.368.446.321		Rp. 1.368.446.321	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kearsipan di Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan, Perusahaan, Orpol, Ormas dan Perseorang serta Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kearsipan															
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%			Rp 522,638,600		-		-		-		-		-	
Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Prosentase SKPD yang Menyerahkan Arsip Statis Sesuai Penggunaan	%			Rp 10.900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					Rp 10.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah					Rp 8.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URUSAN PILIHAN																
Kelautan dan Perikanan																
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	%	14,05	9,68	Rp 3.961.293.500	11,16	Rp 4,969.983.350	14.21	Rp 4.969.983.350	7,90	Rp 7,732,307.267	9,84	Rp 9.834.000.532	9,84	Rp 9.834.000.532	Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan	Peningkatan produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	%	5.00	5,00	Rp 2.726.135.200	5,00	Rp 5,850.000.000	5,00	Rp 7.350.000.000	4,52	Rp 12.750.000.000	4,33	Rp 11,950.000,000	4,33	Rp 11.950.000.000	
Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	%	38	47,00	Rp 1.978.823.700	50,50	Rp 3,910,000,000	52,50	Rp 5.220.000.000	55,00	Rp 2,550,000,000	57,60	Rp 6.440.000,000	57,60	Rp 6.440.000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pariwisata																
Program pengembangan pemasaran pariwisata					Rp 1,267,000,000		Rp 2,350,000,000		Rp 2,575,000,000		Rp 3,100,000,000		Rp 3,450,000,000		Rp 3,450,000,000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Lenght of stay	Hari		3	Rp 389,999,400	3	Rp 450,000,000	3	Rp 500,000,000	4	Rp 800,000,000	4	Rp 6,650,000,000	4	Rp 6,650,000,000	
Program pengembangan kemitraan					Rp 420,000,000		Rp 550,000,000		Rp 550,000,000		Rp 575,000,000		Rp 700,000,000		Rp 700,000,000	
Program Pengembangan Ekonomi kreatif					Rp 759,000,000		Rp 1,786,906,850		Rp 1,775,000,000		Rp 3,200,000,000		Rp 3,430,589,693		Rp 3,430,589,693	
Pertanian																
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Kwintal/Ha		28,46	Rp 1,523,246,605	29,38	Rp 3,660,854,669,65	30,11	Rp 3,827,415,806,77	31,60	Rp 6,469,770,094,86	33,16	Rp 6,875,869,148,20	33,16	Rp 6,875,869,148,20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perke
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Meningkatnya produktivitas holtikultura	Ton/Ha/		3,55	Rp 1,231,628,000	3,59	Rp 3,958,935,000	3,64.	Rp 5,603,880,000	3,68	Rp 6,125,400,000	3,72	Rp 6,344,501,000	3,72	Rp 6,344,501,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produktivitas perkebunan	Ton/Ha/Thn		4,26	Rp 944,785,700	4,35	Rp 10,117,065,280	4,43	Rp 13,004,538,220	4,52	Rp 18,835,429,218	4,61	Rp 21,275,117,490.75	4,61	Rp 21,275,117,490.75	bunan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Prosesntase Peningkatan Prasarana, Sarana dan SDM Petani	%		10	Rp 1,914,500,000	12	Rp 5,841,750,000	13	Rp 8,027,000,000	14	Rp 11,295,740,000	15	Rp 12,688,011,600	15	Rp 12,688,011,600	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Tenaga Penyuluh yang terpasilitasi	Orang		88.00	Rp 773,321,000	86.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	85.00	Rp 773,321,000	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase meningkatnya pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/trnak	%		75	Rp 920,806,950	80	Rp 1,546,000,000	85	Rp 1,602,100,000	90	Rp 1,703,810,000	95	Rp 1,821,691,000	95	Rp 1,821,691,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningakatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan	%		8	Rp 930,826,600	8	Rp 3,250,000,000	8	Rp 3,890,000,000	8	Rp 4,750,000,000	8	Rp 5,060,000,000	8	Rp 5,060,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	non ruminansia															
Program Peningkatan Agribisnis Peternakan	Prosentase peningkatan usaha bidang peternakan	%		10	Rp 466,820,800	10	Rp 1,040,000,000	10	Rp 1,210,000,000	10	Rp 1,310,000,000	10	Rp 1,721,000,000	10	Rp 1,721,000,000	
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Presentase peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	%		10	Rp 934.417.400	10	Rp 1,912,000,000	10	Rp 2,504,000,000	10	Rp 2,665,000,000	10	Rp 2,790,000,000	10	Rp 2,790,000,000	
Perdagangan																
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%		5	Rp 227,570,000	8	Rp 250,000,000	11	Rp 275,000,000	14	Rp 302,000,000	20	Rp 333,000,000	20	Rp 333,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usa
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu	%		8,9	Rp 44,155,000	8,5	Rp 78,000,000	8,5	Rp 85,000,000	8	Rp 94,000,000	8	Rp 25,000,000	8	Rp 25,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(YoY) kurang dari 9%															ha Mikro
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%		10	Rp 72,525.000	20	Rp 69.273,000	30	Rp 78.700.000	40	Rp 88,800,000	50	Rp 111.000,000	50	Rp 111.000,000	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah realisasi ekspor	US $ (Jt)		125	Rp 139,510,000	133,56	Rp 153,461,000	142,91	Rp 168,807,100	154,34	Rp 185,687,810	155,77	Rp 204,256,591	155,7	Rp 204,256,591	
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat yang ditingkatkan			5	Rp 7,948,915,000	5	Rp 10,985,000,000	3	Rp 2.247,000,000	3	Rp 2.251,000,000	3	Rp 2.755,000,000	3	Rp 2.755,000,000	
	Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaaannya			3		3		3		3		3		3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perindustrian																
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah IKMi potensial	IKM		10	Rp 34,000,000	12	Rp 34,000,000	14	Rp 34,000,000	16	Rp 34,000,000	18	Rp 34,000,000	18	Rp 34,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri kecil Menengah yang berkembang	IKM		23	Rp 181,587,500	35	Rp 256,500,000	45	Rp 284,150,000	55	Rp 313,565,000	65	Rp 354,921,500	65	Rp 354,921,500	
Program perlindungan HKI dan standardisasi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam standarisasi industri	IKM		12	Rp 101,603,000	15	Rp 123,020,000	18	Rp 145,000,000	20	Rp 161,000,000	20	Rp 164,000,000	20	Rp 164,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)																
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%		66,7	Rp 199,358,000	66,7	Rp 150,000,000	75	Rp 175,000,000	85	Rp 175,000,000	100	Rp 250,000,000	100	Rp 250,000,000	Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengen dalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase SKPD yg telah menyelengga rakan SPIP dan PMPRB	%	N/A	29	Rp 171.414.000											Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengen dalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban I	Presentase SKPD pada wilayah Irban I yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	%	N/A	-	-	58	Rp 80.000.000	100	Rp 110.580.000	100	Rp 92.032.641	100	Rp 109.744.292	100	Rp 109.744.292	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengen	Presentase SKPD pada wilayah Irban II yang telah menyelenggarakan SPIP dan	%	N/A	-	-	58	Rp 80.000.000	100	Rp 110.580.000	100	Rp 92.032.641	100	Rp 109.744.292	100	Rp 109.744.292	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban II	PMPRB															
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban III	Presentase SKPD pada wilayah Irban III yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	%	N/A	-	-	58	Rp 80.000.000	100	Rp 110.580.000	100	Rp 92.032.641	100	Rp 109.744.292	100	Rp 109.744.292	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban IV	Presentase SKPD pada wilayah Irban IV yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	%	N/A	-	-	58	Rp. 80.000.000	100	Rp. 110.580.000	100	Rp. 92.032.641	100	Rp. 109.744.292	100	Rp. 109.744.292	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penelitian & Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 314.813,000	80	Rp 801.000,000	90	Rp 1.337.000,000	90	Rp 2.150,000,000	90	Rp 1.700,000,000	90	Rp 1.700,000,000	Bappeda
Program Pengendalian dan Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%		80	Rp 657,849,600	80	Rp 879.288.500	90	Rp. 990.736,000	90	Rp 1.261.505.000	90	Rp 1.500.000,000	90	Rp 1.500.000,000	
Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 180.545000	80	Rp 1,140,000,000	90	Rp 1,510.000,000	90	Rp 1.250,000,000	90	Rp 950,000,000	90	Rp 950,000,000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 370,500,000	80	Rp 1,316,100,000	90	Rp 1.490.145,000	90	Rp 1.850.000,000	90	Rp 2.150,000.000	90	Rp 2.150,000.000	
Program Perencanaan Sos. dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%		80	Rp 715,350,000	80	Rp 1,753,500,000	90	Rp 1.873.200,000	90	Rp 1.750.000,000	90	Rp 2.300,000.000	90	Rp 2.300,000.000	
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	%	N/A	75	Rp 121,971,400	80	Rp 128,069,970	85	Rp 137,500,000	90	Rp 144,375,000	95	Rp 151,593,750	95	Rp 151,593,750	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	%		100	Rp 361,781,800	100	Rp 414,375,000	100	Rp 462,093,750	100	Rp 450,698,438	100	Rp 610,233,359	100	Rp 610,233,359	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)																
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK		WTP	Rp 2,553,343,800	WTP	Rp 1.233.994.462	WTP	Rp 1.296.254.230	WTP	Rp 1.585.967.261	WTP	Rp 1.643.250.000	WTP	Rp 1.643.250.000	BPKAD
	Persentase Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan Tepat Waktu	%		100		100		100		100		100		100		
Program Ekstensifikasi Pajak	Data Objek Pajak Bertambah	Objek Pajak	NA	500	Rp 275.319.400	600	Rp 638,447,000	700	Rp 1,070,000,000	800	Rp 1,389,000,000	900	Rp 1,725,000,000	900	Rp 1,725,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan	Jumlah objek pajak yang ditetapkan,	dokumen	NA	500	Rp 594.038,800	600	Rp 1,007,472,200	700	Rp 1,800,000,000	800	Rp 2,000,000,000	900	Rp 2,150,000,000	900	Rp 2,150,000,000	
	Jumlah SSPD BPHTB yang	dokumen	NA	400		420		440		460		500		500		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pelayanan keluhan masyarakat	diverifikasi															
	Jumlah Keluhan Wajib Pajak	dokumen	NA	50		45		35		30		25		25		
Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah	%		30%	Rp 1.410,944,800	30	Rp 1,270,000,000	30	Rp 2,100,000,000	30	Rp 2,500,000,000	30	Rp 2,700,000,000	30	Rp 2,700,000,000	
Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan pendapatan asli daerah	%		18	Rp 926,140,000	37	Rp 610,00,000	56	Rp 1,427,000,000	75	Rp 1,800,000,000	94	Rp 2,250,000,000	79	Rp 2,250,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)																
Program Pengembangan karir	Presentase ASN yang sesuai Kompetensi	%		80	Rp. 861.039.000	82	Rp 767.000.000	85	Rp 1.160.000.000	88	Rp 1.410.000.000	90	Rp 1.580.000.000	90	Rp 1.580.000.000	BKPP
Program Peningkatan	Prosentase Aparatur yang	%		0	Rp 2.132.684	72	Rp 2.598.500.	73	Rp 3.000.000.	74	Rp 2.698.012.4	75	Rp 2.264.225.	75	Rp 130.000.00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kompetensi Aparatur	Memiliki Kompetensi				.000		000		000		58		893		0	
Program Pembinaan Aparatur	Prosentase Penurunan Pelanggaran Disiplin	%		0	Rp 359.005.000	100	Rp 295.000.000	100	Rp 405.000.000	100	Rp 435.000.000	100	Rp 375.000.000	100	Rp 375.000.000	
Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian	Persentase SKPD yang memiliki SOP Bidang Administrasi dan Pemerintahan	%		-	Rp 0	100	Rp 350,000,000	100	Rp 390,000,000	100	Rp 450,000.000	100	Rp.475.000.000	100	Rp.475.000.000	Setda
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota DPRD	%		92	Rp 3,734,900,000	94	Rp 4,609,682,705	96	Rp 7,078,351,396	98	Rp 4,496,469,801	100	Rp 9,876,252,576	100	Rp 9,876,252,576	Setwan

Tabel 7.7: Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD Penanggung jawab
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan		100%	100%	Rp	1.202.714.800	Dinas PUPR
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Prosentase terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	%		60	Rp	2,012,520,000	Dinas Perkim
Sosial							
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang diberikan Pelayanan dan Pembinaan				Rp	53,555,000	Dinas Sosial

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						
Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Kampung KB				Rp 194.349.500	DP3AP2KB
Program Pelayanan Kontrasepsi	Kesertaan / Cakupan peserta KB Aktif				Rp 248.885.000	
Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya kuantitas dan kualitas PIK-R/M.				Rp 105.000.000	
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	(Program ini tidak ada di Renstra)				Rp 20,947,500	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD Penanggung jawab
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Tenaga Kerja							
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Tersusunnya dokumen rencana lokasi transmigrasi yang baru	%		1 paket	Rp	610,960,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu	%		90	Rp	238,298,500	Bakesbangpol
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol	%		85	Rp	259.390.000	
Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat (saber pungli)				Rp	284.210.000	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah kecamatan yang mempunyai pos pemadam kebakaran		NA	90	Rp	636.200.000	Satpol PP

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program pendidikan politik masyarakat	Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala Daerah			100%	Rp 57.000.000	Setda
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Lembaga Organisasi Perempuan				Rp 876.318.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan					Rp 80.442.400	
Penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil Desa dan Kelurahan					Rp 34.637.500	
Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Persentase Peningkatan Pemahaman tentang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna			n/a	Rp 161.922.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD Penanggung jawab
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa			100%	Rp	44.000.000	Setda
Pertanahan							
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase aset daerah terinventarisasi sudah terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	NA	NA	Rp	9,323,079,000	BPKAD
Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana							
Program Tanggap Darurat Pasca Bencana	Prosentase Lokasi Kejadian yang telah di Rehab/Rekon	%	50	50	Rp	141.010.000	BPBD
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	Cakupan pembuatan kampung organik	Lokasi			Rp	461.475.000	
	Cakupan pembuatan taman Keanekaragaman Hayati	Lokasi					

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	Dokumen				
Perhubungan						
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan	Jenis	N/A	66	Rp 1.909.900.000	Dishub
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Presentase meningkatnya kelaikan kendaraan wajib uji	Jenis	N/A	4	Rp 903.250.000	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	%		100%	Rp 480.425.000	
Komunikasi dan Informatika						
Program Pengembangan data/informasi	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan	Sistem informasi		1	Rp 139,950,000	Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten			100%	Rp 163.575.000	
Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase peningkatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah			100%	Rp 1.670.132.400	
Kebudayaan						
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Juru pelihara situs terakomodir Jumlah situs budaya yang terpelihara				Rp 919.361.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kelompok seni budaya mendapat bantuan Festival budaya terlaksana Festival seni terlaksana				Rp 1.441.180.000	
Kearsipan						
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase (%) SKPD yang menyerahkan arsip statis sesuai perundang-undangan				Rp 102,807,000	DPK
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tersedianya penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk Informatika				Rp 8,750,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD Penanggung jawab
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	Meningkatnya lembaga/institusi pemerintah/swasta yang telah memanfaatkan sarana dan prasarana kearsipan daerah				Rp	3,000,000	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi				Rp	13,565,000	
URUSAN PILIHAN							
Perdagangan							
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang yang terbina	Pedagang			Rp	289.101.500	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah sosialisasi ketentuan bidang cukai hasil tembakau di kecamatan	Sosialisasi	n/a	6	Rp	127.375.000	
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah	%		100	Rp	50,000,000	Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Energi dan Sumber daya Mineral						
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 Kecamatan	%		100	Rp 1.155.000.000	Setda
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase jumlah pengelolaan air permukaan sesuai dengan aturan perundang-undangan	%		100	Rp 30,000,000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)						
Program perencanaan pembangunan daerah					Rp 962,725,000	Setda
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	%		100	Rp 163.575.000	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Prosentase ketersediaan dok. Prenc. & pengend. pemanfaatan ruang	%	NA	80	Rp 1.239.081.000	Bappeda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			OPD Penanggung jawab
				2017			
				Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Prosentase pemanfaatan dokumen perenc. sanitasi	%	NA	80	Rp	87.400.000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)							
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Peundang-Undangan	%		75	Rp	162,200,000	Sekwan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	%		100	Rp	715.100,000	Setda
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	Persentase permasalahan hukum tertangani	%		100	Rp	1.129.700,000	
Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Angka pelanggaran HAM				Rp	74,400,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		OPD Penanggung jawab
				2017		
				Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik	%		90%	Rp 1.928.010.000	

Tabel 7.8. Capaian Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2022

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Pembinaan konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	%		100 %	Rp 1.364.175.000	100 %	Rp 3.064.285.000	100 %	Rp 3.586.146.000	100 %	Rp 4.283.336.000	100 %	Rp 4.729.001.000	100%	Rp 4.729.001.000	Dinas PUPR
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	%		100 %	Rp 1.365.500.000	100 %	Rp 4.968.633.000	100 %	Rp 4.866.828.576	100 %	Rp 3.933.216.437	100 %	Rp 4.432.814.468	100%	Rp 4,432,814,468	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	%		100	Rp 73.550.000									100	Rp 73.550.000	Setda
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni			0,92	Rp 1.240.000.000	0,94	Rp 3.080.000.000	0,96	Rp 6.595.000.000	0,97	Rp 8.557.000.000	0,98	Rp 8.230.000.000	0,98	Rp 8.230.000.000	Dinas Perkim

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosial																
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberikan pelayanan dan pembinaan	orang		10	Rp 67,500,000	10	Rp 149,000,000	10	Rp 164,000,000	10	Rp 180,000,000	10	Rp. 180,000,000	10	Rp. 180,000,000	Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Pembangunan sarana social (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Panti Jompo)	unit										1	Rp 1,300,000,000	1	Rp 1,300,000,000	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri			1.250	Rp. 28.250.000	1.100	Rp. 478.255.000	1.000	Rp. 725.680.000	950	Rp. 644.728.032	900	Rp. 342.143.010	900	Rp. 342.143.010	Dispendukcapil

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																
Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Kampung KB	Dok		2	Rp 126,255,000	4	Rp 235,000,000	4	Rp 284,000,000	4	Rp 310,000,000	4	Rp 315,000,000	4	Rp 315,000,000	DP3AP2KB
Program Pelayanan Kontrasepsi	Kesertaan/ Cakupan peserta KB aktif	Dok				3	Rp 74,000,000	3	Rp 82,000,000	3	Rp 90,000,000	3	Rp 90,000,000	3	Rp 90,000,000	
Program Keluarga Berencana	Ratio Peserta KB				Rp 70,000,000		Rp 160,000,000		Rp 215,000,000		Rp 237,000,000		Rp 256,000,000		Rp 256,000,000	
Program Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR	PIK R/M	Dok					Rp 90,000,000		Rp 135,000,000		Rp 145,000,000		Rp 195,000,000		Rp 195,000,000	
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Tenaga kader terbina	Dok		1	Rp 27,000,000	2	Rp 420,000,000	2	Rp 52,500,000	2	Rp 60,000,000	2	Rp 95,000,000	2	Rp 95,000,000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program pengelolaan Data Gender dan Anak	Data gender dan anak	Dok				1	Rp 75,000,000	1	Rp 75,000,000	1	Rp 80,000,000	1	Rp 90,000,000	1	Rp 90,000,000	
Tenaga Kerja																
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Tersusunnya dokumen rencana lokasi transmigrasi yang baru	Paket		1	Rp 479.750.000,00		-		-		-		-		-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran daearah asal dan daerah setempat				Rp 479.750.000		Rp 132.652.260		Rp 269.208.000		Rp 532.853.000		Rp 595.936.000		Rp 595.936.000	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					Rp 403,100,000		Rp 1,033,100,000		Rp 1,133,100,000		Rp 1,183,100,000		Rp 1,233,100,000		Rp 1,233,100,000	Satpol PP

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum-forum binaan kesbangpol			90 %	Rp 101.190.000	90 %	Rp 220.000.000	90 %	Rp 310.000.000	90%	Rp 310.000.000	90%	Rp 425.000.000	90%	Rp 425.000.000	Bakes bangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu			90 %	Rp 240.905.000	90 %	Rp 800.000.000	90 %	Rp 900.000.000	90%	Rp 1.000.000.000	90%	Rp 1.100.000.000	90%	Rp 1.100.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna				80	Rp 266.567.600	80	Rp 765,000,000	85	Rp 530,000,000	90	Rp 565,000,000	90	Rp 590,000,000	90	Rp 590,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pertanahan																
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (Redunden)	Persentase kegiatan dalam RKPD yang terdanai dalam APBD			100	Rp 23.278.356.700	100	Rp 3,625,000,000	100	Rp 4,820,000,000	100	Rp 6,567,000,000	100	Rp7,685,000,000	100	Rp 7,685,000,000	BPKAD

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (redunden)	Jumlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang revisi terbaru Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) kawasan Hutan Primer dan Gambut	%		100	Rp 95,000,000									100	Rp 95,000,000	Setda
	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan					40 %	Rp 200.000.000	45 %	Rp 200.000.000	50%	Rp 518.850.000	50%	Rp 518.850.000	50%	Rp 518.850.000	
Penanaman Modal																
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jumlah produk yang dapat dipromosikan dan dikembangkan	%		100	Rp 88,550,000									100	Rp 88,500,000	Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana																
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pembuatan kampung organik Cakupan pembuatan taman Keanekaragaman Hayati Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH	%		44,63	Rp 409,464,000	49,02	Rp 495,000,000	51,08	Rp 630,000,000	52,90	Rp 710,000,000	56,30	Rp 775,000,000	56,30	Rp 775,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Persentase ketersediaan data inventarisasi wilayah penambangan rakyat tanpa ijin	%		100	Rp 71,600,000									100	Rp 71,600,000	Setda
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang ditindaklanjuti	%	50	50	Rp 135.000.000	50	Rp 235.000.000	50	Rp 308.500.000	50	Rp 370.000.000	50	Rp 570.000.000	50	Rp 570,000,000	BPBD

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Komunikasi dan Informatika																
Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	sistem				2	Rp 595,000,000	2	Rp 680,000,000	2	Rp 846,750,000	2	Rp 874,250,000	2	Rp 874,250,000	Setda
Program Pengembangan Data/ Informasi Bidang Pengadaan ****	Persentase data/ informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sistem Informasi		1	Rp 210,802,500									1	Rp 210,802,500	
Kearsipan																
Program pengelolaan dan layanan arsip	Tersedianya dokumen arsip dalam bentuk informatika						Rp 571.052.864		Rp 980.593.826		Rp 1.300.977.127		Rp 1.404.929.363		Rp 1.404.929.363	DPK
Program pembinaan dan pengawasan kearsipan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sestem kearsipan di Perangkat Daerah, Desa/ Kelurahan,						Rp 590.848.402		Rp 920.626.881		Rp 1.300.977.127		Rp 976.162.156		Rp 976.162.156	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Perusahaa, Orpol, Ormas dan Perseorangan serta meningkatnya pengawasan dan pembinaan tenaga kearsipan															
Perpustakaan																
Program pengembangan, pengolahan bahan pustaka dan layanan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan						Rp 582.148.404		Rp 980.626.884		Rp 1.300.977.054		Rp 1.404.889.361		Rp 1.404.889.361	DPK
Pemuda dan Olahraga																
Program Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana dan Prasarana Olahraga					Rp 313.500.000		Rp 454.500.000		Rp 385.000.000		Rp 442.250.000		Rp 442.250.000		Rp 442.250.000	Dispora
Program Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Tersedianya sarana dan Prasarana Olahraga			100	Rp 983.500.000	100	Rp 13.850.544.136	100	Rp 13.875.743.187	100	Rp 16.623.830.735	100	Rp 4.462.250.000	100	Rp 4.462.250.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perhubungan																
Program Pengendalian Klalu Lintasdan Peningkatan Pelayanan Angkut	Persentase tingkat kesadaran piblik dalam berlalu lintas	%				7	Rp 1.596.913.600	1	Rp 1.965.090.703	1	Rp 2.066.054.405	1	Rp 2.337.000.905	1	Rp 2.337.000.905	Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	%		1	Rp 406.075.000											
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase meningkatnya kelaikan kendaraan wajib uji	%		2	Rp 75.000.000											
URUSAN PILIHAN																
Perindustrian																
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil		Orang		60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	60	Rp 85,000,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Usaha Mikro
Perdagangan																
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase jumlah pendistribusi an BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah	%		100	Rp 38.400.000									100	Rp 38.400.000	Setda
Energi dan Sumber daya Mineral																
Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistri kan	Persentase jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 Kecamatan Kab. Kobar	%		100	Rp 1.709.000. 000									100	Rp 1.709.000. 000	Setda
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	Persentase jumlah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan sesuai dengan aturan perundang-undangan	%		100	Rp 30.257.000									100	Rp 30.257.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program peningkatan infrastruktur, pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	%				100	Rp 1.650.000.000	100	Rp 1.945.000.000	100	Rp 5.302.500.000	100	Rp 5.975.000.000	100	Rp 5.975.000.000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keuangan)																
Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BUD yang disusun	Dok	na			2	Rp 455.000.000	2	Rp 480.000.000	2	Rp 505.000.000	2	Rp 517.500.000	2	Rp 517.500.000	BPKAD
Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	Dok	na	100	Rp 728.866.600	100	Rp 840.000.000	100	Rp 805.000.000	100	Rp 790.000.000	100	Rp 790.000.000	100	Rp 790.000.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Unsur Penunjang Pemerintahan (Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah)																
Program Penyusunan Kebijakan dan Administrasi Pembangunan	Persentase data dan informasi bidang administrasi pembangunan dalam pengambilan kebijakan	%		100	Rp 320,181,000									100	Rp 320,181,000	Setda
Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	%		100	Rp 73,000,000									100	Rp 73,000,000	
Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Jumlah Desa yang Memiliki Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu					16	Rp. 3.710.300.000	16	Rp. 733.800.000	16	Rp. 1.170.000.000	15	Rp. 1.215.000.000	15	Rp. 1.215.000.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Jumlah kecamatan baru yang terbentuk	%		33	Rp. 294.000.000									33	Rp. 294.000.000	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	%		100	Rp.73.550.000									100	Rp.73.550.000	
Unsur Penunjang Pemerintahan (Keorganisasian, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah)																
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan			75	Rp 237.500.000	85	Rp 261.250.000	90	Rp 287.375.000	95	Rp 816.112.500	100	Rp 347.723.750	100	Rp 347.723.750	Sekwan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	%		100	Rp 473.913.800 00									100	Rp 473.913.800 00	Setda
Program Pembinaan dan pelayanan hukum	Persentase permasalahan hukum tertangani	%		100	Rp 387.700.000									100	Rp 387.700.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak sasi Manusia	Angka pelanggaran HAM				Rp 68.4000.000										Rp 68.4000.000	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	%				100	Rp 813.000.000	100	Rp 923.000.000	100	Rp 1.155.000.000	100	Rp 1.185.000.000	100	Rp 1.185.000.000	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Persentase pelayanan kedinasan KDH/ WKDH yang terlaksana baik	%		90	Rp 2.074.587.240											
Program penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi publik	Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah	%				80	Rp 1.972.000.000	85	Rp 2.415.750.000	90	Rp 2.855.750.000	95	Rp 2.990.750.000	95	Rp 2.990.750.000	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	%				100	Rp 900.000.000	100	Rp 950.000.000	100	Rp 1.200.000.000	100	Rp 1.275.000.000	100	Rp 1.275.000.000	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU yang disepakati	Dok		4	Rp 96.300.200											
Program Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase laporan monev bidang perekonomian yang dihasilkan	%				100	Rp 200.000.000	100	Rp 200.000.000	100	Rp 200.000.000	100	Rp 300.000.000	100	Rp 300.000.000	

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersedian pelayanan publik. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program Pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana table berikut.

Tabel 8. 1: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

	Indikator	Satuan	Target tahun ke					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	*Indeks Good Governance*	Skala	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	71.58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	NA	7,48	7,53	7,58	7.63	7,68
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	NA	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
6	Angka Kemiskinan	%	NA	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50
7	*Tourism Intencity Index*	NA	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat

8.2 Indikator Sasaran

Tabel 8. 2: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	5,23	5,50	5,80	5,90	6,50	7,10	7,50	7,50
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,08	7,40	7,50	7,70	8,00	8,30	8,50	8,50
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,73	N/A	10	12	13	15	15	15
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
A	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**									
	Pendidikan									
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,05	8,24	8,43	8,63	8,82	9,01	9,20	9,20

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan									
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,21	70,40	70,59	70,79	70,98	71,17	71,36	71,36
B	**Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
	Pendidikan									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,61	12,80	13,00	13,19	13,38	13,57	13,57
	Kesehatan									
2	Prosentase lembaga layanan kesehatan yang terakreditasi	%	NA	NA	50	60	70	80	90	90
	Pekerjaan Umum									
3	Indeks Williamson	Indeks	N/A	N/A	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
4	Indeks Toleransi (Kohesi Sosial)	%	N/A	0,65	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,76

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Terhadap tahun Sebelumnya	%	NA	10	10	15	18	20	23	23
	Sosial									
6	Persentase Penurunan PMKS terhadap Jumlah Penduduk	%	20	18,50	17,00	15,50	14,00	12,50	10,00	10,00
C	**Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**									
	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.15	3,04	2,93	2,82	2,71	2,61	2,50	2,50
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	NA	92,69	94,01	95,33	96,65	97,98	99,30	99,30
3	Kategori Kabupaten Layak Anak		NA	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
	Pangan									
4	Skor Pola Pangan Harapan	%	84,95	N/A	92,9	93,1	93,4	93,8	94,2	94,2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lingkungan Hidup									
5	Indeks Kualitas Air	Indeks	N/A	50%	53%	56%	59%	62%	65%	65%
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	N/A	N/A	60%	63%	66%	69%	72%	72%
7	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	N/A	56,83%	59%	61%	63%	65%	67%	67%
8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	N/A	115	108	101	94	87	80	80
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
9	Persentase Desa Mandiri	%	NA	NA	5	5	6	6	12	12
	Komunikasi dan Informatika									
10	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E Goverment	%	NA	40	50	60	75	80	85	85
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
11	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	%	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00
12	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	N/A	2,41	2,49	2,60	2,73	2,85	3,11	3,11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanaman Modal									
13	Persentase Peretumbuhan nilai PMA dan PMDN	%	N/A	N/A	8	12	16	20	24	24
	Kepemudaan dan Olahraga									
14	Persentase Peningkatan Peraihan Prestasi Pemuda	%	NA	20	25	30	30	40	60	60
	Perpustakaan									
15	Indeks Minat Baca	Indeks	NA	NA	10%	20%	30%	40%	60%	60%
D	**Fokus Urusan Pilihan**									
	Pariwisata									
1	Persentase Destinasi Wisata Khas lokal	%	NA	70	75	78	80	83	85	85
2	Persentase Jenis Produk kepariwisataan Khas Lokal	%	NA	20	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Kunjungan Wisman dan Wisnus	%	20,11	20	20	25	30	35	40	40
4	Presentase kelembagaan Industri dan SDM Pariwisata	%	NA	10	15	15	20	25	30	30

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	**Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung**									
1	Opini atas audit BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor	C	CC	B	A	A	A	A	A
3	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Skor	NA	85	87	90	95	96	99	99
4	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Rasio	N/A	14,21	11,81	11,86	11,91	11,96	12	12
5	Maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7	Persentase Desa yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang benar dan tepat waktu	%	NA	65	70	80	85	90	90	90

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun kedepan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2017 hingga tahun 2022. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2028 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukanguna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin BaratTahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini;
f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi public tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukanperencanaanpembangunandaerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggungjawab social dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya local dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

9.4. Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat lima tahun kedepan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan satu tahun yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2017 hingga tahun 2022. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun selanjutnya.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan kaidah sebagai berikut:

a. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban menyebar luaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
b. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022;
d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra)

SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini;

f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

g. Bappeda dengan SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakanbahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.